



2022
KABUPATEN PONOROGO



PROFIL GENDER



DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PONOROGO
Jl. Gondosuli No. 35 Ponorogo

PROFIL GENDER



2022

DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PONOROGO
Jl. Gondosuli No. 35 Ponorogo



Di Terbitkan Atas Kerja Sama



PROFIL GENDER

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2022

Diterbitkan atas Kerja Sama:



**Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ponorogo**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo**

Tim Penyusun
Profil Gender Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Pelindung	:	Dr. Hj. Evi Muafiah, M. Ag
Penanggung Jawab	:	Dr. Ahmadi, M. Ag
Koordinator	:	Lia Noviana, M.H.I
Inventaris Data	:	Heru Budi Suseno, M.Pd Anis Afifah, M.Pd Zamzam Muthofa, M.Pd
Analisis Data	:	Fery Diantoro, M.Pd.I Ayunda Riska Puspita, M.A
Pengolah Data	:	Irma Yuliani, M.E Ajeng Wahyuni, M.Pd
Editing	:	Azmi Mustaqim, M.A Ali Murtadlo, M.H
Lay Out dan Finishing	:	Eko Wahyudianto, S.Kom

KATA PENGANTAR

Kami bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya yang tidak terbilang kepada tim kami dalam menjalankan aktivitas akademik dan kemanusiaan yang mulia ini. Disebut "akademik" karena kegiatan ini melibatkan analisa keilmuan dengan perspektif tertentu. Disebut "kemanusiaan" karena, kegiatan ini berfungsi untuk melakukan transformasi kehidupan yang lebih baik dalam relasi kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Dua kerja akademik dan kerja kemanusiaan tersebut adalah implementasi dari fungsi manusia sebagai *khalifatullah* di samping *'abdullah*. Dua fungsi tersebut merupakan semangat yang dicontohkan oleh Sang teladan manusia, utusan Tuhan, Allah SWT, Muhammad SAW. Semoga dengan menjalankan dua aktivitas ini, kita semua mendapatkan Syafaat Beliau di hari pembalasan nanti. *Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad.*

Apa yang ada di hadapan pembaca ini adalah buku Profil Gender Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Buku Profil Gender ini disusun atas keinginan untuk memotret relasi sosial, ekonomi, budaya dan agama di Kabupaten Ponorogo. Potret tersebut diambil dari data-data yang diberikan oleh dinas-dinas atau kantor-kantor terkait dengan tema yang telah ditentukan. Dengan demikian analisa profil gender ini digantungkan kepada data yang tersedia. Berdasar data tersebut, analisa dilakukan. Analisa yang dimaksud adalah analisa dengan perspektif gender. Analisis berperspektif gender akan melihat pertama-tama pada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan, politik, pekerjaan, ekonomi, agama dan lain-lain. Ketimpangan dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh. Jika jumlah mahasiswa di Kabupaten Ponorogo misalnya lebih banyak didominasi oleh laki-laki, ini menunjukkan adanya ketimpangan gender. Hal ini bisa tampak dari jumlah penduduk. Sebagai misal, Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki tetapi kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi justru banyak diisi oleh jenis kelamin laki-laki.

Ketimpangan tersebut, dalam perspektif gender, akan dicari dalam konteks APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat). Akses adalah ketersediaan kesempatan dalam segala hal yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam berbagai kegiatan publik. Apakah kegiatan publik memiliki akses untuk semua orang dan apakah kesempatan terbuka sudah diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Sedangkan kontrol meliputi adanya hak yang sama untuk mengevaluasi, mengontrol dan melakukan kritik atas berbagai kegiatan yang dilakukan. Sementara manfaat ditunjukkan dengan adanya hasil yang bisa diterima secara merata oleh semua pihak. Manfaat juga

membicarakan kegunaan yang bisa dinikmati oleh berbagai unsur termasuk laki-laki dan perempuan.

Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang tidak diterima secara adil oleh laki-laki dan perempuan akan dicari sebab-sebab dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Sebab-sebab tersebut bisa bersifat relasional antara laki-laki dan perempuan. Relasi tersebut bisa berupa relasi agama, budaya, ekonomi dan pendidikan. Relasi agama misalnya menyangkut salah tafsir terhadap teks kitab suci. Argumen-argumen yang "dianggap" berdasar kitab suci maupun sabda Nabi tentang perempuan misalnya, sebenarnya hanyalah tafsir atau interpretasi dari ulama masa lalu. Argumen-argumen tersebut perlu untuk mendapat interpretasi baru sesuai dengan spirit dari ajaran Islam itu sendiri yaitu keadilan, tauhid, musyawarah dan lain-lain. Kesalahan tafsir inilah yang kemudian menghadirkan justifikasi bias gender di masyarakat. Bias gender semakin kuat jika relasi tersebut berhubungan dengan unsur budaya yang mendukungnya. Budaya patriarki misalnya semakin kukuh jika mendapat justifikasi jurisprudensi atau teologis tentang penciptaan manusia serta dalil-dalil hukum agama yang mengitarinya. Budaya Jawa misalnya yang menempatkan perempuan pada adagium *swargo manut, neroka katut* meletakkan perempuan pada kelas dua. Adagium lain seperti perempuan sebagai pemangku 3 M (*macak, manak lan masak*) telah menjadi semacam *symbolic violence* bagi perempuan yang menyerang unsur kognitif mereka. Akibatnya, perempuan berada dalam dua himpitan, yaitu himpitan tafsir agama dan himpitan budaya.

Relasi ekonomi juga penting dibicarakan dalam perspektif gender ini. Ekonomi menjadi salah satu ketidakberdayaan perempuan di hadapan orang lain. Perempuan sering menjadi kelas rendah dalam aktivitas ekonomi dalam kegiatan produksi maupun konsumsi. Dalam kegiatan produksi perempuan biasanya diletakkan sebagai kelas kerja yang kurang bergensi sehingga mendapatkan upah minimum. Relasi keluarga yang melibatkan perempuan juga sering tidak menguntungkan perempuan. Perempuan sering pergi menjadi buruh migran di luar negeri akibat ekonomi keluarga yang tidak memadai. Kesalahan ekonomi keluarga sebenarnya adalah masalah bersama, namun perempuan yang menjadi solusinya. Masalah-masalah lain, termasuk pendidikan juga mengalami hal yang sama. Semangat tidak melanjutkan pendidikan bagi perempuan, terkadang masih menggunakan alasan klasik yaitu "ujung-ujungnya" ibu rumah tangga.

Dalam relasi gender, jenis kelamin perempuan bukanlah objek bahasan. Relasi gender melibatkan dua jenis kelamin sekaligus, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, membicarakan gender selalu melibatkan dua jenis kelamin ini. Relasi yang tidak seimbang adalah problem gender. Terkadang laki-laki bisa mengalami tindakan bias gender dari perempuan. Laki-laki tidak bisa mengambil

kebijakan dalam keluarga karena pihak perempuan yang merencanakan dan menentukan kehidupan keluarga. Relasi laki-laki dan perempuan diungkap karena ada ketidaksadaran di dalam relasi tersebut. Ketidaksadaran ini telah terstrukturisasi dalam nalar sehingga dianggap sebagai suatu ideologi yang telah menjadi dogma dan tidak bisa dipertanyakan. Namun, jika ketidaksadaran tersebut disadari lalu dari masing-masing yang terlibat dalam relasi tersebut menyadari, maka analisis gender tidak bisa dipaksakan. Seorang suami misalnya mengurus rumah tangga dan istrinya berkerja di luar rumah. Seorang istri menyadari bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari tanggungjawab bersama karena menganggap bahwa dirinya yang lebih bisa menghasilkan ekonomi dengan kesadaran yang bukan paksaan, maka tindakan itu bukanlah bias gender.

Profil gender yang ada di hadapan pembaca ini akan melihat melalui kaca mata baca gender di atas dalam berbagai posisi relasi gender. Cakupannya termasuk dalam masalah pendidikan, keluarga, ekonomi, politik, budaya, kesehatan dan lain-lain. Banyak kekurangan di dalam buku ini. Kekurangan tersebut berkisar pada beberapa hal. *Pertama*, masalah data. Data yang ditampilkan berhubungan dengan *stakeholder* lain seperti dinas-dinas atau kantor-kantor yang memiliki kaitan langsung dengan tema yang dibutuhkan. Data terkadang tidak tersedia, atau terkadang pula belum ada data yang terpilah atau bahkan lambatnya data yang kami terima sementara waktu yang disediakan untuk melakukan analisa atau pembuatan profil gender telah berada pada batas akhir. Tanpa data yang memadai, tentu analisa yang kami lakukan kurang sempurna. *Kedua*, kesalahan teknis administrasi tulisan seperti kesalahan ketik, kesalahan huruf, kesalahan ejaan dan lain-lain. Kesalahan seperti ini, walau kecil, tetapi mengganggu dan menunjukkan seberapa tingkat keseriusan dari kegiatan yang kami lakukan. Namun, kami, bukan untuk membela diri, berkali-kali telah kami baca, jika masih ada yang terlewatkan, kesalahan tetap berada di pihak kami. *Ketiga*, ketidaktepatan dalam memberikan analisa. Setiap orang memiliki perspektifnya sendiri dalam melihat sesuatu. Analisa selalu dihubungkan dengan konteks pengarang dan konteks tulisan ini dibuat. Dalam kaitannya dengan konteks pengarang, dalam hal ini penyusun buku profil, tidak bisa dilepaskan dari hasil bacaan, pengalaman dan keterlibatan pembuatnya. Satu masalah bisa saja bernuansa positif bagi satu orang, namun bisa bernuansa negatif bagi orang lain. Sedangkan konteks tulisan dibuat maksudnya adalah bahwa profil gender ini diarahkan untuk perubahan. Oleh karena itu, konteks tulisan adalah konteks di mana ada harapan bahwa relasi gender di Kabupaten Ponorogo lebih baik dari sebelumnya yang dihubungkan dengan konteks penyusunnya.

Buku Profil Gender ini menggunakan pola struktur tulisan sebagai berikut. Pertama, memberi pengantar secara keilmuan terhadap apa yang akan

dianalisa. Hal ini penting agar pembaca tidak “*njujuk*” terhadap apa yang akan ditampilkan. Pengantar berfungsi untuk membuka wawasan pembaca terhadap tema yang dibahas. Kedua, menghadirkan data tentang tema yang dibahas dalam bentuk statistik atau angka-angka di lapangan. Data tersebut, sebagaimana telah dijelaskan, diambil atau diperoleh dari dinas, lembaga, kantor dan lain-lain yang terkait dengan fokus bidang yang menjadi garapannya. Keempat, data yang ditampilkan akan dinarasikan agar memiliki tingkat keterbacaan. Narasi menjadi penting agar pembaca memiliki pengetahuan tentang apa yang dilihat dalam bentuk angka tersebut. Melalui narasi, para pembaca akan terbantu dalam melihat distingsi, ketimpangan, jarak dan perbedaan relasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kelima, menganalisa data yang telah dinarasikan tersebut dalam perspektif relasi gender terutama dalam hal APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat). Untuk memperkuat analisa, profil gender ini juga menggunakan referensi yang dipercaya sebagai penguat terhadap analisis yang dilakukan. Analisa mengenai topik yang dibicarakan berkisar tentang sebab, akibat, langkah-langkah yang ditempuh serta kontribusi solutif apa yang sebaiknya dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut, misalnya dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan termasuk pesantren dan pemerintah.

Profil gender ini berhasil kami buat karena bantuan banyak pihak. Di antaranya adalah Rektor IAN Ponorogo, Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag yang telah memberikan izin dan memotivasi kami dalam melaksanakan kegiatan ini agar bisa membahagiakan orang lain dalam bentuk-bentuk kegiatan yang bermanfaat dan transformasional. Tidak lupa pula, terimakasih kami haturkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kerjasama yang baik ini. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut untuk perubahan sosial yang lebih bagus bagi Kabupaten Ponorogo. Terimakasih juga untuk kepala Dinas, kepala kantor dan lain-lain yang berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam melakukan pembuatan buku profil ini. Terakhir untuk Lembaga Penelitian dan Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo serta teman-teman yang telah terlibat secara aktif dan progressif dalam kegiatan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan lebih bagus dari apa yang dilakukan. Seperti ungkapan di awal, kerja-kerja ini adalah bagian dari implementasi manusia sebagai *'abdullah* dan *khalifatullah*.

Terakhir, semoga buku Profil Gender ini bermanfaat untuk Kabupaten Ponorogo lebih baik. Untuk perbaikan buku profil di masa akan datang, kritik dan saran kami harapkan. Semoga pula perubahan yang lebih baik dalam relasi gender di Kabupaten Ponorogo akan bernilai ibadah buat kami khususnya dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini.

Ponorogo, 18 November 2022

Tim Penyusun

SAMBUTAN BUPATI PONOROGO

Alhamdulillah buku Profil Gender telah terbit. Ini adalah karunia dari Tuhan, Allah SWT, Dzat yang memberi kita kekuatan lahir dan batin kepada kita sebagai makhluk sosial benar-benar dapat kita rasakan. Kita telah diberi kekuatan oleh Allah SWT, untuk menjalankan pesan-pesan kenabian berupa transformasi sosial kehidupan yang lebih baik. Semoga dengan mengikuti jejak teladan Nabi Muhammad kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari di mana jenis kelamin, ras, suku, kulit, bahasa, tempat tinggal dan keturunan tidak lagi diperlukan yaitu hari perhitungan (*yaumul hisab*).

Saya menyambut baik buku Profil Gender ini. Bagi pemerintahan Ponorogo, buku ini mengandung dua sisi, yaitu sisi "belakang" dan sisi "depan". Sisi "belakang" maksudnya bahwa buku ini bisa menjadi alat evaluasi yang baik untuk perbaikan di masa akan datang. Dengan melihat sisi belakang kita akan tahu apa yang terjadi di masa lalu, apa yang salah di tahun sebelumnya, bidang-bidang apa yang belum sempurna di periode sebelumnya serta apa yang telah bagus di masa lalu sehingga patut untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Sisi "belakang" berarti evaluasi, kritik dan semangat untuk memperbaiki. Sedangkan sisi "depan" maksudnya adalah bahwa buku Profil Gender ini memberi arahan untuk merancang, membikin kegiatan, memperbaiki kekurangan, mempersiapkan anggaran dan menjalin relasi tentang kritik yang diberikan oleh sisi "belakang".

Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa) adalah Ponorogo yang tidak bias gender. Semoga buku Profil Gender ini adalah salah satu dari kegiatan yang bisa mewujudkan Ponorogo Hebat tersebut. Harmonis misalnya akan terwujud apabila relasi laki-laki dan perempuan tidak bermasalah, tidak bias, tidak timpang dan tidak pilih kasih. Elok pun demikian. Keindahan dan kebaikan Ponorogo akan dapat dinikmati oleh semua pihak baik laki-laki dan perempuan. Bukankah salah satu indikator bahwa adil gender adalah adanya manfaat yang bisa diterima oleh semua orang. Sedangkan bergas mengindikasikan bahwa setiap persoalan relasional antara laki-laki dan perempuan baik di ranah privat (seperti keluarga), maupun publik (seperti tempat kerja, di organisasi dan lain-lain) cepat mendapatkan penyelesaian dan solusi. Kecepatan memberi solusi diwujudkan pula dengan prinsip amanah yaitu adanya tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah untuk terlibat dalam berbagai masalah di masyarakat. Semua aspek di atas dalam ranah adil gender adalah diawali dari wujud ketakwaan kepada Tuhan sekaligus di arahkan untuk mendekatkan diri kepada Pencipta. Dengan naungan ilahiyah inilah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak hanya bermotif duniawi belaka tetapi juga bersifat *ukhrawi*.

Saya menyambut baik atas hadirnya buku Profil Gender ini. Kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini Dinas Sosial dengan IAIN Ponorogo sangat saya apresiasi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu mendapat masukan dari para ahli dan akademisi di perguruan tinggi. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam, tentu IAIN Ponorogo memiliki nilai strategis untuk bekerja bersama dalam mewujudkan Ponorogo Hebat. Modalitas para dosen dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial sangat membantu dalam hal tersebut.

Terakhir, semoga buku Profil Gender ini bisa dijadikan sebagai pedoman dan semangat perbaikan relasi gender di Kabupaten Ponorogo pada masa-masa mendatang. Salam Hebat!

Ponorogo, 18 November 2022
Bupati Ponorogo,

H. Sugiri Sancoko, S.E. M.M.

SAMBUTAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PONOROGO

Kami patut bersyukur kepada Tuhan, Allah SWT, yang maha *Rahman* dan *Rahim*. Kasih sayangnya Tuhan tidak berdasar jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dikasihi dan disayangi oleh Allah SWT. Tuhan akan melihat kualitas takwa seseorang. Perbedaan jenis kelamin hanyalah model kreasi Tuhan untuk suatu keindahan dan saling membutuhkan dan memerlukan. Pesan Tuhan dalam bentuk pluralitas inilah yang harus kita jaga sebagai bentuk perwujudan syukur tersebut. Shalawat dan salam juga semoga terlimpah kepada Nabi teladan manusia dalam mentransformasikan kehidupan yang lebih bermakna. Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam usaha mengangkat derajat wanita, membela kaum papa dan mengarahkan kaum kaya. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi di saat hari kekayaan, jenis kelami, derajat dan pangkat dunia tidak lagi diperlukan. Amiin.

Hadirnya buku profil gender ini adalah sebagai bagian dari upaya kami bersama agar adanya kehidupan yang lebih baik dalam relasi kehidupan yang adil bagi semua pihak, dalam hal ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai daerah yang didominasi oleh mayoritas Jawa, kadangkala masih ada "sedikit" bias gender. Dikatakan "sedikit" karena pola relasi gender akibat pendidikan yang meningkat sudah mulai bergeser. Asumsi filosofi Jawa bahwa perempuan adalah berperan dalam tiga hal *macak, masak* dan *manak* atau tiga "ur", kasur, sumur dan dapur sudah mulai berubah. Pendidikan telah merubah paradigma masyarakat. Hanya saja, kerja-kerja pendidikan adalah kerja-kerja nalar. Ia membutuhkan waktu yang lama serta memerlukan konsistensi dalam memperjuangkannya.

Apa yang ada di buku Profil Gender ini adalah data terpilah tentang keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam berbagai aktifitas sosial dan kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah keterlibatan masing-masing pihak dalam pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, pengaturan keturunan dan lain-lain. Data terpilah akan dapat memotret partisipasi masing-masing dalam semua *space* yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang tertentu. Data mengindikasikan pula terhadap kemungkinan dari akses, kontrol dan manfaat yang dilakukan. Apakah manfaat suatu kegiatan misalnya, telah dirasakan oleh semua orang, termasuk perempuan apa belum. Apakah pengaturan kelahiran hanya diikuti oleh perempuan, sementara laki-laki belum terlibat? Dan apakah layanan ibu hamil

telah sampai kepada masyarakat paling bawah atau masih sekadar di daerah perkotaan? Dan lain-lain.

Data terpilah yang dihadirkan kemudian akan dianalisa menggunakan perangkat analisa tertentu. Karena kajian ini adalah kajian relasional laki-laki dan perempuan, tentu analisisnya pasti menggunakan perspektif gender. Perspektif gender yang digunakan pun juga berbasis kepada pendekatan kritis. Pendekatan kritis adalah suatu pendekatan yang melihat keterlibatan struktur serta situasi sosial yang melingkupinya. Bagaimana pembelaan pemerintah dan bagaimana struktur yang telah terstrukturisasi berjalan dalam mengatur pola-pola kehidupan sosial masyarakat. Dalam bahasa yang paling mudah, apakah ada ideologi-ideologi kehidupan yang tersembunyi dalam struktur tersebut. Ibarat kemiskinan sebagai misal, analisisnya bukan lagi pada takdir Tuhan yang menjadikan dirinya miskin, atau bukan pula karena seseorang kurang giat bekerja, tetapi kemiskinan disebabkan oleh aturan-aturan sosial yang melanggengkan kemiskinan. Hal ini misalnya seperti tidak adanya regulasi yang mengatur aktifitas orang kaya yang membuat orang miskin bisa menjadi kaya.

Buku Profil Gender ini hadir karena keterlibatan banyak *stakeholder* yang memiliki visi yang sama. Data diberikan oleh dinas atau kantor-kantor terkait. Analisa dilakukan oleh tim dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Ponorogo, semuanya menyumbang terpublikasinya Profil ini. Atas jerih payah ini, semoga dibalas oleh Allah, SWT, Tuhan yang Maha Adil dengan balasan yang setimpal. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung untuk perbaikan kehidupan di Kabupaten Ponorogo di tahun-tahun mendatang.

Profil Gender ini akan bermanfaat untuk berbagai pihak. Data dan analisa dapat digunakan sebagai *pertama*, kritik atas kebijakan dan kegiatan yang pernah dilakukan, terutama yang berkaitan dengan relasi adil gender, *kedua*, sebagai perbaikan di masa depan, *ketiga*, sebagai kaca internal dari setiap kegiatan yang dilakukan. Sebagai kritik, sebagai perspektif masa depan dan sebagai kaca dapat dilakukan dalam siklus PDCA yaitu *plan*, *do*, *check* dan *action*. *Plan* adalah perencanaan, *Do* adalah pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan, *Check* adalah mengevaluasi pelaksanaan yang dilakukan dan *action* adalah melakukan ulang terhadap apa yang telah diperbaiki tersebut. Siklus PDCA tentu akan membuat setiap kegiatan, termasuk dalam upaya-upaya berkeadilan gender dapat sesuai dengan harapan.

Kami mohon maaf apabila dalam kegiatan Profil Gender ini banyak kesalahan. Semoga kesalahan ini dapat kami perbaiki di masa akan datang. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan Profil Gender di tahun 2023 mendatang.

Ponorogo, 18 November 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ponorogo

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized oval shape followed by several vertical and diagonal strokes.

Gulang Winarno, S.H., M.M

NIP. 19730725 199602 1 002

SAMBUTAN REKTOR IAIN PONOROGO

RELASI ADIL GENDER: MENUJU HIDUP BAHAGIA DAN MEMBAHAGIAKAN

Ketika saya diminta untuk memberi pengantar atas buku Profil Gender ini, pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur yang tidak terbilang kepada Tuhan, Pengatur alam, Allah SWT, yang tidak pernah memandang ras, suku, budaya, warna kulit dan bahasa untuk menjadi hamba pilihan-Nya. Bagi-Nya, hamba pilihan adalah mereka yang memiliki kualitas ketakwaan lebih dibanding lainnya. Pesan Tuhan tersebut kemudian disampaikan oleh manusia paling mulia, Muhammad SAW, untuk diwartakan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan mereka hanya melihat hati yang takut kepada-Nya. Kami memohon, agar manusia termulia tersebut dapat akan memberikan *syafa'at*nya kelak di hari pembalasan, suatu hari tidak diperhatikan jenis kelamain dan keturunan.

Saya sangat senang dengan hadirnya buku Profil Gender ini. Hal ini membuktikan bahwa tri dharma perguruan tinggi benar-benar bekerja. Tri dharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian berjalan secara sirkular. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berbasis kepada realitas. Pendidikan diarahkan untuk transformasi kehidupan yang lebih baik. Pendidikan seperti ini akan mungkin terjadi, jika didasari oleh penelitian yang akurat tentang realitas yang terjadi. Namun, pendidikan dan penelitian tersebut hanya akan menjadi macan kertas, andaikan aktivitas empiris tidak dilakukan. Aktivitas tersebut adalah kerja-kerja lapangan yang dilakukan berdasar kepada teori-teori perubahan sosial yang mapan. Kerja nyata inilah yang kemudian disebut dengan pengabdian masyarakat. Dengan tri dharma ini, lengkaplah kerja-kerja manusia sebagai *khalifatullah*, yaitu kerja-kerja yang menurut M.Iqbal, intelektual Muslim dari Pakistan, "kawan Tuhan dalam mencipta".

Kehadiran buku Profil Gender ini sangat penting untuk dibaca dan ditindaklanjuti. Dibaca agar setiap orang memahami realitas yang sesungguhnya. Seringkali seseorang apatis atau tidak mau bertindak, karena tidak memahami masalah seperti apa adanya. Dengan membaca, diharapkan akan ada perubahan paradigmatis seseorang untuk kemudian memiliki intensi untuk bergerak sebagai tindak lanjut kesadaran tersebut. Sangat benar apa yang dikatakan oleh para filsuf, untuk mengubah suatu masyarakat, maka ubahlah pola pikirnya terlebih dahulu. Tindak lanjut dari buku ini tidak harus digantungkan kepada dosen atau pemerintah saja, tetapi oleh semua pihak yang memiliki jalinan relasional terhadap masalah gender, seperti keluarga, organisasi sosial-keagamaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,

individu-individu dan lain-lain. Mereka harus bekerja sama dan saling membutuhkan. Untuk kerja-kerja ini, perguruan tinggi bisa menjadi pioner. Alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, perguruan tinggi, terutama dosen, telah memiliki kemandirian ekonomi. Kerja-kerja sosial sudah tidak lagi disibukkan dengan pencarian sumber kehidupan. Kerja-kerja sosial untuk adil gender, oleh karena itu, lebih bisa fokus dan terarah. *Kedua*, para dosen memiliki modalitas kultural yang baik di masyarakat. Profesi dosen masih dianggap sebagai profesi yang "prestisius". Posisi demikian menjadikan masyarakat memiliki semangat dan daya ikut yang lebih di banding profesi lainnya. Ini artinya kerja-kerja kultural akan lebih memiliki probabilitas untuk diterima masyarakat. *Ketiga*, perguruan tinggi memiliki tingkat konstruksi teoritis yang lebih baik. Para dosen selalu berdampingan dengan teori perubahan sosial, langkah-langkah *participatory action reseach* (PAR) dan lain-lain. Teori-teori ini akan menjadi kaca mata baca yang baik bagi suksesnya transformasi sosial di masyarakat.

Harus kita pahami bahwa problem bias gender masih hidup di masyarakat. Kejadian-kejadian yang melibatkan ketertindasan jenis kelamin tertentu masih kita saksikan dan kita dengar. Budaya patriarkhi juga masih tampak. Tradisi yang berkembang dalam suatu acara misalnya, "laki-laki memakai jas, perempuan menyesuaikan" adalah bagian dari budaya patriarkhi ini. Kalimat ini dianggap biasa karena kesadaran kita telah terkena *symbolic violence* yaitu kekerasan simbolik yang karena terus menerus diucapkan oleh banyak orang dianggap sebagai suatu kebenaran. Kalimat "perempuan menyesuaikan" maksudnya adalah bahwa perempuan mengikuti dan memantaskan diri dengan pakaian yang dipakai oleh suaminya, oleh pihak laki-laki atau tamu laki-laki. Kebiasaan ini, tidak disadari ditransmisikan dari satu manusia ke manusia lainnya. Pembongkaran atas ketidaksadaran ini dapat dilakukan pertama-tama oleh orang yang berpikir kritis. Walau tidak menyebut yang "paling" kritis, posisi lembaga perguruan tinggi dapat disebut sebagai lembaga kritisisme ditumbuhkan dan dikembangkan. Dengan kajian kritis, kekerasan simbolik, akan diketahui asal-usulnya.

Melawan bias gender adalah perintah agama. Teks-teks agama, baik al-Qur'an dan al-Hadis telah menunjukkan perlawanan tersebut. Tradisi Nabi dan juga para sahabat juga semakin memperkuat perlawanan ini. Relasi yang tidak bias gender perlu diperjuangkan karena pesan agama mengarahkan agar tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Tuhan mengarahkan agar manusia memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah inti dasar tujuan hidup manusia. Relasi yang tidak bias gender dalam keluarga misalnya adalah membentuk keluarga bahagia. Demikian pula tujuan bersosial, bernegara dan berbangsa yaitu adanya kebahagiaan masyarakat dan

warga. Merekayasa sosial untuk kebahagiaan berarti pula merekayasa relasi yang adil gender.

Bahagia dan membahagiakan adalah dua istilah yang diarahkan untuk diri sendiri dan orang lain. Bahagia karena telah bekerja untuk kemanusiaan (menjalankan pesan-pesan Tuhan) dan membahagiakan karena telah menjadikan orang lain benar-benar sebagai manusia yang dihargai hak-hak individu dan sosialnya (*kulliyat al-khamsi*). Relasi adil gender adalah bagian dari upaya bahagia dan membahagian tersebut. Lebih penting dari itu, bahagia dan membahagiakan adalah implementasi dari fungsi manusia yaitu *'abdullah* dan *khalifatullah*.

Terakhir, terimakasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam kerja-kerja membahagiakan ini. Pantas untuk saya sebut, Dinas Sosial, semoga kerjasama dan kebersamaan ini terus berlanjut dan semoga selalu bisa saling sinergi. Karena sinergitas inilah, Profil Gender bisa ada di hadapan pembaca. Selanjutnya tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo di bawah komando Dr. Ahmadi, M.Pd serta pusat Studi Gender dan Anak. Mereka semua telah mengeluarkan segala energi dan pikiran untuk selesainya kerja mulia ini. Semoga amal jariyah mereka semua di balas oleh Allah SWT sesuai dengan hasil transformasi yang dilakukan. Semoga.

Ponorogo, 18 November 2022
Rektor IAIN PONOROGO



Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag
NIP. 19740909 200112 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN BUPATI PONOROGO	viii
SAMBUTAN KEPALA KANTOR DINAS SOSIAL P3A KAB. PONOROGO	x
SAMBUTAN REKTOR IAIN PONOROGO.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GRAFIK	xxi

BAB I KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk Akhir tahun Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan.....	1
B. Jumlah Penduduk Menurut Akhir Tahun menurut Kelompok Umur 5 Tahun dan Jenis Kelamin.....	5
C. Jumlah Kelahiran dan kematian Penduduk(LMDP)	9
D. Jumlah Migrasi Datang dan Pergi serta kepadatan Penduduk secara Terpilah	14
E. Jumlah Anak yang Berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir menurut Jenis Kelamin.....	18

BAB II PENDIDIKAN

A. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	23
B. Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	25
C. Angka Partisipasi Murni (APM)	27
D. Angka Anak Putus Sekolah	29
E. Sarana Pendidikan Non Formal	31
F. Sarana PAUD dan Anak yang Memperoleh PAUD di Daerah Terpencil	33
G. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta di Kabupaten ponorogo Tahun 2021	35
H. Guru Negeri yang Memperoleh Sertifikasi	37
I. Sekolah Inklusi.....	39
J. Jumlah Madrasah Diniyah.....	41
K. Jumlah Madrasah Lain (RA BA TA).....	43
L. Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	45

BAB III KESEHATAN

A. Jumlah Kematian Ibu.....	52
B. Penyebab kematian Ibu karena Hamil, Melabiri Nifas.....	55

C. Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas	57
D. Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) Ke Sarana Kesehatan.....	60
E. Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil	63
F. Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi	65
G. Perempuan Pernah Kawin Yang berumur 15-49 tahun Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH).....	68
H. Jumlah Bayi Lahir, BBLR dan Gizi Buruk.....	71
I. Jumlah Kematian Bayi dan Balita	75
J. Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Umur	78
K. Tempat Pelayanan Kesehatan Masyarakat	82
L. Strata Posyandu Masing-masing Kecamatan	85
M. Jumlah Penderita Anemia.....	88
N. Jumlah Penyakit Kronis	90

BAB IV KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN REMAJA

A. Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	94
B. Peserta Akseptor KB di Masing-Masing Kecamatan	97
C. Data Tribina (BKB, BKR, BKL)	101
D. Data PIK-R di Kabupaten Ponorogo.....	105
E. Data Genre di Kabupaten Ponorogo	109

BAB V KETENAGAKERJAAN

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi.....	111
B. Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	115
C. Pekerja Tidak Dibayar	118
D. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan	121
E. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK).....	124
F. Jumlah Penyedia jasa Tenaga Kerja Indonesia	126
G. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Berangkat ke Luar Negeri	130
H. Jumlah TKI ke Negara Tujuan TKI	132

BAB VI KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo	136
B. Home Industry Yang di Kelola Perempuan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan.....	137
C. Data Koperasi dan Anggota di Kabupaten Ponorogo	143
D. Jumlah Penduduk Feminisme Kemiskinan Yang Menerima bantuan Keuangan Desa	145

BAB VII POLITIK DAN PEMERINTAHAN

A. Jumlah Anggota DPR menurut Partai/Golongan dan Jenis Kelamin	154
B. Jumlah Anggota DPR menurut Pendidikan	158
C. Jumlah Anggota DPR menurut Daerah Pemilihan dan partai.....	161
D. Jumlah Anggota BPD	163
E. Jumlah Pejabat Menurut Eselon	167
F. Jumlah PNS Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	169
G. Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	170
H. Jumlah Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	173
I. Jumlah Camat dan Kades/ Kakel	174
J. Jumlah Pengawai KPU Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	176

BAB VIII SOSIAL

A. Jumlah Data Exs Pekerja Seks Komersial Kabupaten Ponorogo...	183
B. Jumlah Anak Jalanan/ Terlantar dilihat dari tingkat umur, pendidikan, asal/ tempat tinggal.....	186
C. Jumlah Pengguna TIK/ Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis TIK dan Kelompok Umur.....	191

BAB IX HUKUM DAN HAM

A. Jumlah Aparat Penegak Hukum	195
1. Jumlah Pegawai Pengadilan menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin.....	195
2. Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	197
3. Jumlah Pegawai Kepolisian menurut Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	199
4. Jumlah Pegawai Kejaksaan menurut Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	201
5. Jumlah Pegawai Lapas menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin.....	202
B. Klasifikasi Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Tindal Kekerasan dan Jumlah Kasus yang Diadvokasi.....	204
1. Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Berdasar Tingkat Perkawinan Serta Jumlah Kasus Yang di Advokasi.....	204
2. Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Berdasar Tingkat Pekerjaan Serta Jumlah Kasus Yang di Advokasi.	205
3. Jumlah Kasus berdasarkan Tingkat Kekerasan, Tingkat kejadian dan Tingkat Pelayanan Kabupaten Ponorogo	207

BAB X PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

- A. Kecamatan Sayang Ibu, Rumah Sakit Sayang Ibu, Satgas GSI Kecamatan, Satgas GSI Desa/ Kelurahan dan Suami Siaga 216
- B. Pokja PUG, Forum peningkatan kualitas Hidup Perempuan, Forum Perlindungan Perempuan dan Fokal Point Gender 217
- C. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 220
- D. Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait Pemberantasan Perdagangan Orang 222
- E. Lembaga Pusat Studi Wanita / Gender 224
- F. Lembaga / Organisasi Masyarakat/ LBH yang Peduli Terhadap Perempuan dan Anak 225
- G. Pemerintah dan Sekolah Layak Anak 226
- H. Forum Anak 231
- I. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Ponorogo 232

BAB XI EKONOMI

- A. Rekapitulasi Laporan Data Base Koperasi melalui sistem Informasi Koperasi 235
- B. Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin 238
- C. Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo 240

BAB XII BUDAYA

- A. Kearifan Lokal di Kabupaten Ponorogo 247
- B. Cerita Rakyat Ponorogo 253
 - 1. Joyonegoro 255
 - 2. Kerajaan Ngerum di Pulung 256
 - 3. Babad Jeruksing 257
 - 4. Ki Demang Kutu 257
 - 5. Keraton Bantarangin 258
 - 6. Sejarah Batu Tulis 259
 - 7. Legenda Golan Mirah 270
 - 8. Babad Ponorogo 271
 - 9. Cerita Baro klinting 276
 - 10. Cerita Sendang Bulus 276
 - 11. Cerita Beji sirah Keteng 277
 - 12. Petilasan sunan Kumbul 278
 - 13. Goa Maria 278
 - 14. Tanah Goyang 280
 - 15. Situs Makam Tumenggung Jayengrono 280
 - 16. Goa Kusumo 280

17. Makam Kyai Ageng Besari dan Masjid Tegalsari	281
18. Petilasan Mbok Rondo Dadapan	281
19. Makam Astana Srandil	282
20. Goa Lowo dan Watu Dukun	282
21. Sukosewu dan Klampis Ireng	282
C. Lagu Daerah dan Musik Ponorogo.....	282

**BAB XIII INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS
PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)**

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	293
B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	297

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Daftar Tabel

Kependudukan	Hal
1.1 Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	3
1.2 Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur 5 Tahun dan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	7
1.3 Jumlah Kelahiran dan Kematian (LMDP) Tahun 2021	11
1.4 Jumlah Migrasi, datang dan Pergi serta Kepadatan Penduduk Secara Terpilah (NTPCR) Tahun 2021	15
1.5 Jumlah Anak yang Berumur dibawah 18 tahun dengan kepemilikan Akta Lahir menurut Jenis Kelamin Tahun 2021.....	20
Pendidikan	
2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	24
2.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok umur (7-12, 13-15 tahun) dan Jenis Kelamin Tahun 2021	26
2.3 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Jenjang Pendidikan SD, SLTP Tahun 2021	28
2.4 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ponorogo Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	30
2.5 Sarana Pendidikan Non Formal di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	32
2.6 Sarana PAUD dan Jumlah Anak yang Memperoleh PAUD di Daerah Terpencil/Perbatasan/Tertinggal Tahun 2021	34
2.7 Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	36
2.8 Jumlah Guru Negeri Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	38
2.9 Jumlah Sekolah Inklusi (ABK, Anak Cerdas dan Berkat) dan Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	40
2.10 Jumlah Madrasah Diniyah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	42
2.11 Jumlah Madrasah Lain (RA, BA, TA) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	44
2.12 Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	46

2.13	Jumlah Pimpinan Perguruan Tinggi di Ponorogo Tahun 2021.....	48
2.14	Jumlah Penerima Beasiswa Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	50

Kesehatan

3.1	Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	54
3.2	Penyebab Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan, dan Nifas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	56
3.3	Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	58
3.4	Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) Ke Sarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	61
3.5	Imunisasi Td2+ pada Ibu Hamil di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	64
3.6	Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	67
3.7	Jumlah Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Kecamatan dan Penolong Proses Kelahiran di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	70
3.8	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	73
3.9	Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	77
3.10	Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Umur di Masing-Masing Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	79
3.11	Tempat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	83
3.12	Strata Posyandu Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	86
3.13	Jumlah Penderita Anemia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	89
3.14	Jumlah Penderita Penyakit Kronis di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	92

Keluarga dan Pemberdayaan Remaja

4.1	Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan (Status Kepegawaian/Pekerjaan Isteri) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021....	95
4.2	Peserta Akseptor KB di Masing-Masing Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	99
4.3	Data Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021..	103
4.4	Data PIK-R di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	107

4.5	Data GenRe di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.....	110
-----	---	-----

Ketenagakerjaan

5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	113
5.2	Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	117
5.3	Pekerja Tidak di Bayar di Kabupaten Ponorogo tahun 2021	120
5.4	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	123
5.5	Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 s.d 2021	126
5.6	Jumlah Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	128
5.7	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Berangkat ke Luar Negeri Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 – 2021.....	130
5.8	Jumlah TKI ke Negara Tujuan TKI dari Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dan 2021.....	134

Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan

6.1	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.....	137
6.2	Home Industry yang Dikelola Perempuan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pada SKPD, ORMAS, LSM dan PT Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	139
6.3	Data Koperasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	143
6.4	Keanggotaan Koperasi di Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	144
6.5	Jumlah Penduduk Feminisme Kemiskinan Yang Menerima Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	145

Politik dan Pemerintahan

7.1	Jumlah Anggota DPR Menurut Partai/Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Periode 2019-2024	156
7.2	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai/Golongan dan Menurut Pendidikan Kabupaten Ponorogo Periode 2019-2024	159
7.3	Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Partai di Kabupaten Ponorogo Periode 2019-2024.....	162
7.4	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	165
7.5	Jumlah Pejabat Struktural Menurut Eselon Kabupaten Ponorogo	

	Tahun 2021	169
7.6	Jumlah PNS Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	170
7.7	Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	171
7.8	Jumlah Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	173
7.9	Jumlah Camat dan Kades/Kakel di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	175
7.10	Jumlah Kades/Kakel di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	
7.11	Jumlah Pegawai KPU Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	176

Sosial

8.1	Jumlah Data Exs Pekerja Seks Komersial Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	185
8.2	Jumlah Anak Jalanan/Terlantar dilihat dari Tingkat Umur, Pendidikan, dan Asal/Tempat Tahun 2021	188

Hukum dan Hak Asasi Manusia

9.1	Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	196
9.2	Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	198
9.3	Jumlah Pegawai Kepolisian Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	200
9.4	Jumlah Pegawai Kejaksaan Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	201
9.5	Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	203
9.6	Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Perkawinan serta Jumlah Kasus yang diadvokasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	204
9.7	Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Pekerjaan dan Jumlah Kasus yang diadvokasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	206
9.8	Jumlah Kasus Berdasarkan Tingkat Kekerasan, Tingkat Kejadian dan Tingkat Pelayanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	208

Pengarusutamaan Gender (PUG)

10.1	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	211
10.2	Home Industri Yang Dikelola Perempuan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	212
10.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	214
10.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	215
10.5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2021	215
10.6	Jumlah Kecamatan Sayang Ibu, Rumah Sakit Sayang Ibu, Satgas GSI Kecamatan, Satgas GSI Desa/Kelurahan, dan Kelompok Suami Siaga Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	217
10.7	Jumlah Pokja PUG dan Fokal Point Gender Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021	219
10.8	Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021	220
10.9	Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait Pemberantasan Perdagangan Orang Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	223
10.10	Daftar Kelembagaan Pusat Studi Gender dan Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	224
10.11	Daftar Lembaga Masyarakat/ Organisasi Masyarakat/ LBH yang Peduli terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	225
10.12	Data Kecamatan layak Anak (KELANA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	227
10.13	Data Desa layak Anak (DELANA) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	227
10.14	Data Sekolah Ramah Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	228
10.15	Jumlah Forum Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2021	231

Ekonomi

11.1	Rekapitulasi Laporan Data Base Koperasi Melalui Sistem Informasi Koperasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	237
11.2	Keanggotaan Koperasi di Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	240
11.3	Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	242
11.4	Home Industry Yang Dikelola Perempuan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pada SKPD, Ormas, LSM, dan PT Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	243

Budaya

- 12.1 Daftar Kearifan Lokal Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021..... 249
- 12.2 Daftar Cerita Rakyat Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021..... 254

IPG dan IDG

- 13.1 Nilai Pembangun IPG Kabupaten Ponorogo 2021..... 295
- 13.2 Nilai Pembangun IDG Kabupaten Ponorogo 2021 298

Daftar Grafik

Pendidikan		Hal
2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP, SLTA berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	25
2.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok umur (7-12, 13-15 tahun) dan Jenis Kelamin Tahun 2021	26
2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Jenjang Pendidikan SD, SLTP Tahun 2021	29
2.4	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ponorogo Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA Kabupaten Ponorogo Tahun 2020.....	31
2.5	Sarana Pendidikan Non Formal di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	33
2.6	Sarana PAUD dan Jumlah Anak yang Memperoleh PAUD di Daerah Terpencil/Perbatasan/Tertinggal Tahun 2021	35
2.7	Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	37
2.8	Jumlah Guru Negeri Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	39
2.9	Jumlah Sekolah Inklusi (ABK, Anak Cerdas dan Berkat) dan Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	41
2.10	Jumlah Madrasah Diniyah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	43
2.11	Jumlah Madrasah Lain (RA, BA, TA) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	45
2.12	Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	47
2.13	Jumlah Pimpinan Perguruan Tinggi di Ponorogo Tahun 2021.....	49
2.14	Jumlah Penerima Beasiswa Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	51
Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga		
4.1	Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan (Status Kepegawaian/Pekerjaan Isteri) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021....	97
4.2	Peserta Akseptor KB di Masing-Masing Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	101
4.3	Data Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 ..	105
4.4	Data PIK-R di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	108

Ketenagakerjaan

5.1	Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	118
5.2	Pekerja Tidak di Bayar di Kabupaten Ponorogo tahun 2021	121

Hukum dan Hak Asasi Manusia

9.1	Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.....	197
9.2	Rasio Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	199
9.3	Jumlah Pegawai Kepolisian Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	200
9.4	Jumlah Pegawai Kejaksaan Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	202
9.5	Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	203
9.6	Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Perkawinan serta Jumlah Kasus yang diadvokasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	205
9.7	Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Pekerjaan dan Jumlah Kasus yang diadvokasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	207
9.8	Jumlah Kasus Berdasarkan Tingkat Kekerasan, Tingkat Kejadian dan Tingkat Pelayanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	209

BAB I

KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin, *Sex Ratio* dan Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Negara terbentuk jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat konstitutif dan syarat deklaratif. Syarat konstitutif terdiri dari tiga hal yaitu wilayah, penduduk dan pemerintah, sementara syarat deklaratif adalah pengakuan negara lain atas kedaulatan dari suatu negara. Penduduk menjadi bagian dari syarat konstitutif, bahwa penduduk adalah orang-orang yang tinggal dalam satu negara dan telah diakui sebagai warga negara. Bukti pengakuan penduduk sebagai warga negara adalah melalui suatu tanda kewarganegaraan yang disebut dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah bukti paling otentik dari suatu kewarganegaraan seseorang. KTP memiliki fungsi sangat banyak. Di antaranya adalah identifikasi ekonomi dan sosial politik. Identifikasi ekonomi misalnya adalah menyangkut kepentingan status ekonomi seseorang dalam masyarakat. Seseorang dengan status ekonomi kurang mampu, akan mendapatkan perlakuan maksimal dari negara dalam hal pemberdayaan atau lainnya. Jika demikian, membicarakan penduduk sangatlah penting karena berhubungan dengan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial warga negara yang menjadi tanggung jawab bersama, terutama menjadi tanggung jawab penyelenggara negara yang disebut pemerintah, suatu penyelenggara negara yang dipilih secara periodik oleh mereka sendiri setiap lima (5) tahun sekali.

Untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah selalu memantau pertambahan jumlah penduduk setiap tahun. Pemantauan ini diperlukan untuk beberapa hal. *Pertama*, pertambahan penduduk berkait erat dengan jaminan pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal. Pertambahan penduduk berimplikasi kepada dana yang dipersiapkan untuk kebutuhan pendidikan, fasilitas, tenaga pengajar dan lain-lain. Semua penduduk dipastikan memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Tidak boleh ada penduduk putus sekolah karena kekurangan biaya pendidikan. Demikian pula, tidak boleh ada tenaga pendidik yang tidak mengajar secara maksimal karena kekurangan insentif profesionalitas pengajaran. Hal lain, tidak boleh terjadi ada penduduk yang belajar di tempat yang tidak layak, di atas atap yang bocor, di samping dinding yang berlumut dan lain sebagainya. Pertambahan penduduk berhubungan dengan program dan kebijakan pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun yang lainnya. Di bidang pekerjaan pun demikian. Lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah sangat terbatas, dibutuhkan usaha-usaha kreatif masyarakat agar dapat bekerja secara mandiri serta mampu

menampung tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar tentu menjadi kerja berat pemerintah dalam mengelola regulasi tentang kesejahteraan ini.

Kedua, penambahan penduduk, secara internal keluarga, juga bagian dari upaya keluarga untuk menciptakan keluarga bahagia yang salah satu indikatornya adalah kesejahteraan dari sisi ekonomi. Tidak saja, ajaran agama mengajarkan untuk meninggalkan keturunan yang kuat (ekonomi, pendidikan dan sosial politik), tetapi juga dorongan psikologis setiap manusia kepada anak keturunannya. Dorongan psikologis ini maksudnya adalah dorongan yang terbawa sejak lahir untuk mensejahterakan anak keturunannya. Dua dorongan ini adalah dorongan yang memungkinkan setiap orang untuk mulai mengatur jumlah keturunannya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dalam diskursus ini memiliki kepentingan yang sama. Inilah di antara alasan kenapa jumlah penduduk diidentifikasi dan dianalisa. Data dan analisa ini sangat penting karena akan menjadi alat ukur keberhasilan pemerintah dalam pengaturan penduduk suatu daerah serta sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan pada tahun atau tahap berikutnya. Lebih dari itu, sebagai bahan dan pedoman masyarakat dalam mengelola kehidupan dan mengatur keluarganya dalam penciptaan keluarga idaman dan keluarga bahagia. Dalam sistem otonomisasi daerah, kerja-kerja pemerintah daerah menentukan terhadap kesejahteraan warganya. Dapat dimengerti kenapa ada suatu daerah dengan pendapatan daerah sangat tinggi dan ada pula daerah dengan pendapatan kecil atau rendah. Pendapatan yang tinggi suatu daerah akan berimplikasi kepada banyak hal, jumlah putus sekolah kecil, kualitas pendidikan terjamin, tersedianya lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat tinggi, kesejahteraan masyarakat meningkat, kepemilikan produksi naik dan lain-lain.

Sekarang kita akan melihat berapa jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun terakhir yang dimulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan jumlah dalam rentang lima tahun tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan
Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan (Districts)	Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah	Sex Rasio (<i>Sex Ratio</i>)
1	2	3	4	5
1. NGRAYUN	31.376	30.408	61.784	103,18
2. SLAHUNG	27.314	27.471	54.785	99,43
3. BUNGKAL	19.137	19.768	38.905	96,81
4. SAMBIT	20.321	20.584	40.905	98,72
5. SAWOO	31.333	31.351	62.684	99,94
6. SOOKO	12.210	12.422	24.632	98,29
7. PUDAK	4.725	4.719	9.444	100,13
8. PULUNG	26.471	26.826	53.297	98,68
9. MLARAK	17.791	17.926	35.717	99,25
10. SIMAN	23.638	23.682	47.320	99,81
11. JETIS	15.867	15.922	31.789	99,65
12. BALONG	23.804	24.371	48.175	97,67
13. KAUMAN	23.566	23.774	47.340	99,13
14. JAMBON	23.880	23.649	47.529	100,98
15. BADEGAN	17.087	17.100	34.187	99,92
16. SAMPUNG	20.241	20.582	40.823	98,34
17. SUKOREJO	29.208	29.531	58.739	98,91
18. PONOROGO	38.355	38.863	77.218	98,69
19. BABADAN	35.225	35.393	70.618	99,53
20. JENANGAN	30.721	31.025	61.746	99,02
21. NGEBEL	10.904	10.915	21.819	99,90
Jumlah/Total 2021	483.174	486.282	969.456	99,36
Jumlah/Total 2020	474.257	475.061	949.318	99,83
Jumlah/Total 2019	435.618	435.752	871.370	99,81
Jumlah/Total 2018	435.169	435.536	870.705	99,92
Jumlah/Total 2017	434.793	435.101	869.894	99,93

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo,
diolah*

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami pertambahan. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 969.456 yang mana di tahun 2020 berjumlah 949.318, ada kenaikan sebanyak 20.138. Selisih antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di tahun 2021 sebesar 3.108, lebih besar dari tahun 2020 yang hanya 804. Adapun Sex ratio pada tahun 2021 adalah 99.36. Sex ratio atau rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Kecenderungan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun termasuk dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan berbagai hipotesa seperti semakin kecilnya angka kematian di Kabupaten Ponorogo atau semakin besarnya angka kelahiran dan atau juga semakin mengurangnya angka kematian bayi di Kabupaten Ponorogo. Di samping itu, pertambahan penduduk juga berhubungan dengan banyak hal. Di antaranya adalah penduduk yang datang atau bermigrasi tidak seimbang dengan penduduk yang pindah dari suatu daerah menuju daerah lain. Dapat disimpulkan bahwa pertambahan penduduk bisa disebabkan oleh hal-hal positif atau hal-hal negatif. Hal positif misalnya angka kematian di suatu daerah semakin menurun. Ini artinya bahwa daya tahan atau imunitas masyarakat semakin baik. Kesehatan masyarakat terjaga. Adanya kontrol dan tempat-tempat kesehatan yang terjangkau. Masyarakat semakin sadar akan budaya sehat. Kematian masyarakat mau tidak mau harus dihubungkan dengan kesehatan dan ruang-ruang konsultatif kesehatan di masyarakat. Semakin sejahtera suatu negara atau suatu daerah semakin berkurang angka kematian. Ini adalah logika rasional yang tidak terbantahkan. Hal positif lainnya adalah adanya penurunan angka kematian bayi. Kenapa bayi? Bayi adalah makhluk sempurna ciptaan Tuhan yang baru hadir di alam dunia dengan daya imunitas yang rentan bagi penyakit. Bayi membutuhkan penjagaan ekstra dari orang tua agar terhindar dari berbagai penyakit. Pemerintah melalui Posyandu patut mendapatkan apresiasi dalam hal ini. Semua bayi diharapkan dapat terkontrol perkembangan dan pertumbuhannya. Kader-kader balita dimaksimalkan hingga tingkat RT. Ibu hamil dan ibu menyusui pun demikian. Kontrol vitamin dan konsultasi kesehatan agar sehat dalam melahirkan menjadi hal penting.

Pertambahan penduduk dalam arti negatif terjadi misalnya karena adanya kesalahpahaman masyarakat tentang adagium Jawa misalnya "Banyak anak banyak rizki". Adagium ini tepat untuk situasi yang berbeda dengan sekarang. Adagium ini relevan untuk orang masa lalu di saat lahan pertanian masih banyak serta tantangan kehidupan global tidak besar. Di saat skill dan keahlian diberbagai bidang diperlukan, adagium itu sudah tidak berlaku lagi.

Adagium tersebut juga berlaku untuk kondisi masyarakat yang tidak mengetahui cara pengaturan kehamilan secara ilmiah.

Pertambahan penduduk adalah pekerjaan rumah setiap orang. Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah mengenai implikasi-implikasi yang ditimbulkan, seperti lahan pekarangan untuk tempat tinggal, lahan pekerjaan, penyakit-penyakit sosial masyarakat dan lain-lain. Tabel-tabel berikutnya akan memperjelas pertambahan penduduk di Kabupaten Ponorogo dari sisi umur dan lainnya. Dengan melihat pemilahan ini, akan tampak hipotesa-hipotesa yang timbulkan.

B. Jumlah penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur 5 Tahun dan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Tabel berikut akan menunjukkan usia penduduk Kabupaten Ponorogo. Data terpilah ini akan memperlihatkan usia berapa penduduk paling terbanyak dan dari jenis kelamin apa usia tersebut. Data ini akhirnya juga akan memperlihatkan usia-usia potensial dan usia-usia produktif untuk setiap jenis kelamin. Jika diuraikan pemilahan penduduk dari kelompok umur akan bermanfaat dalam berbagai hal. Pertama, pemilahan kelompok umur akan memberi arahan kepada *stakeholder* dalam menentukan prioritas kebijakan dalam bidang tertentu. Kedua, pemilihan kelompok umur menunjukkan kelompok umur tertentu yang rentan terhadap resiko-resiko penyakit tertentu. Ketiga, pemilahan penduduk kelompok umur bermanfaat untuk melihat potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh pelaku usaha atau target-target produksi bagi produsen-produsen tertentu. Keempat, pemilahan kelompok umur dalam payung jenis kelamin berguna bagi pegiat gender untuk menganalisa keterlibatan gender dalam berbagai hal kehidupan sosial politik, ekonomi dan budaya. Relasi gender akan dilihat pada wilayah empat hal yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Pada wilayah akses, apakah segala akses di masyarakat telah tepat sasaran untuk semua jenis kelamin. Apakah perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dan apakah perempuan memiliki saluran-saluran informasi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Akses memiliki makna yang beragama. Akses bisa bermakna saluran-saluran informasi yang tersedia untuk perempuan, juga bermakna adanya fasilitas-fasilitas yang memungkinkan perempuan dapat mengembangkan kemampuan dan skill untuk peningkatan dan perbaikan hidup mereka. Sedangkan partisipasi dalam studi gender dimaksudkan sebagai adanya keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang publik. Perempuan tidak lagi diposisikan dalam semangat 3 M, *macak, masak, manak* (berdandan, memasak dan melahirkan) atau 3 R, *kasur, sumur, dapur*. Relasi gender dalam melihat partisipasi perempuan, tidak dimaksudkan sebagaimana teori pembangunan, suatu teori yang melihat perempuan harus terlibat seimbang dan sama dengan

perempuan. Teori pembangunan melihat pembelaan perempuan adalah dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan namun tidak melihat karakteristik dan sifat atau watak perempuan yang berbeda dalam banyak hal dengan laki-laki. Akibatnya, daya saing dan kompetisi yang lemah dari perempuan meletakkan perempuan hanya sebagai pelengkap atau "budak" dari pembangunan. Niatnya, ingin mengangkat derajat perempuan justru merendahkan perempuan dalam jurang penindasan "kapitalisme" pembangunan. Partisipasi perempuan harus dilihatnya dalam kerangka teori "kritis" yaitu teori yang melihat perempuan dalam paradigma komunikasi. Partisipasi perempuan harus didialogkan sesuai dengan kemampuan dan skill mereka. Relasi gender pun harus dilihat dalam prespektif kecurigaan adanya selaput ideologis dibaliknya. Partisipasi perempuan oleh karena itu, harus tetap menjadi kontrol berbagai pihak agar tidak terjebak pada dominasi ideologi tertentu. Hal ini wajar karena perempuan seringkali tunduk pada ideologi kapitalisme yang pintar dalam bermetamorfosa dalam ragam kepentingan.

Sementara itu dalam wilayah kontrol, perempuan memiliki hak untuk ikut terlibat dalam kontrol-kontrol sosial. Koheren dengan gagasan partisipasi perempuan, kontrol perempuan atas perempuan sendiri (keterlibatan mereka, relasi kerja mereka, ketertindasan mereka dan lain-lain) maupun kontrol atas kerja-kerja laki-laki yang berkaitan atau yang memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung dengan perempuan. Kontrol juga bisa dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan atau laki-laki kepada laki-laki sendiri. Relasi gender menempatkan pola relasi seimbang. Tidak boleh atas nama gender, perempuan justru mendominasi laki-laki. Yang menjadi kesepahaman bersama adalah adanya pola relasi kontrol yang saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Terakhir, relasi tidak bias gender ditandai dengan adanya manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan, hasil pembangunan, hasil produksi, pendidikan, pemerataan ekonomi, dan lain-lain berguna dan bermanfaat bagi semua jenis kelamin, tidak ada yang diunggulkan. Keduanya boleh berbeda sesuai dengan peran dan potensi masing-masing, namun keduanya tidak boleh dibedakan. Relasi gender mengenal "perbedaan" tetapi tidak mengancam "pembedaan".

Jumlah penduduk akhir tahun berdasar kelompok umur 5 tahun dapat dilihat dalam data dalam tabel berikut. Data juga akan menampilkan dari jumlah dalam kelompok umur tersebut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur 5 Tahun dan
Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kelompok Umur (Group)	Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah
1	2	3	4
0-4	25.769	24.423	50.192
5-9	30.790	28.839	59.629
10-14	32.998	30.877	63.875
15-19	32.235	29.969	62.204
20-24	33.652	32.136	65.788
25-29	33.757	31.221	64.978
30-34	32.949	31.632	64.581
35-39	38.577	39.039	77.616
40-44	35.114	35.993	71.107
45-49	36.122	37.349	73.471
50-54	35.200	37.125	72.325
55-59	31.679	33.782	65.461
60-64	27.873	29.126	56.999
65-69	20.503	20.702	41.205
70-74	16.456	17.122	33.578
75+	19.500	26.947	46.447
Jumlah / Total 2021	483.174	486.282	969.456

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, diolah

Data dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah kelompok umur dalam rentang usia antara 35-39 yaitu berjumlah 77.616 dengan pembagian jenis kelamin laki-laki berjumlah 38.577 dan jumlah perempuan adalah 39.039, disusul kemudian penduduk dalam rentang umur antara 45-49 yaitu 73.471 dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 36.122 dan jumlah perempuan 37.349, sedangkan jumlah penduduk terkecil terletak pada kelompok umur antara 70-74 yaitu sebanyak 33.578, dengan jumlah laki-laki sebanyak 16.456 dan perempuan berjumlah 17.122.

Data di atas memperlihatkan beberapa hal. *Pertama*, usia terbanyak yang menjadi penduduk Kabupaten Ponorogo adalah usia produktif dan dewasa yaitu antara usia 35 sampai 39. Ini adalah usia kematangan dalam hidup. Usia ini menentukan bagi perkembangan kehidupan baik dari sisi ekonomi dan politik. Apabila digeneralisasi usia paling terbanyak adalah antara usia 30 sampai dengan usia 54. Di samping usia kematangan. Usia ini adalah usia

mereka mendidik putra-putri mereka baik dalam jenjang pendidikan maupun lainnya. Artinya posisi usia ini adalah usia signifikan dalam determinasi generasi bangsa yang berkualitas. Pendekatan dan pendampingan kepada mereka dalam usia rentang ini, bagi mereka yang memerlukan *emporing*, sangat diperlukan baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang respek.

Kedua, jumlah jenis kelamin perempuan dalam tiga urutan rentang umur lima tahun adalah paling terbanyak. Koheren dengan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan terbanyak, jumlah penduduk perempuan adalah potensi untuk memanfaatkan keterampilan mereka dalam kerja-kerja publik maupun domestik. Dalam kerja domestik, kerja-kerja home industri yang diperoleh melalui pelatihan atau pendampingan diperlukan untuk usia ini. Data-data tentang pekerja perempuan (dalam buku ini) memperlihatkan pula, bahwa perempuan perlu meningkatkan keterampilan mereka agar menjadi mandiri, tidak tergantung kepada pihak laki-laki (suami).

Ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah rentang usia 70-74. Data ini memperlihatkan bahwa penduduk Kabupaten Ponorogo rentan meninggal pada rentang usia ini. Laki-laki lebih banyak meninggal di banding perempuan. Belum ada data pasti kenapa rentang usia ini yang paling terbanyak. Rentang ini harus diakui menjadi rentang yang paling rawan. Di antara alasannya adalah bagi mereka yang memiliki pekerjaan rutin semacam pegawai negeri sipil (PNS) atau mereka yang bekerja di perusahaan usia ini adalah usia pensiun. Untuk sebagian orang masa pensiun adalah masa perubahan kondisi yang dikhawatirkan. Mereka mengalami kondisi bekerja rutin menjadi pengangguran yang membosankan. Jika mengikuti teori bahwa pikiran menentukan daya tahan tubuh dan kekuatan imunitas tubuh, maka perubahan keadaan hidup setelah bekerja rutin akan menurunkan daya imunitas mereka sehingga daya tolak terhadap penyakit lemah. Di sinilah pentingnya memberi motivasi kepada para pekerja rutin baik PNS maupun di perusahaan untuk mempersiapkan kegiatan pasca perubahan rutinitas tersebut. Motivasi dapat diberikan secara terstruktur di lembaga atau instansi tempat bekerja atau non struktur oleh diri sendiri.

Keempat, jumlah penduduk terbanyak adalah perempuan. Perempuan hampir dalam setiap rentang umur lima tahun adalah terbanyak, termasuk usia 70 sampai 75 ke atas. Data ini memberi pengertian bahwa perempuan memiliki daya hidup yang lebih lama dibanding laki-laki, di samping karena perempuan memiliki unsur kromosom XX dan laki-laki XY, tetapi lebih dari itu, perempuan lebih bisa menjaga kontrol emosinya dalam menghadapi masalah. Sifat sabar dan kasih sayang yang dimiliki perempuan mengalahkan emosinya untuk menang. Perempuan telah disebut oleh Rasulullah SAW. sebagai orang yang paling pertama untuk dihormati oleh seorang anak. Tiga kali Rasulullah SAW menyebutnya sebelum menyebut bapak. Perempuan diharapkan dapat mengawal anak dan cucunya dalam menjalani kehidupan. Kesabaran dan ketelatenan perempuan dapat menjadikan generasi yang baik di masa akan

datang. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana keberlangsungan ekonomi mereka pasca ditinggal oleh suaminya. Membentuk perempuan mandiri sejak muda adalah tugas bersama. Perempuan yang mandiri secara ekonomi tidak saja berguna untuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya, tetapi juga mampu menjaga dirinya dari dominasi laki-laki yang patriarkhis. Banyak kasus, perempuan mengalami "ketidaksadaran yang mendalam". Mereka ditindas oleh laki-laki tetapi perempuan tidak berani melawan karena tidak tahu bagaimana melakukan pembelaan dan juga karena takut tentang kemiskinan pasca perceraian. Perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi, merasa takut untuk hidup sendiri, tanpa suami. Data tentang daya tahan perempuan untuk hidup menjadi alat pembentuk kesadaran semua pihak, di samping diri perempuan sendiri, untuk memberikan *affirmative action* (kegiatan pembelaan) kepada perempuan tidak saja dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat berupa kontrol kepada tradisi patriarkhis. Penafsiran teks-teks agama menjadi penting dalam wilayah ini yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terbaru.

C. Jumlah Kelahiran dan Kematian Penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Seperti telah dijelaskan, penambahan penduduk berhubungan erat dengan jumlah kelahiran dan jumlah kematian suatu penduduk. Walau ini tidak bisa sebagai faktor satu-satunya, tetapi kelahiran dan kematian merupakan faktor yang tidak bisa dilupakan. Faktor lainnya adalah faktor datang dan pergi dari penduduk suatu daerah. Kelahiran yang tidak seimbang dengan kematian, menyebabkan penambahan penduduk terjadi. Maksudnya adalah jika jumlah kelahiran bertambah, tentu dengan angka hidup tinggi, sedangkan angka kematian menurun, otomatis jumlah penduduk akan bertambah. Sebaliknya, jika kematian tinggi sementara jumlah kelahiran kecil, maka penambahan penduduk akan menurun. Hal ini apa bila jumlah datang dan pergi tidak ikut mempengaruhi terhadap keduanya.

Bertambahnya angka kelahiran oleh suatu daerah ditentukan banyak faktor. Di antaranya adalah pandangan tradisional bahwa banyak anak, banyak rizki masih dianut oleh sebagian masyarakat. Anak adalah anugerah. Sebagai anugerah, kehadirannya tidak boleh ditolak. Masyarakat dengan pendidikan rendah dan tinggal di daerah yang kurang informasi biasanya masih mengikuti tradisi ini. Asumsi banyak anak akan membuat kehidupan di masa tua lebih baik, masih dipegangi oleh sebagian masyarakat. Dengan banyak anak, orang tua di masa tua akan terbantu kehidupannya. Orang tua dapat menentukan masa tuanya dengan mengikuti salah satu dari anak yang dipunya. Anak banyak bagi sebagian masyarakat berkorelasi dengan kenyamanan dan ketenangan di masa tua. sesungguhnya, banyak aspek "penolak" atau antitesa dari gagasan ini. Antitesa tersebut seperti banyak orang tua yang terlantar hidupnya. Orang tua hidup sendiri padahal memiliki banyak anak. Semua anak telah berkerja di

luar daerah atau jauh dari tempat tinggal orang tua. Sebab lainnya adalah karena orang tua tidak memberi pendidikan dan kecakapan memadai untuk anak, akibatnya anak disibukkan dengan kegiatan personal ekonomis sehingga tidak sempat melayani orang tua. Hal lain mungkin terjadi, yaitu konflik antar anak akibat ketimpangan pemberian orang tua kepada anak yang menyebabkan sikap berbeda dari anak kepada orang tua. antitesa ini menyanggah bahwa banyak anak berkorelasi dengan kebahagiaan di masa tua. Namun antitesa ini tidak berlaku general. Ada kasus-kasus di mana banyak anak menjadikan kebahagiaan di masa tua, yaitu mereka dari golongan terpelajar ilmu agama, memiliki status sosial ekonomi mapan dan kelompok penerima akses informasi memadai.

Di samping alasan tradisi yang mengakar, ketidaktahuan tentang pengaturan anak mungkin saja terjadi. Sebagian penduduk tidak tahu alat kontrasepsi yang tepat atau tidak memahami tentang alat-alat atau media untuk pengaturan anak. Ketidaktahuan menyebabkan kesalahan dalam penggunaan, ketakutan dalam pemakaian atau bahkan menggunakan cara-cara yang tidak efektif. Cara-cara yang tidak efektif tersebut seperti cara-cara tradisional yang belum teruji secara ilmiah. Akhirnya ada ungkapan bahasa Jawa "kebobolan". "Kebobolan" adalah istilah untuk menggambarkan suatu kehamilan yang tidak diinginkan. Kebobolan adalah ungkapan untuk menjelaskan bahwa kehamilan tersebut tidak direncanakan kehadirannya. Suami istri telah membuat cara agar tidak hamil, namun fakta berkata lain. Ini adalah cara yang tidak efektif.

Sedangkan faktor penyebab kematian juga tidak tunggal. Ada yang disebabkan oleh faktor usia, faktor penyakit atau faktor-faktor lain seperti tertimbun longsor, pandemi, kecelakaan berkendara, kecelakaan saat bekerja, perkelahian dan lain-lain. Kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan dan perkelahian misalnya adalah sebab-sebab di bawah kendali otak sadar manusia. Ini artinya bisa diusahakan. Hal ini berbeda dengan karena tua misalnya. Tidak menjaga pola makan, tidak beristirahat yang cukup dan tidak berolah raga yang rutin misalnya adalah bagian dari unsur-unsur pendorong hadirnya penyakit. Berbagai hal tersebut dapat diusahakan. Demikian pula pemakaian helm saat berkendara, tidak melebihi batas kecepatan dan mematahui rambu-rambu lalu lintas adalah cara lainnya. Demikian pula perkelahian yang menyebabkan pembunuhan adalah tindakan yang bisa dikontrol oleh agama dan emosi seseorang. hal-hal yang bisa dikontrol tersebut adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat untuk mengusahkannya. Kesadaran berkendara yang baik, kebiasaan pola hidup sehat dan lain sebagainya adalah langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi angka kematian di suatu daerah.

Data di bawah ini akan memperlihatkan bagaimana kelahiran dan kematian di suatu daerah atau tempat berbeda-beda. Data di bawah ini mendeskripsikan data kelahiran dan kematian dari satu kecamatan ke

kecamatan lain. Data ini juga akan menunjukkan jumlah kelahiran dan kematian tersebut dari perspektif jenis kelamin. Jenis kelamin apakah yang paling banyak dilahirkan dan paling banyak meninggal untuk daerah Kabupaten Ponorogo?

Tabel 1.3
Jumlah Kelahiran dan Kematian (LMDP)
Tahun 2021

Kecamatan	Kelahiran			Kematian			Rasio Jenis Kelamin	
	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah	Kelahiran	Kematian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. NGRAYUN	259	243	502	227	264	491	107	86
2. SLAHUNG	243	232	475	380	330	710	105	115
3. BUNGKAL	173	144	317	245	192	437	120	128
4. SAMBIT	196	178	374	318	265	583	110	120
5. SAWOO	283	287	570	319	312	631	99	102
6. SOOKO	112	90	202	148	144	292	124	103
7. PUDAK	58	44	102	34	36	70	132	94
8. PULUNG	225	252	477	383	357	740	89	107
9. MLARAK	172	171	343	271	204	475	101	133
10. SIMAN	277	209	486	366	270	636	133	136
11. JETIS	153	135	288	236	233	469	113	101
12. BALONG	222	219	441	370	321	691	101	115
13. KAUMAN	252	239	491	333	298	631	105	112
14. JAMBON	238	233	471	252	194	446	102	130
15. BADEGAN	159	131	290	192	199	391	121	96
16. SAMPUNG	200	170	370	270	235	505	118	115
17. SUKOREJO	283	269	552	361	321	682	105	112
18. PONOROGO	368	354	722	726	658	1.384	104	110
19. BABADAN	377	303	680	564	464	1.028	124	122
20. JENANGAN	285	264	549	390	293	683	108	133
21. NGEBEL	86	93	179	117	123	240	92	95
Jumlah/Total 2021	4.621	4.260	8.881	6.502	5.713	12.215	108	114
Jumlah/Total 2020	4.755	4.447	9.202	3.634	2.909	6.543	91	120
Jumlah/Total 2019	4.451	4.317	8.768	3.756	3.041	6.797	103	124
Jumlah/Total 2018	4.466	4.159	8.625	3.094	2.611	5.705	107	118
Jumlah/Total 2017	4.632	4.341	8.973	3.050	2.556	5.606	107	119

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, diolah

Daerah terbanyak kelahiran adalah berada di Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 722 di tahun 2021. Jumlah tersebut disusul daerah Kecamatan Babadan yaitu 680 dan disusul dengan Kecamatan Sawoo yaitu 570 jiwa. Daerah tersebut, terutama Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Babadan adalah daerah terpadat dan terbanyak penduduknya di Kabupaten Ponorogo. Geografinya yang berada di perkotaan menarik minat banyak penduduk untuk bertempat tinggal di Kecamatan ini. Mereka tinggal di Kecamatan ini dengan alasan beragam, ada yang karena pekerjaan atau karena keturunan sejak awalnya. Namun yang pasti adalah terdapat banyak peluang-peluang kerja selain pertanian di dua kecamatan ini. Adapun daerah dengan tingkat kelahiran terendah atau terkecil adalah Kecamatan Pudak, Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Sooko. Kecamatan Pudak jumlah kelahiran adalah 102 jiwa dan Kecamatan Ngebel berjumlah 179 dan Kecamatan Sooko adalah 202 jiwa. Daerah ini adalah daerah pinggiran Kabupaten Ponorogo dengan jumlah penduduk yang tidak padat. Dari sini dapat dilihat bahwa penambahan jumlah kelahiran di suatu daerah di antaranya adalah disebabkan karena jumlah penduduk. Rumusnya bisa dikatakan bahwa semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak pula angka kelahiran di daerah tersebut.

Dari angka kelahiran tersebut jumlah kelahiran penduduk perempuan di Kecamatan Ponorogo lebih sedikit di banding laki-laki yaitu 354 jiwa untuk perempuan dan 368 untuk laki-laki. Demikian pula pada daerah Kecamatan Babadan jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih banyak yaitu 377 sementara jumlah bayi perempuan hanya 303. Kecenderungan ini (kelahiran bayi laki-laki lebih banyak) tidak hanya terjadi di tiga kecamatan tersebut, tetapi juga hampir diseluruh kecamatan. Kelahiran yang jumlah bayi perempuannya lebih banyak hanya terjadi di tiga kecamatan yaitu kecamatan Pulung kelahiran bayi perempuan 252, sedangkan bayi laki-laki sejumlah 225. Kelahiran di Ngebel bayi perempuan sejumlah 93 dan bayi laki-laki sejumlah 85. Sedangkan di Kecamatan Sawoo kelahiran bayi perempuan sejumlah 287 sedangkan bayi laki-laki 283.

Secara keseluruhan kelahiran bayi laki-laki di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 ini lebih banyak berjenis kelamin laki-laki di banding jenis kelamin perempuan yaitu 4.621 untuk bayi laki-laki dan 4.260 untuk bayi perempuan dari keseluruhan bayi yang dilahirkan pada tahun 2021 ini yaitu 8.881. Mengikuti perkembangan atau tren kelahiran ini, harusnya penduduk laki-laki lebih banyak di banding penduduk perempuan. Persoalannya kenapa jumlah penduduk perempuan lebih banyak di Kabupaten Ponorogo? Jawabannya adalah ada perbedaan signifikan dengan jumlah kematian dari sisi jenis kelamin. Jika kelahiran penduduk banyak di dominasi dari jenis kelamin laki-laki tetapi kematian banyak terjadi pada penduduk laki-laki. Kecenderungan bahwa bayi laki-laki lebih banyak dapat dilihat dari tahun pertahun. Pada tahun 2017 misalnya bayi laki-laki berjumlah 4.632 sementara bayi perempuan hanya

4.341; pada tahun 2018 jumlah kelahiran bayi laki-laki adalah 4.466 sementara kelahiran bayi perempuan adalah 4.159; pada tahun 2019 jumlah kelahiran bayi laki-laki adalah 4.451 sedangkan kelahiran bayi perempuan adalah 4.317; dan pada tahun 2020 jumlah kelahiran bayi laki-laki adalah 4.755 sedangkan kelahiran bayi perempuan adalah 4.447

Ketidakseimbangan antara jumlah kematian dari sisi jenis kelamin adalah salah satu sebab penduduk Kabupaten Ponorogo lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jenis kelamin laki-laki yang meninggal adalah 6.562 orang sementara jumlah perempuan yang meninggal hanya 5.713. Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2017 jenis kelamin laki-laki yang meninggal adalah 3.756 sementara perempuan hanya 3.041; tahun 2018 laki-laki yang meninggal adalah 3.050 dan jenis kelamin perempuan meninggal berjumlah 2.556, tahun 2019, laki-laki yang meninggal berjumlah 3.094 dan perempuan yang tutup usia berjumlah 2.611 orang; sedangkan pada tahun 2020 jenis kelamin laki-laki yang meninggal adalah 3.634 orang sementara jumlah perempuan yang meninggal hanya 2.909. Fakta ini memperlihatkan bahwa daya tahan perempuan untuk hidup lebih tinggi di banding laki-laki. Perempuan lagi-lagi harus mendapatkan perhatian lebih dalam hal ini karena kebutuhan-kebutuhan hidupnya lebih lama. Perempuan perlu memiliki keterampilan agar ia dapat bertahan dalam masa hidupnya. Perempuan, di masa tua, harus tetap produktif agar tidak tergantung kepada anak atau yang lain. Produktifitas masa tua tidak hanya bermanfaat untuk bagi diri perempuan sendiri, tetapi juga berguna bagi perbaikan sosial ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah dan siapa pun yang peduli kepada perempuan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada jenis kelamin ini. Dengan daya hidup lebih lama, perempuan lebih punya potensi mendidik keturunannya lebih lama dan bisa mengawal perjalanan keturunan hingga cucu. Artinya, pengetahuan perempuan yang memadai dan kebijaksanaan hidup yang tinggi bagi perempuan ikut menentukan terhadap perkembangan generasi bangsa. Dengan argumen ini pantas saja, ada pepatah mengatakan bahwa kebagikan negara terletak pada perempuannya, perempuan yang baik ikut menentukan kebaikan bangsa, sebaliknya, perempuan yang kurang baik ikut menentukan keburukan suatu bangsa. Perempuan sering disebut sebagai "ibu pertiwi", "ibu negara" dan lain-lain.

Adapun daerah kecamatan yang paling banyak angka kematiannya adalah adalah Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 1.384 orang, disusul Kecamatan Babadan dengan jumlah 1.028 orang dan Kecamatan Pulung yang berjumlah 740. Jumlah ini seperti halnya kelahiran, dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang dihuni oleh kecamatan ini. Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Babadan adalah sebagai misal (walau tidak memiliki koherensi dan

korespondensi dengan Kecamatan Pulung, namun dua persamaan dua kecamatan dapat membuktikan asumsi ini benar).

Sebagaimana pernyataan sebelumnya, tidak ada keseimbangan antara jumlah kelahiran dan kematian pada sisi jenis kelamin, dapat dilihat pada data di atas yaitu di Kecamatan Ponorogo, jumlah laki-laki yang meninggal lebih banyak dari jenis kelamin perempuan yaitu 726 untuk jenis kelamin laki-laki dan 658 untuk jenis kelamin perempuan yang meninggal. Demikian pula untuk dua Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Babadan laki-laki yang meninggal 564 dan perempuan yang meninggal adalah 464. Kecamatan Ngrayun juga sama dengan Kecamatan Ponorogo dan Babadan. Dari jumlah 491 penduduk yang meninggal, jumlah laki-laki adalah 227 orang dan jumlah perempuan adalah 264 orang.

Di samping alasan-alasan normatif teologi karena takdir Tuhan, alasan genetik laki-laki dan perempuan yang berbeda juga bisa menjelaskannya. Demikian pula pola hidup laki-laki yang lebih tidak teratur di banding perempuan juga menjadi alasan lain. Keinginan perempuan untuk tampil sehat, cantik, ideal dan seimbang membuatnya menjaga pola hidup (makan, tidur, kerja dan lain-lain), sementara aktifitas laki-laki pada wilayah kasar, berat dan fisik membuatnya kurang kontrol atas kesehatan (merokok, makan malam, kurang tidur dan lain-lain). Berbagai pihak perlu berkerjasama dalam hal mensosialisasikan kesehatan untuk semua jenis kelamin. Pemerintah adalah paling terdepan dalam kerja-kerja ini.

D. Jumlah Migrasi, datang dan Pergi serta Kepadatan Penduduk Secara Terpilah Tahun 2021

Jumlah penduduk yang padat seperti tampak pada bahasan sebelumnya yaitu Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Babadan dapat terlihat dalam data di bawah. Kepadatan penduduk disebabkan banyak hal seperti migrasi, datang dan pergi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan melewati batas-batas tempat dalam suatu administrasi tertentu. Ini berarti perpindahan dari satu daerah ke daerah lain dalam kepengurusan administrasi yang berbeda, seperti dari Kabupaten Madiun ke Kabupaten Ponorogo. Ini disebut migrasi internal. Jika migrasi tersebut sudah keluar dari wilayah kekuasaan politik seperti dari Indonesia ke Malaysia misalnya disebut sebagai migrasi internasional. Tujuan dari migrasi tersebut adalah untuk menetap. Migrasi internasional disebut oleh suatu negara biasanya dengan istilah imigrasi yaitu masuknya atau pindahnya orang dari negara lain ke Indonesia misalnya. Jika migrasi internal terjadi dalam satu negara, maka migrasi internasional terjadi antar negara. Migrasi mengakibatkan banyak hal, ada yang positif dan ada yang negatif. Akibat positif misalnya adalah penambahan tenaga-tenaga profesional jika sebelumnya suatu daerah belum memilikinya, adanya pertukaran budaya yang konstruktif, adanya penambahan kekerabatan antara satu orang dengan lainnya. Namun, migrasi juga bisa

membawa dapat negatif apabila perpindahan tersebut menambah angka pengangguran suatu daerah, membawa budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya lokal, kepadatan penduduk yang berdampak pada polusi, kerusakan lingkungan, sampah dan lain-lain.

Kepadatan penduduk bisa berdampak negatif jika kepadatan penduduk tidak diiringi dengan hal-hal lain seperti penataan ruang kota, pengaturan sampah, pengairan, dan pengaturan jalan dan lain-lain. Salah satu yang menyebabkan kepadatan penduduk adalah banyaknya orang datang dan pergi dari satu daerah ke daerah lain. Wilayah kota, seperti Kecamatan Ponorogo misalnya akan berpotensi pada tingginya kedatangan penduduk dari daerah lain. Keberadaan kecamatan Ponorogo sebagai pusat-pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan pusat-pusat pemerintahan menjadi daya tarik orang untuk memasukinya. Data di bawah ini menunjukkan bagaimana tempat suatu kecamatan menentukan jumlah kepadatan penduduk.

Tabel 1.4
Jumlah Migrasi, datang dan Pergi serta Kepadatan Penduduk Secara Terpilah (NCR) Tahun 2021

Kecamatan	Awal Tahun		Migrasi		Datang		Pergi		Akhir Tahun		Kepadatan Penduduk
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
NGRAYUN	31.907	30.982	0	0	405	355	441	405	31.376	30.408	334
SLAHUNG	27.836	28.073	0	0	404	445	402	432	27.314	27.471	606
BUNGKAL	19.419	20.094	0	0	232	229	236	288	19.137	19.768	720
SAMBIT	20.627	20.889	0	0	285	290	249	237	20.321	20.584	684
SAWOO	32.024	32.024	0	0	344	348	399	401	31.333	31.351	503
SOOKO	12.417	12.701	0	0	191	196	203	215	12.210	12.422	445
PUDAK	4.681	4.692	0	0	42	38	57	53	4.725	4.719	193
PULUNG	27.102	27.429	0	0	355	388	411	419	26.471	26.826	418
MLARAK	18.111	18.202	0	0	289	324	270	292	17.791	17.926	960
SIMAN	24.079	24.102	0	0	442	495	390	414	23.638	23.682	1.247
JETIS	16.271	16.246	0	0	242	253	245	253	15.867	15.922	1.419
BALONG	24.254	24.743	0	0	332	368	309	345	23.804	24.371	846
KAUMAN	23.684	23.859	0	0	352	356	319	350	23.566	23.774	1.293
JAMBON	23.704	23.441	0	0	335	336	302	320	23.880	23.649	805
BADEGAN	17.009	16.999	0	0	231	231	216	215	17.087	17.100	595
SAMPUNG	20.172	20.465	0	0	251	297	258	273	20.241	20.582	780
SUKOREJO	29.099	29.329	0	0	402	403	414	441	29.208	29.531	678
PONOROGO	38.512	38.923	0	0	916	915	906	931	38.355	38.863	3.461

BABADAN	35.222	35.270	0	0	576	602	580	614	35.225	35.393	1.185
JENANGAN	30.638	30.788	0	0	458	487	485	485	30.721	31.025	1.406
NGEBEL	10.876	10.888	0	0	129	138	143	189	10.904	10.915	367
Jumlah 2021	487.644	490.139	0	0	7.213	7.494	7.235	7.572	483.174	486.282	704
Jumlah 2019	480,833	481,751	0	0	7,705	7,730	7,162	7,423	485,041	486,152	705
Jumlah 2018	477,217	474,521	0	0	7,558	7,914	7,166	7,435	480,833	481,751	699
Jumlah 2017	471,968	472,276	0	0	7,028	7,313	6,329	6,355	477,217	474,521	691

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Seperti asumsi di atas, Kecamatan Ponorogo adalah memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu 3.461 disusul kemudian Kecamatan Jetis yaitu 1.419 dan Kecamatan Jenangan yaitu 1.419. Sedangkan daerah dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Pudak dan Kecamatan Ngrayun. Kepadatan Kecamatan Pudak adalah 193 dan kepadatan Kecamatan Ngrayun adalah 334. Kenapa kedua kecamatan ini paling rendah. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu sulitnya kedua daerah tersebut dari sisi geografis. Kedua daerah tersebut adalah daerah pegunungan atau dataran tinggi. Sulitnya akses menuju daerah tersebut menyebabkan jumlah penduduk yang pergi atau pindah menuju dua daerah tersebut tidak melonjak tinggi. Kedua, banyak penduduk daerah tersebut karena faktor ekonomi atau karena yang lainnya lebih memilih untuk tinggal di daerah yang dekat perkotaan. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk mencari tempat tinggal dengan akses mudah dari berbagai aspek seperti akses pendidikan, akses ekonomi dan akses politik. Kemudahan akses di berbagai bidang menjadi daya tarik bagi suatu daerah untuk memiliki kepadatan penduduk. Hal ini tidak terjadi hanya sekarang. Kota Mekkah pada awal kalinya adalah daerah gersang dan jarang penduduk. Akses ekonomi dan akses kehidupan terutama tidak adanya air menyebabkan daerah itu tidak memiliki daya tarik. Namun setelah Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar menemukan sumber air terbaik dunia yang tidak pernah kering, sumur Zamzam, daerah Mekkah menjadi daerah yang padat penduduk. Berbondong-bondong masyarakat bertempat tinggal di sekitar Zam Zam karena mencari akses termudah dalam menjalani kehidupan.

Di lihat dari data dalam tabel di atas tampak bahwa Kabupaten Ponorogo nihil migrasi, yang paling banyak adalah aspek datang dan pergi. Jumlah awal tahun akhir tahun penduduk Kabupaten Ponorogo menunjukkan peningkatan. Dari sisi jenis kelamin, pada awal tahun 2021 jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki adalah 487.644 menjadi 483.174 di akhir tahun. Sedangkan penduduk jenis kelamin perempuan berjumlah 490.139 di awal tahun menjadi 486.282 orang di akhir tahun. Berdasarkan tabel tersebut kepadatan

pendudukan setelah mengalami peningkatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan kepadatan 705, akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 704. Jika dilihat secara teliti masing-masing kecamatan memiliki tingkat datang dan pergi serta jumlah di awal tahun dan akhir tahun yang berbeda. Satu Kecamatan bisa saja kepadatan penduduknya menunjukkan angkat turun, namun ada kecamatan yang menunjukkan angka kenaikan. Sebagai contoh Kecamatan Sawoo penduduk awal tahun adalah 32.024 untuk jumlah laki-laki dan menurun menjadi 31.33 di akhir tahun. Demikian pula untuk penduduk perempuan. Pada awal tahun, penduduk perempuan Sawoo berjenis kelamin perempuan adalah 32.024 naik menjadi 31.351 di akhir tahun. Hal ini berbeda dengan Kecamatan Jambon jumlah penduduk laki-laki awal tahun di Kecamatan Ponorogo adalah 23.704 orang naik menjadi 23.880 di akhir tahun. Demikian pula jumlah penduduk perempuan di awal tahun 23.441 naik menjadi 23.649 orang.

Dari data dalam tabel tampak bahwa tidak ada migrasi di Kabupaten Ponorogo, yang paling banyak adalah datang dan pergi. Berdasarkan data jumlah datang dan pergi terbanyak adalah kecamatan Ponorogo. Jumlah yang datang adalah 916 orang untuk laki-laki dan 915 perempuan. Demikian juga yang pergi adalah 906 untuk penduduk laki-laki dan 931 untuk perempuan. Sementara berdasarkan data datang dan pergi terkecil adalah pada Kecamatan Pudak yaitu penduduk datang berjumlah 42 orang laki-laki dan 38 perempuan, sedangkan penduduk pergi adalah 57 orang laki-laki dan 53 perempuan, Fakta ini memberi implikasi beberapa hal.

Pertama, perlu adanya pengembangan daerah-daerah dalam kategori pinggiran. Ini artinya adanya *affirmative action* atau aksi-aksi dukungan terhadap daerah-daerah dalam kategori pinggiran dalam bidang usaha, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Aksi dukungan juga bisa berupa tempat-tempat yang memungkinkan untuk adanya datang dan pergi secara massif. Perlu adanya pemecahan berbagai kegiatan yang menarik orang untuk menempati daerah yang pada awal kalinya kurang diminati. Sebagai contoh, adanya kampus IAIN baru di daerah Jenangan ternyata mampu menarik minat sebagian orang untuk bertempat tinggal di sekitar kampus. Peluang-peluang usaha semakin menjamur, rumah-rumah mulai didirikan, harga tanah melonjak, sektor usaha semacam warung makan, kos-kosan, foto copy dan lain-lain bertambah ramai. Ini memang menjadi kerja keras dan pekerjaan rumah pemerintah daerah agar kepadatan penduduk dapat dipecah dalam beberapa titik. Tidak hanya untuk menghindari efek kepadatan penduduk, tetapi juga untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, masuk berbagai para ahli tata kota dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Kedua, perlu adanya pengembangan usaha dari pengusaha-pengusaha lokal maupun pengusaha yang digandeng oleh pemerintah daerah dalam

menanamkan modal yang baik dan konstruktif bagi pengembangan masyarakat pinggiran. Perlu adanya investor dalam pengelolaan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Proyek-proyek bisa saja dari investor luar bisa juga dari hasil kreatifitas masyarakat atau swadaya masyarakat dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMD). BUMD perlu diperkuat dan perlu mendapat pendampingan yang baik dari pemerintah. BUMD yang berdaya tidak saja untuk meningkatkan taraf hidup mereka tetapi juga bisa dikembangkan untuk daya tarik orang datang ke suatu daerah. BUMD bisa berupa wisata berbasis alam, atau pemandangan alam yang dibentuk secara natural oleh masyarakat kreatif. Lomba-lomba kreasi alam barangkali bisa menjadi langkah awal pemerintah dalam pengembangan BUMD ini.

E. Jumlah Anak yang Berumur di Bawah 18 Tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Kepemilikan akta lahir adalah sesuatu yang penting bagi warga negara. Akta lahir adalah bukti paling sah dan paling akurat tentang peristiwa kelahiran seorang warga negara. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang telah dicatatkan tersebut akan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam Kartu Keluarga. Dengan adanya hal-hal tersebut (akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) tersebut, seorang bayi telah menjadi warga negara dan berhak mendapatkan pelayanan-pelayanan yang menjadi haknya sebagai warga negara. Semua anak yang baru lahir harus memiliki akta kelahiran. Hal ini penting karena beberapa manfaat dari akta kelahiran adalah. Pertama, sebagai bentuk kewarganegaraan Indonesia. Status kewarganegaraan akibat kelahiran dan juga keturunan dari warga negara Indonesia ditandai dengan akta kelahiran. Kedua, sebagai bukti yang paling akurat atas diri seseorang. Akta kelahiran akan menjadi petunjuk paling akurat apabila terjadi perselisihan masalah kelahiran seseorang. Ketiga, akta kelahiran juga menjadi pedoman bagi aktifitas-aktifitas lainnya seperti pendidikan dan lain-lain (di antaranya sebagai syarat masuk sekolah TK, Sekolah Dasar dan lain-lain). Termasuk dalam kepentingan ini adalah untuk melamar pekerjaan, karir pekerjaan (tunjangan keluarga dan lain-lain) dan lain-lain.

Walau begitu, masih banyak warga negara Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, belum mengertinya masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Akta kelahiran bagi anak adalah hak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak-anak yang tidak sekolah sejak dari awal misalnya belum berurusan dengan akta kelahiran. Namun, bagi mereka yang sadar akan pendidikan akan mengerti fungsi akta kelahiran. Kedua, adanya kendala jauhnya tempat tinggal dengan tempat mengurus akta kelahiran. Namun kendala ini sudah mulai diatasi oleh pemerintah daerah dengan cara pendaftaran online serta

mendekatkan petugas pada daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Pemerintah juga sudah berkerjasama dengan bidan desa dalam hal pencatatan kelahiran ini. Ini artinya bahwa pembuatan akta kelahiran dapat diproses secara mudah. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kelahiran anaknya. Orang tua yang sadar akan kepentingan anaknya di masa depan pasti akan mengurus hal-hal yang bermanfaat untuk anaknya. Kerjasama pemerintah dengan para dokter dan bidan desa sangat penting dalam hal ini. Informasi yang diberikan oleh dokter maupun beda desa akan memberi pengertian kepada orang tua tentang urgensi akta lahir. Dari sisi biaya, pembuatan akta kelahiran juga semakin murah. Agar tidak terlambat dalam pengurusan akta kelahiran persiapan sejak bayi dalam kandungan diperlukan. Oleh karena hampir semua calon ibu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, peran tenaga kesehatan seperti bidan desa tersebut tidak bisa disepelekan.

Kabupaten Ponorogo, walau demikian, belum seratus persen dalam hal kepemilikan akta kelahiran ini. Data dalam tabel berikut menunjukkan bahwa Kabupaten Ponorogo masih memiliki pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pada tahun-tahun akan datang. Cara-cara unik, taktis, strategis, efektif dan tepat sasaran adalah cara yang dibutuhkan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam membuat anaknya yang baru lahir surat akta kelahiran. Mencari sebab-sebab atau alasan dari tanpa kepemilikan akta kelahiran adalah faktor utama untuk mencari cara yang efektif tersebut. Kebijakan dari hasil penelitian agaknya penting dilakukan. Pemerintah perlu menggandeng perguruan tinggi untuk meneliti sebab-sebab dari enggannya masyarakat mengurus akta kelahiran anak. Perguruan tinggi juga bisa menawarkan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Perguruan tinggi sebagai patner pemerintah juga bisa diajak kerjasama dalam sosialisasi dan penyadaran masyarakat tentang akta kelahiran. Di dunia perguruan tinggi, penelitian model seperti ini biasanya disebut sebagai penelitian terapan atau penelitian kebijakan, suatu penelitian untuk perbaikan tindakan atau kebijakan *stakeholder* tertentu. Berikut adalah data tentang kepemilikan penduduk Ponorogo yang memiliki akta lahir dan tidak dalam batas umur di bawah 18 tahun.

Tabel 1.5
Jumlah Anak yang Berumur dibawah 18 tahun dengan kepemilikan
Akta Lahir menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Anak Umur <18 tahun			Kepemilikan Akta Lahir		
	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
0 tahun	3.710	3.417	7.127	3.698	3.412	7.110
1 tahun	5.461	5.162	10.623	5.451	5.150	10.601
2 tahun	5.582	5.302	10.884	5.548	5.269	10.817
3 tahun	5.407	5.290	10.697	5.353	5.224	10.577
4 tahun	5.609	5.252	10.861	5.535	5.207	10.742
5 tahun	5.908	5.508	11.416	5.824	5.450	11.274
6 tahun	5.797	5.439	11.236	5.730	5.374	11.104
7 tahun	6.201	5.787	11.988	6.112	5.703	11.815
8 tahun	6.257	5.849	12.106	6.121	5.739	11.860
9 tahun	6.627	6.256	12.883	6.431	6.095	12.526
10 tahun	6.924	6.354	13.278	6.692	6.156	12.848
11 tahun	6.431	6.169	12.600	6.148	5.891	12.039
12 tahun	6.836	6.429	13.265	6.210	5.858	12.068
13 tahun	6.494	6.119	12.613	6.230	5.850	12.080
14 tahun	6.313	5.806	12.119	5.975	5.489	11.464
15 tahun	6.536	6.096	12.632	6.112	5.726	11.838
16 tahun	6.273	5.572	11.845	5.801	5.183	10.984
17 tahun	6.430	6.004	12.434	5.858	5.575	11.433
Jumlah/Total 2021	108.796	101.811	210.607	104.829	98.351	203.180
Jumlah/Total 2020	109,434	102,426	211,860	102,211	96,043	198,254
Jumlah/Total 2019	107,938	101,319	209,257	98,748	93,049	191,797
Jumlah/Total 2018	110,623	103,409	214,032	99,199	93,068	192,267
Jumlah/Total 2017	106,991	100,302	207,293	83,750	78,421	162,171

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, diolah

Data di atas menunjukkan beberapa hal. Pertama, dari jumlah penduduk yang berusia di bawah 18 tahun dengan jumlah 210.607 yang memiliki akta lahir hanya 203.180. Ini artinya di tahun 2021 ada sekitar 7.427 yang tidak memiliki akta kelahiran. Angka ini mengalami penurunan dari 13.606 tahun 2020. Angka di tahun 2020 ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, tahun 2019 yaitu sekitar 17.460. Angka di tahun 2019 lebih rendah dari tahun sebelumnya, tahun 2018 yaitu 45.122. Data ini oleh karena itu memperlihatkan walau masih ada warga negara yang tidak memiliki akta kelahiran, namun angka kepemilikan akta lahir dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Ada peningkatan kepemilikan. Kenaikan tersebut termasuk signifikan. Hal ini adalah sesuatu yang positif. Kedua, data di atas menunjukkan pula bahwa hampir semua kecamatan di Kabupaten Ponorogo memiliki masalah dalam hal akta kelahiran. Kerja keras dari aparat pemerintah kecamatan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu dijalin secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien menunjukkan bahwa kerjasama tersebut telah terjalin, hanya efektifitas dan efisiensi kerjasama perlu dievaluasi.

Dari sisi relasi gender untuk kepemilikan akta lahir tidak ada diskriminasi. Maksudnya kepemilikan akta lahir tidak berhubungan dengan jenis kelamin bayi. Walau di masyarakat masih ada pandangan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih diunggulkan untuk diharapkan sebagai anak pertama misalnya, namun pandangan demikian tidak memengaruhi pada pengurusan akta lahir. Ketiadaan kepemilikan akta lahir tidak disebabkan oleh jenis kelamin bayi tetapi lebih dari persoalan-persoalan lain seperti ketidaktahuan masyarakat akan arti penting akta lahir serta faktor-faktor geografis seperti jauhnya tempat tinggal, sulitnya alat transportasi dan lain-lain.

Hal lain yang mungkin saja terjadi, namun hipotesa ini perlu dibuktikan melalui penelitian adalah adanya anak dari hasil hubungan di luar nikah, atau hasil hubungan di luar nikah dengan posisi ayah yang tidak bertanggungjawab atau melarikan diri sebelum bayi lahir. Akibatnya rasa malu sang ibu, anak tidak dicatatkan kelahirannya di catatan sipil. Di pihak lain, anak hasil nikah sirri juga demikian. Anak hasil nikah sirri, sebagai proses nikah yang dilegalkan dalam agama, namun tidak ada data dalam rekam negara, tidak bisa dicatatkan dalam akta kelahiran dengan garis nasab kepada ayah.

Anak dari hasil di luar nikah maupun hasil nikah sirri sesungguhnya bisa dibuatkan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya saja nama yang tercantum hanyalah nama ibu, tidak ada tulisan ayah dalam akta tersebut. Dan jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Perpres 96/2018: "*Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah*

menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pencatatan atas pengakuan anak tersebut dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Inilah yang kadangkala menyebabkan ibu dari bayi tidak menguruskan akta kelahiran. Ada beban moral dan psikologis dari sang ibu, atau juga sang ibu kasihan kepada anak apabila anak tumbuh dewasa dan mempersoalkan tentang ayahnya. Negara telah mengatur masalah ini dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah dirubah oleh Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, ketrampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu terbesar dalam pembentukan SDM yang berkualitas. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkeinginan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, handal dan terampil. Untuk mendukung keinginan tersebut pemerintah Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 3 tahun 2013 tentang Program Wajib Belajar 12 tahun, yang tertuang dalam bab kedua pasal 3 mengenai misi penyelenggaraan pendidikan daerah pada butir ke 1. Di samping itu pemerintah juga terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kemajuan dalam bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari segi meningkatnya jumlah lembaga pendidikan, partisipasi penduduk dalam pendidikan serta menurunnya jumlah penduduk buta huruf, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasan lebih lengkap tertuang dalam paparan berikut:

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini sangat berfungsi untuk melihat seberapa besar penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Data APK di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI yang berjenis kelamin laki-laki adalah 94.33 dan perempuan 93.27, untuk tingkat SLTP/MTs. Laki-laki berjumlah 95.82 dan perempuan 98.40. Pada tahun 2021 APK di Kabupaten Ponorogo pada tingkat SD/MI dengan jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan yakni 95,36 dan perempuan 94,78. Sementara pada tingkat SMP/MTs mengalami penurunan yakni untuk laki-laki 85,53 dan perempuan 85,78.

Jika kita bandingkan antara APK SD/MI laki-laki dan perempuan, tampak bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Sementara itu pada tingkat SMP/MTs, jika kita bandingkan menurut jenis kelamin, laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Meskipun demikian, APK pada tingkat SMP/MTs mengalami penurunan jika dibandingkan data pada tahun

sebelumnya, yakni 2020. Sayangnya data terkait APK pada tingkat SLTA/Aliyah pada tahun 2021, data tidak terpilah.

Data terkait bisa dilihat dalam tabel dan grafik di bawan ini:

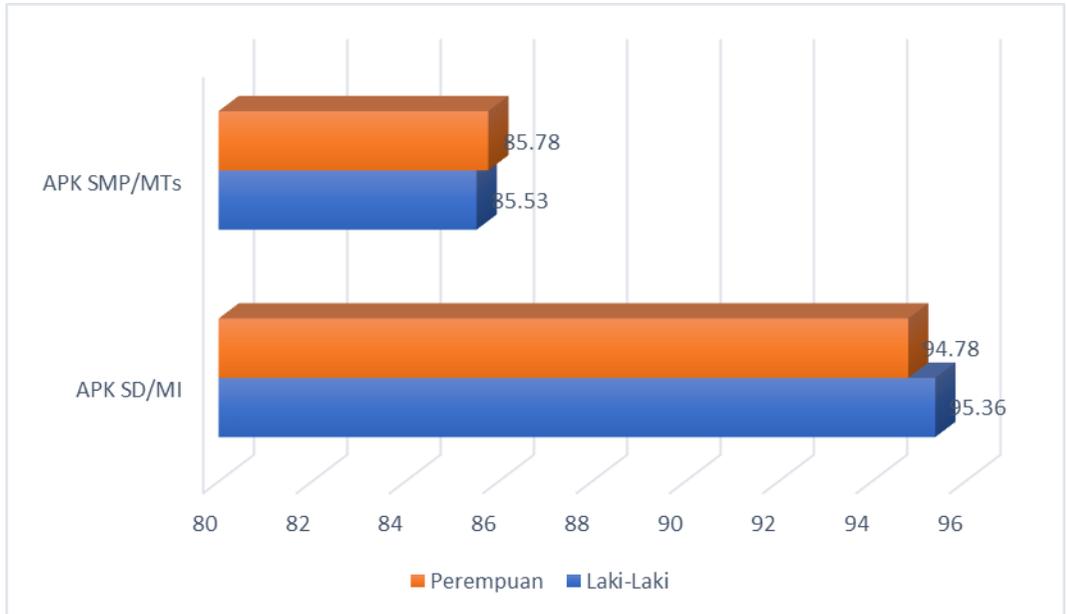
Tabel 2.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK)			
		SD/MI		SLTP/MTs	
		L	P	L	P
1	Babadan	80,83	80,08	82,00	99,26
2	Badegan	89,58	84,95	78,62	75,92
3	Balong	92,23	91,02	92,58	83,61
4	Bungkal	89,69	92,30	71,83	69,98
5	Jambon	100,45	101,42	62,65	54,71
6	Jenangan	91,65	91,05	75,83	62,64
7	Jetis	99,78	104,74	135,58	187,14
8	Kauman	85,24	86,24	92,91	89,08
9	Mlarak	117,17	115,35	169,99	178,23
10	Ngebel	87,20	85,04	48,21	43,68
11	Ngrayun	96,11	94,98	74,15	69,59
12	Ponorogo	132,15	132,74	245,91	238,87
13	Pudak	95,52	92,14	40,40	34,39
14	Pulung	94,15	92,08	72,55	68,72
15	Sambit	80,09	80,55	63,89	54,83
16	Sampung	104,11	103,57	90,62	82,24
17	Sawoo	94,07	94,25	61,04	59,12
18	Siman	91,23	94,31	60,85	86,88
19	Slahung	101,15	94,64	58,09	54,17
20	Sooko	86,40	88,72	67,54	62,08
21	Sukorejo	93,84	90,28	50,96	46,20
	Total	95,36	94,78	85,53	85,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo tahun 2021

Grafik 2.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP, SLTA berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Selain APK, untuk melihat seberapa besar jumlah masyarakat Kabupaten Ponorogo yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan, juga bisa dilihat menggunakan Angka Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok yang sesuai. Penduduk Kabupaten Ponorogo termasuk memiliki respon yang sangat baik dalam hal pendidikan, hal ini dapat dilihat dalam APS tahun 2021, APS umur 7-12 tahun yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 94,75, dan perempuan sebesar 95,06. Sedangkan APS umur 13-15 tahun yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 106,40, dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 106,67. berdasarkan paparan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penduduk perempuan angkatan umur 7-12 dan angkatan umur 13-15 memiliki partisipasi sekolah yang lebih tinggi dibandingkan angkatan penduduk laki-laki. Hal ini kemungkinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, distribusi penduduk perempuan yang lebih dominan, atau juga bisa dipengaruhi oleh faktor

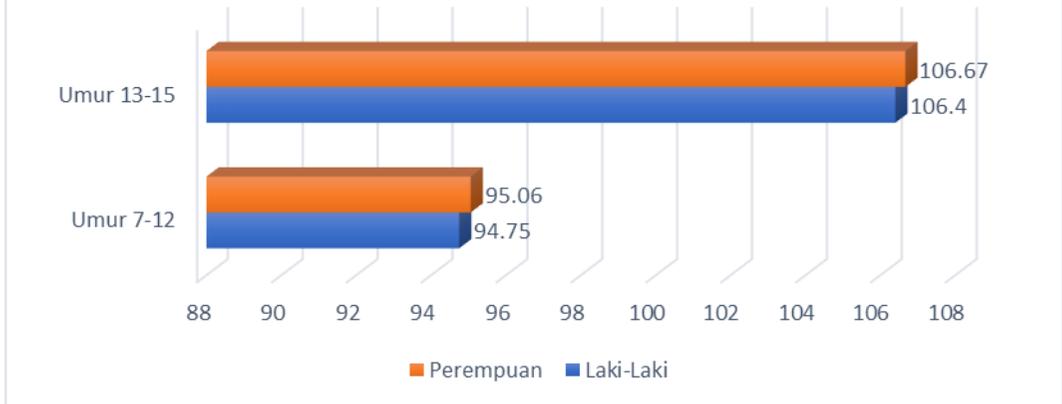
kesadaran sekolah yang lebih tinggi pada penduduk perempuan. Data lebih detail dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok umur (7-12, 13-15 tahun) dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Umur 7-12		13-15	
		L	P	L	P
1	Babadan	80,51	81,07	116,02	105,72
2	Badegan	89,80	87,09	125,11	120,25
3	Balong	91,73	92,06	126,65	116,63
4	Bungkal	83,12	86,60	92,77	98,58
5	Jambon	97,59	98,81	93,87	93,00
6	Jenangan	92,73	92,22	148,51	126,40
7	Jetis	101,60	106,91	140,26	154,65
8	Kauman	86,64	88,93	126,01	122,09
9	Mlarak	119,80	119,68	163,00	173,82
10	Ngebel	84,82	83,23	50,00	46,67
11	Ngrayun	94,44	94,10	68,62	66,96
12	Ponorogo	135,37	137,95	216,96	247,04
13	Pudak	91,04	90,71	41,72	37,58
14	Pulung	94,81	93,44	97,35	104,07
15	Sambit	80,40	80,29	110,46	100,40
16	Sampung	103,20	102,56	98,73	92,03
17	Sawoo	93,55	93,66	84,26	85,35
18	Siman	90,78	94,57	84,72	106,30
19	Slahung	97,85	93,14	79,87	87,33
20	Sooko	86,51	88,84	81,05	74,64
21	Sukorejo	93,40	90,32	88,53	80,65
Jumlah/Total		94,75	95,06	106,40	106,67

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021

Grafik 2.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut
Kelompok umur (7-12, 13-15 tahun) dan Jenis
Kelamin Tahun 2021



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021

C. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA Tahun 2021

Angka Partisipasi Murni yang kemudian disingkat APM merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM dianggap sebagai indikator daya serap yang lebih baik karena melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Berdasarkan data yang digali dari dinas pendidikan kabupaten Ponorogo, angka APM 2021 mengalami peningkatan dibanding APM tahun 2020.

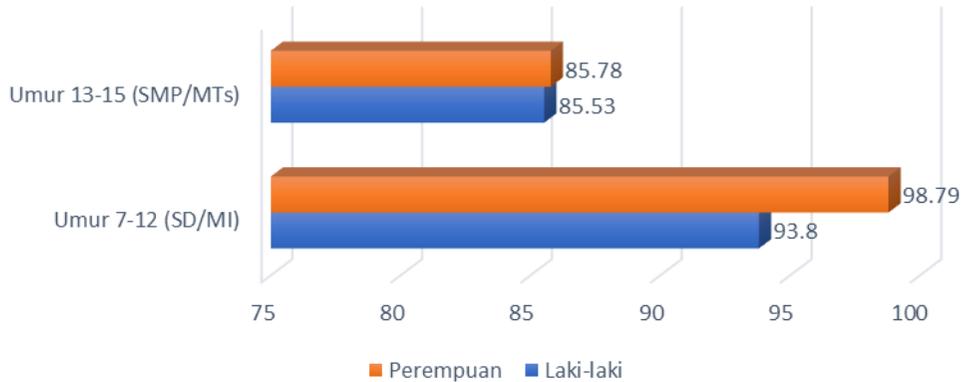
Pada tahun 2021, nilai APM laki-laki di Kabupaten Ponorogo sebesar 93,80 dan APM perempuan sebesar 98,79 untuk usia 7-12 Tahun. Kemudian untuk APM laki-laki usia 13-15 tahun sebesar 85,53, dan 85,78 untuk perempuan. Sedangkan untuk APM usia 16-18 tahun data tidak terpilah. Adapun data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.3
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ponorogo
berdasarkan Jenjang Pendidikan SD, SLTP Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Angka Partisipasi Murni (APM)			
		Umur 7-12 (SD/MI)		13-15 (SMP/MTs)	
		L	P	L	P
1	Babadan	79,09	83,50	82,00	99,26
2	Badegan	89,30	93,28	78,62	75,92
3	Balong	90,50	95,09	92,58	83,61
4	Bungkal	81,76	88,24	71,83	69,98
5	Jambon	95,79	97,45	62,65	54,71
6	Jenangan	91,19	93,28	75,83	62,64
7	Jetis	100,15	106,83	135,58	187,14
8	Kauman	85,69	97,02	92,91	89,08
9	Mlarak	118,25	119,61	169,99	178,23
10	Ngebel	84,82	90,11	48,21	43,68
11	Ngrayun	94,27	97,93	74,15	69,59
12	Ponorogo	134,07	142,25	245,91	238,87
13	Pudak	91,04	110,00	40,40	34,39
14	Pulung	94,34	96,31	72,55	68,72
15	Sambit	79,59	76,54	63,89	54,83
16	Sampung	102,22	101,55	90,62	82,24
17	Sawoo	92,91	104,58	61,04	59,12
18	Siman	90,09	94,15	60,85	86,88
19	Slahung	96,50	101,70	58,09	54,17
20	Sooko	85,75	90,95	67,54	62,08
21	Sukorejo	92,43	94,29	50,96	46,20
Jumlah/Total		93,80	98,79	85,53	85,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021

Grafik 2.3
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten
Ponorogo berdasarkan Jenjang Pendidikan SD,
SLTP Tahun 2021



Sumber: *Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021*

D. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ponorogo Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Tidak berbeda jauh dengan Angka Putus Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019, pada tahun 2020 jumlah Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ponorogo masih menunjukkan angka yang kecil. Meskipun demikian, terdapat beberapa perubahan jumlah angka putus sekolah pada siswa laki-laki dan perempuan. Misalnya, pada tahun 2019, angka putus sekolah SD untuk siswa perempuan hampir tidak ada, namun pada tahun 2020 angka putus sekolah SD untuk perempuan naik menjadi 0.01. Data terkait Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 ini berdasarkan pada data Angka Putus sekolah pada tahun 2020, karena belum tersedianya data di tahun 2021.

Adapun data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.4

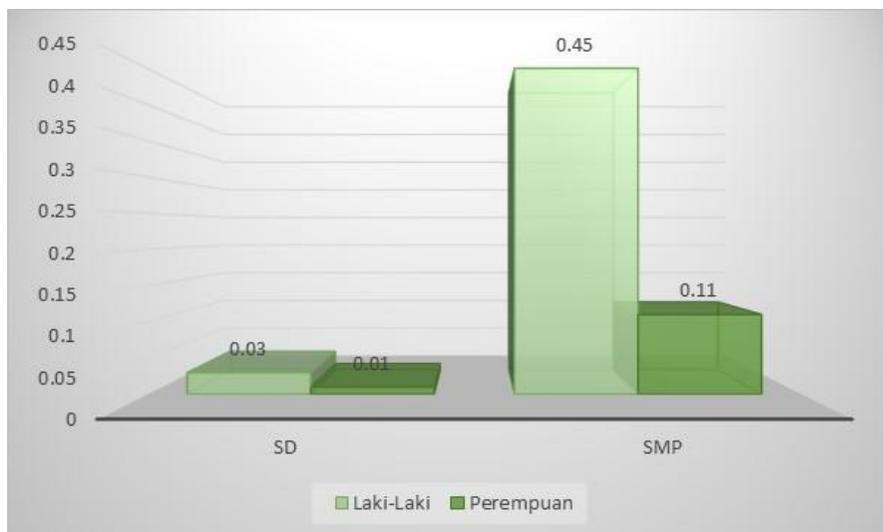
**Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ponorogo
Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021**

Kecamatan	Jumlah Angka Putus Sekolah					
	SD		SLTP		SLTA	
	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7
1. Ngrayun	0.04	0.00	0.00	0.00		
2. Slahung	0.05	0.00	0.35	0.14		
3. Bungkal	0.16	0.00	0.17	0.17		
4. Sambit	0.00	0.00	1.44	0.46		
5. Sawoo	0.00	0.00	1.45	0.14		
6. Sooko	0.00	0.00	0.90	0.40		
7. Pudak	0.00	0.00	0.00	0.00		
8. Pulung	0.00	0.33	2.15	0.00		
9. Mlarak	0.00	0.00	0.00	0.00		
10. Siman	0.00	0.00	0.48	0.09		
11. Jetis	0.00	0.00	0.00	0.00		
12. Balong	0.07	0.00	1.00	0.00		
13. Kauman	0.00	0.00	0.00	0.00		
14. Jambon	0.00	0.00	0.31	0.00		
15. Badegan	0.31	0.27	0.91	1.10		
16. Sampung	0.00	0.00	0.31	0.00		
17. Sukorejo	0.00	0.00	2.56	0.62		
18. Ponorogo	0.00	0.00	0.33	0.20		

19. Babadan	0.00	0.00	0.23	0.02		
20. Jenangan	0.00	0.00	0.00	0.00		
21. Ngebel	0.04	0.00	0.39	0.12		
Jumlah/Total 2020	0.03	0.01	0.45	0.11		

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2020

Grafik 2.4
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ponorogo
Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA Kabupaten Ponorogo
Tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2020

E. Sarana Pendidikan Non Formal di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Pada tahun 2021, pendidikan non-formal di Kabupaten Ponorogo sebagian besar di dominasi oleh lembaga Madin, TPA/TPQ, Ponpes, dan urutan selanjutnya disusul dengan Bimbel, Kursus, dan Kejar Paket. Namun demikian, beberapa kecamatan di kabupaten Ponorogo juga masih ada yang minim pendidikan non formalnya, seperti kecamatan Pudak, Slahung, Sooko, dan Ngebel. Sebagian besar lembaga pendidikan non-formal jenis bimbel, kursus dan kejar paket di kecamatan-kecamatan tersebut belum tersedia. Selain itu,

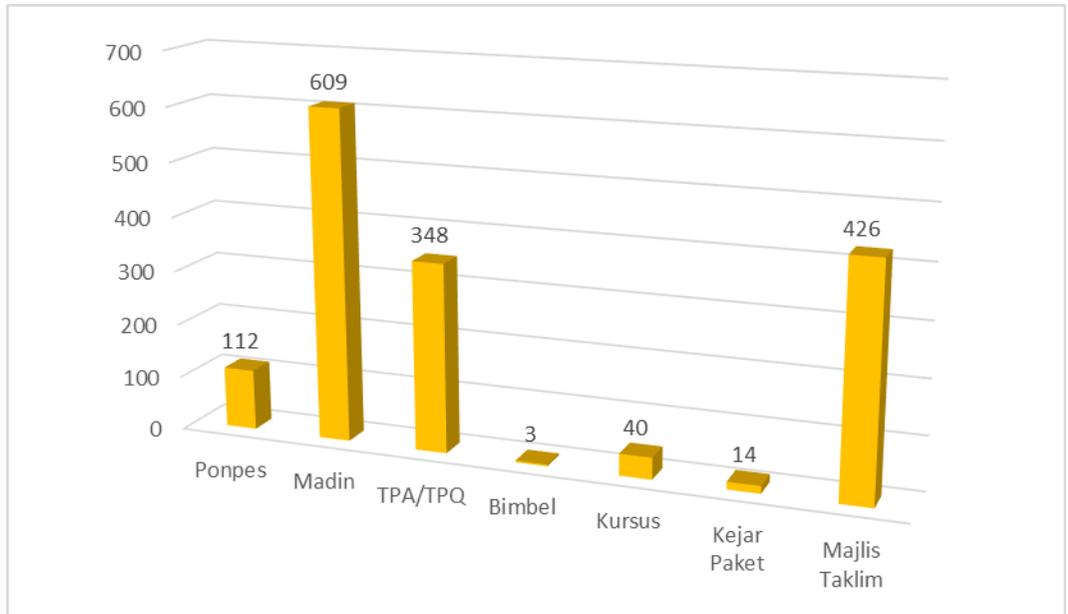
Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo juga berhasil mengidentifikasi data majelis taklim di wilayah ini yang memiliki jumlah cukup banyak. Adapun data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.5
Sarana Pendidikan Non Formal di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

Kecamatan	Sarana Pendidikan Non Formal							Ket.
	Ponpes	Madin	TPA/ TPQ	Bimbel	Kursus	Kejar Paket	Majlis Taklim	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ngrayun	3	43	32	-	1	1	63	
2. Slahung	3	28	1	-	-	-	31	
3. Bungkal	1	30	15	-	-	-	57	
4. Sambit	2	21	31	-	-	-	15	
5. Sawoo	2	19	53	-	1	-	2	
6. Sooko	1	13	4	-	0	-	4	
7. Pudak	0	6	0	-	-	1	4	
8. Pulung	2	33	37	-	1	-	25	
9. Mlarak	11	19	25	-	-	3	11	
10. Siman	7	19	15	-	2	1	11	
11. Jetis	5	19	22	-	2	1	2	
12. Balong	5	34	13	-	1	-	21	
13. Kauman	1	23	6	-	1	1	15	
14. Jambon	5	26	6	-	-	1	29	
15. Badegan	2	16	27	-	-	-	17	
16. Sampung	3	24	7	-	-	1	13	
17. Sukorejo	10	65	3	-	-	-	35	
18. Ponorogo	24	56	21	3	23	2	19	
19. Babadan	14	52	8	-	4	1	25	
20. Jenangan	11	48	18	-	4	1	4	
21. Ngebel	0	15	4	-	-	-	23	
Jumlah/Total 2021	112	609	348	3	40	14	426	

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021/Seksi Pontren Kemenag Ponorogo
2021

Grafik 2.5
Sarana Pendidikan Non Formal
di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: *Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021/ Seksi Pontren Kemenag Ponorogo 2021*

F. Sarana PAUD dan Jumlah Anak yang Memperoleh PAUD di Daerah Terpencil/Perbatasan/Tertinggal Tahun 2021

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, jumlah PAUD yang terdaftar pada instansi tersebut sebanyak 749 sekolah yang tersebar di 21 Kecamatan. Sementara itu, terdapat 10.060 siswa laki-laki yang terdaftar sebagai siswa di PAUD dan 9.512 siswi perempuan yang terdaftar di PAUD. Angka ini menunjukkan bahwa perkembangan PAUD dan jumlah anak yang memperoleh pendidikan PAUD cukup besar sehingga pendidikan di tingkat usia dini sangat diperhatikan oleh masyarakat Ponorogo. Berikut di bawah ini data tabel dan grafik yang dapat dilihat:

Tabel 2.6
Sarana PAUD dan Jumlah Anak yang Memperoleh PAUD di Daerah
Terpencil/Perbatasan/Tertinggal Tahun 2021

No	Kecamatan	Sarana PAUD dan Jumlah Anak yang Memperoleh PAUD di Daerah Terpencil/Perbatasan/Tertinggal		
		Jumlah PAUD	Jumlah Anak	
			L	P
1	Babadan	41	426	430
2	Badegan	30	409	349
3	Balong	43	538	474
4	Bungkal	36	422	441
5	Jambon	26	403	374
6	Jenangan	45	574	538
7	Jetis	24	245	267
8	Kauman	35	554	543
9	Mlarak	27	552	499
10	Ngebel	19	196	200
11	Ngrayun	48	563	509
12	Ponorogo	73	1213	1189
13	Pudak	11	136	141
14	Pulung	35	513	468
15	Sambit	37	437	419
16	Sampung	37	452	413
17	Sawoo	34	555	536
18	Siman	37	391	400
19	Slahung	50	592	551
20	Sooko	19	238	219
21	Sukorejo	42	651	552
Jumlah/Total		749	10060	9512

Sumber: *Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021*

Grafik 2.6
Sarana PAUD dan Jumlah Anak yang Memperoleh PAUD di Daerah
Terpencil/Perbatasan/Tertinggal Tahun 2021



Sumber: *Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021*

G. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Mengenai Jumlah Sekolah Luar Biasa yang ada di Ponorogo, masih sama secara jumlahnya seperti pada tahun 2019, baik yang berbasis Swasta maupun negeri. Data di tahun 2021 belum tersedia, sehingga masih memakai data di tahun 2020. Jumlah SLB terbanyak di tingkat swasta masih diduduki oleh Kecamatan Ponorogo kemudian diikuti oleh Kecamatan Sambit, sedangkan untuk SLB negeri hanya ada di dua kecamatan, yakni Badegan dan Jenangan. Berikut data terkini Tabel SLB yang ada di Kabupaten Ponorogo:

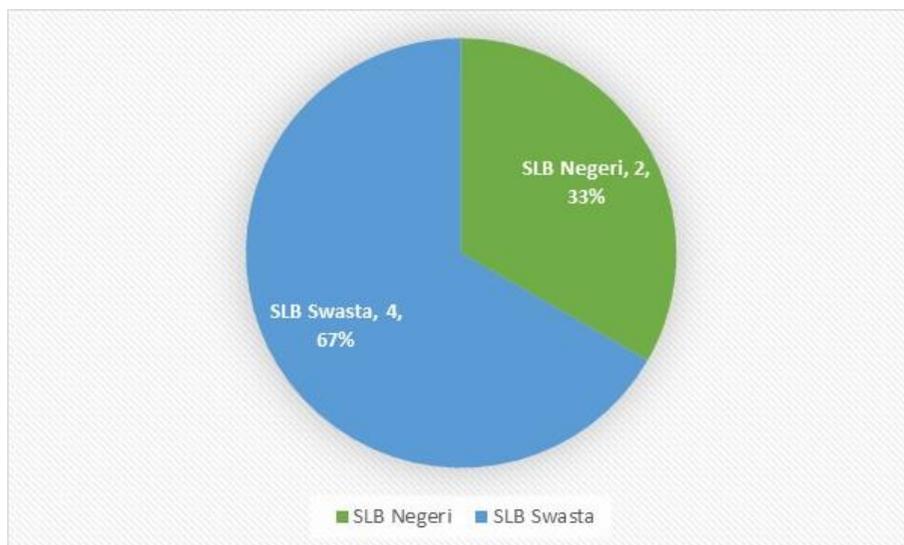
Tabel 2.7
Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta
di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Sekolah Luarbiasa (SLB)		Keterangan
	Negeri	Swasta	
1	2	3	4
1. Ngrayun			
2. Slahung			
3. Bungkal			
4. Sambit		1	
5. Sawoo			
6. Sooko			
7. Pudak			
8. Pulung			
9. Mlarak			
10. Siman			
11. Jetis			
12. Balong			
13. Kauman			
14. Jambon			
15. Badegan	1		
16. Sampung			
17. Sukorejo			
18. Ponorogo		3	
19. Babadan			
20. Jenangan	1		
21. Ngebel			
Jumlah/Total 2020	2	4	

Sumber: *Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2020*

Grafik 2.7

Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: *Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2020*

H. Jumlah Guru Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Jumlah Guru Negeri yang telah memperoleh Sertifikasi terbagi menjadi dua bagian, guru di bawah naungan dinas pendidikan kabupaten Ponorogo diantaranya memiliki data guru SD dan SLTP, sementara guru di bawah naungan kementerian agama kabupaten Ponorogo telah mengidentifikasi data guru dari tingkat MI, MTs dan MA. Untuk sertifikasi guru di bawah Dinas Pendidikan jumlah tertinggi sertifikasi Guru Negeri diduduki oleh Kecamatan Ponorogo, sedangkan yang terkecil dari kecamatan Pudak. Sertifikasi Guru Negeri tertinggi guru di bawah Kementerian Agama ditempati oleh Kecamatan Siman, sedangkan Jumlah terkecil diduduki oleh Kecamatan Pudak. Sayangnya data guru tersertifikasi di tingkat SLTA di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tidak terpilah.

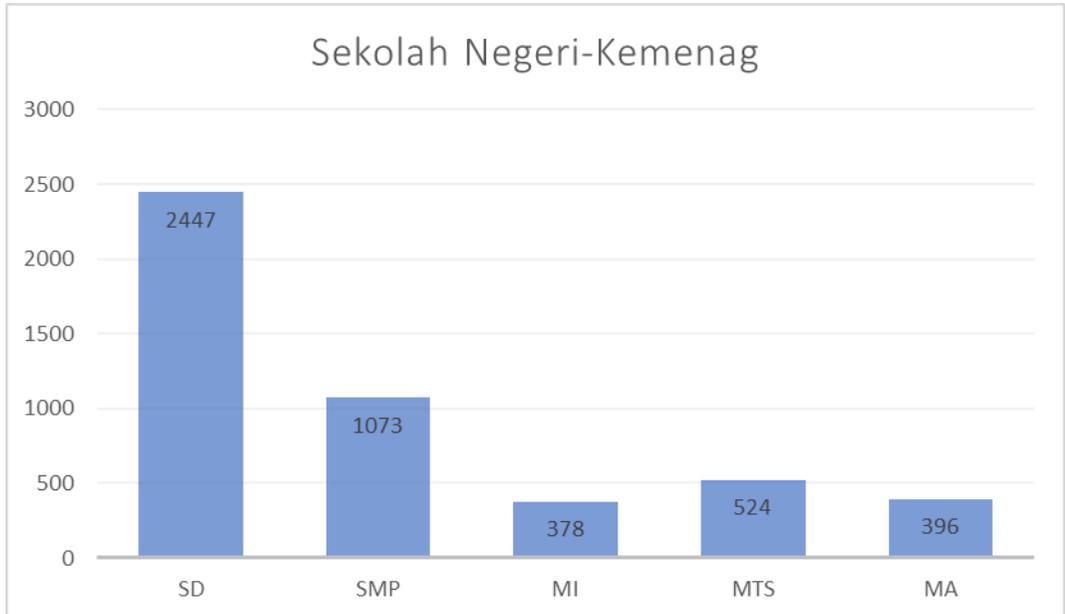
Tabel 2.8

Jumlah Guru Negeri Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Guru yang Telah Memperoleh Sertifikasi											
	Negeri						Kemenag					
	SD		SLTP		SLTA		MI		MTs		MA	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ngrayun	103	74	48	15			3		35	8	5	5
Slahung	73	103	19	23			6	9	28	25	21	19
Bungkal	52	80	21	24			2	3	9	15	11	4
Sambit	37	54	27	25			6	12	10	4	4	1
Sawoo	76	86	30	31			4	5	14	6	10	4
Sooko	31	38	9	14			-	1	5	6	-	-
Pudak	22	15	4	6			-	-	-	-	-	-
Pulung	79	71	28	33			14	10	8	5	1	3
Mlarak	33	73	8	15			5	10	33	32	39	10
Siman	23	56	7	15			17	44	17	27	21	34
Jetis	38	58	21	24			6	14	10	24	15	28
Balong	56	85	27	28			-	8	20	15	9	6
Kauman	45	75	30	33			5	6	10	8	10	9
Jambon	32	49	11	18			7	12	2	2	5	2
Badegan	33	43	22	30			5	5	2	5	-	-
Sampung	60	69	17	25			5	3	9	2	7	-
Sukorejo	63	96	15	25			10	12	6	6	2	1
Ponorogo	51	103	84	140			2	18	25	33	43	19
Babadan	38	80	20	28			20	37	14	11	9	10
Jenangan	61	79	19	25			22	30	16	14	14	9
Ngebel	25	29	20	9			-	-	3	-	4	2
Jumlah 2021	1031	1416	487	586	0	0	139	239	276	248	230	166

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021 dan Kemenag Kab. Ponorogo 2021

Grafik 2.8
Jumlah Guru Negeri Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2021 dan Kemenag Kab. Ponorogo 2021

I. Jumlah Sekolah Inklusi (ABK, Anak Cerdas dan Berkat) dan Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Untuk data Sekolah Inklusi yang ada di Ponorogo dengan Jumlah Ruang kelas yang tersedia cukup proporsional. Jumlah Sekolah Inklusi di Ponorogo tidak cukup banyak serta tidak tersebar secara merata. Jumlah Sekolah Inklusi untuk kalangan SD terbanyak ditempati oleh kecamatan Balong sebanyak 2 kelas diikuti oleh Jambon, Ponorogo dan Babadan. Sedangkan untuk Jumlah ruang kelasnya bisa 2 hingga 4 kali lipat dari sekolahnya. Artinya peminat Sekolah Inklusi cukup banyak di tempat tersebut. Belum tersedia data terbaru di tahun 2021, sehingga masih memakai data di tahun 2020.

Tabel 2.9

Jumlah Sekolah Inklusi (ABK, Anak Cerdas dan Berkat) dan Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

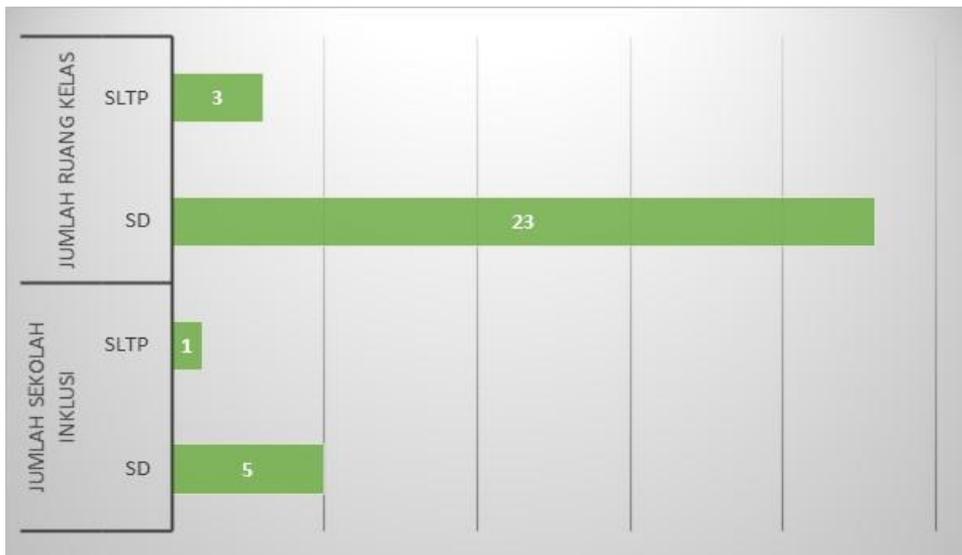
Kecamatan	Jumlah Sekolah Inklusi						Ket.
	Jumlah Sekolah Inklusi			Jumlah Ruang Kelas			
	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ngrayun							
2. Slahung							
3. Bungkal							
4. Sambit							
5. Sawoo							
6. Sooko							
7. Pudak							
8. Pulung							
9. Mlarak							
10. Siman							
11. Jetis							
12. Balong	2			10			
13. Kauman							
14. Jambon	1	1		6	3		
15. Badegan							
16. Sampung							
17. Sukorejo							
18. Ponorogo	1			2			
19. Babadan	1			5			
20. Jenangan							

21. Ngebel							
Jumlah/Total 2020	5	1	0	23	3		

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2020

Grafik 2.9

Jumlah Sekolah Inklusi (ABK, Anak Cerdas dan Berkat) dan Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo 2020

J. Jumlah Madrasah Diniyah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Berdasarkan jumlah Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten tahun 2022, Kecamatan Sukorejo menempati Kecamatan tertinggi. Sedangkan Jumlah terkecilnya ditempati oleh kecamatan Pudak dan Sooko. Berikut daftar tabelnya:

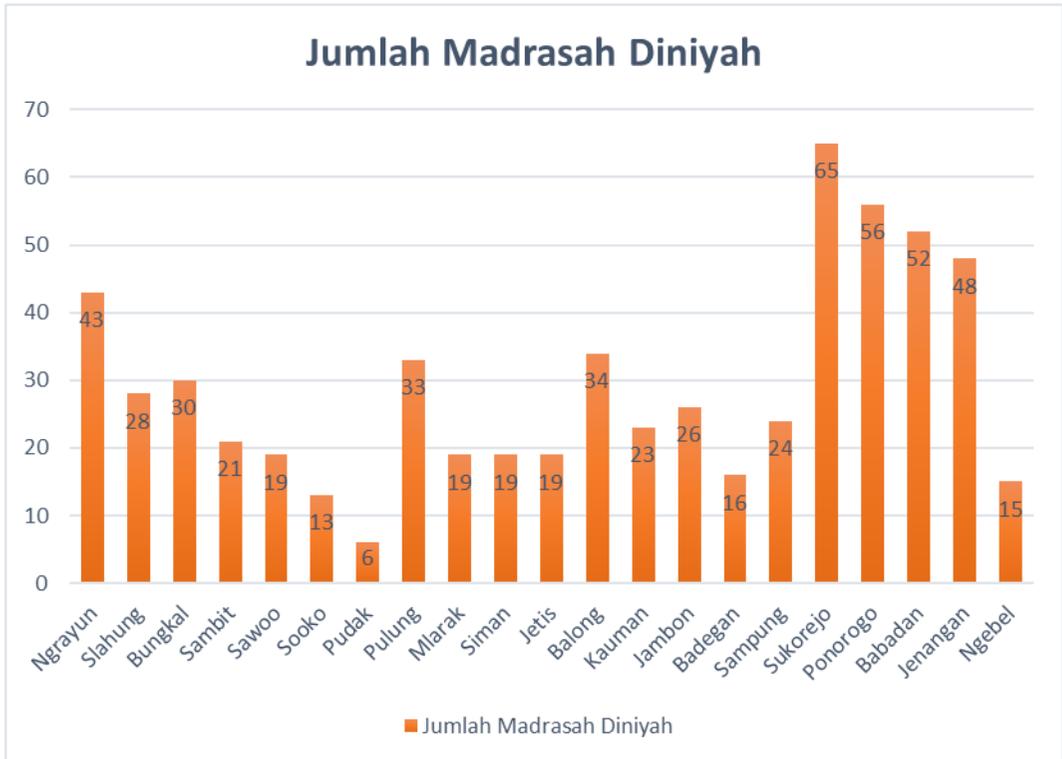
Tabel 2.10**Jumlah Madrasah Diniyah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021**

Kecamatan	Jumlah Madrasah Diniyah
1	
1. Ngrayun	43
2. Slahung	28
3. Bungkal	30
4. Sambit	21
5. Sawoo	19
6. Sooko	13
7. Pudak	6
8. Pulung	33
9. Mlarak	19
10. Siman	19
11. Jetis	19
12. Balong	34
13. Kauman	23
14. Jambon	26
15. Badegan	16
16. Sampung	24
17. Sukorejo	65
18. Ponorogo	56
19. Babadan	52
20. Jenangan	48
21. Ngebel	15
Jumlah/Total 2021	609

Sumber: Kemenag Kab. Ponorogo 2021

Grafik 2.10

Jumlah Madrasah Diniyah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: Kemenag Kab. Ponorogo 2021

K. Jumlah Madrasah Lain (RA, BA, TA) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

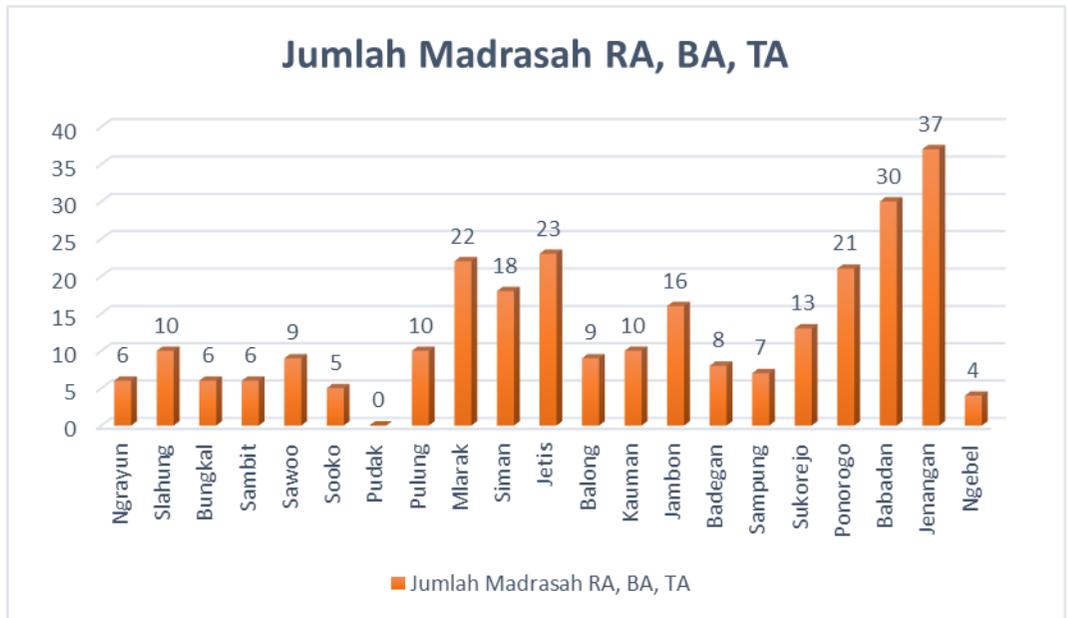
Dibandingkan pada tahun sebelumnya, 2020 jumlah Madrasah Raudlatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), dan Taman Athfal (TA) sebanyak 263, meningkat menjadi 270 di tahun 2021. Pendidikan ini merupakan perpaduan pendidikan anak usia dini (playgroup) dan taman kanak-kanak. Hanya saja bedanya, RA di bawah naungan Kemenag., sementara BA dan TA diprakarsai oleh 2 kekuatan pilar agama Islam di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Jenangan merupakan kecamatan dengan jumlah madrasah RA, BA, dan TA terbanyak. Sedangkan kecamatan yang masih sangat minim dan hampir tidak ditemukan RA, BA, TA di desa-desanya adalah Kecamatan Pudak. Jenangan memiliki jumlah RA, BA, dan TA sebanyak 37 Madrasah, dan Pudak sama sekali tidak memiliki Madrasah tersebut atau sama dengan 0 (nol). Data terkait disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.11
Jumlah Madrasah Lain (RA, BA, TA) di Kabupaten Ponorogo Tahun
2021

Kecamatan	Jumlah Madrasah Lain (RA BA TA)
1. Ngrayun	6
2. Slahung	10
3. Bungkal	6
4. Sambit	6
5. Sawoo	9
6. Sooko	5
7. Pudak	0
8. Pulung	10
9. Mlarak	22
10. Siman	18
11. Jetis	23
12. Balong	9
13. Kauman	10
14. Jambon	16
15. Badegan	8
16. Sampung	7
17. Sukorejo	13
18. Ponorogo	21
19. Babadan	30
20. Jenangan	37
21. Ngebel	4
Jumlah/Total 2020	270

Sumber: Kemenag Kab. Ponorogo 2021

Grafik 2.11
Jumlah Madrasah Lain (RA, BA, TA) di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: Kemenag Kab. Ponorogo 2021

L. Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Pada dasarnya, di berbagai institusi, budaya untuk merekrut pegawai laki-laki masih selalu menjadi prioritas dibandingkan pegawai perempuan, tidak terkecuali di perguruan tinggi. Hal ini kemudian yang menyebabkan jumlah dosen laki-laki persentasenya lebih besar dibandingkan perempuan. Meskipun saat ini rekrutmen dosen sudah menggunakan indikator keahlian, namun tidak menutup kemungkinan faktor penentu lainnya menyebabkan memilih dosen laki-laki lebih diminati dibandingkan dosen perempuan. Di kabupaten Ponorogo pada tahun 2021, prosentase dosen laki-laki mencapai 60% dan perempuan 40%. Prosentase dosen laki-laki menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya, 2020 yakni 61%, sementara prosentase dosen perempuan bertambah dari tahun sebelumnya 39%. Data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini:

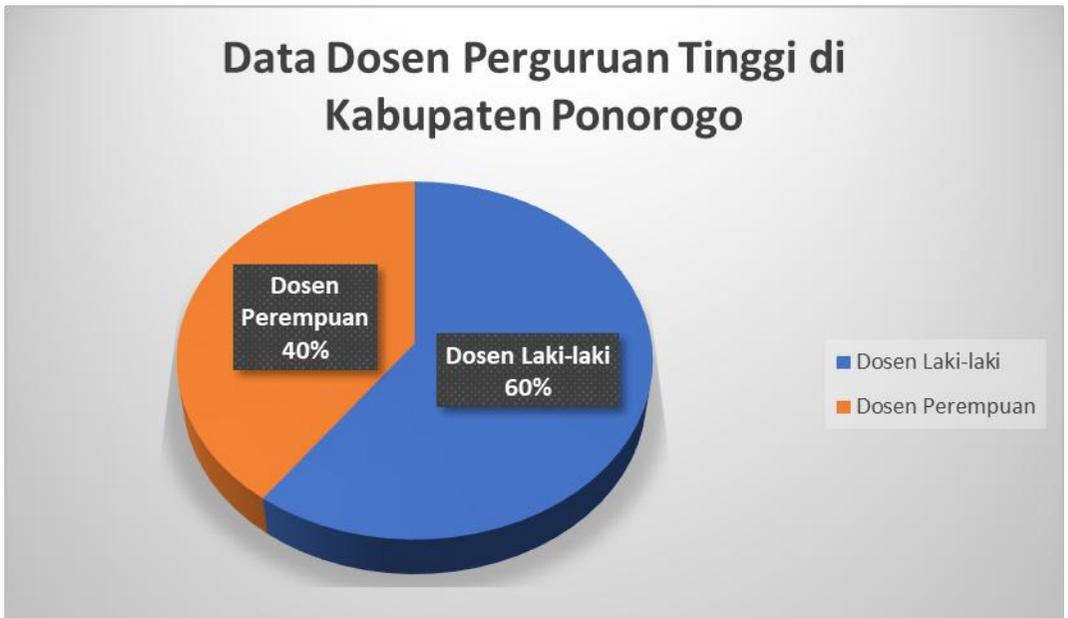
Tabel 2.12
Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Dosen		Jumlah Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	132	155	287
2	Universitas Muhammadiyah (UNMUH)	118	93	211
3	Universitas Darussalam (UNIDA)*	311	111	422
4	Universitas Merdeka (UNMER)*	27	13	40
5	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI)	33	18	51
6	Institut Riyadlatul Mujtahidin (IAIRM)	23	17	40
7	STKIP PGRI	14	14	28
8	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buana Husada	2	13	15
9	Akademi Kebidanan Harapan Mulya	2	5	7
10	Polkesma D3 Prodi Keperawatan Pemkab Ponorogo	4	4	8
Jumlah		666	443	1109

*data tidak terpilah/memakai data tahun 2020

Sumber: *Perguruan Tinggi di Kab. Ponorogo 2021*

Grafik 2.12
Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021



Sumber: *Perguruan Tinggi di Kab. Ponorogo 2021*

M. Jumlah Pimpinan Perguruan Tinggi di Ponorogo Tahun 2021

Masih menjadi budaya umum bahwa sebagian besar jajaran pimpinan lebih banyak di dominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari persentase jumlah pimpinan di perguruan tinggi. Dilihat dari jenis jabatannya, diantaranya ada rektor/wakil rektor, dekanat, serta jajaran ketua program studi. Hampir laki-laki mendominasi struktur jabatan tersebut dibandingkan perempuan. Ketimpangan tertinggi terletak pada jabatan dekanat, kemudian disusul oleh jabatan rektor/wakil rektor. Dan jabatan yang terlihat lebih landai terletak pada ketua program studi. Data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.13
Jumlah Pimpinan Perguruan Tinggi di Ponorogo Tahun 2021

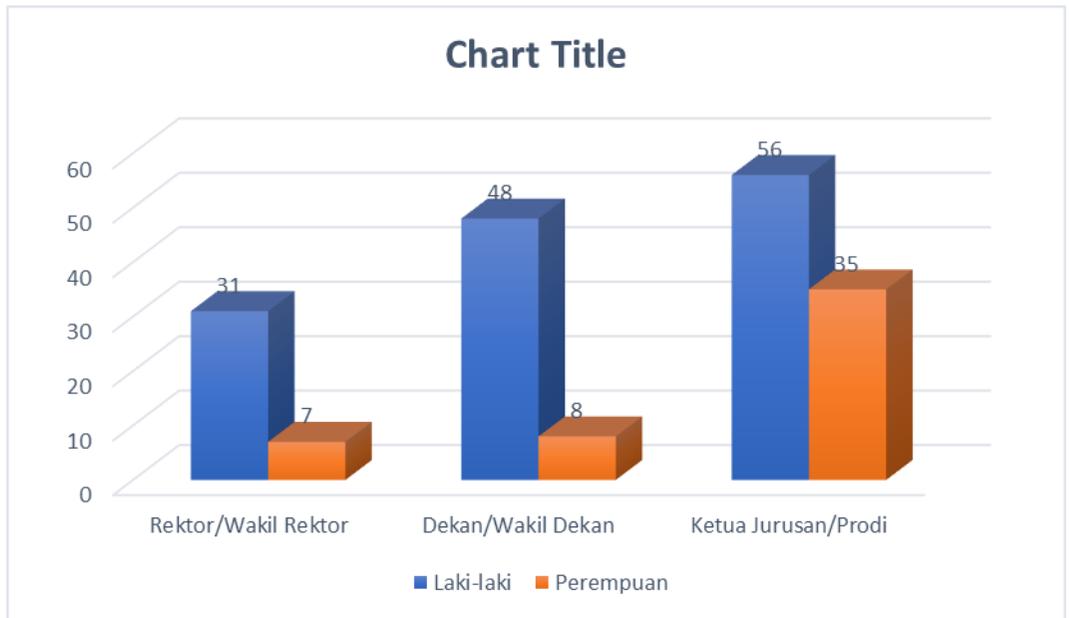
No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Pimpinan						Jumlah Total
		Rektor/ Wakil Rektor		Dekan/ Wakil Dekan		Ketua Jurusan/ Prodi		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	3	1	11	4	15	9	43
2.	Universitas Muhammadiyah (UNMUH)	4	0	11	3	11	13	42
3.	Universitas Darussalam (UNIDA)*	4	0	14	0	17	0	35
4.	Universitas Merdeka (UNMER)*	4	0	3	0	4	2	13
5.	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI)	4	0	3	0	2	6	15
6.	Institut Riyadlatul Mujtahidin (IAIRM)	3	0	5	1	5	0	14
7.	STKIP PGRI	4	0	0	0	1	3	8
8.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buana Husada	0	4	0	0	0	2	3
9.	Akademi Kebidanan Harapan Mulya	1	2	0	0	0	0	3
10.	Polkesma D3 Keperawatan Pemkab Ponorogo	4	0	1	0	1	0	6
Jumlah		31	7	48	8	56	35	

*data tidak terpilah/memakai data tahun 2020

Sumber: *Perguruan Tinggi di Ponorogo 2021*

Grafik 2.13

Jumlah Pimpinan Perguruan Tinggi di Ponorogo Tahun 2021



Sumber: *Perguruan Tinggi di Ponorogo 2021*

N. Jumlah Penerima Beasiswa Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Partisipasi mahasiswa di perguruan tinggi sejauh ini hampir menunjukkan angka yang setara antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Bahkan pada kondisi tertentu perempuan memperlihatkan partisipasi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Misalnya pada data penerima beasiswa yang berhasil digali oleh dinas pendidikan Ponorogo, hampir pada kondisi ini mahasiswa perempuan lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Yang mana mahasiswa perempuan yang menerima beasiswa mencapai 76%, sedangkan laki-laki hanya sebesar 24%. Namun sayangnya belum diketahui secara detail faktor penentu yang mempengaruhi angka penerimaan beasiswa perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Adapun data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.14
Jumlah Penerima Beasiswa Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No	Nama Perguruan Tinggi	Penerima Beasiswa		Jumlah Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	234	1054	1288
2.	Universitas Muhammadiyah (UNMUH)	99	244	343
3.	Universitas Darussalam (UNIDA)*	74	0	74
4.	Universitas Merdeka (UNMER)*	0	0	0
5.	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI)	10	23	33
6.	Institut Riyadlatul Mujtahidin (IAIRM)	17	13	30
7.	STKIP PGRI	6	21	27
8.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buana Husada	0	5	5
9.	Akademi Kebidanan Harapan Mulya	0	16	16
10.	Polkesma D3 Prodi Keperawatan Pemkab Ponorogo	10	13	23
Jumlah		450	1.389	1.839

*data tidak terpilah/memakai data tahun 2020

Sumber: *Perguruan Tinggi di Ponorogo 2021*

Grafik 2.14

Jumlah Penerima Beasiswa Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: *Perguruan Tinggi di Ponorogo 2021*

BAB III KESEHATAN

A. Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Jumlah kematian ibu diharapkan semakin lama semakin nihil. Kematian ibu saat melahirkan adalah bukti rendahnya pelayanan kesehatan ibu hamil di suatu kabupaten. Tidak hanya bukti rendahnya pelayanan kesehatan, tetapi juga menunjukkan bahwa perencanaan masa depan untuk generasi berprestasi sangat rendah. Di antara salah satu generasi yang berprestasi adalah kesehatan dari bayi sejak dalam kandungan. Kesehatan ibu, kesehatan janin serta keselamatan ibu saat melahirkan serta keselamatan bayi adalah aspek terpenting dari pelayanan kesehatan pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Ponorogo.

WHO (*World Health Organization*) menyebut kematian ibu dengan istilah *maternal death* (kematian ibu). Kematian ibu maksudnya adalah kematian ibu hamil yang terjadi saat proses kehamilan atau selama 42 hari mulai terminasi kehamilan. Istilah ini tidak dalam pengertian meninggal akibat kecelakaan seperti tertabrak sepeda motor, jatuh atau yang lainnya. Banyak hal yang menyebabkan kematian ibu. Di antaranya adalah karena pendarahan, tekanan darah tinggi, komplikasi akibat persalinan atau karena infeksi. Berbagai hal yang terjadi dan sering didengar adalah akibat tekanan darah tinggi dan pendarahan. Berbagai penyakit tersebut sebenarnya adalah penyakit yang bisa dikontrol dan dicegah. Konsultasi yang kontinu dengan tenaga medis dapat memperkecil kematian ibu apabila terjadi kasus-kasus yang dimaksud. Pada jaman dahulu, kematian ibu adalah bagian dari perjuangan ibu yang dianggap lumrah. Janji-janji agama sebagai mati syahid akhirat misalnya adalah bagian yang menguatkan posisi ibu. Minimal sejak abad ke-17 perbincangan kematian ibu mulai diperbincangkan dalam dunia medis. Abad ke-20 telah mendorong WHO untuk serta organisasi-organisasi yang konsen dengan kematian ibu, melihat perlu adanya upaya sistematis dalam mencegah tingginya kematian ibu. Hingga saat ini, usaha untuk menurunkan bahkan menihilkan kematian ibu akibat penyakit atau kesehatan terus dilakukan. Dokter atau bidan telan mencatat perkembangan ibu hamil dengan baik dalam buku khusus.

Data dalam tabel berikut menunjukkan bahwa kematian ibu di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 menyalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Jika tahun 2020 angka tertinggi kematian ibu per kecamatan mencapai 3, maka pada tahun 2021 angka kematian ibu ada yang mencapai 4, yaitu kecamatan Pulung, Babadan dan Jenangan termasuk rendah.

Di antara hal-hal atau tindakan yang dapat mengurangi angka kematian ibu adalah seperti pertama, memberikan vitamin, melakukan pamantauan berkala atas faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah kehamilan atau komplikasi kehamilan. Ibu bersama dokter kandungan atau bidan dapat

melakukan ini. Syarat mutlak dari masalah ini adalah konsultasi dan komunikasi dengan tenaga kesehatan. Kedua, melakukan perencanaan keluarga yang baik. Perencanaan keluarga mencakup berapa jumlah anak yang diinginkan, kesehatan ibu, pengaturan kehamilan, ekonomi keluarga dan alat-alat kontrasepsi yang tepat untuk pengaturan kehamilan. Komunikasi dengan tokoh agama berkaitan dengan pemahaman keagamaan dan lain-lain serta komunikasi dengan tenaga kesehatan dalam usaha sarana atau fasilitas yang digunakan dalam perencanaan kehamilan. Ketiga, memilih tenaga kesehatan yang tepat untuk persalinan. Tenaga kesehatan yang berpengalaman, memiliki pengetahuan memadai, kemampuan menggunakan alat-alat bantu persalinan yang tepat adalah diperlukan. Dengan demikian kematian ibu akibat persalinan dapat dikurangi. Tenaga persalinan tradisional dapat pula digunakan untuk membantu persalinan namun tetap dibawah kontrol dan pengawasan tenaga medis profesional. Tenaga bantu persalinan tradisional harus pula mendapat pengetahuan tentang proses persalinan yang steril, baik dan tidak membahayakan. Bagaimanapun tenaga bantu tradisional telah ikut berjasa dalam membantu persalinan, tidak saja dalam sejarah perkembangan manusia tetapi lebih bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil, suatu daerah yang barangkali sangat jauh dari tenaga bantu modern seperti bidan atau dokter. Keempat, adanya kontrol pasca persalinan mulai dari bagaimana cara menyusui yang benar, kewaspadaan ibu dalam melihat tanda-tanda bahaya dari bayi dan lain-lain.

Berbagai hal di atas memungkinkan angka kematian ibu dapat dikontrol. Adagium ibu yang sehat akan membentuk anak yang sehat adalah benar, sebagaimana ibu yang jahat akan menurunkan anak yang jahat pula. Islam sangat menganjurkan agar memilih perempuan yang baik untuk dijadikan ibu. Istri yang baik akan menjadi ibu yang baik pula. Ibu yang baik dengan demikian akan memunculkan keturunan yang baik pula. Untuk mewujudkan angka kematian ibu yang nihil, dimunculkan oleh masyarakat suatu program "Gerakan Sayang Ibu" (GSI). Gerakan Sayang Ibu berkeinginan untuk menjadikan ibu sehat, selamat dan memberi berbagai bantuan kepada ibu hamil yang sedang membutuhkan.

Tabel 3.1
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No	Kecamatan	Usia	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ngrayun		0	
2	Slahung		2	
3	Bungkal		3	
4	Sambit		2	
5	Sawoo		2	
6	Sooko		0	
7	Pudak		0	
8	Pulung		4	
9	Mlarak		1	
10	Siman		3	
11	Jetis		1	
12	Balong		0	
13	Kauman		1	
14	Jambon		3	
15	Badegan		0	
16	Sampung		1	
17	Sukorejo		1	
18	Ponorogo		3	
19	Babadan		4	
20	Jenangan		4	
21	Ngebel		0	
	Jumlah/Total 2021		35	
	Jumlah/Total 2020		11	
	Jumlah/Total 2018		9	
	Jumlah/Total 2017		18	
	Jumlah/Total 2016		12	
	Jumlah/Total 2015		10	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2021 adalah 35 kasus. Banyak kecamatan di tahun ini mengalami nihil kematian ibu. Ada 6 kecamatan yang nihil di antaranya adalah Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak, Balong, Badegan, dan Ngebel. Angka nihil kematian ibu tahun 2021 juga mengalami penurunan, dari yang sebelumnya berjumlah 11 kecamatan yang menunjukkan angka nihil, tahun ini menjadi 6 kecamatan.

Dalam mengurangi penurunan angka kematian ibu, pemerintah dapat menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi. Di antara Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki konsen dalam bidang penurunan angka kematian ibu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). PKBI telah ada hampir di seluruh Indonesia.

Belum ada data dari penyebab kenapa Kecamatan Pulung, Babadan dan Jenangan memiliki kematian ibu tinggi yaitu 4 kasus. Data-data yang dihimpun belum menunjukkan alasan kematian ibu, apakah karena penyakit komplikasi, darah tinggi atau karena yang lain, atau karena pelayanan kesehatan yang bermasalah seperti kurang cepatnya akses pelayanan darurat dalam waktu cepat atau karena yang lain atau karena kasus-kasus yang aksidental seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Jika yang terakhir ini yang terjadi maka semuanya di bawah kendali ibu sendiri. Hal ini berbeda apabila faktor kematiannya adalah karena pendarahan parah, infeksi, partus lama atau macet, aborsi yang tidak aman atau karena tekanan darah tinggi. Semua hal ini bisa dipantau, dikontrol, dikendalikan dan dapat diusahakan untuk diselamatkan. Survei atau penelitian tentang kematian ibu perlu dilakukan agar kebijakan pemerintah berbasis analisis ilmiah yang tepat, bukan menduga-duga atau hanya asumsi. Kerjasama dengan LSM atau perguruan Tinggi diperlukan.

B. Penyebab Kematian ibu karena Hamil, Melahirkan dan Nifas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Data di bawah ini menunjukkan bahwa kematian ibu akibat kehamilan, melahirkan dan nifas di Kabupaten Ponorogo. Tiga macam penyebab kematian ini adalah suatu kematian yang bersifat *ikhtiyari*, maksudnya adalah bahwa manusia mampu untuk mengendalikannya melalui ikhtiyar atau usaha manusia. Tiga sebab kematian ibu tersebut adalah kematian yang lumrah di masa lalu sebelum abad ke-17, namun menjadi tidak lumrah untuk masa saat ini, saat di mana perkembangan penelitian kedokteran dan kesehatan telah maju. Sebagai suatu ikhtiyar manusiawi, berbagai hal yang perlu diketahui adalah seperti telah diuraikan dalam masalah kematian ibu adalah tentang pendarahan saat persalinan, infeksi kehamilan, hipertensi, komplikasi ketika nifas atau penyakit-penyakit yang menyertai dan telah ada pada ibu hamil sebelum kehamilan seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain.

Kematian ibu di sisi lain juga bisa disebabkan oleh kehamilan di bawah umur, jarak kehamilan yang terlalu dekat atau karena penyebab-penyebab lain seperti tidak adanya akses cepat di saat kondisi darurat. Apa yang disebut dengan sebab kematian karena hamil adalah multidimensional, demikian pula tentang penyebab kematian karena bersalin dan nifas. Ada banyak faktor yang memengaruhinya. Walau demikian, data dalam tabel menunjukkan bahwa kematian ibu karena hamil cenderung lebih tinggi di banding karena dua hal lainnya yaitu karena bersalin atau karena nifas. Data berikut menunjukkan

sebab-sebab kematian yang dijelaskan secara terpisah untuk berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Data ini memang tidak menyebutkan karena darah tinggi, karena pendarahan atau karena yang lain, namun data menunjukkan banyak kecamatan di Ponorogo telah mampu mengurangi kematian ibu dari berbagai penyakit tersebut. Kurang lebih terdapat 5 kecamatan yang nihil kematian baik dari sebab hamil, bersalin, maupun nifas, yaitu kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak, Balong, dan Ngebel.

Jumlah diatas menunjukkan angka nihil yang menurun, dari tahun 2020 terdapat 12 kecamatan yang menunjukkan angka kematian nihil, pada tahun 2021 angka nihil kematian hanya menyentuh 5 kecamatan. Artinya, jumlah kematian ibu pada tahun 2021 yang disebabkan oleh kehamilan, bersalin dan nifas mengalami kenaikan.

Tabel 3.2
Penyebab Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan, dan Nifas di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Penyebab Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas			Keterangan
		Hamil	Bersalin	Nifas	
1	Ngrayun	-	-	-	
2	Slahung	2	-	-	
3	Bungkal	2	-	1	
4	Sambit	-	-	2	
5	Sawoo	-	-	2	
6	Sooko	-	-	-	
7	Pudak	-	-	-	
8	Pulung	2			
9	Mlarak	-	-	1	
10	Siman	-	-	3	
11	Jetis	-	-	1	
12	Balong	-	-	-	
13	Kauman	1	-	-	
14	Jambon	3	-	-	
15	Badegan	-	-	1	
16	Sampung	-	-	1	
17	Sukorejo	1	-	-	
18	Ponorogo	2	-	1	
19	Babadan	3	-	1	
20	Jenangan	2	-	2	
21	Ngebel	-	-	-	
	Jumlah/Total 2021	18	-	17	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo

Data terdapat di atas memperlihatkan bahwa kematian akibat hamil adalah 18 orang dan kematian akibat nifas adalah 17 orang. Angka ini cukup sinkron dengan data sebelumnya mengenai kematian ibu yang berjumlah 35 orang. Artinya, bahwa kematian ibu pada tahun 2021 disebabkan oleh kehamilan dan nifas.

Data ini justru berbanding terbalik dengan data 2020, dimana sebagian besar kematian ibu tidak disebabkan oleh kehamilan dan nifas. Dimungkinkan bahwa kematian ibu dalam data tahun 2020 adalah kematian ibu bukan karena tiga macam penyakit ini. Sehingga data kematian ibu tidak mesti menunjukkan bahwa kematian tersebut diakibatkan oleh nifas, kehamilan atau bersalin.

Penyebab kematian akibat nifas di antaranya adalah disebabkan oleh pendarahan atau yang biasa disebut dengan istilah *post partum* (pendarahan setelah persalinan). Ini adalah penyebab kematian ibu yang paling banyak. Pendarahan ini biasanya terjadi sehari atau dalam hitungan minggu pasca persalinan. Pendarahan dapat terlihat dari keluarnya darah terus menerus dari vagina. Pembiaran dan tidak adanya penanganan yang baik akan menyebabkan gagalnya fungsi organ tertentu. Pendarahan pasca melahirkan bisa disebabkan oleh otot rahim yang bermasalah seperti tidak berkonstraksi, bisa juga karena rahim pecah, atau juga karena adanya sisa jaringan plasenta dalam rahim. Dokter yang berpengalaman atau tenaga kesehatan yang profesional dapat mendiagnosa sebab-sebab kematian akibat pendarahan setelah melahirkan ini. Pertolongan yang cepat dan diagnosa yang cepat akan mengurangi resiko dari pendarahan tersebut.

C. Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Pertolongan pada persalinan dan layanan nifas dapat dibagi menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah tenaga yang dipersiapkan khusus untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Mereka biasanya bekerja dalam upaya promotif yaitu mempromosikan kesehatan kepada masyarakat agar terbukanya literasi kesehatan terutama dalam hal persalinan dan kesehatan ibu dan janin. Mereka juga bekerja untuk upaya-upaya preventif yaitu pencegahan agar tidak terjadi suatu penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat. Di pihak lain, tenaga kesehatan juga bersifat rehabilitative yaitu penyembuhan masyarakat dari suatu penyakit tertentu. Mereka, dalam spesifikasi tertentu yang dilagalkan, untuk melakukan tindakan kuratif yaitu pengobatan seperti dokter. Tenaga kesehatan ini telah mendapatkan sertifikat untuk mengadakan kegiatan yang diperlukan. Mereka telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang yang menjadi tanggung jawab mereka. Dengan pengetahuan dan skill mereka tentang persalinan misalnya, persalinan akan berjalan dengan lancar dan terhindar dari resiko persalinan. Seperti tampak dalam data sebelumnya bahwa

kematian akibat persalinan di Kabupaten Ponorogo (untuk semua kecamatan) adalah nihil. Ini adalah prestasi.

Sedangkan non tenaga kesehatan adalah mereka para tenaga kesehatan yang tidak melalui jenjang pendidikan. Kemampuan non tenaga kesehatan biasanya diperoleh melalui turun temurun. Mereka sering disebut sebagai "dukun bayi". Dukun dalam masyarakat tradisional dianggap sebagai orang "ngerti" atau "orang pintar". Jika dukun itu menyangkut kehamilan disebut dukun bayi. Dukun bayi dalam masyarakat tradisional mengawal ibu mengandung mulai awal hingga persalinan. Dukun bayi memposisikan bayi misalnya melalui dipijat di bagian perut ibu untuk agar mudah melahirkan ketika tiba waktunya. Non tenaga kesehatan dibagi menjadi dua, mereka yang telah berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dan telah mendapatkan pelatihan tentang pentingnya kebersihan, alat-alat yang steril serta kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk tindakan lebih lanjut di rumah sakit dan lain-lain. Kelompok lainnya adalah mereka yang belum mendapatkan pelatihan dan belum berkolaborasi dengan tenaga kesehatan. Dengan proses pendidikan masyarakat yang semakin membaik, posisi non tenaga kesehatan kurang mendapat simpati ibu-ibu muda yang berpendidikan. Ibu-ibu yang berpendidikan lebih nyaman dan percaya diri berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Untuk mereka yang memiliki fasilitas justru pergi ke dokter spesialis atau rumah sakit yang dengan fasilitas memadai. Hanya pada waktu-waktu tertentu seseorang pergi ke non tenaga kesehatan karena mendapat informasi atau dorongan dari generasi sebelumnya yang lebih tua. Namun, untuk pertolongan persalinan tenaga kesehatan lebih dipilih. Hal ini terjadi pula di Kabupaten Ponorogo. Data berikut menunjukkannya.

Tabel 3.3
Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Pertolongan dan Layanan Nifas	
		Tenaga Kesehatan	Fasilitas layanan Kesehatan
1	2	3	4
1	Ngrayun	638	623
2	Slahung	620	531
3	Bungkal	431	355
4	Sambit	453	428
5	Sawoo	718	653
6	Sooko	291	237

7	Pudak	92	105
8	Pulung	583	591
9	Mlarak	422	379
10	Siman	457	509
11	Jetis	371	335
12	Balong	533	483
13	Kauman	506	490
14	Jambon	476	475
15	Badegan	353	327
16	Sampung	466	432
17	Sukorejo	612	609
18	Ponorogo	888	802
19	Babadan	718	717
20	Jenangan	632	589
21	Ngebel	244	234
22	Jumlah Tahun 2021	10504	9904
23	Jumlah Tahun 2020	10398	-
24	Jumlah Tahun 2018	10136	-
25	Jumlah Tahun 2017	10338	-
26	Jumlah Tahun 2016	10724	-
27	Jumlah Tahun 2015	10900	-

Sumber: *Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo*

Jumlah persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan di Kabupaten Ponorogo terbilang tinggi yaitu 10.504. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.398. Jumlah ini terbagi dalam berbagai kecamatan. Jumlah terbanyak persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan adalah kecamatan Ponorogo yaitu 888 dan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Pudak dengan jumlah 92.

Perbedaan jumlah persalinan dengan bantuan tenaga medis ditentukan dari jumlah banyaknya proses persalinan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang melahirkan semakin banyak pula pertolongan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dari semua persalinan, tidak ada satupun persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa

hal. *Pertama*, semakin berkurangnya profesi non tenaga kesehatan di masyarakat. Para generasi dari dukun bayi sudah tidak memiliki minat untuk menjalani profesi dukun bayi. Generasi internet lebih menganggap profesi dukun bayi sebagai profesi tradisional yang tidak menjanjikan dari sisi ekonomi dan perbaikan taraf hidup. *Kedua*, dukun bayi sudah kehilangan kepercayaan secara profesionalitas kerja, di mana dunia profesi saat ini ditentukan melalui tahapan pendidikan dan pengajaran serta pelatihan dan bukan dari proses turun temurun dari orang tua. *Ketiga*, dukun bayi hanya mampu memberi pengawalan pada model-model dan ramuan tradisional tetapi tidak mampu memberi perspektif lain secara ilmiah tentang kecerdasan janin, perkembangan janin lain-lain. *Keempat*, generasi belakangan lebih menginginkan suatu konsultasi yang privat, tempat yang nyaman serta menyesuaikan dengan kemampuan ibu hamil, sementara dukun bayi berada dalam rumah biasa dan tidak memiliki ruang konsultasi khusus. Alasan-alasan ini bersifat hipotetik namun dalam beberapa hal bisa dibenarkan.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) ke Sarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Kunjungan ibu hamil ke sarana kesehatan menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang kesehatan, terlebih tentang kesehatan ibu hamil, janin dan keselamatan persalinan. Sarana kesehatan yang dimaksud meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, poliklinik dan polindes. Kesadaran akan kesehatan ibu hamil memberi efek yang beruntun seperti kesehatan janin, terjaminnya gizi dan vitamin untuk janin, masa pertumbuhan janin, kesehatan ibu selama hamil, keselamatan ibu ketika melahirkan, kesehatan ibu pasca melahirkan, perkembangan dan pertumbuhan bayi setelah lahir dan sebagainya. Sarana kesehatan adalah tempat di mana ibu bisa mengkonsultasikan persoalan kehamilan dengan tenaga kesehatan tentang hal-hal yang disebutkan. Tidak hanya berkonsultasi tentang masalah kehamilan, ibu juga mempertanyakan berbagai aspek yang terbaik untuk dirinya dan janin. Kehadiran ibu hamil bisa menjadi sarana konsultatif (sarana konsultasi), informatif (mencari hal-hal yang meragukan ibu atau memilih diantara dua tindakan yang terbaik), solutif (menyelesaikan hal-hal yang terjadi pada ibu maupun janin). Ibu hamil dapat mempertanyakan secara bebas tanpa beban dan tekanan kepada tenaga kesehatan.

Sarana kesehatan yang nyaman dan ramah adalah daya dorong lain bagi kunjungan ibu hamil ke tempat kesehatan tersebut. Dalam bahasa lain, tempat pelayanan kesehatan adalah laksana *home*, tempat nyaman bagi ibu hamil untuk kebahagiaan dirinya. Oleh karena itu, agar sarana kesehatan menjadi daya tarik bagi ibu hamil di antara yang bisa dilakukan adalah pertama, menjadikan tempat sarana kesehatan sebagai tempat yang bersih, aman dan nyaman. Dengan tempat yang seperti ini, sarana kesehatan akan menjadi

tempat yang “betah” apabila seseorang sedang antri dalam pelayanan kesehatan. Kedua, petugas kesehatan yang melayani masyarakat di sarana kesehatan ramah, melayani, tanggap terhadap keluhan masyarakat (ibu hamil) serta responsif terhadap kendala yang dihadapi oleh ibu hamil. Keramahan petugas kesehatan memberi sumbangan sangat berarti bagi kesehatan seseorang dan psikologi ibu. Ketiga, tersedianya vitamin dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh ibu hamil dengan kualitas baik. Ketidaktersediaan apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil, ketidakramahan petugas kesehatan adalah bagian dari penentu kuantitas kunjungan ibu hamil ke sarana kesehatan.

Untuk menjaga kesehatan ibu baik dalam masa hamil, kunjungan ibu hamil dapat disingkat menjadi K1, K2, K3, K4. Arti dari “K” adalah kunjungan. Kunjungan ibu hamil ini berfungsi untuk menjaga agar terwujud kesehatan ibu saat kehamilan, saat persalinan dan nifas serta mewujudkan bayi yang sehat. Kunjungan juga berfungsi untuk mengontrol berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan telah terjadi seperti resiko-resiko hamil. Kunjungan bermanfaat pula untuk merendahkan morbiditas, mortalitas ibu serta perinatal.

Tabel 3.4
Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) Ke Sarana Kesehatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Tempat Pelayanan Kesehatan Masyarakat						Kunjungan Ibu Hamil	
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Poliklinik	Polindes	K1	K4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Badegan	-	1	-	-	-	-	753	716
2	Jambon	-	2	-	-	-	-	586	505
3	Sampung	-	1	-	-	-	-	430	388
4	Sukorejo	-	2	-	-	-	-	479	426
5	Jenangan	-	2	-	-	-	-	743	635
6	Balong	-	1	-	-	-	-	303	249
7	Slahung	-	1	-	-	-	-	120	93
8	Ngrayun	-	2	-	-	-	-	634	588
9	Bungkal	-	1	-	-	-	-	427	400

10	Jetis	-	2	-	-	-	-	531	467
11	Siman	-	1	-	-	-	-	376	323
12	Ponorogo	-	1	-	-	-	-	510	459
13	Babadan	-	2	-	-	-	-	524	474
14	Kauman	-	1	-	-	-	-	494	445
15	Mlarak	-	1	-	-	-	-	385	328
16	Sambit	-	2	-	-	-	-	405	405
17	Sawoo	-	1	-	-	-	-	779	566
18	Sooko	6	2	-	-	-	-	844	703
19	Pulung	-	2	-	-	-	-	757	681
20	Ngebel	-	2	-	-	-	-	635	606
21	Pudak	-	1	-	-	-	-	252	239
	Jumlah Tahun 2021							10967	9696
	Jumlah Tahun 2020	6	31	-	-	-	-	11859	10382
	Jumlah Tahun 2018	6	31	-	-	-	-	11470	9986
	Jumlah Tahun 2017	6	31	-	-	-	-	11375	10081
	Jumlah Tahun 2016	6	31	-	-	-	-	11573	10435
	Jumlah Tahun 2016	6	31	-	-	-	-	12075	10806

Sumber: *Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo*

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa kunjungan ibu hamil pada sarana kesehatan terjadi hanya pada sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas. Kunjungan 1 atau K1 pada tahun 2021 berjumlah 10.967 sedangkan K4 berjumlah 9.696. Baik kunjungan K1 dan K4 keduanya mengalami penurunan pada tahun 2021. Misalnya pada kunjungan K1, tahun 2020 jumlah kunjungan sebanyak 11.859, sedangkan kunjungan K4 pada tahun 2020 adalah 10.382.

Deteksi terhadap penurunan jumlah kunjungan diantaranya disebabkan adanya PPKM selama pandemi covid-19 Tahun 2021. Diketahui bersama bahwa

pada tahun 2021 lonjakan kasus penularan bahkan kematian yang diakibatkan oleh virus corona sangat tinggi. Kondisi ini kemudian memicu kecemasan masyarakat yang sangat besar terhadap penyebaran virus corona, sehingga mereka memilih untuk membatasi diri dalam aktivitas yang membutuhkan kontak langsung.

E. Imunisasi Td²⁺ pada Ibu Hamil di Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Imunisasi adalah upaya untuk memperkuat daya imun seseorang. Jika untuk ibu hamil berarti imunisasi tersebut digunakan untuk imunitas ibu saat masa mengandung. Imunisasi dibutuhkan oleh ibu hamil karena ibu hamil memiliki kerentanan untuk terkena infeksi. Infeksi tersebut jika tidak dicarikan solusi yang tepat akan memengaruhi kondisi janin. Hal yang mungkin terjadi pada janin adalah seperti keguguran, kelahiran prematur, berat badan bayi rendah dan juga adanya kelainan bawaan. Imunisasi tersebut biasanya dalam bentuk pemberian vaksin. Vaksin-vaksin tersebut akan bermanfaat bagi janin dan juga bayi yang akan dilahirkan melalui antibodi lewat ari-ari. Dengan vaksin berbagai penyakit seperti difteri, pertusis, hepatitis, tetanus dan lain bisa dihindari. Begitu pentingnya pemberian vaksin ini, anjuran untuk pemberian vaksin tidak hanya untuk ibu hamil tetapi juga untuk semua ibu yang merencanakan kehamilan. Hal yang baik adalah pemberian vaksin influenza. Vaksin ini menjaga agar ibu hamil tidak terkena virus influenza. Virus ini akan mengakibatkan ibu hamil demam. Demam pada ibu hamil, termasuk karena influenza akan berpotensi pada gangguan janin termasuk cacat pada bayi. Dengan vaksin influenza akan melindungi bayi agar tidak terkena virus dalam beberapa bulan setelah kelahiran. Vaksin diberikan kepada ibu hamil karena bayi yang belum lahir belum bisa menerima vaksin ini.

Vaksin yang penting lagi untuk diberikan adalah vaksin tetanus toxoid. Vaksin ini diberikan 2 kali yaitu sebelum menikah satu kali dan satu kali lagi pada saat hamil. Dengan pemberian imunitas melalui vaksin ini, bayi akan tercegah dari tetanus neonatroum (tetanus pada bayi baru lahir). Ibu hamil harus tahu bahwa bahwa ibu hamil (terutama rahimnya) sangat rentan untuk terinfeksi kuman tetanus. Hal ini sama juga dengan bayi yang bisa terinfeksi dimulai dari luka pada tali pusarnya. Kejadian pada bayi misalnya ketika tali pusar dipotong menggunakan pisau yang tidak tajam atau tidak steril dan hiegenis akan memunculkan bakteri (spora tetanus) yang tumbuh dari luka akibat sesuatu yang tidak steril tersebut. Pemberian imunisasi biasanya akan membawa efek seperti demam ringan atau bengkak pada bekas suntikan, namun semua itu tidak akan membahayakan ibu hamil. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dari proses imunisasi, ibu hamil bisa mengkonfirmasi kepada tenaga kesehatan.

Dengan adanya kunjungan ibu hamil ke sarana kesehatan atau konsultasi dengan tenaga kesehatan, persoalan-persoalan imunisasi, kesehatan

dan penyakit-penyakit yang datang saat kehamilan dapat dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Bidang imunisasi ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kunjungan ibu hamil ke sarana kesehatan. Ketidaktahuan ibu hamil dan ketidaksadaran akan pentingnya bayi sehat dan persalinan selamat terkadang menyebabkan ibu hamil tidak terlalu respek dengan masalah ini. Kata-kata tradisional dengan mengatakan bahwa pada jaman dahulu tidak ada vaksin, pada sehat, di satu sisi benar, namun data menunjukkan bahwa angka kematian ibu, angka kematian saat persalinan dan kematian bayi tidak bisa dibantah. Data dilihat tidak hanya dari lingkungan sekitar, tetapi dari konteks yang lebih luas, seperti di lain kabupaten, lain provinsi dan lain-lain. Data memberi akumulasi kasus yang tidak sedikit.

Tabel 3.5
Imunisasi Td²⁺ pada Ibu Hamil di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Ngrayun	553	
2	Slahung	558	
3	Bungkal	239	
4	Sambit	515	
5	Sawoo	1021	
6	Sooko	251	
7	Pudak	120	
8	Pulung	599	
9	Mlarak	431	
10	Siman	368	
11	Jetis	202	
12	Balong	507	
13	Kauman	370	
14	Jambon	347	
15	Badegan	301	
16	Sampung	319	
17	Sukorejo	606	
18	Ponorogo	475	
19	Babadan	75	
20	Jenangan	440	
21	Ngebel	224	
	JumlahTahun 2021	8521	
	JumlahTahun 2020	9781	
	JumlahTahun 2018	4966	
	JumlahTahun 2017	4226	

JumlahTahun 2016	2582	
JumlahTahun 2015	2632	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Data dalam tabel menunjukkan bahwa pemberian Imunisasi Td²⁺ di Kabupaten Ponorogo tergolong tinggi pada tahun 2021 ini yaitu 8.521. Angka ini sangat tinggi namun cukup mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 9781. Penurunan imunisasi Td²⁺ yang menurun pada tahun 2021 merupakan konsekuensi dari penurunan kunjungan ibu hamil, hal ini lantaran adanya pembatasan aktivitas selama pandemi covid-19.

Di antara kecamatan yang paling terbanyak pemberian imunisasi Imunisasi Td²⁺ adalah Kecamatan Sawoo. Jumlah imunisasi Td²⁺ di kecamatan Sawoo mengalami kenaikan dari yang sebelumnya menduduki peringkat kedua setelah Ponorogo, maka pada tahun ini Sawoo menjadi peringkat pertama dalam pemberian imunisasi Td²⁺. Sedangkan kecamatan terendah adalah Kecamatan Babadan dengan jumlah penerima Imunisasi Td²⁺ adalah 75. Imunisasi Td²⁺ di samping ada informasi dan harapan pemerintah untuk melaksanakan, kesadaran pribadi ibu hamil sangat diperlukan karena yang memiliki kepentingan untuk sehat dan bayi yang sehat adalah keluarga. Suami dan keluarga lain perlu mengingatkan kepada ibu hamil tentang pentingnya kesehatan ibu, janin dan kesehatan saat persalinan.

F. Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Di samping imunisasi Td²⁺, ibu hamil juga perlu memperhatikan kebutuhan zat besi bagi dirinya dan bagi janin. Zat besi bermanfaat untuk membentuk hemoglobin sebagai pembawa oksigen ke seluruh tubuh manusia. Zat besi juga menjadi unsur penting bagi produksi kolagen untuk menjaga kesehatan tulang. Zat besi berfungsi pula untuk membentuk enzim esensial serta dapat membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan zat besi pertumbuhan janin dapat berjalan optimal. Yang harus diketahui oleh ibu hamil adalah bahwa kebutuhan zat besi seorang ibu adalah dua kali lipat dari kebutuhan ibu yang tidak hamil. Hal ini disebabkan untuk kebutuhan dirinya dan kebutuhan janin. Hal yang mungkin saja terjadi jika seorang ibu kekurangan zat besi adalah adanya pengaruh pada perkembangan kognitif janin serta pertumbuhannya. Perkembangan dan pertumbuhan janin yang optimal adalah harapan semua keluarga. Rasa sayang orang tua kepada anak harus diperhatikan tidak saja dengan memberikan apa saja yang diinginkan oleh ibu sebagaimana orang Jawa menyebutnya "nyidam", tetapi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bayi agar bayi tumbuh dan berkembang maksimal. Pasca kelahiran, sang buah hati menjadi buah hati yang sehat, sempurna serta memiliki kemampuan yang membanggakan. Salah satu cara

mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberi nutrisi dan kebutuhan berbagai hal yang diperlukan. Di antaranya adalah dengan memberikan kebutuhan zat besi kepada keduanya yaitu ibu dan anak.

Ibu hamil harus memahami berbagai tanda yang muncul apabila kekurangan zat besi, di antaranya adalah adanya bibir, kulit dan kuku pucat, muncul rasa lelah yang tidak normal, adanya detak jantung yang kurang teratur, adanya nyeri dada, kaki dan tangan terasa dingin, adanya kesulitan dalam konsentrasi dan muncul rasa sakit di kepala. Jika rasa seperti ini hadir pada ibu hamil, ibu hamil harus sesegera mengkonsultasikan kepada tenaga kesehatan untuk mendapatkan solusi yang tepat. Pemberian obat yang salah juga akan mengakibatkan hal tidak baik. Ketika sakit kepala datang misalnya ibu hamil sebaiknya jangan membeli obat antri nyeri secara sembarangan, tetapi sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar obat yang diberikan tidak memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin. Bukankah terkadang seorang tenaga kesehatan mempertanyakan kepada seseorang ketika berobat apakah ibu hamil? Pertanyaan demikian menunjukkan bahwa ibu hamil memiliki obat tersendiri untuk menjaga janin. Kekurangan zat besi mengakibatkan seorang ibu terkena anemia yaitu suatu penyakit akibat kekurangan zat besi. Karena ibu sedang hamil, maka kondisi tersebut berimplikasi kepada janin yang dikandungnya. Berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada janin adalah akan melahirkan bayi prematur bahkan kematian pada janin, bayi dapat pula menjadi yang kekurangan zat besi (anemia), akan muncul depresi pasca persalinan, kelahiran bayi dengan berat badan rendah serta keterlambatan pertumbuhan pada anak.

Petugas kesehatan biasanya akan memberikan suplemen kepada ibu hamil untuk menambah kebutuhan zat besi. Petugas kesehatan biasanya juga akan mengarahkan agar ibu hamil mengkomsumsi makanan yang kaya zat besi. Namun pemberian suplemen zat besi hampir pasti diberikan oleh petugas kesehatan. Di antara makanan penambah zat besi adalah seperti kacang-kacangan dan biji-bijian, daging mentah yang tidak ada lemaknya, telur, hati ayam, sarden kacang kedelai, sayuran dengan daun hijau gelap seperti bayam, dan brokoli. Semua makanan ini dapat diperoleh oleh ibu hamil dari petugas kesehatan. Ibu yang kreatif juga dapat membaca atau mencari di internet berbagai informasi tentang manfaat zat besi serta berbagai makanan yang mengandung zat besi. Berbagai informasi dalam internet dapat dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan untuk memastikan kebenaran yang diperolehnya dari internet. Hal ini sebagaimana kebenaran apakah air kelapa dapat menjadikan anak berkulit putih dan lain sebagainya. Informasi internet kadangkala memberikan banyak hal namun masih bercampur dengan mitos. Komunikasi dengan petugas kesehatan adalah cara terbaik.

Tabel 3.6
Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No (1)	Kecamatan (2)	Jumlah	Keterangan (4)
1	Ngrayun	677	
2	Slahung	548	
3	Bungkal	388	
4	Sambit	433	
5	Sawoo	650	
6	Sooko	251	
7	Pudak	93	
8	Pulung	588	
9	Mlarak	427	
10	Siman	467	
11	Jetis	377	
12	Balong	461	
13	Kauman	473	
14	Jambon	445	
15	Badegan	294	
16	Sampung	443	
17	Sukorejo	605	
18	Ponorogo	755	
19	Babadan	684	
20	Jenangan	628	
21	Ngebel	243	
	JumlahTahun 2021	9930	
	JumlahTahun 2020	10204	
	JumlahTahun 2018	9481	
	JumlahTahun 2017	9246	
	JumlahTahun 2016	10705	
	JumlahTahun 2015	10750	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Ibu hamil yang mendapatkan zat besi di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 termasuk tinggi. Data dalam tabel menunjukkan angka 9.930. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 namun tetap menunjukkan angka yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019.

Jumlah besar ini memungkinkan Kabupaten Ponorogo akan memiliki generasi-generasi yang sehat dan sempurna. Pemberian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memastikan bahwa para ibu hamil

memakan makanan yang memenuhi kebutuhan zat besi mereka. Para kiai, muballigh dan penganjur kebaikan juga dapat menyelipkan berbagai informasi tentang menciptakan generasi yang sehat dan cerdas dalam nasehat-nasehat dan ceramah-ceramah. Para kiai, ustadz dan guru keagamaan dapat menyumbang argumen-argumen agama yang disesuaikan dengan kebenaran ilmiah. Apabila ada kerjasama seperti ini, maka motivasi dan harapan ibu hamil tidak saja berangkat dari perspektif kesehatan *ansich* tetapi juga didasari oleh anjuran-anjuran normatif keagamaan. Anjuran normatif keagamaan akan menjadi efektif jika para kiai dan mublligh mampu menghubungkan secara korelasional antara kebenaran ilahiyah dan kebenaran ilmiah. Tuhan dalam al-Qur'an menganjurkan agar seseorang tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah dalam arti mental, spritual, keilmuan, keahlian, fisik dan lemah secara ekonomi. Di antara usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberi suplemen-suplemen kesehatan atau memenuhi kebutuhan gizi, vitamin dan lain-lain. Usaha-usaha batin seperti doa adalah hal lain yang tidak boleh dilupakan, namun usaha lahiriah manusia dalam bentuk vitamin dan gizi yang tercukupi adalah usaha lainnya. Keseimbangan seperti inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Doa dan usaha serta ikhtiyar ilahiyah dan ikhtiyar ilmiah.

Jumlah terbanyak pemberian zat besi adalah Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 755 ibu hamil. Jumlah ini tentu menyesuaikan dengan jumlah penduduk Kecamatan Ponorogo yang terpadat. Asumsi ini beralasan karena semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak pula kondisi ibu hamil. Lebih dari itu, Kecamatan Ponorogo adalah pusat kota, letaknya dekat dengan berbagai pusat pendidikan dan fasilitas-fasilitas pemerintahan. Informasi dan jaringan internet mudah diakses. Berbagai informasi memungkinkan sampai kepada ibu hamil. Kesadaran untuk mendapatkan zat besi oleh karena itu, dapat dimaklumi. Di bawah Kecamatan Ponorogo adalah Kecamatan Babadan. Jumlah di Kecamatan Babadan adalah 684.

Sedangkan kecamatan yang menunjukkan angka terendah adalah kecamatan Pudak yaitu 93. Kecilnya jumlah yang ada di Kecamatan Pudak dimungkinkan jumlah ibu hamil di Kecamatan Pudak lebih rendah atau lebih kecil di banding Kecamatan yang lain.

G. Jumlah Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Kecamatan dan Penolong Proses Kelahiran di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kabupaten Ponorogo sebagaimana dalam data sebelumnya adalah nihil dalam hal kematian yang disebabkan oleh persalinan atau saat melahirkan. Ini menunjukkan bahwa telah muncul kesadaran ibu hamil di Kabupaten Ponorogo tentang kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi baik pada saat persalinan

maupun pasca persalinan. Jumlah anak lahir hidup pada tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo adalah sangat tinggi yaitu 9816 kasus.

Jumlah di atas tergolong tinggi meskipun menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kecamatan yang paling banyak jumlah anak lahir hidup adalah Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 833 kasus. Ponorogo masih bertahan di Posisi pertama sama dengan posisinya di tahun 2020. Jumlah ini terbagi dalam dua sarana kesehatan yang ada yaitu Ponorogo Utara dengan jumlah 442 kasus dan Ponorogo Selatan dengan jumlah 391 kasus. Kecamatan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pudak 91. Jumlah ini disebabkan, berbagai kemungkinan, adalah karena jumlah yang melahirkan juga sedikit.

Tingginya angka kelahiran yang hidup atau anak lahir hidup di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terpenuhinya berbagai prasyarat melahirkan sehat bagi ibu hamil seperti dilaksanakannya Imunisasi Tetanus Toxoid bagi ibu hamil baik ketika akan merencanakan kehamilan dan saat kehamilan. Kedua, adanya komunikasi yang baik antara ibu hamil dengan petugas kesehatan, bidan misalnya, mengenai keluhan dan perkembangan kehamilan baik pada sisi ibunya maupun janin yang dikandung. Komunikasi yang baik tersebut dapat mendeteksi lebih awal terhadap kelainan-kelainan yang terjadi pada ibu hamil maupun janin. Semakin mudahnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan ibu hamil memungkinkan komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi tidak saja melalui tatap muka langsung ke tempat praktik tenaga kesehatan, tetapi juga bisa melalui media sosial semacam WA (*whats up*), telepon, SMS dan lain sebagainya. Bila dirasa perlu, tenaga kesehatan akan menyarankan agar ibu hamil diperiksa langsung di sarana kesehatan. Jika tidak, maka saran-saran melalui sosial media tersebut sudah dianggap cukup. Keempat, adanya literasi kesehatan ibu dan bayi bagi ibu hamil. Literasi tersebut bisa muncul karena setiap hari ibu hamil dapat membaca media sosial yang menjelaskan tentang kehamilan dan janin, bahkan ada group media sosial tertentu yang memungkinkan seseorang bertanya kepada dokter atau tenaga kesehatan tentang kondisi seseorang. Ada beberapa dokter bahkan membuka konsultasi melalui media sosial seperti WA, Facebook, bahkan melalui youtube. Forum tanya jawab dalam chatting misalnya dapat dimanfaatkan oleh ibu hamil untuk mengetahui berbagai informasi tentang kehamilan kelahiran yang menyenangkan tanpa kecemasan dan ketakutan. Terapi-terapi psikologis juga dapat dijumpai di media sosial untuk menciptakan proses kehamilan yang rileks dan menggembirakan.

di bawah ini adalah tabel tentang jumlah perempuan yang pernah kawin antara umur 15-49 tahun dengan proses melahirkan anak lahir hidup di Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Tabel juga menunjukkan sarana kesehatan mana saja yang ada di setiap Kecamatan Ponorogo yang menjadi rujukan dalam melakukan proses kelahiran. Dari data di bawah, tampak bahwa proses

persalinan paling banyak adalah berada di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Semakin baik dari sisi pelayanan puskesmas, maka semakin senang masyarakat menjadikan puskesmas sebagai rujukan kelahiran. Tidak jarang, dalam setiap kecamatan terdapat lebih dari satu sarana kesehatan seperti di Kecamatan Ponorogo terdapat puskesmas selatan dan puskesmas utara. Dua puskesmas ini ramai dikunjungi masyarakat setiap hari untuk berobat atau yang lainnya. Di samping berobat di puskesmas murah juga karena fasilitas yang nyaman dan menyenangkan dalam berkonsultasi masalah kesehatan.

Tabel 3.7
Jumlah Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Kecamatan dan Penolong Proses Kelahiran di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jumlah
1	2	3	4
1	Badegan	Badegan	358
2	Jambon	Jambon	426
3	Sampung	Sampung	273
4	Sampung	Kunti	149
5	Sukorejo	Sukorejo	585
6	Jenangan	Jenangan	357
7	Jenangan	Setono	208
8	Balong	Balong	503
9	Slahung	Slahung	332
10	Slahung	Nailan	262
11	Ngrayun	Ngrayun	572
12	Bungkal	Bungkal	379
13	Jetis	Jetis	190
14	Siman	Siman	257
15	Siman	Ronowijayan	190
16	Ponorogo	Po Utara	442
17	Ponorogo	Po Selatan	391
18	Babadan	Babadan	457
19	Babadan	Sukosari	319
20	Kauman	Kauman	398
21	Kauman	Ngrandu	124
22	Mlarak	Mlarak	379
23	Sambit	Sambit	210
24	Sambit	Wringinanom	211

25	Sawoo	Sawoo	581
26	Sawoo	Bondrang	87
27	Sooko	Sooko	286
28	Pulung	Pulung	323
29	Pulung	Kesugihan	238
30	Ngebel	Ngebel	238
31	Pudak	Pudak	91
Jumlah (Kab/Kota)			9816

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

H. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya jumlah bayi yang lahir di Kabupaten Ponorogo berjumlah 9.720. Jumlah ini mengalami penurunan di banding jumlah sebelumnya pada tahun 2020 yaitu 10.389. Walaupun hampir semua bayi yang lahir di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 adalah bayi yang selamat, namun tidak semuanya mengalamai kondisi yang sehat. Terdapat bebepa bayi yang mengalami berat badan rendah. Hal ini belum ditambah dengan jumlah bayi lima tahun yang mengalami gizi buruk. Gizi buruk pada bayi lima tahun adalah wilayah pasca kelahiran. Perkembangan dan pertumbuhan bayi tidak saja dikontrol dan dievaluasi setelah kelahiran, tetapi juga setelah bayi itu lahir sampai umur 5 tahun. Masa-masa bayi 5 tahun adalah masa-masa di mana bayi mengalami perkembangan dan pertumbuhan sangat cepat. Oleh karena itu, masa-masa ini menentukan terhadap masa-masa perkembangan dan pertumbuhan setelahnya. Keluarga harus besama-sama menjadi kelompok terdepan dalam memperbaiki gizi keluarga.

Bayi dianggap memiliki berat badan rendah ketika lahir adalah ketika berat badan bayi kurang dari 2,5 kilogram ketika lahir. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah memiliki kerentatan terhadap penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Bayi dengan berat badan rendah memerlukan pengangan kesehatan yang maksimal. Berat badan rendah pada bayi dapat diketahui dari beberapa hal seperti bayi terlihat kurus badannya, bayi memiliki sedikit jaringan lemak tubuh serta tampak kepala yang terlihat lebih besar sehingga tampak secara fisik tidak proporsional. Yang lebih berbahaya adalah ketika berat badan rendah tersebut beriringan dengan bayi lahir prematur. Untuk bayi yang lahir dengan berat badan rendah pada kasus bayi prematur berbagai kemungkinan akan bisa terjadi seperti akan terjadi gangguan pernafasan, bayi berwarna kuning, kesulitan dalam menyusui atau adanya gangguan makan, terjadinya kadar gula darah rendah dan dikhawatirkan adanya sindrom kematian bayi mendadak. Jika mengalami kondisi demikian, tentu perawatan intensif mutlak diperlukan. Karena jika tidak ada perawatan yang baik, dikhawatirkan muncul

berbagai komplikasi pada bayi seperti cacat fisik bahkan kematian. Siapa bayi yang dianggap lahir prematur? Jawabnya adalah bayi yang lahir sebelum memasuki usia kehamilan 37 minggu. Keluarga oleh karena itu, harus melihat perkembangan janin secara baik. Perkembangan bayi dari minggu perminggu harus dipantau baik oleh ibu hamil, keluarga maupun dengan bantuan tenaga kesehatan. Banyak sekali buku dan bahan bacaan yang memperkenalkan perkembangan bayi dari satu minggu ke minggu yang lainnya. Bahkan terkadang, berbagai buku bahkan menampilkan bentuk fisik janin dalam kandungan. Belajar dari pengalaman orang lain tentu sangat berharga dalam kasus ini. Pengalaman orang tua, saudara dan tetangga adalah guru terbaik. Ibu atau keluarga dapat mendengarkan berbagai informasi tentang perkembangan janin atau bayi dari orang lain.

Di antara penyebab bayi lahir dengan berat badan rendah adalah karena ibu memiliki kesehatan yang tidak baik di saat hamil. Kondisi tersebut seperti preeklamsia, tekanan darah tinggi atau karena ibu kekurangan gizi. Kondisi lainnya adalah karena ibu mengalami infeksi di saat kehamilan. Sebab lainnya adalah karena bayi dilahirkan dari ibu yang juga memiliki berat badan kurang dalam masa kehamilan. Berat bayi rendah juga bisa disebabkan oleh usia ibu kurang dari umur 17 tahun atau usia ibu lebih dari 35 tahun. Dalam kondisi ini, disarankan untuk ibu memiliki umur lebih dari 17 tahun serta kurang dari 35 tahun untuk mempersiapkan bayi yang sehat dan berkualitas. Berat badan rendah pada bayi saat kelahiran dimungkinkan pula karena bayi kembar. Banyak kasus ditemui bayi kembar mengalami berat badan yang kurang. Berbagai sebab tersebut akan dianalisa oleh tenaga kesehatan serta diharapkan tidak terulang pada kelahiran berikutnya. Tenaga kesehatan akan memberikan bantuan dalam pemberian perawatan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian ibu agar kelahiran bayi tidak mengalami kerendahan berat badan adalah konsumsi dan gaya hidup yang sehat dari ibu seperti tidak merokok, tidak meminum alkohol dan mengkonsumsi narkoba.

Tenaga kesehatan biasanya akan memberikan perawatan seperti diletakkan di ruangan perawatan khusus seperti dihangatkan dalam inkubator, diberi obat-obatan melalui infus atau pemberian nutrisi yang sesuai. Tenaga kesehatan akan memberi berbagai perawatan terbaik serta menyarankan agar ibu melakukan berbagai hal positif setelah bayi pulang ke rumah.

Data di bawah juga memperlihatkan bahwa ada sebagian bayi lima tahun di Kabupaten Ponorogo yang mengalami gizi buruk. Gizi buruk tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti karena kurang makan, makan yang tidak teratur. Kekurangan makanan akan menimbulkan asupan makanan yang sedikit sehingga nutrisi bayi kurang. Sedangkan makan yang tidak teratur juga akan menyebabkan berbagai masalah dalam pencernaan maupun malnutrisi. Kekurangan gizi pada balita dapat memengaruhi perkembangan dan

pertumbuhan anak. Kurang gizi juga bisa disebabkan karena kurangnya asupan air susu ibu yang masuk.

Di antara tanda-tanda yang bisa menunjukkan gizi buruk pada anak adalah seperti keadaan kulit yang kering dan bersisik, perut buncit, pertumbuhan kognitif lambat, mengalami gangguan kesehatan yang sering, anak cepat merasa lelah dan ketika ia sakit atau luka sembuhnya agak lama. Jika melihat tanda-tanda ini, gizi buruk harus cepat diatasi. Hal ini berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu nama untuk menyebut unsur-unsur kognitif intelektual seseorang. Anak dengan gizi buruk akan susah menerima pelajaran misalnya, sulit menghafal, dan lambat dalam mengingat sesuatu. Sementara pertumbuhan adalah berhubungan dengan bentuk fisik anak. Anak mengalami tumbuh dan tinggi yang tidak seimbang, tidak sama dengan usia sebaya dan lain-lain.

Masalah gizi buruk oleh karena itu tidak hanya masalah keluarga, tetapi juga masalah bersama termasuk pemerintah. Tanggungjawab pemerintah adalah memastikan bahwa rakyat tidak ada yang mengalami masalah perkembangan dan pertumbuhan akibat gizi buruk. Keberhasilan pemerintah di antaranya adalah keberhasilan dalam menuntaskan kemiskinan, di antaranya adalah masalah gizi buruk bayi lima tahun.

Tabel 3.8
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Lahir Hidup	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Balita dengan Gizi Buruk	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Ngrayun	580	42	255	
2	Slahung	528	19	182	
3	Bungkal	309	2	105	
4	Sambit	436	30	179	
5	Sawoo	647	10	164	
6	Sooko	237	9	21	
7	Pudak	102	4	31	
8	Pulung	547	34	183	
9	Mlarak	371	0	139	
10	Siman	504	8	116	
11	Jetis	336	16	101	
12	Balong	498	27	156	

13	Kauman	493	23	97	
14	Jambon	426	1	182	
15	Badegan	325	17	55	
16	Sampung	459	31	202	
17	Sukorejo	609	19	195	
18	Ponorogo	795	42	567	
19	Babadan	713	32	172	
20	Jenangan	596	16	114	
21	Ngebel	209	8	39	
Jumlah Tahun 2021		9720	390	3255	
Jumlah Tahun 2020		10389	497	2712	
Jumlah Tahun 2018		10845	468	490	
Jumlah Tahun 2017		10329	479	191	
Jumlah Tahun 2016		11183	430	205	
Jumlah Tahun 2015		11357	462	269	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Data menunjukkan bahwa walau Kabupaten Ponorogo mengalami keberhasilan dalam mewujudkan bayi lahir sehat dan tidak ada yang mengalami kematian pada saat melahirkan. Namun, bayi lahir dalam kondisi berat badan rendah masih ditemui yaitu 390 kasus. Meskipun angka ini cukup menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 497 kasus. Namun kondisi ini sangat perlu diperhatikan agar Kabupaten Ponorogo kelak bisa mencapai bonus demografi yang optimal jika generasi yang lahir adalah generasi yang sehat dan memiliki kecukupan gizi yang baik.

Data sebelumnya tentang pemberian zat besi misalnya sebenarnya telah tersampaikan kepada ibu hamil. Tingkat pemberian zat besi tergolong tinggi, yaitu 9930 ibu hamil. Ini berarti banyak masalah lain yang menjadi pemicunya. Mengacu pada sebab-sebab bayi lahir dengan berat badan rendah, maka penanganannya disesuaikan dengan masalah yang terjadi. Seperti telah dijelaskan banyak sebab yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah seperti kesehatan ibu, darah tinggi yang dialami ibu, ibu pemakai alkohol dan lain-lain. Cara yang mungkin dilakukan untuk mengurangi kondisi bayi lahir dengan berat badan rendah adalah pertama, memastikan bahwa setiap ibu hamil mengikuti program pemerintah seperti melaksanakan imunisasi, pemberian zat besi, serta mengikuti K1-K4 serta program-program lainnya. Kedua, mengontrol asupan gizi ibu, konsumsi zat besi dan lainnya. Bisa mungkin, ada ibu hamil yang menerima suplemen zat besi namun tidak

mengkonsumsinya di rumah. Ketiga, keterlibatan keluarga seperti suami dan orang tua dalam kegiatan-kegiatan kesehatan istri. Ini artinya bahwa yang melek sehat ibu hamil dan bayi sehat adalah bukan hanya menjadi wilayah istri tetapi juga keluarga termasuk suami. Keempat, pemerintah menggandeng juru dakwah (kiai, ustadz dan lain-lain) agar menyisipkan materi-materi tentang pentingnya bayi sehat untuk kekuatan umat. Bayi sehat adalah amunisi bagi kuatnya agama. Perjuangan mewujudkan anak yang sehat dhoir dan batin adalah bagian dari investasi akhirat yang tidak akan habis. Kegiatan ini bertujuan agar adanya kesadaran internal ibu hamil dan keluarga. Tidak ada yang dapat mengalahkan kesadaran internal yang intrinsik hadir pada diri seseorang. Kelima, ikut mensertakan pihak perguruan tinggi dalam meneliti sebab-sebab bayi lahir rendah, apakah faktor kesalahan pola hidup sehat ibu hamil atau karena kesalahan-kesalahan lain seperti salah dalam pemahaman agama, atau karena ada tindakan-tindakan tradisional yang berbeda dengan dunia ilmiah. Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo terutama dinas kesehatan adalah pioner dalam hal ini.

Di samping bayi lahir dengan berat badan rendah adalah masalah gizi buruk pada bayi lima tahun. Jumlah ini terbilang tinggi di Kabupaten Ponorogo yaitu berjumlah 3255 bayi. Jumlah ini sangat mencengangkan. Masalah gizi buruk pada tahun 2021 juga menunjukkan angka yang meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 2.712. Meskipun lonjakan ini tidak setajam tahun 2019 ke 2020. Namun jumlah yang terus meningkat perlu untuk dicari akar permasalahannya.

Ini patut menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah Kabupaten melalui dinas kesehatan. Perlu adanya penelitian sebab-sebab yang menjadi faktor. Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Babadan adalah dua daerah yang tinggi dalam gizi buruk balita. Gizi buruk balita Kecamatan Ponorogo adalah 567 bayi dan di Kecamatan Ngrayun berjumlah 255 bayi. Pemerintah perlu memberi bantuan secara cepat untuk mengatasi kurang gizi balita baik melalui bantuan langsung maupun yang lainnya. Namun, sebelum memberi bantuan perlu diadakan penelitian untuk menemukan apa yang menjadi penyebab gizi buruk balita. Hal ini diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan agar tidak terulang.

I. Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Seperti telah dijelaskan pada data sebelumnya, angka kurang gizi pada balita di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 termasuk tinggi yaitu 3.255 kasus serta masih adanya bayi lahir dengan berat badan rendah yang berjumlah 390 kasus, serta kematian bayi yang melonjak tajam, yaitu mencapai 120 kasus. Data kematian bayi pada tahun 2021 memang tidak dirinci berdasarkan klaster usia sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2020. Pada tahun ini daftar kematian hanya dibagi menjadi kematian bayi dan kematian balita.

Sedangkan berdasarkan data terbaru, jumlah kematian balita pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, yaitu sebanyak 17 kasus dari sebelumnya berjumlah 16 kasus. Kecamatan dengan jumlah kematian bayi adalah Ponorogo, sedangkan kecamatan dengan jumlah kematian bayi paling sedikit adalah kecamatan Ngebel.

Jika dianalisis dari situasi dan kondisi yang terjadi pada tahun 2021, bisa dipastikan bahwa kematian bayi terbanyak yang terjadi di tahun 2021 disebabkan oleh kondisi pandemi covid-19 yang mendorong situasi menjadi semakin buruk. Sisanya, bisa dimungkinkan karena gizi buruk atau juga karena penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh lahir dengan berat badan rendah. Tidak ada yang tersedia yang dapat digunakan untuk menjelaskan penyakit apa yang mendahului terhadap kematian bayi.

Sedangkan pada kasus kematian balita, total kematian balita pada tahun 2021 berjumlah 17 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 16 kasus. Meski mengalami sedikit kenaikan, namun beberapa kecamatan juga ada yang berhasil mencegah kematian balita sehingga jumlah kematian balita di Kecamatan tersebut menjadi nihil, yaitu kecamatan Ngrayu, Sambit, Sawoo, Sooko, Pudak, pulung, Mlarak, Siman, Kauman, Jambon, dan Badegan.

Di antara yang memberi semangat kepada Kecamatan dan petugas kesehatan yang telah menjadikan kecamatan nihil kematian dalam usia 0-1 dan 2-3 adalah "seharusnya" ada apresiasi, baik berupa hadiah maupun yang lainnya oleh pemerintah daerah. Penghargaan diberikan karena seseorang telah berjuang tidak saja untuk keberhasilan program pemerintah, tetapi lebih dari itu adalah karena mereka telah menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahan di muka bumi. Kekhالفahan tersebut adalah menghargai manusia sebagai manusia. Bagi Tuhan, menyelamatkan nyawa satu orang manusia sama dengan menyelamatkan manusia seutuhnya. Daerah-daerah yang paling banyak tingkat kematian dalam usia ini perlu menjelaskan sebab-sebabnya. Apakah sebab tersebut bersumber pada kesalahan keluarga, kesalahan sarana kesehatan, petugas kesehatan atau karena sebab lainnya. Jika ditemukan bahwa kesalahan terletak kepada petugas kesehatan atau kesalahan sarana prasarana maka perbaikan cepat harus cepat diselesaikan agar kejadian serupa tidak terulang. Namun jika masalahnya adalah pada ibu atau keluarga bayi, maka pemberian kesadaran penting dilakukan, tidak saja untuk diri ibu bayi dan keluarganya tetapi bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain agar tidak mengikuti pola dan gaya hidup dari ibu yang bayinya meninggal. Setiap kejadian yang menimpa warga adalah *lesson learned* yang baik bagi warga lainnya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan anak atau bayinya meninggal, namun apakah keinginan itu telah dibarengi dengan ikhtiar kesehatan atau belum. Di sinilah pentingnya meneliti sebab-sebab kematian bayi dalam usia yang disebutkan oleh data penelitian ini. Kebijakan yang berkaitan dengan masalah ini tanpa didahului oleh penelitian adalah laksana

tindakan buta yang bisa saja salah sasaran. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan untuk penciptaan generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Ini adalah investasi sumber daya yang tidak tertandingi. Tabel berikut adalah data yang menjadi analisa beberapa paragraf di atas.

Tabel 3.9
Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi dan Balita			Penyebab	Ket
		Bayi	Balita			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ngrayun	6	0			
2	Slahung	6	1			
3	Bungkal	9	1			
4	Sambit	4	0			
5	Sawoo	4	0			
6	Sooko	5	0			
7	Pudak	2	0			
8	Pulung	13	0			
9	Mlarak	9	0			
10	Siman	2	0			
11	Jetis	2	2			
12	Balong	6	1			
13	Kauman	9	0			
14	Jambon	2	0			
15	Badegan	2	0			
16	Sampung	3	1			
17	Sukorejo	6	1			
18	Ponorogo	15	3			
19	Babadan	9	2			
20	Jenangan	4	1			
21	Ngebel	1	1			
	Jumlah Tahun 2021	120	17			
	Jumlah Tahun 2020	30	16			
	Jumlah Tahun 2018	134	10	144		
	Jumlah Tahun 2017	151	18	169		
	Jumlah Tahun	180	10	190		

	2016					
	Jumlah Tahun 2015	40	8	48		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

J. Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Umur di Masing-Masing Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

HIV/AIDS adalah penyakit mematikan. HIV (*human immunodeficiency virus*) merupakan virus mematikan yang mampu merusak imunitas tubuh. Kekebalan tubuh dapat rusak karena virus ini. Virus HIV adalah virus yang menginfeksi dan merusak sel CD4. Rusaknya sel CD4 memungkinkan seseorang akan rentan terhadap penyakit. sel CD4 adalah sel darah putih, suatu sel yang berfungsi melawan virus yang datang kepada tubuh manusia. Virus akhirnya, karena daya pertahanannya lemah, akan membuat salinan di dalam sel CD4 tersebut. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah lanjutan dari virus HIV. Ini artinya bahwa virus HIV tidak mesti menjadikan pengidapnya langsung terkena AIDS. Diperkirakan apabila virus tersebut tidak diobati maka akan menjadi penyakit AIDS dalam kurun waktu antara 10 sampai 15 tahun berikutnya. AIDS adalah akhiran dari virus HIV. Jika sudah terkena AIDS maka tubuh sudah tidak bisa lagi melawan penyakit. Menurut berbagai referensi, belum ada obat untuk penyakit AIDS atau mengatasi virus HIV, yang ada adalah memperpanjang harapan hidup penderitanya dengan memperlambat perkembangan penyakit atau laju virus HIV. Begitu berbahanya penyakit ini sehingga sebagian orang menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit kutukan. Suatu penyakit pemberian Tuhan untuk orang-orang yang bertindak seperti binatang yaitu tindakan seks bebas tanpa ikatan perkawinan, sering gonta ganti pasangan (karena seks bebas tersebut) atau juga karena tertular penyakit AIDS dari penderita. Stigma negatif masyarakat, oleh karena itu tidak bisa digenarilisir. Mereka yang terinfeksi virus HIV dan lalu menderita AIDS karena tertular tentu bukanlah kutukan. Masyarakat harus memilah sesuai dengan kategori penderitanya. Stigma "kutukan" tidak boleh terus didengarkan kepada penderita, karena penderita perlu diberi kekuatan psikologis agar bisa bertahan hidup lebih lama dalam menjalankan aktifitas yang positif dan bermanfaat. Dari sisi agama, ia masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Tuhan adalah maha pengampun dan pemberi rahmat kepada hambanya. Penderita HIV/AIDS perlu dimotivasi untuk semangat hidup. Dengan demikian, mereka bisa memperbaiki diri dan hidup manfaat. Pemberian stigma negatif apalagi membuat diri mereka teralienasi akan mendorong tindakan yang kadang diluar batas rasionalitas seperti keinginan untuk mencari teman, akibatnya ia sengaja menularkan penyakit dirinya kepada orang lain agar stigma itu tidak ditanggung oleh dirinya sendiri. Intinya, perlakuan yang baik kepada

mereka adalah kekuatan psikologis yang mampu menjadikan diri mereka lebih baik dalam menjalani hidup dan menjalani kehidupan lain yaitu pasca kematian.

Bagaimana virus dapat ditularkan? Virus HIV dapat ditularkan melalui hubungan langsung antara penderita dengan orang lain, bisa seperti darah atau cairan orang yang menderita seperti ASI, sperma tau cairan vagina. Sarana yang dapat digunakan adalah seperti melalui jarum suntik dan lain-lain. Sebagai suatu penyakit yang membahayakan, HIV/AIDS diperingati setiap 1 Desember, suatu peringatan yang menandai semangat untuk menghindari diri dari virus dan penyakit ini. Apakah virus ini juga menyerang warga Kabupaten Ponorogo. Data dalam tabel berikut menunjukkan kondisi penderita HIV/AIDS tersebut. Data ini tidak dimaksudkan untuk mengafirmasi bahwa seseorang memiliki teman dalam hal sakit, tetapi lebih kepada preventif atau pencegahan agar setiap orang terhindar dari penyakit ini dengan menghindari berbagai sebab-sebab yang menjadi alasan adanya penyakit seperti seks bebas, gonta-ganti pasangan dan lain-lain. Berbagai penyebab tersebut adalah penyebab yang dilarang oleh agama. Pendekatan keagamaan adalah cara yang paling efektif dari semua cara. Cara lainnya adalah menghindari kegelisahan jiwa, penyelesaian masalah dengan tenang dan menghadapi persoalan hidup dengan releks dan santai. Banyak juga orang yang memiliki pengetahuan dalam agama namun agama hanya sampai ditenggorokannya, tidak sampai kepada kesadaran hati pemilikinya. Sebab-sebab persoalan hidup seperti ekonomi, tekanan jiwa akibat problem sosial, dapat menjatuhkan tindakan yang dilarang oleh agama termasuk seks bebas. Data yang dipaparkan dalam tabel masih menggunakan data tahun 2020 karena keterbatasan data di tahun 2021.

Tabel 3.10
Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Umur di
Masing-Masing Kecamatan Se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

NO	KELOMPOK UMUR	AIDS				H I V			
		L	P	L+P	PROPO RSI KELOMPOK UMUR	L	P	L+P	PROPO RSI KELOMPOK UMUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	≤ 4 TAHUN	3	1	4	3.88	1		1	2.08
2	5 - 14 TAHUN	0	0	0	0.00			0	0.00

3	15 - 19 TAHUN	1	1	2	1.94			0	0.00
4	20 - 24 TAHUN	1	1	2	1.94			0	0.00
5	25 - 49 TAHUN	34	37	71	68.93	20	16	36	75.00
6	≥ 50 TAHUN	17	7	24	23.30	3	8	11	22.92
JUMLAH (KAB/KOTA)		56	47	103		24	24	48	
PROPORSI JENIS KELAMIN		54.3 7	45. 63			50.0 0	50.0 0		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo

Data menunjukkan bahwa penderita AIDS lebih banyak daripada mereka yang terserang virus HIV. Seperti telah dijelaskan bahwa virus HIV belum tentu menyebabkan penyakit AIDS, namun di Kabupaten Ponorogo, agaknya AIDS lebih banyak dibanding mereka yang terserang virus HIV. Jumlah penderita AIDS di Kabupaten Ponorogo adalah 103 sementara mereka yang terserang virus HIV adalah berjumlah 48. Penderita AIDS paling banyak adalah jenis kelamin perempuan yaitu 56 orang sementara penderita jenis kelamin laki-laki adalah 47 orang. Adapun penderita HIV adalah sama antara perempuan dan laki-laki yaitu 24 orang. Usia terbanyak penderita AIDS adalah dalam usia 25-49 tahun yang berjumlah 37 untuk laki-laki dan 34 untuk perempuan. Penderita lainnya adalah di bawah usia 50 tahun. Pada usia di bawah 50 tahun jumlah penderita laki-laki adalah 24 orang dengan perincian 17 orang dan jumlah perempuan adalah 7 orang. Sedangkan untuk mereka yang terinfeksi virus HIV terbanyak adalah mereka dalam rentang umur 25-49 tahun, suatu usia yang sama dengan mereka yang terkena penyakit AIDS. Jumlah mereka yang terpapar virus HIV dalam usia rentang ini adalah 36 orang dengan perincian 20 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Demikian pula umur terbanyak setelahnya adalah rentang umur di bawah 50 tahun sama dengan mereka yang terkena AIDS yaitu berjumlah 11 orang dengan perincian 3 orang laki-laki dan 8 orang berjenis kelamin perempuan.

Fakta di atas memberi indikasi beberapa hal, yaitu:

Pertama, penyakit AID dan virus HIV ternyata masih menjadi penyakit yang mengancam Kabupaten Ponorogo. Setiap orang, oleh karena itu, harus waspada terhadap penyakit ini. Semua pihak harus terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Tokoh agama, tokoh pendidikan, sekolah, keluarga dan tokoh masyarakat harus bersinergi dalam mengurangi sebab-sebab yang

menjadi penyebab penyakit HIV/AIDS yaitu seperti pergaulan bebas, seks di luar nikah dan lain-lain. Penyebab terjadinya HIV/AIDS adalah penyebab dalam kategori sampah masyarakat. Tidak hanya dilarang oleh agama, tetapi juga keluar dari norma-norma masyarakat.

Kedua, pemerintah perlu memberi informasi memadai kepada masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS, bahaya tersebut tidak hanya untuk si penderita tetapi juga untuk keluarga, sahabat dan masyarakat. Dengan menyelamatkan diri sendiri dan masyarakat, seseorang telah menjalani hidup manfaat. Sarana-sarana kesehatan yang menyebar ke seluruh pelosok desa perlu memberi informasi melalui brosur, panflet dan lain-lain agar terbaca oleh masyarakat. Kampanye-kampaye sehat melalui media sosial seperti WA, Facebook, Instagram dan lain-lain penting dilakukan. Tingkat keterbacaan media sosial ini sangat tinggi terutama untuk generasi yang rentan seperti dalam data yaitu usia 25-49 tahun. Instagram dengan tampilan menarik tentu menarik minat generasi internet untuk membacanya.

Ketiga, data menunjukkan pula bahwa usia yang paling terbanyak adalah usia di antara rentang 25-49 tahun. Usia ini adalah usia yang produktif, sekaligus usia pencarian identitas. Pada usia ini seseorang mungkin akan terjerembab kepada tindakan yang dilarang agama atau sebaliknya. Usia ini adalah usia di mana mereka akan melakukan eksperimentasi berbagai hal termasuk mencoba lawan jenis yang berbeda. Setiap orang perlu mewaspadai usia ini. Mereka perlu mengisi berbagai kegiatan positif dan beragama. Lebih dari itu membentuk pribadi yang religius adalah benteng bagi mereka untuk tidak terjerembab dalam tindakan penyebab HIV/AIDS.

Keempat, data menunjukkan keprihatinan mendalam yaitu di dapatnya penderita AIDS di bawah umur 4 tahun yaitu berjumlah 4 orang dengan rincian 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka adalah bayi tiga tahun (BATITA) karena umurnya kurang dari empat tahun. Sedangkan anak BATITA yang terserang virus HIV berjumlah 1 orang. Bagi anak BATITA ini, bisa disebabkan oleh keturunan, suatu penyakit yang diturunkan dari orang tuanya karena orang tuanya adalah penderita HIV/AIDS.

Kelima, kasus adanya BATITA yang terinfeksi virus HIV dan memiliki penyakit AIDS menunjukkan bahwa virus ini memang menjadi virus yang tidak hanya akan berakibat kepada penderitanya saja, tetapi juga untuk orang-orang yang dicintai seperti anak, suami, isteri, orang tua, saudara, keluarga dan teman-teman yang bersamanya. Tidak ada cara lain dalam pencegahan penyakit ini kecuali menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang-orang yang dicintainya. Saling menasehati dalam kebenaran agama dan sosial serta saling menasehati dalam kebaikan adalah perintah agama agar selamat di dua dunia, yaitu dunia saat ini dan dunia itu, nanti (akhirat).

K. Tempat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Tempat pelayanan kesehatan sangat penting untuk masyarakat. Minimal tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, tempat pelayanan kesehatan adalah tempat di mana warga masyarakat dapat mengkonsultasikan berbagai masalah kesehatan yang diderita. Tidak hanya konsultasi, tempat pelayanan kesehatan dapat menjadi rujukan untuk rehabilitasi dan penyembuhan atas penyakit yang diderita seseorang. Kedua, ketersediaan tempat pelayanan kesehatan adalah salah satu tanda kemajuan negara. Negara yang maju adalah negara yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara baik dan maksimal. Tempat pelayanan kesehatan diadakan secara terjangkau dan dapat dikunjungi secara mudah. Tempat pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak rakyat di mana kesehatan dan jaminan kesehatan disediakan oleh pemerintah. Melalui pelayanan kesehatan yang dekat dengan rakyat, masyarakat akan dapat mengetahui dan mengobati penyakit yang diderita secara cepat. Kematian akibat ketidakterediaan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan nihil dalam negara maju. Negara maju dan sejahtera salah satu indikatornya adalah adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Jaminan kesehatan tersebut ditandai dengan adanya tempat pelayanan kesehatan yang terjangkau tidak saja dari tempat, tetapi juga dari biayanya. Ketiga, tempat pelayanan kesehatan masyarakat adalah jaminan bagi keberlangsungan negara. Hal ini terjadi mulai adanya fasilitas untuk konsultatif, kuratif, preventif dan rehabilitatif. Tempat pelayanan kesehatan bisa menjadi tempat bagi ibu hamil atau ibu yang merencanakan kehamilan berkonsultasi. Kesehatan ibu hamil dan janin serta bayi adalah bagian dari persiapan menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Generasi yang sehat dan berkualitas adalah calon-calon pemimpin dan pengisi kemerdekaan Indonesia. Para bayi saat ini adalah pemimpin di masa depan. Mereka adalah pengganti para generasi yang saat ini sedang mengisi pemerintahan. Mereka juga akan menjadi masyarakat yang cerdas, suatu masyarakat yang dapat berpikir tentang masa depan kebangsaan. Generasi yang sehat dan berkualitas akan mampu memberi kritik konstruktif bagi pemerintahan. Ide-idenya dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat (*empowering civil society*). Dari sini bahwa tempat pelayanan kesehatan tidak hanya untuk kesehatan itu sendiri, tetapi untuk kemajuan bangsa dan negara. Negara kuat adalah negara dengan penduduk yang sehat. Sebaliknya, negara yang lemah adalah negara dengan penduduk yang berpenyakit.

Tempat pelayanan kesehatan masyarakat dapat dibagi dalam beberapa kategori seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, poliklinik dan polindes. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat ini biasanya bertingkat. Yang paling lengkap sarana dan prasarannya adalah rumah sakit. Rumah sakit yang terpercaya, lengkap, ramah, fasilitas yang nyaman serta pelayanan prima adalah rumah sakit yang menjadi rujukan. Rumah sakit dapat

dibagi menjadi dua yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang didirikan oleh negara, sementara rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh perseorangan, kelompok atau organisasi tertentu seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Rumah sakit dengan demikian di satu sisi ada nuansa bisnis dan disatu sisi adalah tempat pertolongan. Rumah sakit pemerintah diharapkan lebih memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dapat menjadi rujukan nomor satu bagi masyarakat. Keluhan-keluhan masyarakat seperti lambatnya pelayanan, kekurangramahan petugas dan lainnya harusnya mulai diperbaiki. Mengingat rumah sakit merupakan lembaga milik pemerintah sebagai perpanjangan tangan untuk kesehatan masyarakat. Rumah sakit swasta membantu rumah sakit pemerintah dalam melayani masyarakat dalam kesehatan. Oleh karena itu sebisa mungkin rumah sakit menerapkan model keuntungan yang tidak terlalu besar dan tinggi agar terjangkau untuk masyarakat miskin.

Tabel 3.11
Tempat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Masing-Masing Kecamatan
di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Tempat Pelayanan Kesehatan Masyarakat					
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Poli klinik	Poli ndes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ngrayun		1	4	56		9
2	Slahung		2	6	69		2
3	Bungkal		1	3	71		5
4	Sambit		2	2	48	48	
5	Sawoo		2	4	59	1	2
6	Sooko		1	1	29	29	
7	Pudak		1	1	12	12	
8	Pulung		2	2	71	71	2
9	Mlarak		1	1	51	51	
10	Siman		2	2	46	48	1
11	Jetis		1	1	44	44	
12	Balong		1	1	66	66	2
13	Kauman		2	1	59		2
14	Jambon		1	2	47	1	2
15	Badegan		1	2	39		
16	Sampung		2	3	50		2

17	Sukorejo		1	4	63	5	3
18	Ponorogo	6	2	2	77	17	12
19	Babadan		2	2	60	8	8
20	Jenangan		2	2	75	3	1
21	Ngebel		1	1	37	37	1
	Jumlah Tahun 2021	6	31	57	1129	41	84

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo*

Jumlah tempat pelayanan kesehatan masyarakat di Ponorogo terbagi dalam beberapa tempat yaitu rumah sakit dengan jumlah 6 buah. Puskesmas terdiri dari 31 tempat, puskesmas pembantu terdiri dari 57 buah, posyandu 1129 buah, poliklinik 41 buah dan polindes 84 buah. Rumah sakit yang terdiri 6 buah tersebut adalah RSUD Dr. Hardjono, RSUD Darmayu, RSUD Muhammadiyah, RSUD 'Aisyah, RSUD Muslimat dan Griya Waluyo. Enam rumah sakit ini menjadi tempat masyarakat apabila mengalami penyakit serius dan puskesmas memberi rujukan untuk berobat atau bisa juga masyarakat langsung mendatangi tanpa rujukan sebelumnya yang disebut dengan atas permintaan sendiri (APS). Hal ini disebabkan karena rumah sakit memiliki beberapa fasilitas seperti fasilitas poliklinik tempat para dokter spesialis membuka praktik. Di samping rumah sakit, masyarakat juga pergi untuk mengetahui kesehatan mereka di puskesmas. Puskesmas menjadi rujukan, tidak saja tempatnya yang dekat dengan tempat tinggal, juga dengan biaya pengobatan sangat murah. Peningkatan kualitas puskesmas akan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat dalam hal kesehatan. Hal ini terbukti ada puskesmas yang sangat ramai dan dikunjungi tidak hanya dalam satu kecamatan tetapi dari luar kecamatan karena dikenal dalam hal spesialisasi atau terkenal keramahannya.

Jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah 31 tempat. Ada kecamatan yang memiliki dua puskesmas dan ada yang hanya satu. Di antara kecamatan yang memiliki dua puskesmas adalah Kecamatan Sawoo, Slahung, Kauman, Sampung, Ponorogo, Babadan dan Jenangan. Adapun puskesmas pembantu paling terbanyak adalah Kecamatan Slahung dengan jumlah 6 buah, di bawahnya adalah kecamatan Ngrayun, Sawoo dan Sukorejo. Masing-masing berjumlah 4 buah. Jumlah tempat pelayanan kesehatan adalah Posyandu. Jumlahnya adalah 1.129 buah. Kecamatan terbanyak Posyandu adalah daerah Kecamatan Ponorogo yang berjumlah 76 dan Kecamatan Jenangan dengan jumlah 75 buah. Yang menjadi perhatian adalah Kecamatan dengan posyandu kecil seperti daerah Kecamatan Sambit, Sooko, Pudak, Mlarak, Siman dan Jetis. Jumlah mereka hanya 2 tempat. Pertanyaannya kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa jumlahnya *jomplang* (terpatu jauh) dengan daerah-daerah lain. Ini perlu dianalisa untuk kemudian dicarikan solusinya.

Posyandu adalah lembaga kesehatan yang berbasis masyarakat. Posyandu diadakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat bersama-sama dengan masyarakat. Posyandu bermanfaat untuk memberikan layanan dasar dalam hal pelayanan kesehatan dasar misalnya untuk menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu. Posyandu dapat dibedakan dalam beberapa tingkat seperti Posyandu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Oleh karena itu, jika daerah-daerah tersebut yang hanya memiliki 2 posyandu, langkah yang perlu dilakukan adalah mencari masyarakat agar bisa berkerjasama untuk menjadi kader-kader posyandu yang militan yang siap berkontribusi untuk kemajuan masyarakat dalam bidang kesehatan.

L. Strata Posyandu Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Seperti telah dijelaskan bahwa posisi Posyandu sangat penting di masyarakat. Ia diadakan bersama masyarakat, oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam posyandu. Posyandu memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan di masyarakat seperti menekan agar angka kematian ibu melahirkan serta untuk menghindari angka kematian bayi. Di antara kegiatan utama posyandu adalah pengontrolan kesehatan ibu dan anak (KIA) dengan memberikan tablet penambah darah (TTD) minimal tiga kali pemberian, posyandu juga memantau pertumbuhan bayi dengan model timbangan bulanan, pemberian imunisasi, Keluarga Berencana dan pemberian oralit apabila muncul diare.

Dari sisi tingkatannya Posyandu dapat dibedakan dalam beberapa tingkat yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Tingkat pratama adalah tingkat pratama adalah tingkat posyandu yang belum fiks atau mantap. Kegiatan yang dilakukan belum bisa rutin untuk setiap bulan. Posyandu pratama memiliki kader yang terbatas. Posyandu pratama perlu mendapatkan pelatihan agar memiliki kader yang mapan. Kedua posyandu madya yaitu posyandu yang mampu menyelenggarakan kegiatan 8 kali setiap tahun. Kader posyandu sekitar 5 orang atau lebih, namun kegiatannya masih rendah dalam hal KB, KIA, Gizi dan Imunisasi. Kegiatan di bidang ini hanya 50 %. Posyandu ini sudah baik hanya perlu manambah cakupannya. Ketiga, Posyandu dalam tingkat purnama yaitu posyandu yang kegiatannya lebih dari 8 kali pertahun. Kader tugas posyandu ini sudah 5 orang atau lebih. Cakupan kegiatannya lebih dari 50 % dalam KB, KIA dan imunisasi. Posyandu purnama sudah ada program tambahan dan ada dana sehat walau masih sederhana dan terakhir posyandu tingkat mandiri yaitu posyandu yang dapat menelenggarakan kegiatan secara teratur, dapat melaksanakan 5 kegiatan utama secara bagus, memiliki data sehat yang menjangkau lebih 50 % KK serta memiliki program tambahan. Tingkatan

posyandu tersebut biasanya ditandai dengan warna. Posyandu pratama berwarna merah, posyandu madya berwarna kuning, posyandu purnama berwarna hijau dan posyandu mandiri berwarna biru. Jika dilihat kerja posyandu seperti ini peran-peran posyandu di masyarakat sangat dibutuhkan. Daerah-daerah dengan posyandu kecil tentu perlu untuk ditata dan dikelola secara serius. Data di bawah ini menunjukkan tingkat posyandu dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Sebelum melihat data yang ada di Kabupaten Ponorogo, harus terlebih dahulu mengetahui lima (5) program utama Posyandu yaitu pertama, program kesehatan ibu dan anak atau yang disingkat dengan KIA. Kedua, program Keluarga Berencana atau yang dikenal dengan KB, Ketiga, program imunisasi, Keempat, program gizi dan kelima adalah program pencegahan dan penanggulangan diare. Lima program ini yang menjadi salah satu standar untuk menjelaskan apakah program-program posyandu berjalan dengan baik sehingga memengaruhi pada peringkat posyandu di masyarakat. Dari semua posyandu yang ada di Kabupaten Ponorogo ada posyandu aktif dan ada yang tidak aktif sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.12
Strata Posyandu Masing-MasingKecamatan di
KabupatenPonorogoTahun 2021

No	Kecamatan	Strata Posyandu				PosyaduA Ktif
		Prata ma	Mad ya	Purn ama	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ngrayun	0	9	47	0	47
2	Slahung	0	6	63	0	63
3	Bungkal	0	0	67	4	71
4	Sambit	0	5	43	0	43
5	Sawoo	0	0	59	0	59
6	Sooko	0	12	17	0	17
7	Pudak	0	12	0	0	12
8	Pulung	0	18	53	0	53
9	Mlarak	0	9	42	0	42
10	Siman	0	5	41	0	41
11	Jetis	0	0	44	0	44
12	Balong	0	17	49	0	49
13	Kauman	0	2	52	0	52
14	Jambon	0	11	36	0	36
15	Badegan	0	8	31	0	31

16	Sampung	0	5	45	0	45
17	Sukorejo	0	5	54	4	58
18	Ponorogo	1	0	76	0	76
19	Babadan	0	2	58	0	58
20	Jenangan	0	8	64	3	47
21	Ngebel	0	8	29	0	29
	Jumlah Tahun 2021	1	135	982	11	993
	Jumlah Tahun 2020	0	125	992	10	1003
	Jumlah Tahun 2018	1	143	975	10	985
	Jumlah Tahun 2017	8	152	948	21	969
	Jumlah Tahun 2016	13	140	923	55	978
	Jumlah Tahun 2015	15	263	799	51	850

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo*

Dari seluruh kecamatan diatas, terdapat 1 kecamatan yang memiliki peringkat posyandu pratama, yaitu Ponorogo. Peringkat ini kembali disabet oleh Ponorogo setelah 2 tahun kebelakang ia tidak berhasil memperoleh dan pernah memperoleh di tahun 2018. Peringkat yang paling banyak diperoleh adalah Purnama yaitu suatu peringkat dimana kegiatannya lebih dari 8 kali pertahun serta memiliki kader tugas posyandu 5 orang atau lebih. Kegiatannya lebih dari 50 % dalam KB, KIA dan imunisasi. Jumlah posyandu dalam tingkat purnama ini adalah 982. Angka ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 992.

Sedangkan dalam tingkat madya baru terdapat 135 dan menunjukkan angka yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 125. Jika menelaah angka pada purnama yang menurun namun angka madya meningkat, artinya ada peningkatan peringkat pada posyandu di kabupaten Ponorogo.

Jumlah terbanyak kecamatan yang memiliki posyandu peringkat Purnama adalah Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 76 buah. Di bawah Kecamatan Ponorogo adalah Kecamatan Bungkal dengan jumlah 67. Sedangkan posyandu aktif di Kabupaten Ponorogo berjumlah 993. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan data sebelumnya yaitu 1003. Meskipun jumlah ini menunjukkan penurunan namun patut disyukuri bahwa peringkat posyandu dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus meningkat.

Posyandu tingkat mandiri dimiliki oleh 3 kecamatan yaitu Bungkal, Sukorejo, dan Jenangan. Angka ini meningkat dari sebelumnya hanya ada 2 kecamatan yang memiliki posyandu aktif, yaitu Bungkal dan Sukorejo. Ini tentu prestasi yang bisa ditiru prosesnya oleh kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Ponorogo. Semakin tinggi prestasi tingkat posyandu, tentu semakin baik manfaatnya untuk masyarakat.

Kehadiran posyandu harus didukung oleh semua pihak karena menyangkut perkembangan dan pertumbuhan serta psikomotorik bayi dan anak. Aspek perkembangan berhubungan dengan kognitif bayi atau anak, sedangkan aspek pertumbuhan berhubungan dengan kesehatan fisiknya serta kemampuan bayi dalam merespon berbagai kegiatan kehidupan atau aktifitas hidup. Pemberian gizi, imunisasi, diare, keluarga berencana, dan kesehatan ibu dan anak adalah kegiatan yang tidak hanya berfungsi untuk ibu dan anak tetapi untuk perkembangan bangsa di masa akan datang.

M. Jumlah penderita Anemia di Kabupaten Ponorogo

Anemia adalah kondisi di mana tubuh manusia tidak memiliki sel darah merah yang cukup dan sehat. Sel darah merah ini sangat penting karena berfungsi untuk memberi oksigen ke seluruh jaringan tubuh manusia. Ketika sel darah merah tidak tercukupi, maka oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh pun semakin sedikit. Dalam sel darah merah yang sehat terdapat hemoglobin, yaitu suatu protein yang mampu membawa oksigen. Penderita anemia tidak memiliki unsur hemoglobin yang cukup, artinya ia tidak memiliki protein penghantar oksigen.

Di antara penyebab anemia adalah di antaranya karena kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 atau asam folat, karena kehamilan (membutuhkan zat besi banyak), keluarnya darah, karena konsumsi obat-obatan tertentu, karena penyakit seperti penyakit ginjal kronis, kanker atau yang lain. Di antara tanda-tanda penyakit anemia adalah adanya rasa lemah atau lelah yang tidak seperti biasanya, muncul sakit kepala, kurang konsentrasi dalam berpikir atau mengerjakan sesuatu, kondisi cepat marah, sering mendapati kesemutan pada kaki dan tangan. Dalam kasus anemia yang parah akan menampilkan gejala seperti warna kulit pucat, adanya bisul pada mulut, bagian putih mata berwarna biru, lidah terasa sakit dan gejala-gejala lain. Berkonsultasi dengan petugas kesehatan adalah cara terbaik dalam mengatasi masalah ini untuk mendapatkan pengobatan dengan segera.

Data di kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa penyakit anemia masih menjadi penyakit lumayan besar di Ponorogo, hanya saja memang ada informasi dalam data bahwa dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2017 misalnya terdapat sekitar 5.789 orang yang menderita anemia, Kemudian jumlah ini menurun pada tahun 2018 yaitu 5168 orang. Jumlah ini turun drastis pada tahun 2020 yaitu 813 orang. Penurunan ini sangat signifikan.

Semakin pahamnya seseorang akan nutrisi dan kebutuhan gizi melalui media sosial atau informasi lainnya akan menjadikan kesadaran itu bersifat intrinsik, yaitu kesadaran karena pemahaman akan pentingnya suatu manfaat dan menghindari suatu bahaya. Kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang lemas memang tidak semuanya karena kekurangan sel darah merah, ada sebab-sebab yang beragam. Konsultasi dengan tenaga kesehatan akan mampu mendiagnosa sebab-sebab tersebut. Data di bawah ini menunjukkan bahwa ada kecamatan-kecamatan tertentu di Kabupaten Ponorogo yang nihil penyakit anemia. Artinya bahwa data yang tercatat dalam sarana kesehatan tidak ada. Di antara daerah yang nihil tersebut adalah Kecamatan Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sambit, Pudak, Mlarak, Balong, Kauman dan Babadan. Data di bawah memperlihatkan fakta tersebut, data yang dipaparkan dalam tabel masih menggunakan data tahun 2020 karena keterbatasan data di tahun 2021

Tabel 3.13
Jumlah Penderita Anemia di Kabupaten
Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	2	3
1	Ngrayun	0
2	Slahung	0
3	Bungkal	0
4	Sambit	0
5	Sawoo	149
6	Sooko	103
7	Pudak	0
8	Pulung	161
9	Mlarak	0
10	Siman	10
11	Jetis	41
12	Balong	0
13	Kauman	0
14	Jambon	28
15	Badegan	41
16	Sampung	27
17	Sukorejo	141
18	Ponorogo	71
19	Babadan	0
20	Jenangan	41
21	Ngebel	0
	JumlahTahun 2021	813

JumlahTahun 2020	813
JumlahTahun 2018	5167
JumlahTahun 2017	5789
JumlahTahun 2016	5638
JumlahTahun 2015	5017

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo*

Penderita anemia terbanyak adalah daerah Kecamatan Pulung, Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Sukorejo. Jumlah penderita anemia di Kecamatan Pulung adalah 161 orang, jumlah di Kecamatan Sawoo berjumlah 149 orang dan di Kecamatan Sukorejo berjumlah 141. Kecamatan yang sampai angka seratus lainnya adalah Kecamatan Sooko dengan jumlah 103. Jumlah besar ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi tenaga kesehatan. Apakah penyebab dari anemia tersebut, apakah karena kurang gizi, atau karena yang lain. Anemia bisa menyebabkan hal-hal serius apalagi pada ibu hamil. Seseorang harus waspada karena kondisi-kondisi akibat anemia adalah seperti tidak bisa melakukan aktifitas yang maksimal. Kondisi lelah terus menerus mengiringinya, memungkinkan masalah jantung seperti adanya gangguan irama jantung bahkan gagal jantung, anemia juga bisa menyebabkan masalah pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal. Jika terjadi pada ibu hamil akan mengakibatkan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah dan akan mengganggu pada perkembangan dan pertumbuhan bayi dan anak-anak.

Secara mandiri seseorang yang mengalami anemia bisa melakukan perbaikan diri seperti makan makanan yang kaya zat besi dan asam folat seperti daging, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti dan juga buah-buahan. Menambah makanan dengan komposisi vitamin B12 seperti susu, tahu dan tempe. Penambahan asupan buah-buahan juga penting seperti buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti tomat, jeruk, stroberi dan lain-lain. Kenapa pengobatan anemia penting dan segera? Jawabannya adalah karena anemia jika menyerang seperti telah dijelaskan seperti jantung atau yang lainnya akan mengakibatkan kematian. Jika tidak, maka akan mengganggu produktifitas seseorang. Tentu jika ini terjadi pada orang tua, akan dapat mengganggu penghasilan yang berimplikasi pada pembiayaan sekolah, masalah keluarga dan lain-lain.

N. Jumlah Penderita Penyakit Kronis di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Penyakit kronis adalah penyakit yang diderita oleh seseorang dalam jangka waktu yang lam. Biasanya penyakit tersebut diderita oleh seseorang lebih dari satu tahun. Penyakit kronis biasanya terjadi akibat dari pola hidup seseorang yang tidak sehat. Kadangkala penyakit ini pada awal kalinya tidak

disadari oleh penderita, hingga kemudian penyakit ini menjadi parah bahkan pada kasus tertentu bisa menjadi penyebab kematian. Yang dimaksud dengan pola hidup yang tidak sehat adalah makan dengan tanpa kontrol, makan dengan tidak memperhatikan berbagai aspek dalam tubuh seperti kolesterol, asam urat dan lain-lain. Ketidakbagusan dalam pola makan ditambah pula dengan jarang olahraga. Kelompok usia produktif antara 25-50 tahun memiliki resiko penyakit kronis, terutama bagi para pekerja kantoran, pekerja dengan menjadikan laptop sebagai sarana, duduk terlalu lama dan lain-lain.

Data tentang penyakit kronis di Kabupaten Ponorogo akan memperlihatkan beberapa hal. Pertama, tingkat kesadaran masyarakat akan hidup sehat seperti kebiasaan memakan makanan yang teratur dan tepat, kebiasaan olahraga, kebiasaan tidur dan lain-lain. Tingkat kesadaran masyarakat menunjukkan pula tentang tingkat pengetahuan seseorang tentang kesehatan. Semakin tinggi orang mengerti akan sesuatu, semakin tinggi kesadaran akan sesuatu tersebut. Dalam hal ini adalah tentang kesehatan dan penyakit. Kedua, tingkat pelayanan tempat kesehatan masyarakat. Apakah tempat layanan kesehatan masyarakat telah memadai untuk para penderita penyakit kronis apa belum. Pengukuran ini penting untuk melihat apakah layanan pemerintah dalam hal kesehatan telah maksimal atau tidak. Dengan demikian, tingkat layanan tempat kesehatan dalam kasus penyakit kronis ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk kecamatan dalam melihat kesehatan masyarakat serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah bisa membuat kebijakan *affirmative action* dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat kecamatan. Kecamatan yang memiliki kemampuan pelayanan baik akan mendapatkan reward. Demikian pula, tindakan pemerintah kecamatan yang mampu membuat kebijakan *extra ordinary* suatu tindakan di luar kebiasaan namun efektif dan efisien dapat diapresiasi pula.

Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa ada beberapa kecamatan yang penduduknya tidak memiliki penderita penyakit kronis yaitu Kecamatan Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sambit, Pudak, Mlarak, Balong, Kauman, Babadan dan Ngebel. Kecamatan ini memiliki penderita yang nihil. Ini adalah suatu kebanggaan. Namun penelitian lebih lanjut adalah apakah nihilitas ini sebagai sesuatu yang tidak terpantau oleh petugas kesehatan atau karena ada data yang tidak terekap, ataukah karena memang telah muncul kesadaran pada diri masyarakat. Jika problemnya adalah karena tidak ada data yang tercatat atau karena tidak terpantau, maka akan jadi lain perkaranya. Namun jika ditemukan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah atau tenaga kesehatan, maka model ini perlu mendapat apresiasi.

Dari data di bawah tampak bahwa penyakit yang berurusan dengan tukak lambung menempati posisi tertinggi yaitu berjumlah sekitar 7.495 untuk

penderita perempuan dan 4053 untuk penderita laki-laki. Masalah bagian perut adalah masalah terbanyak. Di bawah masalah lambung adalah penyakit yang berhubungan dengan infeksi lain pada saluran pernafasan bagian atas dengan jumlah 6183 untuk perempuan dan 4517 untuk laki-laki. Jika ditotal penderita masalah tukak lambung adalah 11.548 orang. Sedangkan untuk penderita infeksi saluran pernafasan lain bagian atas adalah 10.700. Jumlah ini untuk keseluruhan masyarakat Ponorogo terbilang tinggi. Dari semua penyakit tersebut, jenis kelamin perempuan adalah penderita terbanyak dari penyakit kronis ini. Perempuan dengan penderita tukak lambung terbanyak adalah kecamatan Sawoo yaitu 1406 orang. Di bawah Kecamatan Sawoo adalah Kecamatan Jenangan yaitu 1159. Sedangkan untuk infeksi lain pada saluran pernafasan bagian atas Kecamatan Jenangan adalah yang paling tertinggi yaitu 1136. Di bawah Kecamatan Jenangan adalah Kecamatan Badegan dengan jumlah 1921 orang. Penyakit kronis lain yang agak tinggi adalah penyakit kulit alergi dengan jumlah 3993 untuk laki-laki dan 2456 untuk laki-laki. Total penderita kulit alergi adalah 6449. Kecamatan Pulung dan Kecamatan Jambon adalah terbanyak dalam hal ini. Kecamatan Pulung berjumlah 626 orang dan Kecamatan Jambon berjumlah 568 orang. Data berikut akan memperlihatkan secara jelas masalah penderita tersebut. Data yang dipaparkan dalam tabel masih menggunakan data tahun 2020 karena keterbatasan data di tahun 2021

Tabel 3.14
Jumlah Penderita Penyakit Kronis di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No	Kecamatan	Penderita Penyakit Kronis									
		Jantung Iskemik + Demam Rematik Dan Penyakit Jantung Rematik		Tukak lambung (+ gastritis)		Infeksi Lain pada Saluran Pernafasan Bagian Atas		Penyakit Kulit Alergi		Penyakit Lain-Lain	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Ngrayun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Slahung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bungkal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sambit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sawoo	33	38	571	1406	410	619	201	309	28	37
6	Sooko	39	26	255	599	161	261	157	305	9	26

7	Pudak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pulung	17	25	309	988	42	89	280	626	25	2
9	Mlarak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Siman	13	3	59	135	81	149	41	80	0	0
11	Jetis	19	26	86	350	29	40	128	245	96	157
12	Balong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kauman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jambon	31	44	635	121	612	836	358	568	98	73
15	Badegan	0	0	516	873	1335	1921	211	301	29	141
16	Sampung	18	15	180	465	0	0	129	202	57	53
17	Sukorejo	29	34	266	653	132	210	253	525	34	51
18	Ponorogo	67	82	576	746	769	922	326	373	0	0
19	Babadan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jenangan	125	170	600	1159	946	1136	372	459	42	61
21	Ngebel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pudak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	391	463	4053	7495	4517	6183	2456	3993	418	601

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo*

BAB IV

KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN REMAJA

A. Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan

Perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, dan merupakan legitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara, sebagai suami isteri untuk menghasilkan keturunan. Keturunan inilah yang menjadi salah satu tujuan dari sebuah perkawinan, sehingga regenerasi manusia akan terus berlanjut.

Masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan merupakan "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pernikahan yang bahagia dan kekal, dapat terwujud jika calon suami atau istri sudah dewasa. Perdebatan tentang batas usia anak dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun resiko psikologis.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1-3, yaitu "(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan."

Revisi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia minimal perkawinan yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal. *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak. *Ketiga*, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga dimasa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.

Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia perkawinan dinilai memberikan dampak positif. Hal ini disebabkan karena pernikahan usia anak adalah hal yang sangat dilematis. Kasus pernikahan di bawah umur jarang atau sangat sedikit muncul ke permukaan, tetapi sesungguhnya banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih sangat kental ataupun factor ekonomi. Pernikahan usia anak ini menimbulkan masalah hukum. Di antaranya terjadi peningkatan angka perceraian akibat nikah di bawah umur sangat tinggi. Usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademisi hingga instansi.

Pada tahun 2021 jumlah perempuan yang menikah berjumlah 6.387 orang. Jumlah ini menurun 1.188 orang dibanding tahun sebelumnya yaitu 7.575 orang. Untuk yang menikah pada usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 2.634 orang. Disusul peringkat berikutnya adalah usia 26-30 tahun sebanyak 1683. Peringkat ketiga usia 16-20 tahun yaitu sebanyak 759 orang. Data lebih detail tersebut dipaparkan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan
(Status Kepegawaian/Pekerjaan Istri)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Usia	JML	Status Kepegawaian					
			TNI/ Polri	PNS	Swasta	Petani	Pedagang	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10-15 tahun	16	0	0	7	0	0	9
2	16-20 tahun	759	0	2	503	9	8	237
3	21-25 tahun	2634	0	52	1860	95	56	571
4	26-30 tahun	1683	2	35	1174	71	8	393
5	31-35 tahun	464	0	19	291	48	10	96
6	36-40 tahun	355	0	8	198	73	6	70
7	41-45 tahun	259	0	9	169	35	5	41

8	46-50 tahun	134	0	1	69	33	2	29
9	50 tahun ke atas	83	0	2	26	32	1	22
<i>Jumlah</i>		6387	2	128	4297	396	96	1468

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

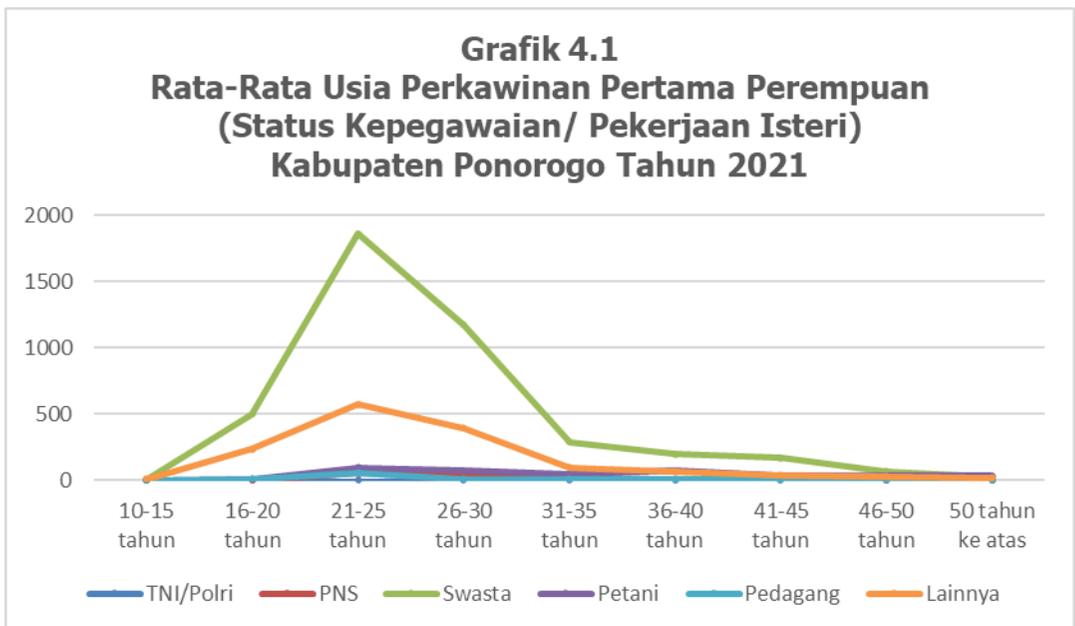
Data ini menunjukkan bahwa ada kesadaran masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia yang ideal, yaitu antara 21 – 30 tahun. Karena pada usia tersebut secara fisik dan mental sudah siap menghadapi kehidupan yang baru bersama suami atau isteri dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Akan lebih lengkap jika sebelum menikah calon pengantin memahami hal-hal yang bersangkutan paut dengan rumah tangga, seperti mengetahui hak dan kewajiban baik srebagai suami atau isteri, *hadlonah*, hubungan dengan social masyarakat, dan lain-lain yang mengarah kepada tercapainya tujuan dari dibentuknya sebuah keluarga.

Karena meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa batas minimal usia menikah ialah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun secara fisik dan psikis usia ideal menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menikah adalah bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 21 tahun. Perempuan yang sudah berusia 21 tahun secara fisik sudah mulai memiliki kesiapan emosional yang matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Begitupun dengan laki-laki yang sudah berusia 25 tahun dipertimbangkan sudah mampu menopang kehidupan keluarga dan siap menjalani rumah tangga.

Pernikahan usia remaja atau yang biasa disebut pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan yang rawan terjadi pada remaja. Selain dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas minimal usia pernikahan, pernikahan dini memberikan dampak yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, sosial, maupun kesehatan bagi masyarakat.

Pada tahun 2021 ada 775 kasus pernikahan dini, yaitu yang menikah di bawah 19 tahun. Jumlah ini menurun 286 kasus dibanding tahun 2020 yaitu sebanyak 1.061 orang. Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur tentu menjadi tugas pemerintah untuk mencari tahu sebabnya. Kampanye untuk tidak menikah di usia dini harus digalakkan, dan izin dispensasi nikah harus diperketat agar tidak terus terjadi kasus pernikahan dini. Di samping itu sosialisasi dan pemahaman yang mendalam tentang perkawinan dan dampak pernikahan dini juga harus terus disampaikan kepada para remaja agar mereka memahami dengan baik, sehingga cita-cita pemerintah untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dapat tercapai.

Adapun terkait masalah kepegawaian/status pekerjaan, yang paling tinggi jumlahnya adalah swasta, disusul jenis kepegawaian/pekerjaan lainnya dan yang ketiga adalah petani. Ini menunjukkan bahwa sektor swasta menjadi pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh kebanyakan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa untuk menikah yang dibutuhkan adalah keseriusan dalam menjalin hubungan. Masalah pemenuhan kebutuhan keluarga, tidak menjadi halangan masyarakat untuk menikah, karena masyarakat memiliki mindset bahwa setiap orang punya rizkinya masing-masing. Meskipun sebenarnya masalah ekonomi keluarga merupakan salah satu jenis PMKS yang harus ditangani oleh pemerintah. Data lengkap tentang rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menurut kepegawaian/status pekerjaan di Kabupaten Ponorogo lebih lanjut dapat dilihat dalam grafik 4.1 berikut.



B. Peserta Akseptor KB di Masing-Masing Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo

Indonesia telah menerapkan program yang membantu untuk membatasi meledaknya jumlah penduduk. Salah satu program tersebut ialah Keluarga Berencana, yang merupakan suatu program untuk membatasi jumlah anak yang lahir dari suatu keluarga dengan tujuan agar kehidupan yang ada dalam keluarga tersebut berkualitas dan sejahtera. Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Karena Keluarga Berencana adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan

jumlah penduduk, maka dari itu program KB ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Keluarga Berencana (KB) menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Hali ini bermakna bahwa perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, suntik dan lain sebagainya.

Dalam program keluarga berencana terdapat beberapa kontrasepsi yang dapat dipilih dengan kesesuaian yang tepat. Kontrasepsi tersebut pada dasarnya ialah mencegah atau mengatur fertilisasi yang ada dalam hubungan suami istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari keluarga berencana ialah mengatur secara berkala kehamilan yang ada dalam suatu keluarga dengan sengaja sesuai aturan hukum perundang-undangan. Akseptor adalah Peserta KB, yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sedangkan akseptor aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.

Akseptor baru adalah Pasangan Usia Subur yang baru pertama kali menggunakan alat/obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus.

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 berjumlah 170.961 pasang. Jumlah ini menurun 971 pasang dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 171.932 pasang. Sedangkan di tahun 2019, Pasangan Usia Subur berjumlah 171.117 pasang. Pasangan Usia Subur terbanyak di Kabupaten Ponorogo ialah di kecamatan Pulung yang berjumlah 11.451 pasang, kemudian kecamatan Sawo berjumlah 11.245 pasang dan kecamatan Jenangan berjumlah 11.102. Sedangkan yang paling sedikit ialah di kecamatan Pudak berjumlah 2.115 pasang dan kecamatan Ngebel berjumlah 3.716 pasang. Data detailnya dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Peserta Akseptor KB di Masing-Masing Kecamatan
Se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan District		Alat Kontrasepsi							Jumlah PUS	
		IUD	MOW	MOP	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah/ Total	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ngrayun	1.349	515	69	265	3.679	1.020	40	6.937	10.426
2.	Slahung	2.295	375	22	1.152	2.581	544	136	7.105	10.484
3.	Bungkal	1.850	315	19	821	1.188	314	260	4.767	7.107
4.	Sambit	1.535	337	3	766	1.896	1.061	376	5.974	8.860
5.	Sawoo	2.466	498	20	813	2.729	665	264	7.455	11.245
6.	Sooko	375	172	71	812	1.418	162	58	3.068	4.735
7.	Pudak	317	109	18	497	434	75	0	2.350	2.115
8.	Pulung	1.873	660	81	1.492	2.903	550	282	7.841	11.451
9.	Mlarak	998	177	7	403	1.803	246	124	3.758	5.579
10.	Siman	2.988	338	19	580	1.543	357	207	7.832	8.691
11.	Jetis	440	286	5	314	1.814	840	179	3.878	5.792
12.	Balong	1.994	143	36	641	2.317	346	93	5.570	8.363
13.	Kauman	1.923	317	9	552	1.583	376	178	4.938	7.515
14.	Jambon	1.032	196	39	958	3.262	494	176	6.157	9.113
15.	Badegan	649	218	6	708	2.028	240	83	3.932	5.921

16.	Sampung	1.454	272	3	384	2.161	380	90	4.744	7.085
17.	Sukorejo	2.022	296	10	961	2.382	647	462	6.780	10.099
18.	Ponorogo	2.148	599	10	247	1.297	300	172	4.773	10.720
19.	Babadan	1.854	352	8	258	2.846	556	289	6.163	10.797
20.	Jenangan	812	542	13	632	3.362	1572	338	7.271	11.102
21.	Ngebel	454	146	20	592	585	448	121	2.366	3.716
<i>Jumlah/ Total 2021</i>		30.828	6.863	488	13.848	43.811	11.193	3.928	110.959	170.961
<i>Jumlah/ Total 2020</i>		37.000	7.295	541	13.329	43.491	9.479	3.625	114.760	171.932
<i>Jumlah/ Total 2019</i>		37.887	7.382	579	13.077	43.072	9.165	3.542	114.704	171.117

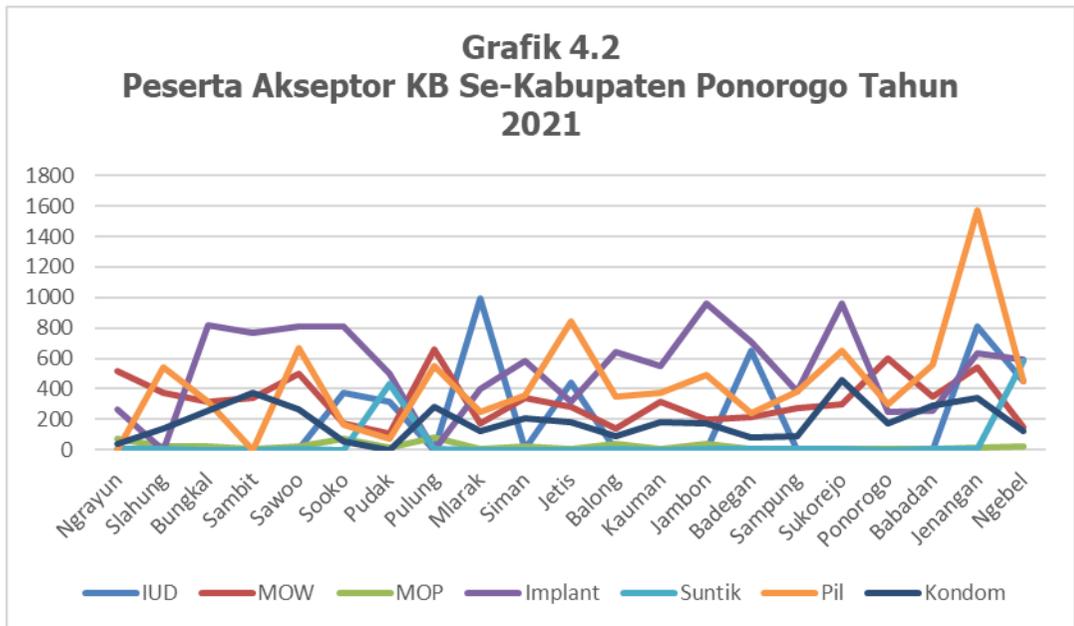
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Adapun jumlah akseptor KB pada tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo adalah 110.959 akseptor. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding dengan jumlah akseptor tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 dia angka 114.760 dan 2019 di angka 114.704. Selain data yang tercatat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, banyak pula masyarakat yang melakukan program KB secara mandiri. Masyarakat dapat membeli secara bebas alat-alat kontrasepsi ke apotik atau toko. Akibatnya akseptor yang membeli di tempat tersebut tidak terdaftar sebagai akseptor aktif. Beberapa alat kontrasepsi yang tidak bisa dibeli di apotik/toko seperti IUD, suntik dan implant tetap harus dilakukan pada tenaga kesehatan, sehingga data menunjukkan, penggunaan ketiga alat kontrasepsi tersebut, jumlahnya paling banyak dibanding kondom, MOW dan MOP.

Pada tahun 2021 ini akseptor yang menggunakan IUD menurun dari tahun 2020, yaitu dari 37.000 menjadi 30.828, MOW menurun dari 7.295 menjadi 6.863, MOP menurun dari 541 menjadi 488, Implant juga naik dari 13.329 menjadi 13.848. Sedangkan akseptor yang memilih suntik naik dari 43.491 menjadi 43.881 di tahun 2021.

Akseptor yang menggunakan pil meningkat dari 9.479 orang menjadi 11.193. Akseptor yang memilih menggunakan kondom jumlahnya juga meningkat yaitu dari 3.625 menjadi 3.928 akseptor. Data selengkapnya tentang

jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan akseptor KB di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dalam lampiran grafik 4.2 berikut.



C. Data Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus berupaya melakukan inovasi untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk program Tribina, yaitu program Keluarga Berencana yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Bina Keluarga Balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada di tingkat desa. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Hal ini tentu harus diperhatikan oleh setiap keluarga, mengingat anak adalah asset bangsa yang harus dijaga dan dibina agar menjadi generasi yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita atau anak balita. Untuk memberdayakan keluarga Batita (Bawah Usia Tiga Tahun) dan keluarga Balita (Bawah Usia Lima Tahun), seluruh jajaran pembangunan, termasuk kekuatan keluarga yang tergabung

dalam POSDAYA, diarahkan agar setiap keluarga memberi prioritas yang tinggi terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak balitanya. Orang tua dalam POSDAYA dapat disiapkan untuk menyegarkan kembali gerakan Bina Keluarga Balita (BKB), sebagai gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kesehatan, hantaran tumbuh kembang anaknya, deteksi dini kelainan atau kecacatan dan akhirnya menyiapkan anak balitanya siap sekolah bersama anak-anak lain.

Program Tribina merupakan program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang, baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja. Selain itu juga bertujuan agar orang tua dapat mengurus dan merawat anak dengan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar, meningkatkan ketrampilan dalam hal mengasuh dan mendidik agar melahirkan generasi muda yang berkualitas.

Sementara itu, pada program Bina Keluarga Remaja (BKR), kegiatannya dilakukan oleh sekelompok keluarga atau orangtua dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan terhadap tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah, sebagai langkah awal mereka untuk membangun keluarga yang berkualitas. Sedangkan pada program Bina Keluarga Lansia (BKL), merupakan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota dari kalangan lanjut usia, baik dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Jika keseluruhan program itu berjalan secara baik dan dinamis, pihaknya meyakini akan memicu keselarasan terhadap upaya membangun manusia Indonesia yang sejahtera dan memiliki daya saing dengan bangsa lain.

Dari tabel 4.4 di bawah ini dapat diketahui bahwa jumlah BKB di Kabupaten Ponorogo jumlahnya lebih tinggi dibanding BKR dan BKL. Untuk tahun 2021 jumlah BKB sebanyak 385 buah. Jumlah ini sama dengan tahun 2020 dan mengalami penurunan 79 buah dibanding tahun 2019 yang berjumlah 464 buah. Jika kita lihat dalam tabel 4.4 di bawah ini, selama 3 tahun terakhir jumlah BKB menunjukkan grafik yang naik turun, bahkan 2 tahun mengalami stagnan. Demikian pula dengan jumlah BKR pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan 1 buah, yaitu dari 97 buah di tahun 2020 menjadi 98 buah. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 141 buah, maka dapat dilihat mengalami penurunan sebanyak 43 buah. Penurunan jumlah BKB dan BKR tentu harus dicermati, mengingat program tersebut sangat baik untuk mewujudkan masyarakat Ponorogo yang berkualitas dan sejahtera.

Sedangkan jumlah BKL di tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 213, dan mengalami penurunan 1 buah dibanding tahun 2019,

yaitu 214 buah. Data lengkap tentang jumlah Tribina (BKB, BKR dan BKL) di Kabupaten Ponorogo lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Data Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Data Tribina			Keterangan
		BKB	BKR	BKL	
1	2	3	4	5	6
1	Ngrayun	14	1	7	
2	Slahung	34	1	7	
3	Bungkal	24	5	19	
4	Sambit	19	16	16	
5	Sawoo	18	6	8	
6	Sooko	9	1	2	
7	Pudak	6	1	1	
8	Pulung	19	18	18	
9	Mlarak	15	5	15	
10	Siman	19	1	5	
11	Jetis	15	7	9	
12	Balong	26	2	8	
13	Kauman	17	2	16	
14	Jambon	13	1	6	
15	Badegan	10	4	7	
16	Sampung	12	3	3	
17	Sukorejo	36	6	18	
18	Ponorogo	19	3	19	
19	Babadan	25	3	19	

20	Jenangan	22	6	6	
21	Ngebel	13	6	4	
	Jumlah Tahun 2021	385	98	213	
	Jumlah Tahun 2020	385	97	213	
	Jumlah Tahun 2019	464	141	214	

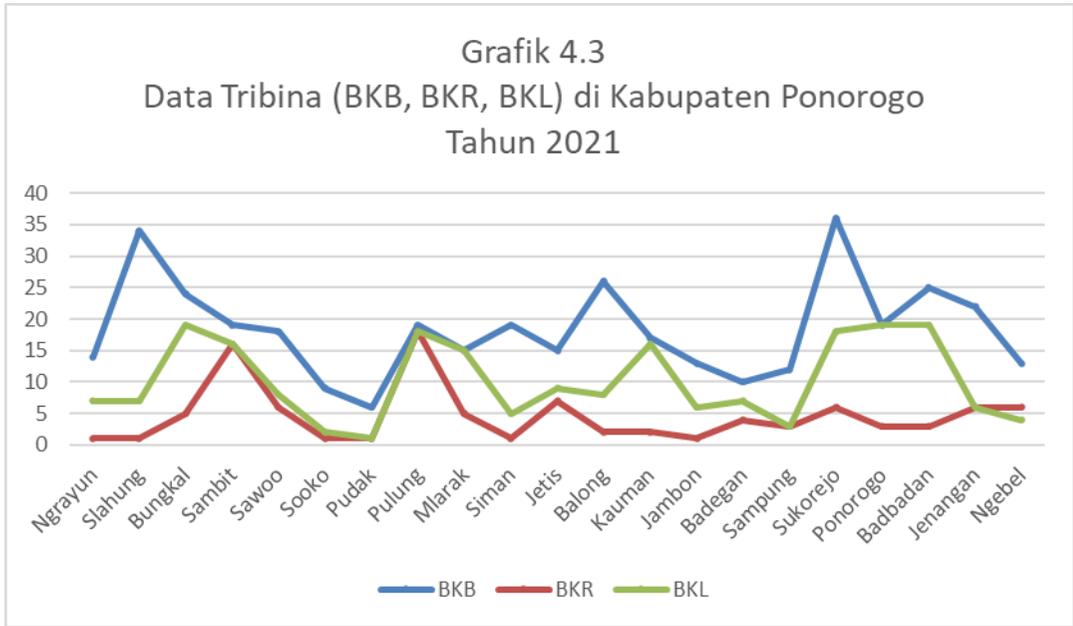
Sumber : *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo*

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus mendorong masyarakat untuk mendirikan kampung KB. Program kampung KB ini sudah dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 14 Januari 2016. Kampung KB diharapkan akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kampung KB dapat menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejewantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Manfaat kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Contoh program yang memberdayakan potensi masyarakat adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Misalnya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan yang bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Penggalian potensi dan pemberdayaan masyarakat data dilakukan misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan batik yang dilakukan di kampung-kampung KB yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Selain pelatihan membatik, pemerintah Kabupaten Ponorogo juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang berbeda sesuai dengan potensi masing-masing kampung KB yang ada. Misalnya dengan pemberian pelatihan pertukangan, rias manten dan pemberian pelatihan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk diketahui, Kampung KB terus tumbuh pesat dan di tahun 2021 ini jumlahnya sudah mendekati angka 15 ribu kampung KB yang tersebar di seluruh Nusantara. Sedangkan di Kabupaten Ponorogo jumlahnya ada 38 buah kampung KB yang tersebar seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Diantara wilayah yang termasuk kampung KB tersebut adalah Desa

Wilangan Sambit, Kelurahan Banyudono Ponorogo, Desa Coper Jetis, Desa Jarak Siman, Desa Pager Bungkal, Desa Suren Mlarak, Desa Blembem Jambon, Desa Prajegan Sukorejo, dan lain-lain. Grafik 4. 3 berikut menunjukkan data Tribina di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021.



D. Data PIK-R di Kabupaten Ponorogo

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai bidang.

Dinas PP dan KB Kabupaten Ponorogo membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) sebagai sarana komunikasi kepada remaja untuk memberikan informasi dan edukasi kepada remaja terkait masalah-masalah remaja seperti kesehatan reproduksi, narkoba, pernikahan dini, dan lain-lain. PIK-R adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Masa remaja seperti ini oleh Bank Dunia disebut sebagai masa transisi kehidupan remaja. Transisi kehidupan

remaja oleh Bank Dunia dibagi menjadi 5 hal (*Youth Five Life Transitions*). Transisi kehidupan yang dimaksud menurut *Progress Report World Bank* adalah:

1. Melanjutkan sekolah (*continue learning*)
2. Mencari pekerjaan (*start working*)
3. Memulai kehidupan berkeluarga (*form families*)
4. Menjadi anggota masyarakat (*exercise citizenship*)
5. Mempraktekkan hidup sehat (*practice healthy life*).

Program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang kehidupan yang kelima dari transisi kehidupan remaja dimaksud, yakni mempraktekkan hidup secara sehat (*practice healthy life*). Empat bidang kehidupan lainnya yang akan dimasuki oleh remaja sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya remaja mempraktekkan kehidupan yang sehat. Dengan kata lain apabila remaja gagal berperilaku sehat, kemungkinan besar remaja yang bersangkutan akan gagal pada empat bidang kehidupan yang lain.

Dari data-data yang berkaitan dengan gambaran perilaku sehat remaja, khususnya yang berhubungan dengan risiko TRIAD KRR (Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS), tampaknya sebagian remaja Indonesia berperilaku tidak sehat. Perilaku tidak sehat tersebut diantara adalah tentang seks pranikah, aborsi, narkoba HIV/AIDS perlu ditingkatkan pengetahuan dan bahayanya kepada para remaja, agar mereka terhindar dari hal-hal tersebut.

Sasaran yang terkait dengan pembentukan, pengembangan, pengelolaan, pelayanan dan pembinaan PIK Remaja, sebagai berikut:

a. *Pembina*

1. Pembina PIK Remaja adalah seseorang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah remaja, memberi dukungan dan aktif membina PIK Remaja, baik yang berasal dari Pemerintah,
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kepemudaan/remaja lainnya, seperti : Pemerintah: Kepala desa/lurah, camat, bupati, walikota, pimpinan SKPDKB.
3. Pimpinan LSM: pimpinan kelompok-kelompok organisasi masyarakat (seperti: pengurus masjid, pastor, pendeta, pedande, biksu) dan pimpinan kelompok dan organisasi pemuda.
4. Pimpinan media massa (surat kabar, majalah, radio dan TV)Rektor/Dekan, kepala SLTP, SLTA, pimpinan pondok pesantren, komite sekolah.
5. Orang tua, melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR), majelis ta'lim, program PKK.
6. Pimpinan kelompok sebaya melalui program Karang Taruna, pramuka, remaja masjid/gereja/vihara.

b. *Pengelola PIK Remaja*

Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul dan kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya.

Sedangkan ruang lingkup PIK Remaja meliputi aspek-aspek kegiatan pemberian informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*), pelayanan konseling, rujukan, pengembangan jaringan dan dukungan, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat remaja. 40 46 47

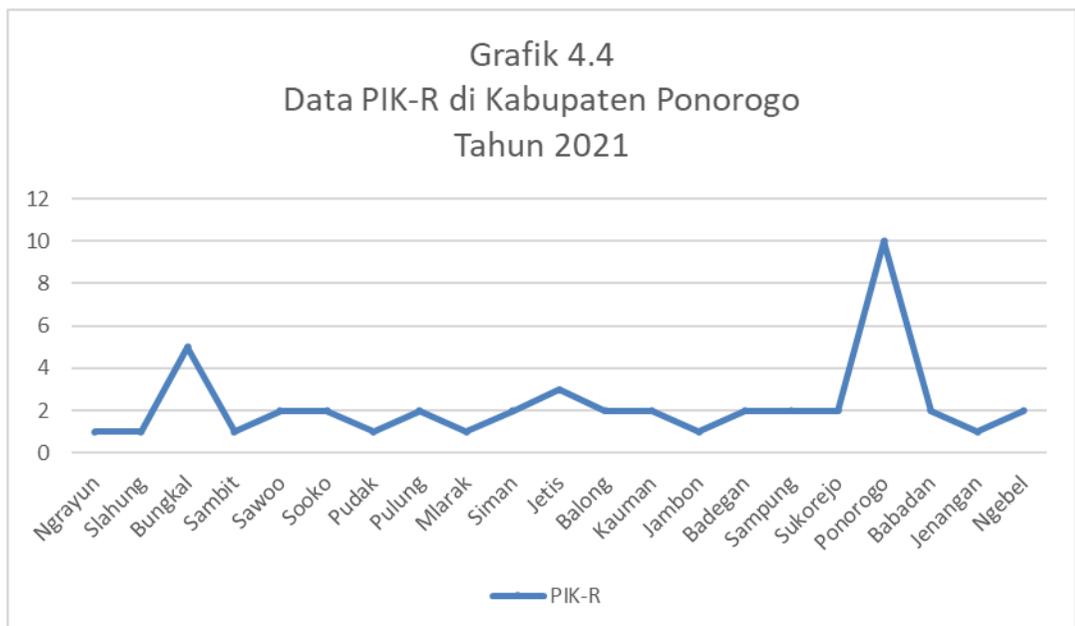
Dari data yang diperoleh, terjadi peningkatan jumlah PIK-R di kabupaten Ponorogo selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 berjumlah 40 buah, sedangkan pada tahun 2020 ini jumlahnya meningkat 6 buah menjadi 46 buah, dan bertambah 1 buah di tahun 2021 menjadi 47 buah. Lebih lanjut data tentang perkembangan PIK-R dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel dan grafik 4.4 berikut;

Tabel 4.4
Data PIK-R di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	2	3
1	Ngrayun	1
2	Slahung	1
3	Bungkal	5
4	Sambit	1
5	Sawoo	2
6	Sooko	2
7	Pudak	1
8	Pulung	2
9	Mlarak	1
10	Siman	2
11	Jetis	3
12	Balong	2

13	Kauman	2
14	Jambon	1
15	Badegan	2
16	Sampung	2
17	Sukorejo	2
18	Ponorogo	10
19	Babadan	2
20	Jenangan	1
21	Ngebel	2
	Jumlah Tahun 2021	47
	Jumlah Tahun 2020	46
	Jumlah Tahun 2019	40

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Ponorogo



Seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo telah memiliki PIK-R. Jumlah terbanyak PIK-R di Kabupaten Ponorogo terdapat di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Slahung sebanyak 3 buah, Kecamatan Ponorogo 10 buah,

Kecamatan Bungkal 5 buah, dan Kecamatan Jetis sebanyak 3 buah. Selain itu, 12 kecamatan memiliki 2 buah PIK-R dan selainnya hanya memiliki 1 buah PIK-R. Yang memiliki 1 PIK-R adalah Kecamatan Ngrayun, Slahung, Sambit, Pudak Mlarak, Jambon dan Jenangan. Adapun yang kecamatan yang memiliki 2 PIK-R adalah Kecamatan Sawoo, Soko, Pulung, Siman, Balong, Kauman, Badegan, Sampung, Sukorejo, Babadan dan Ngebel.

E. Generasi Remaja di Kabupaten Ponorogo

Masa muda adalah masa yang penuh dengan kreativitas dan kegairahan hidup. Generasi muda merupakan sebuah aset negara yang harus dikembangkan bakat dan kompetensinya agar perjuangan dan cita-cita bangsa terus ada di pundak para remaja. Salah satu bentuknya adalah dengan membuat wadah remaja di bidang bakat dan kompetensinya, di antaranya PIK-R yang telah dibentuk oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengadvokasi masalah-masalah remaja.

Di antara program pemerintah untuk memberdayakan remaja adalah program "GenRe", singkatan dari Generasi Remaja. GenRe adalah suatu program di bawah naungan BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. GenRe dalam bentuk subyek didefinisikan adalah remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bertindak dan berperilaku sebagai remaja untuk menyiapkan dan perencanaan menuju keluarga berencana.

PIK (Pusat Informasi & Konseling) Remaja sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (Generasi Berencana), yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi, KIE dan kependudukan.

Tujuan dari program GenRe adalah untuk memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana dalam hal jenjang pendidikan terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.

Program GenRe di Kabupaten Ponorogo telah terbentuk sejak tahun 2017. Sejak tahun terbentuknya sampai tahun 2021 ini, jumlah GenRe di Kabupaten Ponorogo belum bertambah, yakni baru 1 buah. Berbagai macam upaya dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo dalam mensosialisasikan program GenRe agar lebih dikenal masyarakat Ponorogo. Upaya tersebut adalah dengan membuat iklan di radio, membuat baliho di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Dengan upaya itu

diharapkan masyarakat bisa mengerti dan menindak lanjuti program pemerintah tersebut.

Selain sosialisasi lewat media cetak maupun elektronik, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga mengadakan lomba duta GenRe setiap tahun. Duta GenRe merupakan sebuah ajang pencarian sosok/figure bagi remaja yang diharapkan mampu menjadi idola bagi sebayanya dan mampu merencanakan masa depan dengan sebaik-baiknya. Lomba GenRe ini juga bertujuan untuk menebarkan informasi mengenai program GenRe kepada masyarakat sekitar khususnya remaja dan mahasiswa serta mewakili Kabupaten Ponorogo untuk pemilihan Duta GenRe tingkat provinsi Jawa Timur.

Mereka yang terpilih sebagai duta GenRe, memiliki tugas membina dan memberikan penyuluhan bagi masyarakat umum khususnya di tingkat remaja agar mengetahui tentang pola hidup yang baik dan terencana. Program ini memberikan manfaat bagi penekanan kenakalan remaja ataupun permasalahan kependudukan baik dalam bentuk nikah muda, seks pra nikah, bahkan NAPZA. Data tentang GenRe di Kabupaten Ponorogo lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel 4.5.

Tabel. 4.5
Data GenRe di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Jumlah Tahun 2021	1	
2	Jumlah Tahun 2020	1	
3	Jumlah Tahun 2019	1	
4	Jumlah Tahun 2018	1	
5	Jumlah Tahun 2017	1	
6	Jumlah Tahun 2016	0	

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Ponorogo

BAB V

KETENAGAKERJAAN

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Berbagai topik dibahas dalam kaitannya dengan tempat kerja. Pertama, dunia kerja terkait dengan kepuasan keinginan mendasar manusia, dan tidak hanya puas, tetapi juga pertanyaan apakah persyaratan mendasar ini konsisten dengan kondisi hidup yang sehat dan memadai. Pangan, sandang, pendidikan, dan papan adalah kebutuhan pokok (primer) manusia. Persyaratan ini harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, agar semuanya berjalan dengan baik. Seperti halnya makanan, kebutuhan kesehatan seseorang, seperti nutrisi, vitamin, dan mineral, harus diperhatikan. Dorongan makan dan minum merupakan kebutuhan mendasar yang menuntut tidak hanya rasa kenyang, tetapi juga kecukupan zat gizi untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Kebutuhan perkembangan meliputi karakteristik kognitif seperti kecerdasan dan kemampuan menanggapi informasi yang ditawarkan oleh orang lain, serta unsur emosional seperti empati terhadap orang lain dan kepekaan terhadap orang lain. Mengenai perkembangan, pola makan juga berpengaruh. Seseorang dengan gangguan mental, seperti karena kelaparan, tidak akan dapat berkomunikasi secara efektif. Demikian pula, makan memengaruhi pertumbuhan tulang, gigi, dan jaringan lainnya. Perkembangan ini mempengaruhi penampilan fisik seseorang. Salah satu faktor pertumbuhan adalah konsumsi makanan dan cairan. Seseorang yang makan lebih sedikit, kurang gizi, dan kekurangan vitamin akan mengalami masalah pertumbuhan, seperti kurus, pertumbuhan kurang optimal, dsb.

Kedua, masalah pasar tenaga kerja terkait dengan masalah pendidikan. Hubungan ini mencakup dua aspek: jaminan pendidikan sendiri dan jaminan pasca pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan warga negara yang bekerja. Mengenai jaminan pendidikan, dunia kerja terkait dengan kemampuan individu untuk menyelesaikan pendidikannya dengan biaya yang terjangkau. Seorang pekerja dengan gaji kecil akan sangat kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Sekolah dengan tingkat kualitas yang tinggi membebankan biaya pendidikan yang tinggi. Tenaga kerja orang tua harus mencukupi untuk membiayai pendidikan anak. Dunia kerja oleh karena itu berkaitan dengan masalah pendidikan anak. Di sisi lain, dunia kerja juga menuntut adanya kemampuan dan keahlian dari pekerja agar hasil produksi berkualitas sehingga mendapatkan konsumen yang memadai. Kualitas pekerjaan ditentukan dari skill, pengalaman dan keahlian pekerja. Sedangkan skill dan keahlian ditentukan dari pendidikan. Pendidikan, Akibatnya, berdampak pada kualitas manufaktur. Tidak heran jika dunia kerja mengharapakan masyarakatnya untuk mengenyam pendidikan tertentu karena

hal itu sangat penting bagi keberlangsungan dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang fokus dan terarah untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Pengertian link and match merupakan konsep pendidikan yang sejak awal telah disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja. Pendidikan bukanlah lembaga yang terpisah dari realitas kehidupan. Namun demikian, dunia ketenagakerjaan juga merupakan pusat distribusi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus terus mempelajari kesulitan hidup agar dapat menjadi solusi penyelesaiannya. Semakin besar jumlah lulusan yang bekerja atau diterima di dunia kerja di bidang studinya, maka semakin baik pula sekolah tersebut dalam memenuhi tuntutan dunia kerja.

Tidak heran jika Badan Akreditasi Nasional di ranah pendidikan menggunakan akseptabilitas alumni di dunia kerja sebagai salah satu kriteria penetapan status akreditasi perguruan tinggi. Semakin besar tingkat akreditasi lembaga pasca sekolah menengah, semakin tinggi tingkat penerimaan lulusan ke dunia kerja.

Ketiga, dunia ketenagakerjaan juga terkait dengan kemampuan negara untuk menyejahterakan warga negaranya. Penurunan tingkat pengangguran merupakan indikasi pencapaian. Tingkat pengangguran yang tinggi suatu negara merupakan indikasi bahwa pemerintahnya telah gagal mengelola sumber dayanya dan menciptakan lapangan kerja. Menyediakan pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja merupakan salah satu strategi untuk memerangi pengangguran. Salah satu indikasi keberhasilan suatu bangsa adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa ada jaminan pekerjaan negara untuk rakyat, tetapi lebih penting untuk memastikan bahwa upah minimum dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari mereka. Pada saat yang sama, terdapat dialektika interaksi antara upah atau gaji dengan kualitas dan keterampilan pekerja. Di sisi lain, kualitas dan keterampilan seseorang juga ditentukan oleh tingkat pendidikannya.

Berikut statistik partisipasi angkatan kerja berbasis pendidikan tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 5.1.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi
di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persentase Pengangguran Terbuka Terhadap Angkatan Kerja			
		Jumlah Angkatan Kerja			
			2019	2020	2021
1	2	7	8	9	10
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah				
2	Tidak/ Belum Tamat SD		1,49%	2,14%	2,16%
3	SD				
4	SMP		2,98%	5,12%	4,47%
5	SMA		5,91%	3,18%	8,43%
6	SMA KEJURUAN		9,95%	11,65%	7,76%
7	Diploma/ Akedemi		0,00%	12,82%	0,00%
8	Universitas		5,37%	6,14%	4,19%
Jumlah 2021			4,38%		
Jumlah 2020			4,45%		
Jumlah 2019			3,50%		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo

Tabel di atas menunjukkan jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikannya. Mayoritas pegawai di Kabupaten Ponorogo adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 246.846 orang. Hal ini menunjukkan bahwa banyak warga Kabupaten Ponorogo yang hanya tamat SD. Ada 96.245 lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah lulusan SD. Menyusul 51.334 lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan total 8.601 orang, level terendah adalah lulusan alumni, diploma, atau akademi. Ada sekitar 32.500 lulusan perguruan tinggi. Beberapa hal ditunjukkan oleh data ini.

Sebagai permulaan, banyak warga Kabupaten Ponorogo yang masih belum terdidik. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam pendidikan sama-sama buruk. Jika mengikuti pola sekolah memengaruhi pembayaran atau gaji, Anda mungkin yakin bahwa itu dibayar dengan adil. Mengapa demikian? Itu ada hubungannya dengan bakat dan kemampuan seseorang. Akibatnya, upah yang rendah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersier tambahan. Akibatnya, ada coretan dalam persoalan ini, seperti pendidikan anak yang tidak terjamin, pemenuhan

gizi yang kurang ideal, dan lain-lain. Sekolah dasar memiliki angkatan kerja yang besar, yang menunjukkan status pekerjaan mereka. Sebenarnya, lulusan pendidikan dapat meningkatkan daya negosiasinya jika memiliki keterampilan tambahan dari kursus, pelatihan, atau kualifikasi profesional lainnya. Kekuatan negosiasi lulusan sekolah dasar akan meningkat sebagai hasil dari kredensial ini. Keahlian, kompetensi, dan pengalaman dibutuhkan di tempat kerja.

Kedua, kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin agar generasi bangsa lulus dari sekolah dasar dan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pendidikan tidak hanya menangani tantangan pekerjaan ansich, tetapi juga kedewasaan dan kedewasaan dalam bekerja, pengaturan ekonomi keluarga, kepemimpinan keluarga, pengasuhan anak, dan masalah lainnya. Pendidikan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Pemikiran seperti ini memungkinkan lulusan perguruan tinggi untuk menciptakan lapangan kerja daripada hanya mencari pekerjaan. Cara berpikir ini mempersiapkan seseorang untuk menjadi pengusaha atau seseorang yang dapat mengelola perusahaan dengan jumlah orang yang signifikan. Negara Indonesia saat ini membutuhkan pola pikir kewirausahaan. Sekolah dan universitas saat ini sedang menumbuhkan mentalitas kewirausahaan agar karir lulusan menjadi dinamis daripada membosankan dan statis.

Ketiga, meningkatnya jumlah lulusan sekolah dasar yang memasuki angkatan kerja dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan daerah dan tingkat pengangguran suatu daerah, termasuk kabupaten. Tidak banyak lulusan SD yang memulai usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sedikit lapangan pekerjaan yang tersedia bagi lulusan sekolah dasar. Lulusan sekolah dasar sering dipekerjakan. Dia melamar suatu posisi. Pekerjaan yang juga dilakukan dengan skala kompensasi yang "rendah". Penduduk di daerah Anda harus memiliki keahlian dan bakat dalam berbagai profesi jika ingin menjadi penguasa di wilayah Anda sendiri. Banyaknya jumlah tenaga kerja dari luar daerah maupun tenaga kerja internasional menandakan bahwa tenaga kerja di daerah atau dalam negeri belum kompeten. Jika tidak, kepercayaan pada tenaga kerja regional atau domestik belum cukup terbangun. Fakta lainnya yang perlu dilihat adalah jumlah angkatan kerja dari perguruan tinggi. Belum ada data terpilah dari sisi pekerjaan yang dilakukan mereka. Apakah mereka para alumni sebagai "pencari kerja" atau "pembuka" lowongan pekerjaan. Pertanyaan ini penting karena apakah para alumni berposisi sebagai "kuli" atau sebagai "bos". Pertanyaan ini patut diajukan apakah para alumni perguruan tinggi pasca lulus menambah daftar pengangguran dan daftar para pencari kerja atau tidak. Ada batas toleransi alumni perguruan tinggi bekerja, misalnya batas toleransi itu adalah apakah setelah 6 (enam) bulan lulus apakah ia telah bekerja. Bekerjanya dimana? Bidang apa yang dilakukan? Jawaban-jawaban ini berguna tidak saja untuk bahan evaluasi perguruan tinggi, tetapi juga untuk para mahasiswa ketika dia memutuskan untuk kuliah. Putusan masuk perguruan tinggi bukanlah

putusan *ordinary* seperti hanya mengikuti teman, dorongan orang tua, daripada *naganggur* atau yang lain. Intensi masuk perguruan tinggi adalah intensi yang terencana dan terprogram. Seorang mahasiswa dapat merencanakan skill dan kemampuan apa yang harus didapat di perguruan tinggi tersebut, merencanakan kegiatan yang dilakukan serta menentukan target-target yang jelas dan terukur. Dengan demikian ia telah mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang siap kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Dalam kerangka ini, perguruan tinggi bisa menggandeng atau berkerjasama dengan dunia usaha dalam memberi penjelasan tentang peluang, usaha dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Keterlibatan pelaku usaha dengan perguruan tinggi adalah sangat penting bagi keberhasilan mahasiswa di masa akan datang.

Di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 akan ada 17.247 orang pengangguran. Pengangguran karena kurangnya pekerjaan disebut sebagai pengangguran terbuka. Mereka menganggur karena tidak melamar pekerjaan atau ditolak di tempat kerja. Angka ini sangat tinggi. Pemerintah harus memberi mereka pilihan pekerjaan yang relevan. Pekerjaan dapat diciptakan dengan memberi mereka pelatihan dan bantuan ringan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah mengadvokasi mereka dengan memberikan pelatihan dan uang tunai awal atau pinjaman lunak setelah pelatihan kerja. Namun upaya ini harus didampingi oleh pihak-pihak tertentu. Pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh semua pemangku kepentingan ini dapat dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

B. Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Tujuan bekerja adalah untuk mencari sumber-sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan dasar manusia adalah seperti tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, *_embaga_* dan *_embaga_*. Ini adalah kebutuhan primer manusia yang wajib atau mutlak dipenuhi. Sementara kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi, kehidupan masih berjalan normal hanya saja tidak sempurna. Contoh kebutuhan sekunder adalah kepemilikan sepeda motor untuk usaha dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan yang apabila tidak dimiliki tidak akan mengganggu apa pun seperti kebutuhan akan rekreasi, memakai baju yang modis dan lain-lain. Di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi diri. Maksudnya adalah seseorang bisa untuk mencurahkan segala kemampuan dan potensi diri untuk diaktualkan dalam ranah pekerjaan. Dalam wilayah aktualisasi ini, kreatifitas seseorang akan dapat dilihat. Aktualisasi dalam ranah psikologi adalah bagian dari kebutuhan manusia dalam mengeluarkan ke wilayah *_embag_* (di luar dirinya) tentang ide atau gagasan

yang dimilikinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat berguna bagi masyarakat untuk berbagai kepentingan.

Berbagai pekerjaan yang mungkin untuk diisi oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, _embaga_ pengolahan, listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, _embag dan perorangan. Melihat berbagai pekerjaan ini, sangat banyak peluang pekerjaan yang dapat diisi oleh tenaga kerja. Sangat mengherankan sebenarnya apabila ada warga negara yang tidak mendapatkan pekerjaan. Alasan utama pekerjaan tidak dapat diisi adalah karena tidak punya skill atau kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemampuan dan skill sebenarnya bisa dilatih dan bisa dipelajari.

Data menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling banyak diisi oleh tenaga kerja adalah bidang jasa kemasyarakatan dan perorangan yaitu berjumlah 485.830 dan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu 241.509. Kenapa bidang jasa kemasyarakatan banyak diisi oleh para pekerja? Jawabannya adalah cakupan yang luas dalam bidang ini yaitu seperti dokter, perawat, _embaga, pramugari, tukang sedot wc, body guard, pengacara, pilot, pemadam kebakaran, satpam, tukang parkir dan lain-lain. Demikian pula pada wilayah pertanian. Wilayah ini adalah bidang terbesar pekerjaan penduduk Kabupaten Ponorogo. Pada wilayah pertanian, _embaga_ besar adalah pada sawah berupa padi, belum ada pertanian dengan penghasian besar seperti berambang, melon atau yang lain. Di bawah dua jenis pekerjaan tersebut, jenis pekerjaan bangunan juga termasuk jenis pekerjaan yang paling banyak diisi. Termasuk bidang garap bangunan adalah seperti usaha _emb bangunan, pembuatan miantur atau maket bangunan, produsen besi begel, cakar ayam dan sejenisnya, usaha alumunium, desain bangunan, bengkel las atau besi dan lain-lain.

Hanya saja, belum didapatkan data terpilah dari jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Data terpilah penting untuk mengetahui masing-masing jenis kelamin dalam menjalani pekerjaan. Data terpilah akan memperlihatkan bidang pekerjaan yang paling banyak diikuti oleh laki-laki atau perempuan. Apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan karakter dan sifat perempuan dan laki-laki serta kemampuan apa yang perlu ditingkatkan. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah _embaga perpanjangan tangan pemerintah yang paling penting untuk menambah kemampuan atau skill masyarakat agar para pekerja memiliki daya tawar lebih tinggi serta dapat membantu dalam meningkatkan gaji mereka. BLK bisa bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha untuk menjelaskan berbagai peluang yang dapat diisi oleh para pekerja. Peluang-peluang usaha yang banyak bisa ditentukan dengan kesenangan,

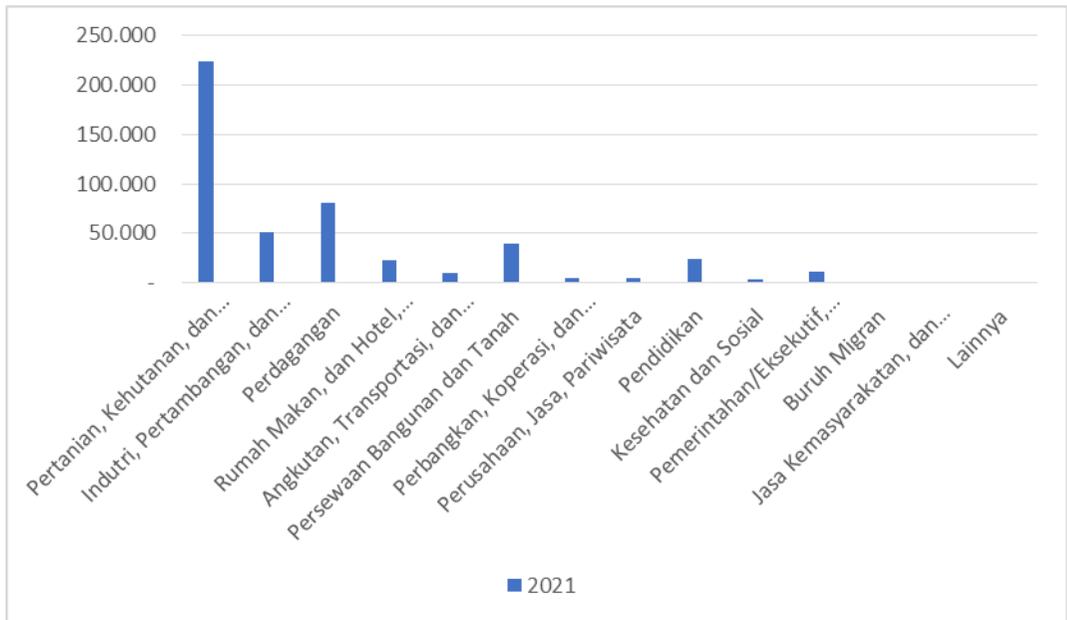
kesesuaian kondisi dan situasi serta yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Berikut adalah data tentang pekerja dalam lapangan pekerjaan utama.

Tabel. 5.2
Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			223.583
2	Indutri, Pertambangan, dan Energi			51.587
3	Perdagangan			80.064
4	Rumah Makan, dan Hotel, Pariwisata			22.301
5	Angkutan, Transportasi, dan Komunikasi			9.733
6	Persewaan Bangunan dan Tanah			39.822
7	Perbankan, Koperasi, dan Asuransi			4.968
8	Perusahaan, Jasa, Pariwisata			3.915
9	Pendidikan			23.512
10	Kesehatan dan Sosial			3.613
11	Pemerintahan/Eksekutif, Legislatif, TNI, Polri, dan Bidang Hukum			11.403
12	Buruh Migran			
13	Jasa Kemasyarakatan, dan Perorangan			
14	Lainnya			16.411
Jumlah 2021				500.941
Jumlah 2020				490.912
Jumlah 2019				491.137

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo

Grafik 5.2
Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021



Bedasarkan pekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 terdiri dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Industri, Pertambangan, dan Energi Perdagangan Rumah Makan, dan Hotel, Pariwisata Angkutan, Transportasi, dan Komunikasi Persewaan Bangunan dan Tanah Perbangkan, Koperasi, dan Asuransi Perusahaan, Jasa, Pariwisata Pendidikan Kesehatan dan Sosial Pemerintahan/Eksekutif, Legislatif, TNI, Polri, dan Bidang Hukum Buruh Migran Jasa Kemasyarakatan, dan Perorangan Lainnya. Dari data diatas bisa dilihat pekerjaan yang paling tinggi adalah pada sector pertanian Kehutanan, dan Perikanan.

C. Pekerja Tidak dibayar di Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Pekerja yang tidak dibayar adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang karena membantu orang lain, namun bantuan tersebut tidak mendapatkan upah baik upah berupa uang maupun barang. Biasanya pekerja tidak dibayar adalah karena membantu pekerjaan keluarga, seperti pekerjaan seorang istri membantu suami dalam bekerja. Pekerjaan itu seperti isteri membantu suami bekerja di sawah atau juga membantu suami dalam membeli barang untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah suami penjual bakso lalu isteri membantu pembuatan bakso dan menjualnya. Termasuk pula dalam pekerjaan ini adalah seorang anak membantu pekerjaan orang tua atau sebaliknya orang tua membantu pekerjaan anak.

Membicarakan angkatan kerja adalah membicarakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja yaitu mereka yang sudah berumur antara 15 tahun sampai 65 tahun. Namun bukan dalam arti semua usia dalam rentang tersebut termasuk angkatan kerja. Mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi bukanlah angkatan kerja seperti mereka yang masih sekolah (siswa dan mahasiswa), ibu rumah tangga juga tidak termasuk dalam angkatan kerja. Termasuk pula dalam bukan angkatan kerja adalah para pensiunan. Oleh karena itu, jumlah angkatan kerja ditentukan oleh jumlah penduduk termasuk jumlah penduduk laki-laki maupun jumlah penduduk perempuan. Walau jumlah penduduk perempuan lebih banyak, terkadang angkatan kerja perempuan lebih sedikit. Hal ini disebabkan oleh alasan bahwa ibu rumah tangga bukan termasuk angkatan kerja. Padahal usia produktif sebagai penghitung angkatan kerja adalah antara 15 sampai 65 tahun. Sungguh sangatlah banyak para perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dalam rentang usia ini. Angkatan kerja dibagi menjadi dua yaitu angkatan kerja aktif dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja aktif adalah usia penduduk dalam rentang usia kerja yang telah dijelaskan dan sudah bekerja. Sedangkan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan adalah masyarakat dalam usia kerja yang belum bekerja.

Data di bawah ini memperlihatkan bahwa angkatan kerja aktif di Kabupaten Ponorogo berjumlah 503.077 orang. Angka tersebut dibagi dalam angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Angkatan kerja laki-laki berjumlah 295.805 dan angkatan kerja perempuan berjumlah 207.272 orang. Angkatan kerja yang ada dalam tabel di bawah menunjukkan pula bahwa masyarakat yang bekerja berjumlah 520.324 orang dengan pembagian 306.970 laki-laki dan 213.354 pekerja perempuan. Dengan melihat mereka yang bekerja, tampaklah penduduk sebagai pengangguran terbuka, yaitu mereka yang belum mendapatkan pekerjaan dan tidak bekerja sama sekali. Jumlah mereka adalah 11.165 orang laki-laki dan 6.082 orang perempuan. Jumlah mereka dalam kategori pengangguran terbuka adalah 17.247 orang. Angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo yang menempati posisi pengangguran terbuka termasuk tinggi. Mereka bukanlah kelompok yang sedang menempuh pendidikan ataupun yang menjadi pekerja yang tidak dibayar seperti istri membantu suami dalam berjualan dan lain-lain.

Di antara jenis-jenis angkatan kerja dapat dibedakan dari angkatan kerja berdasar kerjanya dan angkatan kerja dilihat dari penganggurannya. Angkatan kerja berdasar kerjanya dapat dipilah menjadi bekerja maksimum dan bekerja setengah menganggur. Angkatan kerja maksimum adalah angkatan kerja yang bekerja lebih dari 8 jam sehari sampai 10 jam. Sedangkan setengah menganggur adalah sebaliknya. Adapun angkatan kerja apabila dilihat dari penganggurannya dapat dipilah menjadi dua juga yaitu pengangguran musiman yaitu menganggur karena musim menuntutnya menganggur seperti petani

menunggu panen; pengangguran siklikal (pengangguran karena naik turunnya masalah ekonomi; pengangguran struktural (pengangguran karena pergantian struktur), pengangguran teknologi yaitu suatu pengangguran karena adanya prosedur ekonomi dan pengangguran yang disebabkan kurangnya permintaan agregat yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh permohonan secara total dari masyarakat akibat kegiatan penanaman modal.

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo 70.87%. Angka tersebut dipilah menjadi 83.80% untuk jenis kelamin laki-laki dan 58.07% jenis kelamin perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketenagakerjaan penduduk. Apakah penduduk terlibat aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka ini memang bisa dianggap sebagai angka yang baik, namun juga belum sepenuhnya merefleksikan suatu kondisi yang membanggakan. Pemerintah perlu mendorong angkatan kerja yang pengangguran dapat mendapatkan pekerjaan. Seperti yang telah diuraikan, pemberian keterampilan serta pemberian modal awal dengan angsuran murah adalah salah satu solusi. Mereka dapat digolongkan sebagai pengangguran atau belum dapat pekerjaan adalah mereka yang dalam kategori tidak punya pengalaman kerja namun sedang dalam proses pencarian kerja. Termasuk dalam kategori pengangguran adalah mereka yang dalam posisi bekerja, namun sedang dalam pencacahan menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga terjadi untuk mereka yang diberi kebebasan dalam tugas tetapi juga sedang mencari pekerjaan.

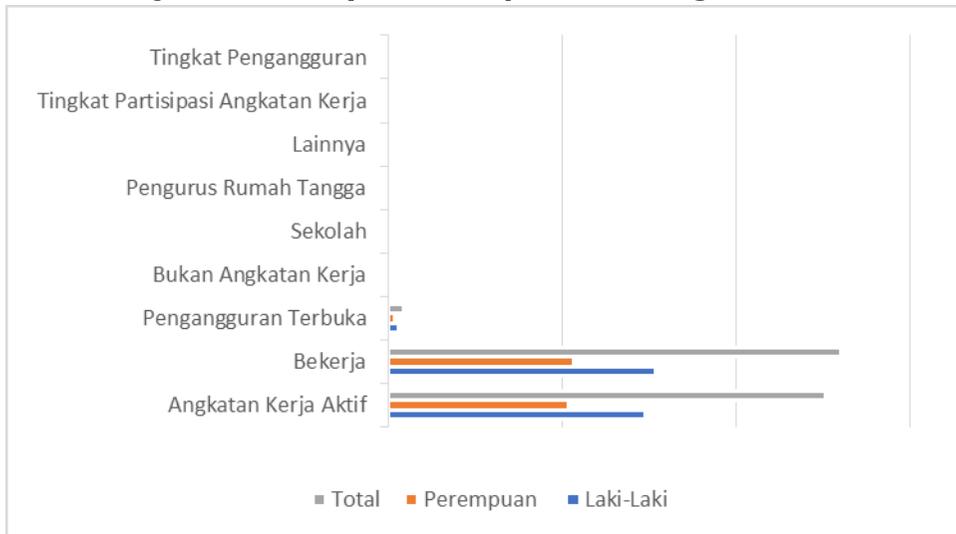
Tabel 5.3
Pekerja Tidak di Bayar di Kabupaten Ponorogo tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		TOT
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Angkatan Kerja Aktif	295.805	207.272	503.077
	Bekerja	306.970	213.354	520.324
	Pengangguran Terbuka	11.165	6.082	17.247
2	Bukan Angkatan Kerja			
	Sekolah			
	Pengurus Rumah Tangga			
	Lainnya			
3	Jumlah			
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83,80 %	58,07 %	70,87%

	Tingkat Pengangguran	3,77 %	2,93 %	3,43%
--	----------------------	--------	--------	-------

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo*

Grafik 5.3
Pekerja Tidak di Bayar di Kabupaten Ponorogo tahun 2021



D. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang dapat dikatakan sebagai pengangguran yang dilekatkan kepada seseorang yang ingin bekerja, memiliki kemampuan bekerja namun tidak menemukan pekerjaan. Pengangguran model semacam ini sangat banyak ditemui di masyarakat. Para alumni perguruan tinggi misalnya adalah mereka yang memiliki sertifikasi pendidikan namun ketika mencari pekerjaan mereka tidak mendapatkannya. Kenapa ini terjadi? Jawabannya adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan lapangan pekerjaan yang ada. Lulusan perguruan tinggi setiap tahun ribuan, namun yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak sama dengan yang diluluskan perguruan tinggi. Pengangguran model ini banyak ditemui di kota dari pada di desa. Alasannya adalah karena di desa mereka dapat meneruskan pekerjaan ekonomi keluarga seperti bercocok tanam, bertani atau yang lainnya. Lebih dari itu, kota sebagai pusat ekonomi dan kantor banyak diserbu oleh para pendatang baik dari desa atau dari luar kota untuk mengadu nasib dalam jenis-jenis pekerjaan yang sama, seperti pegawai kantor, karyawan perusahaann, karyawan hotel, karyawan supermarket dan lain-lain. Mereka disebut sebagai pengangguran "terbuka" karena sifat pengangguran dapat terlihat jelas. Bergelar sarjana, tetapi tidak bekerja atau

memiliki kompetensi tertentu tetapi tidak bekerja dan lain-lain. Oleh karena itu, pengangguran terbuka sering dihubungkan dengan pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang tidak tampak. Mereka tampak bekerja tetapi sebenarnya mereka memiliki pekerjaan yang minim. Mereka hanya bekerja dalam paruh waktu yang tidak penuh. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena mereka terlibat dalam pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan oleh banyak orang yang sesungguhnya pekerjaan tersebut jika kehilangan dirinya tidak terlalu bermasalah. Pekerjaannya banyak, tetapi pekerjaan yang dilakukan sedikit. Tidak seimbang antara pekerjaan dengan jumlah pekerjaannya.

Untuk mengetahui pengangguran terbuka dengan mudah dapat ditandai dengan pertama, orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan; kedua, orang yang tidak bekerja tetapi sedang mempersiapkan suatu usaha untuk dikerjakan; ketiga, orang tidak bekerja dan ia juga tidak berusaha mencari pekerjaan; keempat, orang-orang yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; kelima, orang yang sudah diterima bekerja namun belum mulai untuk bekerja. Intinya pengangguran terbuka adalah orang-orang yang tidak bekerja, belum bekerja atau sedang menunggu pekerjaan yang dijanjikan.

Apa yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung? Pertama, menciptakan pekerjaan sendiri. Caranya adalah menumbuhkan rasa berwirausaha yang kuat. Apabila belum memiliki keahlian, seseorang bisa mengikuti kursus keterampilan sehingga memiliki keterampilan. Jiwa *entrepreneurship* perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Kedua, memperbaiki kualitas diri saat menjadi siswa, mahasiswa dan lain-lain. Ini berarti berhubungan dengan pendidikan seseorang. Seseorang tidak hanya mempersiapkan nilai ijazah tetapi juga mempersiapkan skill sesuai dengan kemampuan yang diajarkan oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dalam hal ini dituntut untuk menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan dunia kerja. Lembaga pendidikan juga perlu untuk bekerjasama dengan pelaku usaha dalam menyusun kurikulum maupun dalam proses pembelajaran dalam bentuk kuliah tamu dan lain-lain. Ketiga, memberanikan diri untuk memulai usaha melalui apa yang paling disukai, seperti suka burung maka usahanya adalah usaha burung dan lain-lain, namun cara ini haruslah bertahap, mulai dari kecil, modal kecil dan mulai sekarang. Cara inilah yang dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia. Mereka memulai dari modal kecil, dari usaha kecil dan dari kelompok kecil. Keempat, membangun relasi dalam pekerjaan yang diminati. Membangun relasi penting dalam hal mengembangkan usaha. Kelima, campur tangan pemerintah dengan mempersiapkan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja baru perlu dibuka untuk mengisi kekosongan para pengangguran terbuka. Tidak mengherankan jika presiden misalnya menyebut angka pengangguran terbuka dalam berbagai kesempatan. Tujuannya adalah sebagai kerangka untuk mengatasinya. Namun biasanya cara kerja pemerintah

adalah bertahap. Beriringan dengan tahapan itu, jumlah lulusan sekolah juga bertambah. Akhirnya problem pengangguran terus ada. Yang paling mungkin adalah bahwa setiap orang berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Andaikan saja setiap lulusan di antara 100 orang misalnya ada 10 orang diantaranya adalah pelaku usaha kreatif dengan menrima karyawan 3 orang misalnya, maka beban pemerintah akan berkurang.

Di bawah ini adalah data tentang pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo berdasarkan pendidikan mereka.

Tabel 5.4
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan di Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
1	2	3	4	5
Tidak/Belum Pernah sekolah				
Tidak/Belum Tamat SD				
SD	246.846	101	246.947	
SMP	96.254	4.627	100.881	
SMA	51.334	3.447	54.781	
SMA Kejuruan	50.295	6.420	56.715	
Diploma/Akademi	8.601	377	8.978	
Universitas	32.500	2.275	34.775	
Jumlah/Total 2021	485.830	17.247	503.077	

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo*

Pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorog tergolong tinggi yaitu 503.077 orang. Jumlah pengangguran terbuka perempuan adalah 17.247 sementara pengangguran terbuka laki-laki adalah 485.830. Perbedaan jumlah ini diantaranya disebabkan oleh adanya istri yang bekerja sebagai rumah tangga tidak termasuk sebagai pengangguran terbuka. Data ini juga menunjukkan bahwa pengangguran terbuka banyak terjadi pada lulusan Sekolah Dasar yaitu berjumlah 246.947 dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki 246.846 dan jumlah perempuan adalah 101 orang. Pengangguran terbuka lainnya yang tinggi adalah lulusan SMP dengan jumlah 100.881 dengan deskripsi laki-laki berjumlah

96.254 dan perempuan berjumlah 4.627. Data ini memperlihatkan beberapa hal berikut.

Pertama, bahwa di Kabupaten Ponorogo masih banyak masyarakat yang hanya lulus Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Ini sesungguhnya adalah masalah serius bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah harus bekerja keras untuk mendorong mereka tetap sekolah melalui beasiswa, sekolah murah, insentif untuk kelompok miskin dan lain-lain. Sekolah adalah aspek paling terpenting bagi kemajuan bangsa. Kedua, bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki pengangguran yang banyak dan mereka adalah lulusan sekolah dasar (SD dan SMP). Tidak hanya itu, lulusan perguruan tinggi pun demikian. Jumlah mereka adalah sekitar 34.775 orang dengan pembagian jumlah laki-laki adalah 32.500 dan jumlah perempuan adalah 2.275. Pemerintah dengan semua perangkat serta masyarakat yang peduli untuk memikirkan ini dengan kegiatan yang ekstra ordinary agar masalah ini terselesaikan dalam jangka waktu yang tidak lama. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak kejadian yang mengiringinya seperti perampokan, pencurian dan penyakit-penyakit sosial lainnya.

E. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Ponorogo dalam Tahun 2021

Upah minimum adalah upah minimal yang menjadi hak bagi pekerja untuk menerimanya.. Upah minimum ditentukan secara berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kabupaten Ponorogo misalnya berbeda dengan Kabupaten Banyuwangi misalnya. Biasanya penentuan upah minimum kabupaten ditentukan dari saran dan maskan dewan pengupahan kabupaten. Jika upah minimum itu adalah berada di tingkat provinsi maka pertimbangannya adalah dewan pengupahan provinsi. Dengan upah minimum, gaji yang diberikan kepada pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hidup. Upah minimum oleh karena itu berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lain disebabkan oleh perbedaan kebutuhan hidup di suatu daerah pekerjaan. Upah minimum Jakarta dan Surabaya misalnya akan berbeda dengan Upah Minimum di Kabupaten Ponorogo.

Penetapan upah minimum kabupaten merupakan bagian dari responsi pemerintah terhadap keberpihakan kepada para pekerja. Pekerja harus dibela hak-haknya. Pekerja harus mendapatkan perlakuan yang layak. Pemerintah yang tidak membela pekerja, maka pemerintah tersebut dianggap membela kelompok borjuis. Pemerintah yang pro rakyat adalah pemerintah yang memperjuangkan hak-hak pekerja agar mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan di suatu daerah. Kebutuhan suatu daerah tersebut meliputi harga-harga bahan pokok yang ada di daerah tersebut.

Melihat perkembangan upah minimum kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun tampak bahwa ada peningkatan walaupun bertahap. Hal ini misalnya

dalam jangka waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada tahun 2015 misalnya upah minimum kabupaten adalah 1.150.000. Upah ini meningkat menjadi 1.913.321 di tahun 2021. Prosentase kenaikan dapat dilihat pada tabel di bawah. Inti yang harus diperhatikan adalah bahwa pekerja harus dimanusiakan dengan cara menghargai tenaga mereka dalam bentuk upah yang sesuai. Relasi pekerja dengan pemilik pekerjaan adalah relasi simbiotik. Pemilik pekerjaan tidak akan bisa menjalankan pekerjaannya atau roda ekonomi jika tidak dibantu oleh para pekerja. Demikian pula pekerja tidak akan dapat penghasilan jika tidak bekerja di tempat pemilik pekerjaan. Relasi mereka adalah saling terkait yang menguntungkan. Jika terjadi masalah yang merugikan satu pihak, dialog-dialog dapat dilakukan baik secara personal maupun organisasi yang memayungi seperti serikat pekerja dan lain-lain. Pemerintah dalam hal ini dapat menjadi mediator yang paling bagus dalam memecahkan masalah apabila terjadi ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan upah.

Pembelaan pemerintah kepada pekerja melalui penetapan upah minimum yang sesuai adalah wujud dari pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini pemerintah memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup bahagia, sejahtera dan dapat hidup layak di negara Indonesia. Lebih dari itu, upah minimum juga menjadi tanda bahwa masyarakat Indonesia menikmati hasil pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui sektor ekonomi. Dengan demikian terlihat adanya pemerataan ekonomi bagi semua masyarakat termasuk masyarakat dalam kategori kurang mampu.

Pekerja biasanya adalah kelompok yang menjadi daya tarik bagi kepentingan politik tertentu. Pekerjaan adalah salah satu program yang sering ditawarkan oleh kelompok kepentingan politik. Setiap orang atau setiap warga berhak untuk memperhatikan apakah pemimpin memiliki kepedulian dengan kelompok pekerja dalam hal upah. Apakah pemerintah yang berkuasa memberikan perhatian serta melakukan kerja-kerja terukur untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat melalui peningkatan upah minimum dan lain-lain. Rakyat yang cerdas adalah rakyat yang berani menyampaikan aspirasinya melalui jalur-jalur yang dilegalkan. Demikian pula tindakan masyarakat cerdas untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil mereka yang duduk di parlemen. Pada waktu tertentu, wakil rakyat melakukan permintaan aspirasi dari para konstituen, masalah upah kerja minimum bisa menjadi bahan diskusi atau bahan masukan bagi anggota parlemen dalam rapat-rapat mereka.

Tuntutan pekerja kepada pemilik pekerjaan maupun pemerintah tidak harus dilakukan dengan cara sembarangan, tetapi berdasarkan kepada data dan fakta tentang status tempat kerja. Artinya tuntutan yang terlalu berlebihan akan menjadikan roda ekonomi tempat bekerja tidak stabil. Tuntutan upah minimum pun ditentukan tidak saja dari berbagai kebutuhan pokok kehidupan masyarakat tetapi juga oleh kondisi tempat kerja (pabrik, perusahaan, home industri dan lain sebagainya). Hal ini disebabkan oleh paradigma yang dibangun antara

pekerja dan tempat pekerjaan adalah paradigma komunikasi yang simetris bukan sekedar paradigma kerja yang asimetris. Berikut adalah tabel peningkatan upah minimum yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 5.5
Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Ponorogo
Tahun 2015 s.d 2021

No	Tahun	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Perkembangan
1	2015	1.150.000	Naik 13,04 %
2	2016	1.283.000	Naik 10,36 %
3	2017	1.388.000	Naik 7,56 %
4	2018	1.509.816,12	Naik 8,07 %
5	2019	1.763.267,65	Naik 14,37 %
6.	2020	1.913.321	Naik 13,04 %
7.	2021	1.938.321,73	Naik 1,29 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo

F. Jumlah Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Menjadi buruh migran saat ini masih menjadi daya tarik sebagian masyarakat. Alasannya adalah pergi keluar negeri untuk bekerja adalah cara instan untuk mendapatkan apa yang diinginkan seperti membangun rumah, membeli sawah, modal kerja atau yang lainnya. Dalam membangun rumah misalnya, seseorang akan membutuhkan waktu lama jika bekerja di dalam negeri. Membangun rumah sering dijadikan sebagai alasan untuk menjadi buruh migran. Tidak heran, jika suatu daerah agak terpencil misalnya, lalu ditemui rumah bagus, maka sebagian orang akan mengatakan “*dun-dun an korea*” (uang hasil kerja di negara Korea). Menjadi buruh migran disebut sebagai cara instan disebabkan cara memerolehnya yang cepat. Hanya dua tahun misalnya seseorang bisa mengumpulkan uang yang banyak untuk kebutuhan membangun rumah. Kedua, bekerja di luar negeri biasanya dapat dilakukan oleh perempuan. Dengan cara perempuan bekerja, ini berarti tidak akan mengurangi pekerjaan laki-laki atau suami di rumah. Suami bisa menjaga anak, merawat keluarga dan mengerjakan sawah atau ladang. Isteri yang biasanya di rumah tidak berpenghasilan, dengan bekerja di luar negeri akan mendapatkan pekerjaan dan menambah penghasilan. Dengan bekerja di luar negeri,

suami-isteri bekerja secara bersama-sama. Ketiga, bekerja di luar negeri menjadi pilihan karena nilai mata uang luar negeri memiliki nilai lebih tinggi di banding nilai mata uang dalam negeri. Dengan sedikit gaji yang diperoleh sebenarnya untuk ukuran daerah tempat bekerja, namun ketika di tukarkan ke dalam mata uang Indonesia, nilai mata uang tersebut terlihat banyak. Keempat, keinginan kerja di luar negeri disebabkan oleh pekerjaan salah satu pasangan (suami atau isteri) kurang maksimal di dalam negeri. Dengan kesepakatan bersama, salah satu di antara mereka bekerja di luar negeri. Hal ini jika yang bekerja adalah suami atau isteri. Namun, sering juga dijumpai mereka berangkat ke luar negeri masih muda, belum menikah, laki-laki maupun perempuan. Motivasi utama biasanya adalah ingin membantu orang tua, dan jika ada tambahan untuk modal menikah atau persiapan di hari tua dengan menginvestasikan uang yang dimiliki untuk masa tua seperti membeli tanah, modal usaha, membeli sapi dan lain sebagainya. Di balik keuangan yang melimpah, sebenarnya bekerja di luar negeri memiliki akibat yang tidak jarang ditemui.

Pertama, perpisahan yang lama seringkali menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga seperti suami tidak memanfaatkan kiriman uang dengan semestinya, sang isteri lalu mengetahui perilaku suami dan menuntut cerai. Seringkali dijumpai pula, suami atau isteri mengkhianati cinta salah satu pihak, baik yang ada di rumah maupun di luar negeri. Ketika perdamaian tidak mungkin dilakukan maka perceraian dilakukan, bahkan ditemui ada salah satu rumah yang telah dibangun hasil kerja di luar negeri misalnya terpaksa harus dihancurkan akibat ketidaksetiaan pasangan. Data menunjukkan bahwa banyak motif perceraian adalah ketidakcocokan akibat salah satu pasangan bekerja di luar negeri. Waktu kontrak yang terus diperpanjang selama 2 tahun sekali misalnya, menyebabkan perpisahan itu menjadi panjang. Hal ini memang rawan terhadap konflik keluarga bahkan perceraian.

Kedua, ditemui menegerial keuangan yang salah, yaitu hasil bekerja hanya untuk kepentingan konsumtif seperti membeli sepeda motor, membangun rumah, membeli mobil, membeli perkakas rumah tangga dan lain-lain. Sedikit di antara mereka yang berpikir produktif. Hal-hal konsumtif adalah sesuatu yang berkurang nilainya dengan berlalunya waktu. Sepeda motor yang awalnya memiliki harga 25 juta misalnya beberapa tahun kemudian akan menjadi menurun. Lain halnya dengan sesuatu yang produktif. Semakin lama-semakin naik harganya seperti sawah, ladang atau yang lainnya. Kegiatan produktif juga dapat diwujudkan dalam bentuk usaha. Suami atau isteri yang dipercaya dan setia adalah suami atau isteri yang mempergunakan hasil kiriman uang salah satu pasangan untuk kegiatan produktif seperti membuka toko, membuka usaha transportasi, usaha jasa dan lain-lain. Membangun rumah adalah hal kemudian dari hasil usaha tersebut. Kegiatan produktif akan

menjadikan seseorang harus membatasi diri dalam bekerja di luar negeri dan menuntut dirinya untuk mengurus hasil usaha dalam negeri. Banyak ditemui, seorang suami, baru beberapa bulan isteri bekerja di luar negeri, untuk membuktikan kesuksesan isteri membeli barang-barang mewah seperti motor dengan harga mahal. Terkadang, keinginan membeli motor tersebut tidak hanya datang dari suami tetapi dari pihak isteri. Inilah salah satu sebab, mereka yang menjadi buruh migran tidak segera pulang ke tanah air. Pulang dalam masa cuti misalnya membuat dirinya "bingung", merasa menjadi orang asing, tidak ada pekerjaan. Solusinya kembali menjadi buruh urban.

Ketiga, akibat menegerial keuangan yang salah, masa bekerja di luar negeri selalu diperbaharui. Akibatnya pendidikan anak menjadi bermasalah, ada yang putus sekolah, akhlak dan moralitas anak memperhatikan. Jika ini yang terjadi di mana letak kebahagiaan keluarga itu? Bukankah dalam kajian agama, kebahagiaan itu ditandai oleh empat hal, yaitu isteri atau suami yang baik, anak yang baik, teman yang baik dan tempat pekerjaan yang tidak jauh dari rumah. Anak yang baik misalnya adalah anak dengan pendidikan terjamin, mengalami proses-proses pendidikan yang sesuai serta tingkat moralitas yang pula. Demikian pula dalam hal pekerjaan. Tempat kerja yang jauh adalah indikator ketidakbahagiaan. Tempat kerja jauh menjadikan keluarga khawatir (ketika musim hujan, ketika pulang malam, ketika jalan ramai dan lain-lain). Kebahagiaan tidak dilihat dari berapa besar uang yang dimiliki. Kebahagiaan juga tidak ditentukan dari bentuk rumah yang mewah dan kendaraan yang mahal, tetapi kebahagiaan itu adalah ketika semua orang dalam keluarga menyenangkan dan bertindak sesuai norma-norma agama dan sosial.

Keempat, bekerja di luar negeri mengakibatkan keseimbangan kontrol masing-masing tidak terjadi. Tidak saja kontrol untuk relasi mereka, tetapi juga kontrol atas pendidikan anak. Kehilangan kontrol ini, tidak jarang dijumpai, perempuan dipengaruhi oleh budaya tempat mereka bekerja seperti rambut pirang, celana model robek-robek, gaya meletakkan tas, pakaian yang digunakan, dan lain-lain. Akhirnya mereka kehilangan identitas dan kehilangan nilai-nilai kebudayaan lokal yang diharapkan terus dipertahankan.

Berikut adalah jasa tenaga kerja Indonesia Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

Tabel 5.6
Jumlah Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

KECAMATAN	PENYEDIA JASA TENAGA KERJA		JUMLAH
	L	P	
1	2	3	4

1. Ngrayun			
2. Slahung		2	2
3. Bungkal		1	1
4. Sambit			
5. Sawoo			
6. Sooko			
7. Pudak			
8. Pulung			
9. Mlarak			
10. Siman	1	1	2
11. Jetis	2		2
12. Balong			
13. Kauman			
14. Jambon			
15. Badegan			
16. Sampung			
17. Sukorejo			
18. Ponorogo	5	2	7
19. Babadan	8	9	17
20. Jenangan	4	2	6
21. Ngebel			
Jumlah/Total 2021	20	17	37
Jumlah/Total 2020	20	17	37
Jumlah/Total 2019	15	16	31
Jumlah/Total 2018	22	16	38
Jumlah/Total 2017	22	14	36
Jumlah/Total 2016	12	14	26
Jumlah/Total 2015	12	12	24

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo*

Jumlah penyedia jasa tenaga kerja di Ponorogo pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Pada tahun 2019 misalnya penyedia jasa tenaga kerja berjumlah 31 yang terdiri dari penyedia laki-laki berjumlah 15 menjadi 20 di tahun 2021. Tetapi penyedia jasa perempuan bertambah 1 yang semula 16 menjadi 17. Banyaknya jasa penyedia jasa bekerja di luar negeri menandakan bahwa minat bekerja di luar negeri masih menarik dan dicari oleh warga Kabupaten Ponorogo. Wajar saja jika Kabupaten Ponorogo bersama daerah lain seperti Banyuwangi dan Tulungagung termasuk penyumbang buruh migran terbanyak di Jawa Timur.

Jumlah penyedia jasa tenaga kerja tahun 2021 adalah 37. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Babadan yang berjumlah 17 dan disusul daerah Kecamatan Ponorogo yang berjumlah 7 orang. Banyaknya penyedia jasa layanan memungkinkan para pesertanya untuk memilih jasa tenaga kerja yang dapat dipercaya, memiliki pengalaman bagus dan lain-lain.

G. Jumlah Tenaga kerja indonesia (TKI) yang Berangkat ke luar negeri Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.

Seperti telah dijelaskan, penyedia jasa tenaga kerja untuk Kabupaten Ponorogo terbilang banyak yaitu 31 penyedia jasa. Banyaknya jumlah penyedia jasa ini menunjukkan adanya minat yang banyak pula dari masyarakat Ponorogo. Dalam beberapa tahun penyedia jasa ini masih bertahan. Artinya, dari sisi bisnis, bisnis penyedia jasa ini masih memberikan keuntungan bagi pelakunya. banyaknya jumlah penyedia jasa yang disebabkan banyak pula peminat pekerja buruh migran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.7
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Berangkat ke Luar Negeri Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 – 2021

Kecamatan		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1		2	3	4	5	6	7
1	Lain-lain	137	74	30	12	9	
2	BABADAN	193	710	67	181	4	29
3	BADEGAN	64	190	23	37	3	10
4	BALONG	255	488	66	96	5	25
5	BUNGKAL	160	370	52	96	5	16
6	JAMBON	262	492	57	112	9	23
7	JENANGAN	248	738	49	164	9	40
8	JETIS	57	191	22	46	5	11
9	KAUMAN	196	397	36	108	2	18
10	MLARAK	81	180	15	44		8
11	NGEBEL	66	179	12	35		13
12	NGRAYUN	76	185	21	52	1	5
13	PONOROGO	81	574	26	118	1	20
14	PUDAK	18	41	2	8	2	1
15	PULUNG	117	390	32	79	2	17
16	SAMBIT	93	243	23	39	2	12

17	SAMPUNG	104	290	28	73	1	17
18	SAWOO	174	298	50	58	4	15
19	SIMAN	86	328	22	70		12
20	SLAHUNG	214	412	47	89	4	18
21	SOOKO	37	107	19	21		6
21	SUKOREJO	198	737	60	178	7	43
Jumlah/ Total 2021		434					
Jumlah/ Total 2020		2.475					
Jumlah/ Total 2019		10.531					

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo*

Jumlah pekerja buruh migran di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 ini adalah 4.975 orang dengan perincian 3330 buruh migran perempuan dan 1645 buruh migran laki-laki. Jumlah ini jika dilihat dari tahun sebelumnya memang mengalami peningkatan yaitu 4971 di tahun 2019. Jumlah peningkatan angka buruh migran tersebut terjadi pada buruh migran laki-laki dan perempuan. Buruh migran laki-laki pada tahun 2019 adalah 1644 dan buruh migran perempuan adalah 3327. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan terjadi pada tahun 2018 tersebut. Data tentang tenaga kerja di luar negeri tersebut mengindikasikan beberapa hal berikut.

Pertama, orang yang berkeinginan pergi ke luar negeri untuk bekerja selama lima tahun terakhir tidak berkurang dari angka 4000. Angka ini selalu naik turun. Secara grafikal, angka-angka ini menunjukkan angka-angka yang stabil. Kenapa ini bisa terjadi. Di antara alasannya adalah adanya contoh atau adanya model peniruan dari orang satu kepada orang lain. Adanya peniruan dari satu tetangga kepada tetangga yang lain. Cerita tentang keberhasilan dari sisi bangunan material seperti bangunan rumah, kemampuan membeli sawah dan lain-lain diceritakan dan ditransformasikan kepada teman dan saudara. Teman dan saudara akhirnya ingin mengikuti jejak langkah keberhasilan tersebut. Di antara sebab lainnya adalah tidak adanya pekerjaan yang memungkinkan mereka bekerja di luar negeri, atau ada pekerjaan namun pekerjaan tersebut dengan upah rendah. Tidak ada lowongan pekerjaan dan upah rendah adalah alasan yang sering ditemui di masyarakat. Ingin mempercepat keinginan adalah motivasi lainnya. Ingin memiliki rumah bagus, ingin memiliki sawah, ingin memiliki sepeda motor bagus dan lainnya di antara motivasi tersebut.

Kedua, data menunjukkan bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo memiliki penduduk yang bekerja di luar negeri. Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan dan Kecamatan Sukorejo adalah penyumbang tenaga kerja terbanyak. Dari Kecamatan Babadan jumlah tenaga kerja adalah 456, sedangkan dari Kecamatan Jenangan adalah 437 sementara dari Kecamatan Sukorejo berjumlah 436 orang. Jumlah yang paling terkecil atau

paling sedikit adalah daerah dari Kecamatan Pudak yaitu hanya 33 orang. Tidak ada data bagaimana nasib mereka setelah pulang, sama halnya tidak ada data berapa lama mereka tinggal di negara lain.

Ketiga, data juga menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok jenis kelamin yang paling terbanyak. Perempuan dalam konteks ini berarti memiliki berbagai peran dengan suami. Suami merawat anak dan isteri mencari nafkah. Akibat tukar peran ini, terkadang menyebabkan masalah seperti suami tidak bekerja hanya mengurus anak. Suami hanya memanfaatkan penghasilan isteri dengan tinggal diam menunggu kiriman dari sang isteri. Kondisi seperti ini seringkali menyulut konflik dalam keluarga. Untuk suami yang bertanggungjawab akan dapat memanfaatkan kiriman uang dari isteri, namun untuk suami yang tidak bertanggungjawab, kondisi demikian menimbulkan masalah keluarga. Untuk sebagian tenaga kerja luar negeri, karena tidak percaya dengan suami, kiriman uang tidak diterima oleh suami tetapi kepada saudara perempuan atau kepada orang tua perempuan. Terkadang masalah ini pun menjadi runcing.

Keempat, perlu ada pendampingan untuk para pekerja di luar negeri. Mereka harus mempersiapkan diri berlama-lama akan menjadi buruh migran. Target apa yang akan mereka dapatkan? Apakah uang yang diterima untuk kebutuhan produktif atau konsumtif? Apakah relasi keluarga terjalin dengan baik ketika mereka menjalani komunikasi jarak jauh? Bagaimana pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak ketika ditinggal oleh salah satu pihak? Apakah masing-masing pihak saling menjaga amanah dan dapat dipercaya atau tidak? Dan lain-lain. Advokasi ini penting tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli atau bisa juga dari jasa penyedia tenaga kerja. Penyedia tenaga kerja dengan advokasi ini berarti tidak hanya mengantarkan mereka bekerja di luar negeri tetapi juga bertanggungjawab atas keberhasilan mereka dalam merengkuh kebahagiaan tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi dari perspektif psikologis. Dalam kerangka ini, penyedia jasa tenaga kerja bisa bekerjasama dengan para ustadz, kiai dan lain sebagainya untuk pengawalan pasca dari luar negeri atau pemanfaatan uang hasil kerja di luar negeri.

H. Jumlah TKI ke Negara Tujuan TKI dari Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kemana saja para tenaga kerja Indonesia menuju? Data menunjukkan bahwa akan bekerja dalam 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Taiwan, Arab Saudi, Amerika, Hongkong, Thailand dan Jepang. Di antara 10 negara tersebut, jumlah yang paling terbanyak adalah negara Taiwan dan Hongkong. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan adalah 2.140 dengan rincian jenis kelamin laki-laki 740 dan jumlah jenis kelamin perempuan adalah 1.400 orang. Jumlah ini menurun dari tahun

2019 yaitu 2.175 orang. Sementara untuk daerah tujuan Hongkong berjumlah 1.740 orang dengan perincian jumlah laki-laki berjumlah 15 orang dan jumlah perempuan adalah 1.725. Jumlah tenaga kerja pada dua negara tersebut mengalahkan beberapa kali lipat di negara-negara lain. Malaysia saja misalnya tenaga kerja Indonesia hanya berjumlah 465 orang disusul ke negara Korea Selatan yang berjumlah 400. Negara yang mengalami drastis penurunan untuk tempat bekerja adalah negara Arab Saudi pada tahun 2021 yaitu tidak ada TKI. Pertanyaannya kenapa? Jawaban probabilitasnya adalah masalah upah yang tidak terlalu tinggi, serta terkadang banyak kasus tenaga kerja Indonesia dihukumi bersalah padahal mungkin saja mereka sedang membela diri. ini artinya berhubungan dengan keamanan jiwa dan persoalan upah kerja. Persoalan gaji atau upah memang menjadi daya tarik suatu negara untuk didatangi oleh para pekerja dari Indonesia.

Kenapa daerah Taiwan dan Hongkong menjadi negara yang paling banyak di jadikan tempat tujuan? Menurut berita yang dilansir oleh Tribun News, Minggu, 12 Nopember 2017 yang diposting pukul 20:19 WIB mengenai negara Taiwan dan Hongkong negara tujuan favorit TKI asal Kota Blitar disebutkan bahwa dua negara tersebut (Taiwan dan Hongkong) memiliki gaji atau upah pekerja yang besar yaitu sekitar 8 juta perbulan untuk tenaga kerja informal. Tenaga kerja bidang informal tersebut adalah seperti sebagai pembantu rumah tangga, sebagai perawat orang tua atau jompo, sebagai tukang kebun dan sebagai perawat anak. Pekerjaan informal ini menarik banyak orang Indonesia disebabkan pekerjaan informal tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau keterampilan memadai apalagi butuh pengalaman. Intinya pekerjaan tersebut cukup mudah namun gajinya besar.

Apabila mengikuti apa yang diberitakan Tribun News tersebut dimungkinkan bahwa alasan penduduk Kabupaten Ponorogo memilih Taiwan dan Hongkong adalah sama yaitu alasan gaji dan alasan kemudahan dalam pekerjaan. Persyaratan yang tidak sulit membuat para calon Tenaga Kerja Indonesia bahkan rela untuk menjual tanah atau sawah sekedar untuk memenuhi persyaratan pemberangkatan dengan niat akan dapat diganti atau akan dapat membeli tanah lagi setelah penerimaan gaji di luar negeri terakumulasi. Ini adalah kepentingan pragmatis jangka pendek yang dimiliki oleh masyarakat.

Kesulitan tempat tujuan seperti Amerika misalnya tampak dari nihilitas penduduk Ponorogo yang menjadikannya tempat kerja. Kerja di Amerika sebenarnya sangat menjanjikan. Nilai mata uang dolar sangat besar untuk mata uang Indonesia. Namun karena sulitnya bekerja di sana, nyaris tidak ada penduduk Ponorogo yang bekerja di Amerika. Sebenarnya ada beberapa kasus di Kabupaten Ponorogo para pekerja dari Amerika, mereka memiliki bangunan rumah yang khas, tinggi, megah dan mewah. Ini menunjukkan berapa uang yang didapat. Namun, keberhasilan ini sedikit menular untuk tetangga ataupun

saudara. Tabel yang membicarakan data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.8
Jumlah TKI ke Negara Tujuan TKI dari Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dan 2021

N O	Negara Tujuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Laki- Laki	Perem- puan	Laki- Laki	Perem- puan	Laki- Laki	Perem- puan
1		2	3	5	6	5	6
1	Malaysia	754	81	133	11	6	
2	Singapura	1	273	1	54		14
3	Brunei Darussalam	103	11	17	3	2	
4	Korea Selatan	512	15	102	2	38	
5	Taiwan	1.491	2.170	488	500	9	11
6	Arab Saudi		1		1	2	
7	Amerika						
8	Hongkong	20	5.037	7	1.140	1	332
9	Thailand						
10	Jepang	4	4	3	4	1	
11	Lainnya	29	22	8	2	17	10
Jumlah/ Total 2021		434					
Jumlah/ Total 2020		2.475					
Jumlah/ Total 2019		10.531					

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo

Data tahun 2021 ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan melampaui tenaga kerja laki-laki. Di negara Taiwan misalnya jumlah tenaga kerja laki-laki hanya 740 orang sedangkan tenaga kerja perempuan adalah 1.400. Jumlah tenaga kerja Indonesia perempuan ini kurang lebih 2 kali lipat dari jumlah laki-laki. Demikian pula mereka yang bekerja di Hongkong. Jarak jenis

kelamin justru sangat menyolok, yaitu tenaga kerja Indonesia laki-laki berjumlah 15 dan jumlah tenaga kerja Indonesia berjenis kelamin perempuan adalah 1725. Hal ini menunjukkan dua hal, *pertama*, banyaknya perempuan yang bekerja di luar negeri secara hipotetik disebabkan karena mereka bekerja pada wilayah informal seperti pembantu rumah tangga, perawat orang jompo, perawat anak dan lain-lain. *Kedua*, perempuan sering memiliki beban ganda dalam keluarga yaitu sebagai ibu dan sebagai pekerja. Peran-peran keluarga menjadi hilang bagi ibu yang bekerja di luar negeri. Jika tidak tepat, suami yang ditinggal di rumah tidak bisa menjaga amanah dari isteri. Akibatnya timbul kesalahpahaman yang potensial menjadi konflik. *Ketiga*, perlu pendampingan kepada perempuan dari masalah-masalah yang menimpa diri perempuan, seperti pendampingan dalam pengelolaan keuangan, pendampingan dalam berkomunikasi dengan suami dan pendampingan kepada perempuan yang mengalami ketidaksadaran akan posisi dirinya. Yang dimaksud ketidaksadaran akan posisinya itu adalah bahwa seseorang mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan. Ia tidak terpengaruh dengan orang lain karena skema-skema kehidupan telah terjalin.

BAB VI

KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo

Kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang diterbitkan oleh Worldbank untuk mengukur kemiskinan. Konsep ini mengacu pada definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang masuk dalam kategori penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo terus menurun dari segi prosentase, namun meningkat Kembali pada tahun 2020 hingga 2021. Usaha pemerintah Ponorogo terus membuahkan hasil, setelah covid-19 mulai mereda perekonomian terus membaik terlihat dari peningkatan prosentase penduduk miskin, dan penurunan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2021. Lebih lanjut jumlah dan

prosentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Prosentase Penduduk Miskin
1	2	3	4
2016	266.312	102,06	11,75
2017	279.168	99,03	11,39
2018	297.467	90,22	10,36
2019	313.175	83,97	9,64
2020	326.205	90,22	10,36
2021	341.090	89,94	10,26

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo (Ponorogo dalam angka 2021)

B. Home Industry yang dikelola Perempuan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan.

Pada konsep ini, perempuan mampu ikut berkontribusi dalam berbagai bidang termasuk pada bidang ekonomi. Dengan kata lain, diharapkan akan muncul dan lahir program-program gender yang mampu memberikan perkembangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik dari segi pendidikan, ekonomi,

keterampilan dan lain sebagainya. Sehingga terbitnya buku profil gender ini merupakan langkah untuk merealisasikan program PBB tersebut di atas dengan mengidentifikasi peran dan keterlibatan perempuan di berbagai bidang yang ada Kabupaten Ponorogo.

Keterlibatan aktif perempuan dalam aktivitas ekonomi diharapkan mampu untuk memperbaiki kondisi keluarga yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Karena perempuan juga memiliki peran untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai bidang. Menurut data Badan Pusat Statistik, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79% terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% terletak di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut, dan sisanya 5,9% terletak pada ketinggian di atas 700 m¹. Karena kondisi topografi tersebut, sebagian besar aktifitas masyarakat berada di dataran rendah yang bentuk aktifitas tersebut beraneka ragam, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, home industry, perdagangan, dan lain-lain.

Kondisi masyarakat yang berada di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan tersebut jika dilihat dari jenis usaha masyarakat yang ditekuni menurut data BPS adalah bervariasi. Jumlah total penduduk yang bekerja adalah 485.697 orang yang terdiri atas 276.489 laki-laki dan 209.208 perempuan. Jika dicermati, penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Berbagai jenis usaha yang ditekuni misalnya usaha sendiri, buruh tidak tetap, buruh tetap, karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak di bayar.

Berbagai jenis usaha yang ditekuni masyarakat Ponorogo tersebut setidaknya mampu menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo. Tingkat kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan relative meningkat tiap tahunnya. Kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan indeks kedalaman kemiskinan Ponorogo. Indeks kedalaman kemiskinan di Ponorogo terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Ponorogo mencapai 1,69 namun pada tahun 2021 ini indeks tersebut menurun hingga 1,08 persen. Namun demikian, sebaran jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan. Oleh karenanya, program-program peningkatan kesejahteraan rakyat miskin harus bisa menjangkau atau lebih berorientasi di daerah pedesaan. Penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo (berdasarkan data BPS) pada tahun 2018 sebanyak 90,22 ribu jiwa menurun ditahun 2019 dengan total 83,97 ribu jiwa, namun Kembali meningkat menjadi 86,74 ribu jiwa pada tahun 2020 dan 89,94 ribu pada tahun 2021 sebagai efek dari pandemic covid 19.

¹ Lihat dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Ponorogo Dalam Angka 2019*, (Ponorogo: BPS, 2019) .

Pasca Pandemi covid 19 membutuhkan upaya ekstra untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Meskipun, pemerintah sudah menyiapkan berbagai upaya untuk menurunkan kemiskinan, upaya tersebut masih belum memiliki dampak yang signifikan terlihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin dan prosentasenya.

Berbagai program Pemerintah Daerah telah dilakukan sebagai upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan yang dikemas dalam berbagai program pengentasan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), Jalin Matra, serta program pendamping desa. Namun program tersebut belum mampu menangkal dampak dari Pandemi, sehingga pemerintah Bersama masyarakat harus lebih giat lagi dalam melaksanakan dan mengembangkan program-program tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengurai benang kusut masalah kemiskinan di Kabupaten Ponorogo adalah dengan merangkul masyarakat, terutama kaum perempuan untuk mendirikan home industry. Tujuannya adalah untuk mendorong perempuan di Ponorogo agar ikut terjun berpartisipasi di dunia kerja serta hidup mandiri sehingga terbebas dari kemiskinan. Pemerintah memberikan pinjaman lunak bahkan hibah kepada perempuan agar dapat mengembangkan usaha sehingga bisa menambah pendapatan untuk kesejahteraan ekonomi keluarga.

Banyak home industry yang berdiri di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo yang dikelola oleh perempuan dengan mengembangkan berbagai macam jenis usaha. Mulai usaha makanan maupun kerajinan sesuai bakat masing-masing. Tabel 6.2 berikut menjelaskan tentang jenis usaha perempuan di masing-masing kecamatan.

Tabel 6.2.
Home Industry yang Dikelola Perempuan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pada SKPD, ORMAS, LSM dan PT Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS USAHA	JUMLAH
1	2	3	4
1	KECAMATAN PONOROGO	MAMIN	68
		KERAJINAN	7
		BATU-BATA	0
		BATIK	3
		GERABAH	6
Jumlah			84

2	KECAMATAN BABADAN	MAMIN	34
		KERAJINAN	8
		BATU-BATA	9
		BATIK	8
		GERABAH	3
Jumlah			62
3	KECAMATAN JENANGAN	MAMIN	25
		KERAJINAN	3
		BATU-BATA	0
		BATIK	4
		GERABAH	1
Jumlah			33
4	KECAMATAN SIMAN	MAMIN	28
		KERAJINAN	23
		BATU-BATA	2
		BATIK	0
		GERABAH	2
Jumlah			55
5	KECAMATAN JETIS	MAMIN	32
		KERAJINAN	71
		BATU-BATA	1
		BATIK	0
		GERABAH	0
Jumlah			104
6	KECAMATAN BALONG	MAMIN	15
		KERAJINAN	6
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	1
Jumlah			22
7	KECAMATAN BUNGKAL	MAMIN	19
		KERAJINAN	16
		BATU-BATA	8
		BATIK	0
		GERABAH	0
Jumlah			43
8	KECAMATAN SLAHUNG	MAMIN	49
		KERAJINAN	8
		BATU-BATA	1
		BATIK	0
		GERABAH	1

		Jumlah	59
9	KECAMATAN NGRAYUN	MAMIN	13
		KERAJINAN	1
		BATU-BATA	1
		BATIK	1
		GERABAH	0
		Jumlah	16
10	KECAMATAN KAUMAN	MAMIN	13
		KERAJINAN	0
		BATU-BATA	2
		BATIK	0
		GERABAH	1
		Jumlah	16
11	KECAMATAN SAMPUNG	MAMIN	12
		KERAJINAN	1
		BATU-BATA	17
		BATIK	0
		GERABAH	1
		Jumlah	31
12	KECAMATAN SUKOREJO	MAMIN	28
		KERAJINAN	10
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
		Jumlah	38
13	KECAMATAN JAMBON	MAMIN	28
		KERAJINAN	4
		BATU-BATA	1
		BATIK	0
		GERABAH	6
		Jumlah	39
14	KECAMATAN BADEGAN	MAMIN	17
		KERAJINAN	2
		BATU-BATA	7
		BATIK	0
		GERABAH	0
		Jumlah	26
15	KECAMATAN SAWOO	MAMIN	24
		KERAJINAN	48
		BATU-BATA	0
		BATIK	0

		GERABAH	0
		Jumlah	72
16	KECAMATAN SAMBIT	MAMIN	17
		KERAJINAN	105
		BATU-BATA	58
		BATIK	1
		GERABAH	0
		Jumlah	181
17	KECAMATAN PULUNG	MAMIN	30
		KERAJINAN	22
		BATU-BATA	1
		BATIK	0
		GERABAH	1
		Jumlah	54
18	KECAMATAN SOOKO	MAMIN	30
		KERAJINAN	0
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
		Jumlah	30
19	KECAMATAN PUDAK	MAMIN	0
		KERAJINAN	0
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
		Jumlah	0
20	KECAMATAN NGBEL	MAMIN	8
		KERAJINAN	0
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
		Jumlah	8
21	KECAMATAN MLARAK	MAMIN	23
		KERAJINAN	37
		BATU-BATA	3
		BATIK	3
		GERABAH	0
		Jumlah	66
		TOTAL	1039

Berdasarkan data yang disajikan di atas tampak bahwa perempuan di Kabupaten Ponorogo banyak berkiprah dan mengembangkan usaha di bidang home industry, sebanyak 1.039 Home Industry yang dikelola perempuan ada di Ponorogo dan terdiri berbagai bidang, mulai dari makanan dan minuman, kerajinan, batu bata, batik hingga gerabah. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Ponorogo memiliki Home Industry yang dikelola oleh perempuan, Sebagian besar Home Industry tersebut bergerak pada bidang makanan minuman. Hal tersebut merupakan wujud keterlibatan aktif perempuan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan di bidang ekonomi.

C. Data Koperasi dan Anggota di Kabupaten Ponorogo

Koperasi merupakan *soko guru* yang keberadaannya diharapkan mampu memberikan solusi untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai wadah pemberdayaan perempuan. Hal tersebut tampak dari banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Ponorogo yang setiap tahun jumlahnya selalu bertambah. Data terakhir menunjukkan angka 993 pada tahun 2018 menjadi 1.012 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 dan 2021 ini jumlah koperasi berkurang menjadi 919. Salah satu penyebabnya adalah Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai kegiatan di sektor ekonomi. Banyaknya anggota yang kemudian tidak bisa membayar iuran koperasi dan pembayaran lainnya, membuat beberapa koperasi terpaksa harus menutup pintu. Ini lah yang kemudian menjadi PR besar pemerintah untuk bisa kembali meningkatkan jumlah koperasi di daerah Kabupaten Ponorogo.

Dengan demikian, jumlah total koperasi di Kabupaten Ponorogo adalah 1.012, dengan anggota yang berjumlah 120.565 orang, kemudian manajer sebanyak 101 orang serta 915 orang karyawan. Tabel 6.2 berikut menunjukkan data terkait tentang koperasi, dan juga tergambar dalam grafik berikut:

Tabel 6.3.
Data Koperasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Identitas Koperasi	Jumlah Koperasi	Anggota	Manajer	Karyawan
KUD	26	53.471	13	230
Kopontren	22	62	-	4
Kopinkra	5	312	-	4
Kopti	2	122	-	-
Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	69	15.087	3	54
Kopkar	28	358	1	2
Kop. Angkatan Darat	2	634	1	7
Kop. Kepolisian	1	966	-	7

Kop. Serba Usaha	334	10.098	20	241
Kop. Pasar (KOPPAS)	1	-	-	-
Kop. Simpan Pinjam (KSP)	49	5.425	17	243
Kop. Listrik Pedesaan	-	-	-	-
KAI	-	-	-	-
Kop. Wanita	307	13.486	1	2
Kop. Veteran	1	-	-	-
Kop. Wredatama	2	176	-	-
Kop. Pepabri	1	108	-	1
Kop. Mahasiswa	2	503	-	-
Kop. Pemuda	2	296	-	-
Kop. Pertambangan	-	-	-	-
Kop. Pedagang Kaki Lima	2	-	-	-
Kop. Jamu Gendong	-	-	-	-
Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	85	5.901	3	30
Kop. Pertanian	4	56	-	-
Kop. Peternakan	7	-	-	-
Kop. Angkutan Darat	5	-	-	-
Kop. Telkom	1	25	-	27
K.B.P.R	3	13	1	49
Kop. Lainnya	68	236	1	28
Kop. Sekunder	2	282	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo

Tabel 6.4.
Keanggotaan Koperasi di Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kabupaten	Keanggotaan Koperasi		Jumlah L + P
		L	P	
1	Ponorogo	65.249	42.368	107.617
	Jumlah	65.249	42.368	107.617

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo

Tabel di atas menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi di Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh laki-laki. Laki-laki unggul dengan jumlah total 65.249 orang sedangkan perempuan 42.328. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yang terdiri dari jumlah anggota laki-laki 60.981 orang sedangkan

perempuan 40.206 orang. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan perempuan sudah terlibat dalam kegiatan koperasi. Dengan kata lain bahwa perempuan juga memiliki kesempatan dan akses yang sama seperti laki-laki dalam keanggotaan koperasi.

D. Jumlah Penduduk Feminisme Kemiskinan Yang Menerima bantuan Keuangan Desa

Feminisme Kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara Bersama. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan biasanya lebih dari sekedar kekurangan secara ekonomi. Dampak kemiskinan bagi perempuan lebih terasa dengan rendahnya akses perempuan pada ruang public, pelayanan public, terbatasnya jumlah lapangan kerja, sumberdaya ekonomi, dan terbatasnya kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam politik. Selain itu, perempuan juga rawan terhadap kekerasan baik dalam keluarga, masyarakat maupun di tempat kerja. Sehingga seorang perempuan yang miskin, bukan hanya tentang tidak terpenuhi kebutuhannya namun juga tentang terbatasnya ruang gerak dimana ia bisa bebas berkreasi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan terutama bagi kaum perempuan, pemerintah memberi bantuan keuangan melalui desa/kelurahan di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Dengan bantuan ini pemerintah berharap Tabel 6.5 di bawah menjelaskan tentang data awal masing-masing kecamatan. Lebih lanjut lihat tabel 6.3 di bawah ini.

Tabel 6.5
Jumlah Penduduk Feminisme Kemiskinan Yang Menerima Bantuan Keuangan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Data Awal	No Urut	Desa/ Kelurahan	Data Verifikasi
1	2	3	4	5	6
1.	Ngrayun	1.040	1	Baosan Kidul	
			2	Wonodadi	
			3	Sendang	
			4	Binade	
			5	Baosan Lor	
			6	Ngrayun	
			7	Temon	
			8	Selur	
			9	Cepoko	
			10	Gedangan	
Jumlah					

2.	Slahung	695	11	Tugu Rejo	
			12	Senepo	
			13	Slahung	
			14	Caluk	
			15	Broto	
			16	Menggare	
			17	Kambeng	
			18	Wates	
			19	Ngilo-Ilo	
			20	Duri	
			21	Ngloning	
			22	Plancungan	
			23	Jebeng	
			24	Galak	
			25	Truneng	
			26	Simo	
			27	Crabak	
			28	Mojopitu	
			29	Gundik	
			30	Janti	
			31	Nailan	
Jumlah					
3.	Bungkal	384	32	Pelem	
			33	Kori[an	
			34	Bekare	
			35	Nambak	
			36	Kalisat	
			37	Munggu	
			38	Pager	
			39	Bungkal	
			40	Ketonggo	
			41	Kunti	
			42	Bancar	
			43	Bungu	
			44	Kupuk	
			45	Sambilawang	
			46	Bedi Wetan	
			47	Bedi Kulon	
Jumlah					

4.	Sambit	383	48	Gajah	
			49	Wringinanom	
			50	Ngadisanan	
			51	Maguwan	
			52	Nglewan	
			53	Bedingin	
			54	Bancangan	
			55	Campurejo	
			56	Campursari	
			57	Bulu	
			58	Sambit	
			59	Besuki	
			60	Bangsalan	
			61	Wilangan	
Jumlah					
5.	Sawoo	718	62	Tumpuk	
			63	Pangkal	
			64	Tumpak Pelem	
			65	Tempuran	
			66	Sriti	
			67	Temon	
			68	Sawoo	
			69	Prayungan	
			70	Tugurejo	
			71	Grogol	
			72	Kori	
			73	Bondrang	
			74	Ngindeng	
			Jumlah		
6.	Sooko	256	75	Ngadirojo	
			76	Klepu	
			77	Suru	
			78	Sooko	
			79	Bedoho	
			80	Jurug	
Jumlah					
7.	Pudak	74	81	Banjarejo	
			82	Pudak Kulon	
			83	Krisik	
			84	Tambang	

			85	Bareng	
Jumlah					
8.	Pulung	373	86	Karang Patihan	
			87	Tegalrejo	
			88	Wagir Kidul	
			89	Singgahan	
			90	Patik	
			91	Pulung	
			92	Pulung Merdiko	
			93	Sidoharjo	
			94	Plunturan	
			95	Pomahan	
			96	Kesugihan	
			97	Serag	
			98	Wayang	
			99	Munggung	
100	Banaran				
Jumlah					
9.	Mlarak	322	101	Tugu	
			102	Candi	
			103	Totokan	
			104	Ngrukem	
			105	Siwalan	
			106	Nglumpang	
			107	Gontor	
			108	Gandu	
			109	Jabung	
			110	Bajang	
			111	Mlarak	
			112	Serangan	
			113	Suren	
			114	Kaponan	
Jumlah					
10.	Siman	242	115	Ngabar	
			116	Madusari	
			117	Beton	
			118	Sekaran	
			119	Brahu	
			120	Kepuhrubuh	
			121	Sawuh	

			122	Jarak	
			123	Tranjang	
			124	Pijeran	
			125	Manuk	
			126	Siman	
			127	Ronosentanan	
			128	Tajug	
			129	Demangan	
			130	Patihan Kidul	
Jumlah					
11.	Jetis	314	131	Ngasinan	
			132	Kutu Kulon	
			133	Kutu Wetan	
			134	Kradenan	
			135	Mojomati	
			136	Coper	
			137	Mojorejo	
			138	Karanggebang	
			139	Tegalsari	
			140	Wonoketro	
			141	Josari	
			142	Turi	
			143	Winong	
Jumlah					
12.	Balong	476	145	Pandak	
			146	Bulu Kidul	
			147	Bulak	
			148	Ngendut	
			149	Karang Patihan	
			150	Sumberjo	
			151	Ngumpul	
			152	Ngraket	
			153	Dadapan	
			154	Singkil	
			155	Karangan	
			156	Bajang	
			157	Balong	
158	Sedarat				
159	Purworejo				

			160	Tatung	
			161	Muneng	
			162	Ngampel	
Jumlah					
13.	Kauman	476	163	Tegalombo	
			164	Nongkodono	
			165	Ngrandu	
			166	Nglarangan	
			167	Bringin	
			168	Pengkol	
			169	Gabel	
			170	Ciluk	
			171	Semanding	
			172	Tosanan	
			173	Maron	
			174	Somoroto	
			175	Plosojenar	
176	Carat				
Jumlah					
14	Jambon	798	177	Krebet	
			178	Jonggol	
			179	Poko	
			180	Bringinan	
			181	Sendang	
			182	Karanglo Kidul	
			183	Bulu Lor	
			184	Jambon	
			185	Blembem	
			186	Menang	
			187	Srandil	
188	Sidoharjo				
Jumlah					
15.	Badegan	470	189	Dayakan	
			190	Karangan	
			191	Tanjunggunung	
			192	Karangjoho	
			193	Tanjungrejo	
			194	Bandaralim	
			195	Kapuran	
			196	Badegan	

			197	Watubonang	
			198	Biting	
Jumlah					
16.	Sampung	364	199	Gelang Kulon	
			200	Karang Waluh	
			201	Glinggang	
			202	Carangrejo	
			203	Tulung	
			204	Kunti	
			205	Pager Ukir	
			206	Pohijo	
			207	Jenangan	
			208	Nglurup	
			209	Sampung	
			210	Ringin Putih	
Jumlah					
17.	Sukorejo	324	211	Morosari	
			212	Sragi	
			213	Gandu Kepuh	
			214	Nambangrejo	
			215	Lengkong	
			216	Golan	
			217	Bangunrejo	
			218	Sukorejo	
			219	Nampan	
			220	Kranggan	
			221	Gelanglor	
			222	Sidorejo	
			223	Gegeran	
			224	Prajegan	
225	Serangan				
			226	Kedung Banteng	
Jumlah					
18.	Babadan	166	227	Cekok	
			228	Japan	
			229	Gupolo	
			230	Polorejo	
			231	Ngunut	
			232	Sukosari	
			233	Babadan	

			234	Purwosari	
Jumlah					
19	Jenangan	253	235	Mrican	
			236	Plalangan	
			237	Ngrupit	
			238	Pintu	
			239	Jenangan	
			240	Kemiri	
			241	Tanjungsari	
			242	Nglayang	
			243	Paringan	
			244	Wates	
Jumlah					
20	Ngebel	373	245	Ngrogung	
			246	Sahang	
			247	Wagir Lor	
			248	Talun	
			249	Gondowido	
			250	Pupus	
			252	Ngebel	
			252	Sempu	
Jumlah					
Total					
DATA KELURAHAN					
1	Siman		1	Ronowijayan	
			2	Mangunsuman	
2	Babadan		3	Kertosari	
			4	Patihan Wetan	
			5	Kadipaten	
3	Jenangan		6	Singosaren	
4	Ponorogo		7	Paju	
			8	Brotonegaran	
			9	Pakunden	
			10	Surodikaman	
			11	Purbosumam	
			12	Tanjungsari	
			13	Kauman	
			14	Mangkujayan	
			15	Nologaten	

			16	Tonatan	
			17	Banyudono	
			18	Pinggirsari	
			19	Keniten	
			20	Jingglong	
			21	Beduri	
			22	Cokromenggalan	
			23	Tambak Bayan	
			25	Tamanarum	
Total					
Jumlah Total					

Sumber: *Dinas Sosial dan P3A.*

Dari data tersebut di atas, terlihat upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan pada kaum perempuan. Tentu saja, diharapkan kedepannya pemerintah tidak hanya berfokus pada bagaimana memberikan bantuan namun juga bagaimana meningkatkan pemberdayaan perempuan, mengurangi tindak kejahatan terhadap perempuan, dan terbukanya kesempatan perempuan untuk berkarya di ruang publik.

BAB VII POLITIK DAN PEMERINTAHAN

A. Jumlah Anggota DPR Menurut Partai/Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo

Negara demokratis membutuhkan alat aspirasi masyarakat. Negara demokratis adalah negara di mana kekuasaan di miliki oleh rakyat, para penyelenggara negara juga berasal dari rakyat dan segala kebijakan negara juga untuk rakyat. Dengan bahasa mudah demokrasi adalah *from the people, of the people dan for the people* (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Penguasa negara adalah rakyat dan pemegang kekuasaan adalah rakyat. Mereka yang dipilih dalam jabatan-jabatan pemerintahan adalah mandat dan di beri wewenang oleh rakyat untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam sistem demokrasi dipercaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Maksudnya adalah bahwa suara rakyat adalah suara kebenaran, suara rakyat adalah suara harapan keadilan, suara rakyat adalah suara yang menginginkan kesejahteraan. Oleh karena itu, suara rakyat harus didengar, ibarat suara Tuhan. Ajakan kebaikan rakyat, seruan keadilan, penegakan hukum bagi yang bersalah, pembelaan kepada kaum papa dan miskin adalah inti dari pesan-pesan agama yang diturunkan Tuhan. Suara rakyat, oleh karena itu adalah suara penyampai pesan-pesan Tuhan, karenanya harus didengar oleh pemimpin.

Dalam sistem demokrasi, dibutuhkan adanya partai politik. Jika politik diartikan sebagai *the art of possibilities* atau seni berbagai kemungkinan, maka politik adalah berbagai langkah atau strategi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam mencapai cita-cita sesuai yang diharapkan atau yang direncanakan. Dengan demikian dapat dimaknai berbagai lembaga yang diarahkan untuk mencapai tujuan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dapat disebut sebagai lembaga politik. Dapat disebut di sini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga Eksekutif (Presiden dan para menteri), Gubernur, dan Bupati dan lain-lain. Semua lembaga tersebut merupakan lembaga politik yang berfungsi untuk mencari cara dan melaksanakan cara tersebut untuk kepentingan negara dan bangsa yaitu suatu kepentingan yang diciptakan sejak awal keinginan berdirinya yaitu menjadi bangsa yang merdeka dari penjajahan, bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang aman dari ketertindasan, bangsa yang aman dari gangguan dan lain-lain. Keinginan rakyat yang terhimpun dalam bangsa-bangsa tersebut mewujudkan suatu organisasi besar yaitu negara. Negara oleh karena itu merupakan lembaga besar buatan rakyat atau buatan bansa-bangsa yang bersatu untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, negara perlu dibentuk orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi negara. Perangkat-perangkat negara perlu ada yang menjalankannya dengan cara

profesional dan proporsional. Mereka yang menjalankan roda-roda kenegaraan itulah yang kemudian disebut dengan pemerintah. Dengan mudah dikatakan, pemerintah adalah aparat penyelenggara negara. Untuk Indonesia, aparat penyelenggara negara di bawah kekuasaan eksekutif dalam bentuk presiden. Presiden oleh karena itu adalah kepala pemerintahan. Presiden di pilih selama lima tahun sekali oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjadi penyeimbang, agar kekuasaan eksekutif tidak sewenang-wenang dan despotik perlu dibentuk lembaga politik yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pun demikian agar pengadilan bisa tidak berat sebelah serta bersikap adil, membenarkan yang benar, maka lembaga yudikatif di bentuk. Semua lembaga dibentuk untuk tujuan mulia negara di atas.

Sebagai pemiliki kekuasaan, rakyat memerlukan sarana komunikasi politik, suatu komunikasi yang memungkinkan suaranya didengar, tidak hanya ketika pemilihan eksekutif maupun legislatif, tetapi juga dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintahan. Untuk itulah dibentuk namanya partai politik (partai). Di antara fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sarana menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Fungsi lainnya adalah lembaga pengkaderan politik rakyat untuk mempersiapkan personalitas yang siap untuk melakkan regenerasi kepemimpinan politik seperti bupati, gubernur, presiden dan lain-lain. Partai politik menjadi lembaga yang mempersiapkan para kader dalam kepemimpinan publik termasuk di dalamnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat daerah, propinsi maupun pusat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai namanya adalah wakil dari rakyat. Fungsi mereka adalah lidah rakyat, penyampai aspirasi rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dekat rakyat, bergaul bersama mereka, hidup bersama mereka dan mengerti kebutuhan mereka. Dengan begitu, apa yang diinginkan masyarakat adalah suara-suara mereka, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan atau kepentingan lain yang tidak koheren dengan kepentingan rakyat. Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seseorang harus masuk melalui partai politik. Kendaraan partai politik digunakan untuk mencari simpati rakyat. Mereka menawarkan berbagai program agar dipilih rakyat. Mereka juga berjanji untuk memperbaiki nasib rakyat agar dicintai rakyat. Itulah sebabnya *money politics* dilarang. *Money politics* telah menutupi hati nurani rakyat. *Money politics* bisa menjadi salah satu sebab dari tidak berfungsinya peran-peran wakil rakyat secara optimal. Partai pemenang pemilu legislatif dan orang yang diserahi tugas untuk menjadi wakil adalah orang yang diharapkan oleh rakyat pula. Itulah sebabnya, setiap tahun jumlah pemenang partai politik dari masing-masing partai selalu berubah. Terkadang partai A menang di tahun kemarin, namun partai tersebut kalah di tahun ini. Semuanya selalu berubah.

Di bawah ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Kabupaten Ponorogo periode 2019-2024.

Tabel 7.1
Jumlah Anggota DPR Menurut Partai/Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Periode 2019-2024

NO	PARTAI	ANGGOTA DPR		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Golkar	4	-	4	
2	PKB	7	1	8	
3	Partai Gerindra	4	1	5	
4	Partai Demokrat	4	1	5	
5	PAN	3	-	3	
6	PDIP	2	2	4	
7	PKS	3	1	4	
8	PPP	1	-	1	
9	Nasdem	10	-	10	
10	HANURA	1	-	1	
Total		39	6	45	

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo

Ada 10 partai politik yang berkontestasi di Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan anggota legislatif yaitu Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PDIP, PKS, PPP, Nasdem dan Hanura. Seluruh jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo adalah 45 orang. Jumlah ini terbaik kepada 39 jumlah DPRD laki-laki dan 6 orang dari anggota DPRD perempuan. Jumlah anggota dewan dari jenis kelamin laki-laki yang terbanyak adalah dari partai Nasdem yaitu 10 orang di susul dari partai PKB yaitu 7 orang. Sedangkan partai pengusung anggota legislatif dari perempuan terbanyak adalah PDIP yaitu 2 orang. Secara umum pemenang Pemilu legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo adalah partai Nasdem dengan jumlah kursi 10 kursi, di bawahnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah 8 kursi dan disusul partai Gerindra dan Demokrat, masing-masing 5 kursi.

Data dalam tabel di atas memperlihatkan beberapa hal. *Pertama*, jumlah anggota legislatif dari perempuan tidak ada separuh dari jumlah laki-laki dan juga belum memenuhi sepertiga dari jumlah kursi. Jumlah anggota legislatif laki-laki berjumlah 39 sedangkan anggota legislatif dari perempuan hanya 6 orang. Artinya bahwa keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di

DPRD Kabupaten Ponorogo di angka 13 %. Partai-partai yang memenangkan perempuan menjadi legislatif adalah PKB, Gerinda, Demokrat, PDIP, dan PKS. Semuanya berjumlah 1 kecuali PDIP, 2 orang. 5 partai lainnya tidak bisa menarik rakyat untuk memilih perempuan untuk mewakili mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan perlu berbuat lebih banyak dalam wilayah publik agar gagasan, ide dan kerja-kerja mereka dapat dilihat oleh masyarakat. Mereka perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa perempuan juga bisa. Yang diharapkan adalah keterpilihan perempuan karena gagasan yang baik, pengalaman yang teruji dan serta keberhasilan yang telah dibuktikan. Ini adalah idealitas. Keterpilihan bagaimana pun kadang bersifat "semu", bukan karena kualitas, bukan karena pengalaman yang baik, dan bukan karena keberhasilan kerja yang telah dibuktikan, tetapi karena keturunan, uang pemilihan, bujuk rayu orang lain dan lain-lain. Perempuan perlu bekerja keras untuk mendapatkan pilihan yang tidak "semu" tetapi pilihan keterpanggilan rasionalitas dan keterpanggilan korespondensial yaitu keterpanggilan yang sesuai dengan kenyataan perempuan tersebut dalam kerja-kerja nyata di masyarakat.

Kedua, partai pemenang pemilu yaitu Nasdem, tidak memiliki anggota DPRD perempuan. Hal ini perlu untuk membenahan di masa akan datang. Di samping Nasdem adalah PKB. Walau PKB telah memiliki satu orang anggota DPRD perempuan, kader-kader PKB putri perlu bekerja keras untuk menarik minat hati rakyat. Di samping kerja-kerja personal dari diri perempuan, partai politik perlu melakukan *affirmative action* dalam mendorong dan mengadvokasi perempuan agar memenangkan dalam pemilihan. Sebagai partai kader, partai politik memang harus banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk pemberdayaan kader perempuan. Perempuan tidak harus dianggap sebagai musuh laki-laki dalam pemilihan, tetapi perempuan harus diletakkan sebagai bentuk pembelaan dan kesamaan dalam kesempatan beraktualisasi dalam ruang-ruang publik. Perempuan harus dilihat sebagai bentuk penyeimbang laki-laki dalam penentuan kebijakan publik. Dalam perspektif ini pemberdayaan kepada perempuan justru menyenangkan karena menjadi bagian dari cita-cita bangsa yaitu keadilan untuk semua.

Ketiga, melihat sedikitnya jumlah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, perempuan harus keluar dari "kerengkeng" wilayah domestik. Perempuan juga harus bersuara di wilayah publik. Tradisi patriarkhi harus mulai digugat. Ajaran agama dan fakta sosial mengajarkan laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang memiliki potensi yang sama. Mereka memiliki kebebasan yang sama. Hanya saja terkadang perempuan diikat oleh tradisi dan kultur-kultur yang patriarkhis. Kultur dan tradisi patriarkhis hanya bisa dipecahkan dengan pendidikan, pengetahuan dan hasil bacaan yang lengkap dari berbagai perspektif. Secara personal, perempuan harus mengkonstruksi diri sendiri untuk menjadi pemilik mental pemenang.

B. Jumlah Anggota DPR Menurut Partai/Golongan Menurut Pendidikan Kabupaten Ponorogo

Berikut adalah data anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dari tingkatan pendidikan mereka. Seperti kita ketahui, pendidikan memiliki koherensi dengan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan serta kesiapan dalam memecahkan problem-problem personal maupun sosial seseorang. Pendidikan adalah sarana seseorang belajar dan mencari pengetahuan untuk matang dalam tiga hal yaitu matang dari sisi kognitif, afektif dan psikomotorik. Matang dari sisi kognitif dalam konteks anggota DPRD adalah memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengambil kebijakan yang benar, mengetahui ilmu pemerintahan yang baik, mengetahui cara-cara pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat, mengetahui cara-cara yang harus ditempuh ketika satu solusi mengalami kegagalan, mengetahui pola relasional dan jaringan memadai untuk memperkuat kebijakan dan lain-lain. Sedangkan kemampuan afektif adalah kemampuan yang berkaitan dengan rasa dan kepekaan sosial seseorang seperti seberapa empati anggota Dewan melihat kemiskinan, apakah ada rasa ketakutan ketika ia ingin melakukan korupsi, apakah ada rasa bahwa setiap kebijakan dan tindakan selalu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan rakyat, apakah ia memiliki kedekatan emosional dengan rakyat apa tidak, apakah ia memiliki rasa hidup sederhana atau tidak. Jika kognitif berhubungan dengan kecerdasan otak seseorang, maka kecerdasan afektif adalah kecerdasan pada wilayah kecerdasan kalbu atau hati seorang. Berikutnya adalah kecerdasan psikomotorik, yaitu kecerdasan dalam bertindak dan berbuat. Apakah anggota Dewan telah melakukan apa yang dikatakan, apakah perkataan anggota dewan sesuai dengan kenyataan dan bukti-bukti yang ada, apakah ia melakukan kerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, apakah proyek yang dikerjakannya sesuai dengan apa yang tertulis, apakah ada laporan yang dimanipulasi, apakah uang dana sesuai peruntukannya dan lain sebagainya.

Tiga kecerdasan pada diri anggota Dewan adalah mutlak. Hal ini tidak saja berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan anggota dewan sebagai wakil rakyat serta bagaimana ia memperjuangkan hak-hak rakyat yang diwakili tetapi juga sebagai wujud pertanggungjawaban dirinya di hadapan Tuhan dan masyarakat. Untuk mengetahui itu, maka indikator yang paling mungkin dilakukan adalah rekam jejak anggota dewan dalam masyarakat yang ada dalam memori rakyat serta pendidikan yang mereka selesaikan. Walau tanpa pendidikan seseorang bisa mencapai kecerdasan tiga hal tersebut, namun prototipe seperti ini tidak banyak dimiliki. Ketiga kecerdasan tersebut memang dapat dilatih, namun pelatihan yang paling bagus adalah melalui pendidikan. Kenapa demikian? Sebabnya adalah karena pendidikan berjalan dalam jangka panjang serta bertingkat sesuai dengan perkembangan peserta didik atau perkembangan mahasiswa. Pendidikan memiliki kurikulum yang jelas, terarah

dan terukur. Kurikulum pendidikan disusun dengan memperhatikan banyak hal, termasuk mendengarkan para praktisi, para ahli dan *stakeholder* lain yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Di bawah ini adalah tabel tingkat pendidikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo tahun 2020 dari 10 partai yang ada dan memiliki kursi.

Tabel 7.2
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai/Golongan dan Menurut Pendidikan Kabupaten Ponorogo Periode 2019-2024

NO	PARTAI	PENDIDIKAN ANGGOTA DPR					Jumlah
		SD	SMP	SMA	S1	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Partai Golkar				2	2	4
2	PKB			3	3	2	8
3	Partai Gerindra			3	2		5
4	Partai Demokrat				3	2	5
5	PAN				1	2	3
6	PDIP			1	2	1	4
7	PKS			3		1	4
8	PPP				1		1
9	Nasdem			5	5		10
10	HANURA				1		1
TOTAL				15	20	10	45

Sumber: Sekretariat *DPRD Kabupaten Ponorogo*

Jumlah terbanyak tingkatan pendidikan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo adalah sarjana strata 1 atau S1. Jumlah ini menempati urutan pertama yaitu 20 orang. Sedangkan mereka yang berpendidikan S2 berjumlah 10 orang. Sedangkan lulusan SMA berjumlah 15 orang. Dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo lebih dari separuhnya (dari 45 orang) adalah berpendidikan sarjana (20 orang S1 dan 10 orang S2). Strata pendidikan anggota DPRD Kabupaten ini perlu ditingkatkan. Seperti telah dijelaskan, pendidikan adalah indikator yang paling mudah untuk melihat seberapa efektif dan efisien suatu gagasan dan ide anggota dewan dalam membela rakyat. Terkadang ditemui, anggota dewan tidak memiliki ide dan gagasan dalam pembelaan rakyat. Mereka datang, diam, mendengarkan dan hanya mengikuti arus besar, bahkan ada yang tertidur di saat sidang.

Partai dengan nihil dari lulusan SMA adalah partai Golkar, Demokrat dan PAN. Sedangkan untuk partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan tidak memiliki anggota dewan SMA, namun jumlah mereka hanya 1 kursi, jadi tidak

bisa dijadikan sebagai alat ukur yang baik dalam analisa pendidikan anggota dewan. Partai dengan jumlah kursi terbanyak, Partai Nasdem bahkan memiliki jumlah anggota dewan lulusan SMA terbanyak yaitu 5 orang, demikian pula PKS, PKB dan Gerinda, masing-masing 3 orang. Partai Nasdem bahkan tidak memiliki anggota dewan dari lulusan strata dua (S2).

Kenapa lulusan SMA masih banyak memenangkan hati rakyat. Jumlah mereka bahkan lebih banyak dari jumlah lulusan S2 yaitu 15 orang. Jawabannya bisa beragam. Di antaranya adalah karena nama atau orang tersebut telah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, baik karena aktifitas sosial yang dilakukan, keorganisasian yang diikuti atau karena pernah menjadi anggota dewan sebelumnya. Keterkenalan mereka dapat menjadi salah satu modal bagi keterpilihan mereka. Keterkenalan biasanya mengalahkan gelar yang dimiliki lawan. Keterkenalan adalah modal terbesar bagi calon anggota dewan. Siapa pun mereka yang ingin menjadi anggota dewan harusnya memang memiliki aktifitas sosial di masyarakat agar namanya dikenal. Keterpilihan juga bisa disebabkan oleh menegerial kampanye yang bagus. Ia memiliki modalitas yang cukup untuk mengorganisasikan tim sehingga solid. Pada kasus tertentu tim konsultan kadang dibutuhkan, namun tim konsultan jarang yang gratis. Konsultan membutuhkan biaya. Bagi mereka yang memiliki modalitas tanggung agak susah untuk memiliki konsultan bergensi dan memiliki rekam jejak bagus. Tim solid pun demikian, managerial tim membutuhkan ongkos. Walau hanya lulusan SMA, namun karena ia adalah tokoh senior misalnya, ia bisa didukung oleh kelompok yang solid. Ia dibantu oleh banyak pihak. Artinya, ia bisa mengkomunikasikan berbagai modal untuk memikat pemilih untuk memilih dirinya. Cara lainnya bisa mungkin terjadi. Namun cara ini adalah cara-cara yang kotor dalam politik. Cara ini sangat tidak dianjurkan. Cara ini merusak demokrasi sekaligus cara ini adalah cara yang tidak halal. Meski tidak tertangkap oleh Panwas hingga tidak di bawa ke pengadilan sehingga bisa aman, namun cara ini dibenci tidak saja oleh manusia tetapi oleh Tuhan, yaitu dengan cara *money politics* atau politik uang. Modusnya bermacam-macam yaitu dengan serangan fajar, ongkos mencomblos, biaya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan lain-lain. Permainan uang, untuk sebagian masyarakat adalah suatu pesta. Namun, ini adalah tidak mendidik. Partai politik sebagai wadah untuk mencerdaskan masyarakat dalam politik harus diajari cara-cara yang bersih, tidak menyebarkan hoaks, kampanye hitam dan tidak menggunakan politik uang. Partai politik harus menjadi pioner dalam kerja-kerja mulia untuk kebaikan bangsa. Lalu bagaimana dengan ongkos politik yang mahal. Para politisi dan aparat pemerintah bisa mendiskusikan ini melalui parlemen. Para pakar dan tokoh politik bisa menyumbangkan gagasan agar ongkos politik tidak berimbas kepada tindakan menyimpang suatu saat.

C. Jumlah Anggota DPR Menurut Daerah Pemilihan dan Partai di Kabupaten Ponorogo

Seperti telah diuraikan banyak sebab yang menjadikan seseorang dalam kontestasi legislatif. Di Kabupaten Ponorogo para calon anggota dewan harus bertarung dalam daerah pemilihan masing-masing. Di daerah pemilihan itulah, calon anggota dewan berkontestasi dengan calon lain dari partai yang berbeda. Partai-partai memiliki calon yang banyak dalam daerah pemilihan. Jika partai berjumlah 10 misalnya dan masing-masing memiliki calon di daerah pemilihan yang sama, berarti seseorang harus memenangkan kontestasi melawan sejumlah calon yang ada. Di Kabupaten Ponorogo terdapat 6 daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan 1 meliputi daerah Kecamatan Babadan dan Kecamatan Ponorogo), daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Jetis, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Mlarak dan Kecamatan Siman, daerah pemilihan 3 meliputi Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Sooko. Daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Bungkal, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Sambit dan Kecamatan Slahung. Daerah pemilihan 5 meliputi Kecamatan Balong, Kecamatan Badegan dan Kecamatan Jambon dan daerah pemilihan 6 terdiri dari Kecamatan Kauman, Kecamatan Sampung dan Kecamatan Sukorejo.

Sebagai pemenang legislatif di Kabupaten Ponorogo partai Nasdem hampir memenangkan di seluruh daerah pemilihan kecuali daerah pemilihan 1 dan daerah pemilihan 3. Daerah pemilihan 1 seperti dijelaskan meliputi daerah Kecamatan Babadan dan Kecamatan Ponorogo. Sedangkan daerah pemilihan 3 adalah daerah meliputi Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pudak, Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Sooko. Jika daerah pemilihan lain, Partai Nasdem memenangkan di tempat lain dengan 2 kursi maka pada daerah pemilihan 1 dan 3 ini, partai Nasdem hanya dapat 1 kursi.

Kemengangan partai Nasdem memang menggerus partai-partai yang besar sebelumnya dan memangkan di daerah pemilihan. Partai besar, Partai Golkar misalnya yang memiliki 9 kursi pada pemilu legislatif sebelumnya langsung turun drastis menjadi 4 kursi. Golkar kehilangan 5 kursi dalam pemilu tahun 2019. Sebelumnya Golkar mememangkan hampir seluruh daerah pemilihan dengan peroleh 2 kursi. Hanya daerah pemilihan 1, daerah pemilihan 5 dan daerah pemilihan 6, Golkar mendapatkan 1 kursi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbeda dengan Golkar. Partai ini cenderung stabil. Stabilitas PKB misalnya tampak selalu mendapat suara di setiap daerah pemilihan, bahkan di daerah pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Babadan, partai ini mendapatkan 2 kursi. Partai-partai lainnya cenderung stabil. Partai yang mengalami penurunan drastis adalah Golkar.

Berikut adalah nama-nama anggota dewan Kabupaten Ponorogo dari partai Nasdem (Mukridon Romdlon, ST, Sukirno, Eka Miftatakhul Huda SE, Agus Subiyantoro, Pamuji, Anang Budi Pangarso, Sumarno, Agus Mustofa Latief

H, Sunarto, S.Pd, Isnaini, S.Pd), dari PKB (Suhari, SH, Slamet Hariyanto, Dwi Agus Prayitno, Fikso Rubiyanto, Ir. H. Moh. Erkamni, M.SI, Mahfut Arifin, S.Sos, Mashudi, Mujiatin), dari Partai Gerindra (Eka Rekno Setyani, Anik Suharto, S. Sos, Drs. Mulyono, Ghuftron Ridlo'i, Imam Mustofa), dari Partai Demokrat (Edy Iswahyudi, H. Miseri Effendy, SH., M.H, Binti Rahmawati, Widodo S.H. Sugiyanto, S.Sos), dari PDIP (H. Agung Priyanto, S.E, MM. Evi Dwitarsari, S. Sos, Releyanda Solekha Wijayanti, S. I.P, Teguh Pujianto), dari partai Golkar (Rahmat Taufik, S. Sos, M.Si, Moh. Komarudin, S.Ag, M.Si, Eko Priyo Utomo, S.T, Kateni, S.H), dari PKS (Christine Hery Purnawaty, Drs. Samsudin, Lc, Ribut Riyanto, Suharlianto), dari PAN (H. Wahyudi Purnomo, M.Si, Puryono, M.Ag, M.Pd.i, dr. H. Burhanudin), dari PPP (Cipto Priyono), dari Partai Hanura (Muryanto, S.I.P). Mereka semua telah dilantik untuk mengabdikan dan melayani rakyat dalam masa bakti 2019-2024. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo masa bakti 2019-2024 dapat terlihat dalam tabel di bawah ini. Termasuk dalam tabel adalah jumlah dari masing-masing daerah pemilihan yang terdiri dari 6 daerah pemilihan.

Tabel 7.3
Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Partai di Kabupaten Ponorogo Periode 2019-2024

No	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN I	DAERAH PEMILIHAN II	DAERAH PEMILIHAN III	DAERAH PEMILIHAN IV	DAERAH PEMILIHAN V	DAERAH PEMILIHAN VI	JUMLAH
1.	Partai Golkar	1	1		1	1		4
2.	PKB	2	1	1	1	1	1	8
3.	Partai Gerindra		1	1	1	1	1	5
4.	Partai Demokrat	1		2	1		1	5
5.	PAN		1	1	1			3
6.	PDIP	1	1	1	1			4
7.	PKS	1	1	1		1		4
8.	PPP						1	1
9.	Nasdem	1	2	1	2	2	2	10
10.	HANURA						1	1
Total		7	8	8	7	6	7	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Ponorogo

Kenaikan partai Nasdem dalam memperoleh kursi adalah suatu lompatan yang sangat tajam. Pada tahun sebelumnya, partai ini hanya mendapatkan 1 kursi yaitu di daerah pemilihan 6 yang meliputi Kecamatan Kauman, Kecamatan Sampung dan Kecamatan Sukorejo. Dari satu kursi menjadi 10 kursi di pemilu legislatif tahun 2019. Kenaikan ini dimungkinkan terjadi karena beberapa sebab. Pertama, adanya tim yang solit dalam memenangkan calon. Ada koordinasi yang baik dari setiap calon dengan tim pemenangan dan lain-lain. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kemenangan calon bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu soliditas tim yang dibentuk secara organisasional maupun hasil konsultasi dengan lembaga konsultan politik tertentu. Yang lebih penting dari itu adalah kesiapan calon dengan modalitas baik modalitas yang berbasis modalitas kultural seperti keterkenalan calon, posisi sosial kemasyarakatan calon dan lain-lain; modal simbolik seperti gelar pendidikan, putra tokoh masyarakat, dan lain-lain atau juga modal ekonomi dan sumber daya manusia. Modal ekonomi seperti biaya-biaya atau ongkos dalam mengkoordinasi tim kampanye, tim sukses, tim doa dan lain-lain atau juga disebabkan oleh adanya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dalam memenangkan calon melalui cara-cara konvensional maupun non konvensional. Cara konvensional misalnya dengan cara-cara manual tatap muka, agitasi dan lain-lain. Sedangkan cara non manual atau non konvensional adalah dengan cara-cara digital, media sosial atau platform-platform lain yang bisa menjangkau ke ruang privat seseorang atau pemilih melalui alat komunikasi yang disalurkan lewat internet seperti android, HP, Laptop dan lain-lain. Kemenangan Nasdem secara melonjak bisa dimungkinkan dari salah satu sebab yang telah dijelaskan (modalitas kultural, modalitas simbolik, modalitas sumber daya manusia dan modalitas ekonomi).

D. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Ponorogo

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki arti penting bagi pembangunan masyarakat pedesaan. Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa BPD adalah lembaga yang menjalankan pelaksanaan pemerintahan desa. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa setempat dengan jumlah perwakilan yang disepakati bersama. Peraturan Menteri yang mengatur teknis BPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Arti penting BPD bagi masyarakat desa seperti yang tertera dalam pasal 31 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah pertama, untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa; kedua, berfungsi untuk menampung dan juga untuk menyalurkan aspirasi masyarakat; ketiga, berfungsi untuk mengawasi kerja-kerja kepala desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh karena itu sangat signifikan. Tidak boleh ada raja-raja kecil di desa, sebagaimana tidak boleh ada korupsi di tingkat desa. Jika Indonesia bersih tanpa korupsi mulai tingkat desa sampai pusat, tentu Indonesia adalah negara yang sangat baik. Untuk mencegah tersebut diperlukan anggota BPD yang berdaya. Keberadaan BPD tidak hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga berfungsi sebagaimana adanya. Fungsi penting tersebut tampak sebagai pembuat rancangan peraturan desa. Ini artinya bahwa kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat. Seperti rakyat memiliki negara, rakyat pula yang memiliki desa. Peraturan yang dibuat jika dilakukan oleh BPD, maka akan berjalan secara *bottom up* yaitu dari bawah ke atas, dari masyarakat yang dicantumkan dalam bentuk peraturan. Dapat dipahami, kenapa ada desa yang maju dan ada desa yang kurang maju, jawabannya adalah tergantung seberapa besar BPD berperan aktif ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsinya.

Fungsi BPD yang tidak kalah penting adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa untuk ditindaklanjuti oleh kepala desa. Apabila disamakan, maka BPD adalah semacam lembaga legislatif desa. Ia dipilih dari masyarakat untuk membantu menyampaikan berbagai keinginan dan harapan dari desa. Untuk kepentingan ini, BPD haruslah mereka yang berpengetahuan dalam hal pemerintahan desa. Jika tidak, mereka perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan agar mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan desa, berapa uang yang dimiliki desa, darimana uang itu diperoleh, dan digunakan untuk apa uang tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa. BPD yang kreatif serta responsif akan menyebabkan masyarakat makmur. Masyarakat bisa membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Desa) yang dikembangkan dan dikemas untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat kadang belum memahami sepenuhnya fungsi BPD. BPD yang berdaya akan menyebabkan desa berdaya.

Fungsi berikutnya adalah fungsi pengawasan. BPD mengawasi jalannya pemerintahan desa. Pemerintah adalah mereka orang-orang yang dipasrahi untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan pemerintahan desa setiap hari. Mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani rakyat. Rakyat juga membayar mereka sebagai kepala desa dengan gaji bulanan atau dengan tanah desa yang disebut "bengkok". Tanah tersebut diserahkan oleh masyarakat untuk kepala desa agar dikelola dan hasilnya dapat digunakan oleh kepala desa sebagai upah dari jabatan yang dipegangnya. Namun, karena kepemimpinan yang sewenang-wenang, dan korupsi memiliki berbagai cara yang beragam, maka kinerja kepala desa juga perlu diawasi. BPD memiliki peran penting untuk mengawasi kinerja kepala daerah. Pengawasan menjadi urgen agar memberi rasa takut dan hati-hati atas tindakan yang mungkin saja keluar dari standar

operasional prosedur yang telah ditetapkan. BPD yang kritis ikut membantu terlaksananya program desa yang bersih, baik dan tepat sasaran.

Berikut adalah anggota BPD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 berdasarkan jumlah dan dari sisi jenis kelamin. Data di bawah menunjukkan seberapa besar peran perempuan dalam BPD di Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

Tabel 7.4
Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Slahung	104	33	137
2	Ngrayun	72	21	93
3	Bungkal	85	30	115
4	Sambit	77	31	108
5	Sawoo	83	26	109
6	Sooko	40	10	50
7	Pulung	106	30	136
8	Mlarak	76	23	99
9	Jetis	73	16	89
10	Siman	83	23	106
11	Balong	104	27	131
12	Kauman	97	17	114
13	Badegan	60	20	80
14	Sampung	75	21	96
15	Sukorejo	107	19	126
16	Babadan	78	15	93
17	Jenangan	89	21	110
18	Ngebel	42	12	54
19	Jambon	74	23	97
20	Pudak	28	6	34
21	Ponorogo	-	-	-
Jumlah/Total		1.553	424	1.977

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ponorogo*

Jumlah total anggota BPD Kabupaten Ponorogo adalah 1.977 yang dihitung untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Jumlah tersebut

dibagi dalam jenis kelamin yang berbeda. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak menjadi anggota BPD yaitu 1.553 orang dan jumlah BPD perempuan adalah 424 orang. Jumlah perempuan tidak ada separuh dari jumlah BPD laki-laki. Oleh karena itu dalam relasi gender, fakta ini memperlihatkan beberapa hal.

Pertama, dalam hal BPD di Kabupaten Ponorogo, keterlibatan perempuan sangat lemah. Jumlah perempuan tidak sampai jumlah separuh BPD laki-laki. Kenapa ini bisa terjadi. Alasannya bisa dari dua perspektif, perspektif internal perempuan dan perspektif relasi laki-laki dan perempuan. Dari perspektif perempuan, di antaranya adalah adanya illeterasi perempuan tentang politik kebijakan atau politik pemerintahan desa. Bagi kebanyakan perempuan, urusan publik adalah urusan laki-laki. Perempuan dianggap kurang panjang langkahnya. Perempuan mengidentifikasi diri sebagai *konco wingking*, pembantu di belakang layar. Kerja-kerja di depan dalam ranah publik adalah urusan laki-laki. Terlalu jarang terlibat dalam urusan publik, perempuan akhirnya jarang diberi kesempatan oleh laki-laki untuk memerankan diri dalam urusan publik. Laki-laki pada suatu ketika ingin memasrahkan kepentingan masyarakat kepada perempuan, namun kesempatan itu kadang ditolak. Ini artinya bahwa perempuan harus melakukan reformasi paradigmatik dirinya sendiri. Perempuan harus berani mengambil peran-peran sosial sebagaimana laki-laki. Kehadirannya bukan sebagai suatu tuntutan laki-laki lagi, seperti adanya kebijakan *affirmative action* tetapi karena peran dan kemampuannya dalam berperan dan terlibat. Terkadang perempuan juga mengidap sindrom "ratu lebah", yaitu sindrom di mana perempuan tidak ingin perempuan lain maju. Akibatnya, perempuan terjebak kepada persaingan antar mereka sendiri serta tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Ibarat ratu lebah yang ingin satu-satunya ratu, terkadang perempuan demikian. Ia ingin maju sendiri dan menghambat prestasi perempuan lainnya.

Dalam perspektif relasi laki-laki dan perempuan masih tampak adanya relasi yang bias gender. Relasi tersebut seperti adanya anggapan laki-laki bahwa perempuan tidak pantas dalam ranah publik. Perempuan pantas dalam ranah domestik. Keterlibatan perempuan dalam ranah publik akan melupakan kewajiban utamanya yaitu mengurus anak, memasak dan mencuci pakaian. Relasi patriarkhis ini akan semakin diperparah apabila laki-laki berpikir dominatif di satu sisi dan perempuan sendiri menganggap bahwa dominasi tersebut mendapat legitimasi dari tradisi, budaya dan bahkan agama.

Kedua, hampir semua kecamatan di Kabupaten Ponorogo, keterlibatan perempuan sangatlah rendah. Tidak ada satu kecamatan pun yang meletakkan relasi jenis kelamin ini dalam posisi seimbang. Sebagai contoh anggota BPD daerah Kecamatan Ngrayun jumlah laki-laki berjumlah 72 dan jumlah BPD perempuan hanya 21. Demikian pula anggota BPD laki-laki Kecamatan Pulung berjumlah 106 sementara anggota BPD perempuan hanya 30 orang. Hal ini memprihatinkan. Jumlah penduduk banyak di huni oleh perempuan namun

keterwakilan mereka banyak didominasi laki-laki. Ini adalah rezim laki-laki. Suara perempuan diendapkan dalam suara laki-laki. Jika diamati tidak perbedaan tersebut sangat mencolok. Bisa dilihat misalnya jumlah laki-laki BPD Sukorejo berjumlah 107 sementara jumlah perempuan adalah 19 orang. Suara perempuan perlu didengar melalui perempuan bukan melalui laki-laki. Dimungkinkan suara perempuan yang disampaikan oleh laki-laki akan mengalami reduksi.

Perempuan perlu didengar suaranya karena menyangkut beberapa hal. Pertama, perempuan banyak terlibat dalam kebijakan keluarga. Suara perempuan biasanya memiliki kecenderungan benar dari perspektif yang tidak dipikirkan laki-laki. Kebiasaan perempuan berbicara dengan temannya dalam teras rumah adalah potensi pengumpulan informasi yang massif dalam masyarakat. Demikian pula banyak kegiatan laki-laki dalam sosial masyarakat tidak sempurna dan tidak berjalan dengan baik tanpa ada keterlibatan perempuan. Walau dalam diam, perempuan sering memberi kontribusi bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Dalam kasus pilihan-pilihan BPD, perempuan harus diundang dan diajak bicara. Diamnya perempuan tidak berarti perempuan tidak memiliki gagasan. Relasi gender menjelaskan bahwa ada empat hal yang menandai suatu masyarakat bersifat tidak bias gender, yaitu adanya akses yang sama antara laki-laki dan perempuan, adanya partisipasi yang sama antara laki-laki dan perempuan, adanya kontrol yang sama dari laki-laki dan perempuan dan adanya manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat tersebut dalam kasus anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah keterlibatan perempuan menjadi anggota BPD serta terlibat dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat desa.

E. Jumlah Pejabat Menurut Eselon di Kabupaten Ponorogo

Istilah eselon adalah istilah untuk menyebut model kepangkatan aparatur sipil negara (ASN) atau yang lebih dikenal sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kepangkatan tersebut bersifat hirarkhis, maksudnya adalah kepangkatan yang bersifat berjenjang. Sistem hirarkhi tersebut untuk menunjukkan banya hal, diantaranya adalah masa lama seseorang melakukan pengabdian atau untuk menunjukkan prestasi seorang pegawai. Prestasi dapat disebabkan oleh beberapa indikator yang biasanya telah ditentukan aturannya. Eselon telah diatur oleh peraturan khusus yang mengaturnya. Hak dan kewajiban seseorang dalam eselon tertentu telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai tingkat eselon tertentu, seorang PNS atau ASN memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan tersebut akan mudah diperoleh apabila seseorang dengan kesungguhan dan pengabdianya melakukan tugas dengan sebaik mungkin.

Di satu sisi, eselon merupakan bagian dari kontestasi. Artinya seseorang dengan prestasi yang tinggi akan cepat mendapatkan eselon yang lebih tinggi

dari teman yang sama-sama pada posisi eselon yang sama, apabila dia melakukan pengabdian dengan sungguh-sungguh serta mempersiapkan dirinya untuk bekerja dengan kreatifitas dan inovasi yang tiada henti. Hal ini berarti setiap orang dapat memperoleh eselon yang lebih tinggi dengan cepat. Bahkan untuk mewujudkan kontestasi tersebut, lomba jabatan diperbolehkan. Ini artinya ada regulasi yang mengatur bagi siapa yang serius dalam pekerjaannya dan menciptakan hal-hal bermanfaat bagi bidang kerjanya, memungkinkan dirinya untuk naik eselon lebih cepat.

Apabila melihat jumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2021 tampak bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Dari 830 jumlah pejabat PNS yang ada, jumlah laki-laki adalah 537 orang, sementara jumlah perempuan adalah 293. Ada kenaikan jumlah pejabat perempuan di tahun 2022 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jumlah pejabat laki-laki masih mendominasi. Lihat saja misalnya eselon yang paling banyak jumlahnya yaitu eselon IV, jumlah laki-laki adalah 383 orang sementara jumlah perempuan adalah 248 orang. Demikian pula eselon yang tertinggi di Kabupaten Ponorogo yaitu eselon II, jumlah laki-laki adalah 20 orang sementara jumlah perempuan hanya 2 orang saja. Kenapa hal ini bisa terjadi.

Pertama, mengikuti asumsi sebelumnya bahwa eselon adalah bagian dari prestasi, maka dapat dikatakan bahwa perempuan "dimungkinkan" kurang berprestasi di banding laki-laki. Perempuan barangkali beralasan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan *double* atau ganda yang harus ditanggung sebagai pekerja atau sebagai PNS dan sebagai ibu rumah tangga di rumah, namun alasan ini adalah alasan klasik yang sudah tidak sesuai dengan paradigma relasional gender. Peran keluarga dan peran mengasuh anak misalnya adalah peran bersama antara suami dan isteri. Perempuan, sebagai perempuan, kadangkala memiliki apatisme kerja karena merasa bahwa prestasi bagi dirinya sudah diwakili oleh suami atau pendamping hidup sebagai kepala keluarga. Akibatnya, perempuan merasa cukup dengan apa yang telah diperolehnya. Apabila ini yang terjadi, perubahan pada diri perempuan harus diawali dari perubahan internal perempuan sendiri. Paradigma kerja perempuan harus dirubah bahwa bekerja tidak hanya mencari penghasilan semata, tetapi mencurahkan segala kreatifitas dan kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Dengan usaha ini, perempuan akan mendapatkan kerja manfaat yang lebih besar buat masyarakat. Kerja yang manfaat tidak hanya berimplikasi kepada eselon tetapi juga perhitungan Tuhan di akhirat. Bukankah perhitungan akhirat ini lebih penting dari segalanya. Secara eksternal, dunia sudah berubah, perempuan memiliki yang sama, Undang-undang telah mengaturnya, tidak ada diskriminasi dalam masalah eselonisasi pegawai. Dengan memperbanyak membaca kerja-kerja yang manfaat untuk kehidupan, dengan membaca keberhasilan seseorang dalam merubah kehidupan sosial, motivasi perempuan

akan terbina dan semangat. Peran suami juga diperlukan dalam hal ini. Suami yang sadar akan relasi sosial adil gender akan memberikan kesempatan kepada isteri untuk bekerja yang lebih bermanfaat untuk orang lain dalam bentuk pengabdian kreatif dan kontestatif.

Kedua, sedikitnya jumlah eselon untuk semua tingkat dimungkinkan pula karena jumlah perempuan yang tidak sebanyak laki-laki. Jumlah ini, oleh karena itu, berimplikasi pula kepada kepada sedikitnya eselon pada masing-masing tingkat. Berikut adalah data masing-masing eselon pejabat yang ada di Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

Tabel 7.5
Jumlah Pejabat Struktural Menurut Eselon Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

ESELON	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL		JUMLAH TOTAL
	L	P	
1	2	3	4
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	383	248	631
Eselon III	134	43	177
Eselon II	20	2	22
Eselon I	-	-	-
Jumlah	537	293	830

Sumber: *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ponorogo*

F. Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo

Jumlah PNS terbagi dalam beberapa jenis jabatan seperti jabatan struktural, fungsional umum, dan fungsional tertentu. Jumlah PNS Kabupaten Ponorogo menurut jenis jabatan pada akhir tahun 2021 secara keseluruhan adalah 8.435 orang. Jumlah ini terbagi kepada jabatan yang diemban oleh laki-laki dan perempuan. Jumlah laki-laki adalah 4.289 dan jumlah perempuan adalah 4.146, ada selisih yang terpaut tidak terlalu jauh antara jumlah PNS laki-laki dan perempuan, yaitu selisih 143 atau sekitar 1,7 %. Jumlah laki-laki paling banyak adalah mengisi jabatan struktural, fungsional umum sementara jumlah perempuan terbanyak mengisi jabatan fungsional tertentu. Yang paling mencolok adalah perbedaan dalam jumlah mereka yang menduduki jabatan fungsional umum. Dalam jabatan fungsional umum laki-laki berjumlah 1.336 sedangkan perempuan berjumlah 493.

Dari berbagai jabatan termasuk dalam eselonisasi, laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini sebenarnya tidak bermasalah apabila telah ada kesempatan yang sama untuk berbagai jenis kelamin. Selama ada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama di antara laki-laki dan perempuan, maka perbedaan ini tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi bias gender dalam jabatan tersebut atau masih adanya stereotipe kepada perempuan bahwa laki-laki lebih hebat dari pada perempuan. Jika stereotipe ini masih melekat dari para pengambil keputusan, maka bias gender ini harus dihentikan. Jika fakta bahwa perempuan memang tidak bisa mengaktualisasi diri dalam pekerjaannya secara maksimal setelah adanya kesempatan yang sama, maka perbedaan jenis kelamin dalam jumlah tidak menjadi problem bersama. Problem bersamanya adalah bagaimana mendorong para perempuan untuk lebih memiliki jiwa kreatifitas, jiwa inovasi dan jiwa tangguh dalam menghadapi masalah kehidupan sosial dan politik. Berikut adalah data tentang jumlah PNS menurut jenis jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

Tabel 7.6
Jumlah PNS Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

JENIS JABATAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
	L	P	
1	2	3	4
Struktural	537	293	830
Fungsional Umum	1.336	493	1.829
Fungsional Tertentu	2.416	3.360	5.776
Jumlah/Total	4.289	4.146	8.435

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ponorogo

G. Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Ponorogo.

Koheren dan berkorespondensi dengan data sebelumnya tentang eselonisasi dan jenis jabatan yang dimiliki oleh PNS Kabupaten Ponorog masih dominasi laki-laki. Hanya pada jabatan fungsional tertentu perempuan lebih banyak di banding laki-laki. Pun demikian pada jumlah PNS menurut golongan ruang dan jenis kelamin. Dominasi laki-laki juga terjadi. Dapat diketahui dari tabel bahwa jumlah PNS berdasar golongan dan ruang adalah 8.435 orang. Jumlah ini dibagi menjadi 4.289 berjenis kelamin laki-laki dan 4.166 berjenis kelamin perempuan. Perempuan dan laki-laki menduduki golongan dan ruang yang terdiri dalam 4 kelompok golongan dan ruang. Kelompok tersebut adalah Golongan 1, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV. Masing-masing golongan terdiri dari beberapa ruang yaitu ruang a, b, c dan e. Jika digabung

adalah golongan 1/a, 1/b, 1/c, 1/d dan seterusnya untuk Golongan II, III dan IV. Hanya saja, pada golongan IV ada penambahan ruang yaitu ruang IV/e. Penambahan ruang ini biasanya diberikan untuk mereka yang akan menjalani masa pensiun.

Tabel 7.7
Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

GOLONGAN/RUANG	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
	L	P	
1	2	3	4
I / a	1	-	1
I / b	2	-	2
I / c	15	-	15
I / d	71	3	74
II / a	31	4	34
II / b	245	33	278
II / c	319	150	469
II / d	399	309	708
III / a	639	745	1.384
III / b	437	655	1.092
III / c	372	383	755
III / d	543	611	1.154
IV / a	312	252	564
IV / b	826	949	1.775
IV / c	67	49	116
IV / d	9	2	11
IV / e	1	1	2
Jumlah/Total	4.289	4.146	8.435

Sumber: *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ponorogo*

Dari 17 ruang atau golongan, jumlah laki-laki lebih banyak sekitar 12 ruang golongan dan sisanya perempuan yang lebih banyak. Dalam hal ini jumlah perempuan lebih banyak mendominasi di golongan III untuk semua ruang dan unggul dari laki-laki di golongan ruang IV B dengan jumlah 949 sedangkan laki-laki hanya 826 orang.

Kondisi mental perempuan memang dapat dikategorikan kepada tiga hal dalam menghadapi tantangan terutama tantangan pekerjaan. Ada mereka yang termasuk kelompok "tenang" yaitu kelompok perempuan yang sudah tenang dengan kondisi kemapanan. Ia tidak mau menghadapi rintangan atau tantangan yang membuat dirinya sulit. Apa yang diperoleh adalah sesuatu yang menyenangkan. Mereka lebih senang dengan zona nyaman. Mereka tidak suka tantangan. Kedua, kelompok perempuan dengan kepribadian "pemanjat" yaitu kelompok yang senang dengan tantangan namun ketika tantangan itu terlalu berat, ia mundur dan berbalik arah. Tantangan hanya dihadapinya dengan sekuat tenaga yang dia punya. Usaha-usaha untuk menaklukkan tantangan tersebut dengan cara-cara yang ekstra ordinary tidak dilakukan. Yang terakhir adalah kondisi perempuan dengan jiwa "pendaki", yaitu jiwa perempuan dengan penantang terhadap ujian dan rintangan. Ia selalu mencari celah dan cara setiap persoalan datang. Kelompok terakhir inilah sebenarnya harapan para perempuan. Perempuan dalam mental "pendaki" inilah yang akan mengisi berbagai peran-peran sosial dan peran-peran politik.

Namun, mempersiapkan seorang perempuan dengan jiwa "pendaki" adalah butuh proses. Minimal ada beberapa hal yang harus diselesaikan untuk mewujudkan mental "pendaki" tersebut. Pertama, harus melewati rintangan budaya. Budaya yang dimaksud adalah budaya patriarki, suatu budaya yang meletakkan perempuan pada posisi subordinat, perempuan diletakkan pada nomor dua, terlebih dalam urusan-urusan publik. Hambatan-hambatan budaya ini seperti labelling jelek atau labelling negatif kepada perempuan seperti tukang nangis, gampang emosional dan lain-lain. Labelling ini mengesankan bahwa perempuan tidak akan kuat jika menjadi pemimpin atau menjadi pengambil kebijakan dan lain-lain. Di samping labelling, kesan *double burden* (beban ganda) mengurus anak dan bekerja juga belum sepenuhnya hilang. Stereotipe juga penghalang budaya lainnya. Anggapan perempuan keluar rumah bisa membahayakan perempuan adalah penghalang lain dalam melakukan peran-peran publik. Perempuan tidak bisa ikut rapat malam, perempuan tidak pantas pergi sendiri dan lain-lain. Kedua, hambatan pendidikan. Masih banyak perempuan yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Termasuk pendidikan ini adalah kurangnya keterampilan dan keahlian perempuan dalam bekerja. Perempuan dalam dirinya banyak kekurangan. Perempuan harus membenahi diri dalam wilayah ini. Menjadi perempuan mandiri adalah langkah awal yang penting dalam mengasah kemampuan dan meningkatkan skill pribadi. Hambatan ketiga adalah hambatan tafsir agama. Masih banyak kelompok agamawan melihat tafsir agama dalam nada bias. Tafsir-tafsir israiliyat yang mendeskriditkan perempuan masih dipedomani. Tafsir-tafsir tersebut perlu mendapat sentuhan secara multiperspektif agar tidak bias gender. Buku-buku dan kajian yang equal telah banyak dilakukan oleh para kritikus tafsir dan juga para ulama. Perempuan bisa membaca multiperspektif ini sehingga

menimbulkan pemahaman yang lebih transformatif. Hambatan keempat adalah hambatan dari laki-laki. Ketidaksiapan laki-laki terhadap kerja-kerja perempuan dalam wilayah publik terkadang muncul. Hal ini bisa terjadi karena berbagai kemungkinan, bisa karena laki-laki tersebut masih bias patriarkhis atau karena perempuan kalah dalam persaingan dalam kontestasi melawan perempuan.

H. Jumlah Tim Penilai Kinerja Kabupaten Ponorogo

Dapat dilihat bagaimana tim penilai kinerja didominasi oleh laki-laki dan tidak ada anggota tim perempuan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Perempuan harus dilihat oleh kaca mata perempuan, bukan oleh kaca mata laki-laki. Suara perempuan harus diungkapkan oleh perempuan dan bukan disuarakan oleh laki-laki. Dari keseluruhan jumlah tim penilai atau Baperjakat yang berjumlah 7 orang, adakah kemungkinan bias gender hadir dalam setiap kebijakan yang ditetapkan. Kemungkinan mungkin saja terjadi. Kemungkinan tersebut terkadang tidak disadari. Kenapa demikian, karena bias gender telah menjadi suatu kesadaran yang dianggap benar akibat ideologi yang terus menerus masuk dalam alam bawah sadar manusia. Data berikut adalah bukti dari ketiadaan perempuan sebagai anggota Tim Penilai Kinerja atau Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Tabel 7.8
Jumlah Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

NO	BAPERJAKAT		JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
	L	P	L+P	
1.	7	0	7	Tim Baperjakat sudah diganti menjadi Tim Penilai Kinerja
	Jumlah		7	

Sumber: *Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kab. Ponorogo*

Perlunya memasukkan unsur perempuan dalam hal tim penilai kinerja atau tim Baperjakat adalah pertama, sebagai bentuk apresiasi atas kesamaan kesempatan bagi setiap manusia dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Keempat hal tersebut harus diterima oleh semua orang dari berbagai jenis kelamin. Pembentukan tim dengan memasukkan perempuan adalah bagian dari *affirmative action* kepada perempuan. Di satu pihak, agar tim penilai kinerja menjadi pionier bagi gerakan adil gender. Gerakan adil gender harus dimulai dan diawali. Caranya adalah memasukkan perempuan dalam anggota tim. Tim penilai harus menjadi penggerak bagi gerakan ini. Walau setiap orang bisa

membela bahwa tim penilai tidak akan pilih kasih karena semua hal telah ditentukan mekanismenya, namun pembelaan biasanya perlu diwujudkan dalam bukti yang dapat disaksikan. Salah satu bukti adalah adanya perempuan menjadi tim penilai. Kedua, dengan masuknya perempuan berarti akan tercipta suatu equalibrium dalam pengambilan keputusan, tidak saja dalam hal baik dan buruk, tetapi juga ada pertimbangan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan berbagai perspekti. Ketiga, dengan adanya anggota tim perempuan, anggota tim yang lain akan mendengarkan suara perempuan dari perempuan sendiri, bukan dari suara laki-laki. Kenapa demikian, karena dimungkinkan akan ada reduksi ketika aspirasi perempuan disampaikan oleh laki-laki. Karena bagaimana pun tidak ada jaminan bahwa laki-laki akan memperjuangkan suara perempuan, sebagaimana tidak ada jaminan juga bahwa perempuan akan membela kelompok mereka sendiri. Namun, perempuan yang mengerti akan pembelaan terhadap perempuan akan memahami bahwa perjuangan membela perempuan juga tidak dimaksudkan menghilangkan berbagai syarat kecakapan dan keahlian tertentu. Membela perempuan di satu sisi juga tidak mempersoalkan kesadaran perempuan dalam melakukan pilihan. Yang jadi konsentrasi pembelaan perempuan adalah perempuan yang merasa terdominasi namun ia tidak sadar bahwa ia sedang didominasi. Kaum perempuan harus paham dan sadar akan segala apa yang dilakukan. Juga tidak dimaksudkan bahwa pembelaan perempuan untuk mendominasi laki-laki. Pembelaan kepada perempuan diarahkan untuk adanya komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang seimbang dan saling pengertian antara satu dengan yang lain.

I. Jumlah Camat dan Kades/Kakel di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020

Dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo, jumlah Camatnya adalah 21 orang. Dari jumlah total tersebut, jumlah camat laki-laki adalah 18 orang, sementara jumlah camat perempuan adalah 3 orang. Komposisi ini sebenarnya tidak seimbang. Namun sebagai sebuah awalan, adanya camat perempuan adalah patut diajungi jempol. Demikian pula untuk Kades/Kakel. Jumlah Kades/Kakel adalah 24 orang dengan perincian 15 orang kades laki-laki dan 9 orang kades/kakel perempuan. Data dalam tabel menunjukkan berbagai data tentang jumlah camat dan Kades dalam hubungannya dengan jenis kelamin.

Tabel 7.9
Jumlah Camat Kakel dan Kades di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

NO	CAMAT		KEPALA KELURAHAN		KEPALA DESA	
	L	P	L	P	L	P
1.	17	4	18	8	267	14
JUMLAH TOTAL	21		26		281	

Sumber: *Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Ponorogo*

Data di atas menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, jumlah Kepala desa yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jumlah camat yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini bisa dimungkinkan karena pada Kades mereka dipilih. Mereka mendapat dukungan dari masyarakat untuk menjadi kepala desa. Mereka juga didukung oleh suami-suami mereka. Dalam sistem pemerintahan desa, kaum perempuan harus memenangkan hati rakyat agar memilih dirinya. Sementara itu untuk camat perempuan bukanlah hasil pemilihan. Mereka ditunjuk oleh atasan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah penunjukan tersebut didasarkan oleh prestasi kerja dan kemampuan manajerial mereka atau karena ada sesuatu yang lain. Andaikan karena hasil kerja, alangkah sedikitnya jumlah perempuan yang berprestasi di Kabupaten Ponorogo. Dianggap sedikit karena camat perempuan hanya tiga orang. Selebihnya kemana? Studi analisa gender, oleh karena itu, sebenarnya juga mempersoalkan alasan kenapa camat banyak dipegang oleh laki-laki daripada perempuan.

Kedua, perlunya camat perempuan atau kades perempuan adalah untuk mulai melihat berbagai kemungkinan perbaikan kecamatan atau desa ketika di kendalikan oleh perempuan. Kasus kepemimpinan Risma di Kota Surabaya misalnya adalah contoh baik. Ini artinya perlu untuk mencoba berpikir sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan perempuan memimpin. Perempuan dalam ranah ini berarti harus membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya mampu mengembangkannya sebagaimana Risma sebelumnya juga dikenal mampu menjadikan Kota Surabaya asri.

Pertanyaannya adalah apakah tidak boleh memiliki camat atau kades laki-laki. Jawabannya adalah boleh. Yang tidak boleh adalah ketika seorang perempuan layak menjadi camat misalnya lalu dihambat karena faktor-faktor yang tidak terkait dengan aturan administrasi. Dalam hal camat perempuan, pemerintah Kabupaten harus melihat pada kemampuan dan manajerial mereka dalam bekerja sekaligus sebagai ajang untuk *affirmative action* buat perempuan.

J. Jumlah Pegawai KPU Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (PEMILU). Lembaga ini pertama kali dibentuk pada tahun 1999. KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan presiden, kepala daerah, DPR, DPRD dan DPD. Apabila KPU tersebut berada di suatu Kabupaten, maka KPU daerah tersebut berfungsi untuk mengadakan pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah baik bupati maupun walikota. Di antara tugasnya adalah menjabarkan program dan melaksanakan anggaran dan menetapkan jadwal pilihan kepala daerah. KPU daerah juga membentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) yang menjadi wilayah kerjanya. KPU juga mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten dengan menerbitkan Surat Keputusan, KPU juga melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai data kependudukan yang valid dan tugas-tugas lainnya yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

Dari data yang tampak dalam tabel di bawah bahwa KPU Ponorogo dipimpin oleh 1 orang ketua, 4 orang anggota, 1 orang sekretaris, 3 orang kasubbag, 1 orang bendahara, 7 orang staff PNS dan 11 staf non PNS. Jika ditotal mereka yang bekerja di KPU berjumlah 28 orang. Jumlah laki-laki berjumlah 19 sedangkan jumlah perempuan adalah 9 orang.

Tabel 7.11
Jumlah Pegawai KPU Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

NO	JENIS JABATAN DAN JENIS KELAMIN													
	KETUA		ANGGOTA		SEKRETARIS		KASUBBAG		BENDAHARA		STAF PNS		STAF NON PNS	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	0	4	0	1	0	1	2	0	1	5	2	7	4

Sumber: KPU Kabupaten Ponorogo

Data yang ada tentang KPU Kabupaten Ponorogo memperlihatkan. Pertama, KPU Kabupaten Ponorogo banyak didominasi oleh laki-laki. Laki-laki berjumlah 19 orang dan perempuan berjumlah 9 orang. Jumlah laki-laki 2 kali lipat dari jumlah perempuan. posisi penting di isi oleh laki-laki semua yaitu ketua, anggota dan sekretaris. Jabatan sekretaris yang biasanya identik dengan perempuan juga tidak diisi oleh perempuan. Anggota pun demikian. Semua

anggota KPU adalah laki-laki. Untuk Kasubbag terdiri dari 3 orang dengan komposisi perempuan yaitu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sementara pada bendahara hanya terdiri dari 1 orang dan semuanya adalah perempuan tidak ada laki-laki di jabatan ini. Sementara itu untuk staf PNS, jumlah laki-laki lebih banyak yaitu 5 orang dan perempuan hanya 2 orang. Sama dengan staff PNS, staf Non PNS juga demikian, bahkan jumlahnya lebih banyak yaitu 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kedua, tidak adanya anggota perempuan dalam komposisi komisioner atau anggota KPU bisa dimungkinkan karena perempuan kalah dalam penjangkaran pemilihan anggota KPU. Jika ini yang terjadi adalah bahwa perempuan harus memiliki jika kompetitif dalam hal ini. Seperti telah dijelaskan, perempuan harus menaikkan semangat dalam menghadapi tantangan pada level "pendaki" yaitu perempuan yang berani menghadapi resiko serta dapat mencari jalan terhadap resiko itu untuk meneruskan apa yang diinginkan. Level "pendaki" apalagi level di bawahnya harus dievaluasi. Kontestasi dalam pemilihan anggota KPU adalah bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Perempuan, oleh karena itu, harus mempelajari banyak hal. Lebih dari itu *affirmative action* dari pemerintah melalui peraturan juga penting. Artinya ada regulasi yang mensyaratkan salah satu anggota adalah keterwakilan perempuan. Jika ini yang terjadi maka bagaimana pun perempuan akan ikut belajar bersama dan memperbaiki diri dalam kerja-kerja mulia di KPU. *Affirmatif action* adalah wujud pemerintah terhadap keberpihakan kepada perempuan. Setiap orang wajib mendengarkan perempuan dari perempuan sendiri bukan dari suara laki-laki. Seperti diketahui, terkadang suara perempuan tereduksi oleh suara laki-laki atau sengaja direduksi oleh laki-laki. Regulasi menjadi penting karena regulasi memiliki daya paksa atas semua tindakan seseorang dalam wilayah kerja di mana regulasi itu diberlakukan.

BAB VIII SOSIAL

Ponorogo adalah salah satu kabupaten di propinsi Jawa Timur yang pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 955.839 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 477.428 orang dan perempuan 478.411 orang dengan sex ratio sebanyak 99.77 jiwa. Letak kabupaten dan jumlah penduduk tentu mempengaruhi banyak aspek dan permasalahan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam ruang lingkup pergaulan di sekolah, keluarga, sampai pada segmen yang berhubungan dengan masalah sosial yang lain.

Masalah sosial atau permasalahan sosial adalah keadaan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara impian dan kenyataan dalam hidup bermasyarakat. Akibatnya menimbulkan penyimpangan atau interkasi sosial yang menyimpang. Diantara permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat adalah kemiskinan, pengangguran, korupsi, pertikaian, kesenjangan hukum, pendidikan yang rendah, tingginya penyakit menular, gizi buruk, konflik sosial antar kelompok, kenakalan remaja, narkoba, disorganisasi keluarga, perilaku konsumtif, kesehatan, modernisasi, globalisasi, kejahatan seksual, dan lain-lain. Faktor yang seringkali menjadi sumber masalah sosial di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya, antara lain;

1. Ekonomis

Faktor ekonomis menjadi salah satu sumber masalah sosial dalam masyarakat lantaran faktor ini akan mengakibatkan kesenjangan sosial, serta kecemburuan yang berakibat pada dorongan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Manusia yang memiliki keinginan tidak terbatas apabila kurang memenuhi kebutuhannya akan memberikan peluang terjadi penyimpangan terhadap norma sosial di masyarakat.

2. Biologis

Selain faktor ekonomis, seringkali pula yang menjadi latar belakang adanya sumber masalah sosial adalah faktor biologis seseorang, yang terjadi karena lingkungan tidak sehat sehingga menjadikan dia sebagai individu yang terjangkit dalam penyakit menular

3. Psikologis

Psikologis menjadi salah satu unsur yang memberi pengaruh dalam masalah sosial di masyarakat. Faktor ini erat hubungannya dengan gonjangan jiwa sertafisiran setiap manusia yang tidak bisa seimbang dengan alam sadarnya, kondisi ini akan berakibat pada kegilaan serta ketidaknormalan dalam menjadi kehidupan.

4. Kebudayaan

Kasus masalah sosial di masyarakat yang terakhir, bisa terjadi karena kebudayaan yang berbeda dari satu kelompok sosial ke dalam kelompok

sosial lainnya. Perbedaan ini bisa menyangkut pada sistem, adat, bentuk tubuh, paras wajah, kulit, dan lain sebagainya.

Di antara masalah-masalah sosial yang menjadi problem aktual saat ini adalah keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yang masih menjadi persoalan yang cukup rumit hampir di setiap Provinsi, atau Kota/ Kabupaten. Pengertian Kesejahteraan Sosial menurut UU No. 11 tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Perlu diungkap kembali tentang jenis-jenis PMKS, karena setiap tahun permasalahan tersebut tidak ada habisnya. Ada 22 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu:

1. Anak Balita Terlantar, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial.
2. Anak Terlantar, adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial.
3. Anak Nakal, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain,

serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia maka belum dapat dituntut secara hukum.

4. Anak Jalanan, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat umum.
5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
6. Korban Tindak Kekerasan, adalah seseorang yang terancam secara fisik maupun non fisik(psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdakwa. Dalam hal ini termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan.
7. Lanjut Usia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8. Penyandang Cacat, adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Dalam hal ini termasuk anak cacat, penyandang cacat eks penyakit kronis.
9. Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
11. Gelandangan, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengambara di tempat umum.
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
13. Korban Penyalahgunaan Napza, adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras

diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

14. Keluarga Fakir Miskin, adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
15. Keluarga Berumah Tak Layak Huni, adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya terutama antara suami-isteri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
17. Komunitas Adat terpencil, adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
18. Korban Bencana Alam, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri(kecelakaan kerja).
19. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
21. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional(dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
22. Keluarga Rentan, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan 5 tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan

ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Dari 22 jenis PMKS tersebut, data yang tersedia di Kabupaten Ponorogo hanya ada 2, yaitu eks PSK dan anak jalanan. Sedangkan anak terlantar pada tahun 2021 ini sudah tidak ada lagi.

Salah satu masalah sosial yang melenceng dari norma yang terdapat di masyarakat adalah meluasnya praktik prostitusi. Prostitusi atau pelacuran pada hakekatnya adalah perilaku seks yang berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia praktek prostitusi lebih banyak dilakukan oleh perempuan meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi juga dilakukan oleh kaum laki-laki.

Sebenarnya masalah prostitusi di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Aktivitas prostitusi mempunyai sejarah panjang di dalam masyarakat Indonesia, mulai dari keberadaan para selir untuk para laki-laki bangsawan, para Nyai bumiputra untuk para pejabat VOC, para perempuan penghibur untuk para kuli kereta api serta perkebunan pada masa Hindia Belanda, serta pemaksaan pemerintah penjajah Jepang pada perempuan bumiputra untuk menjadi perempuan penghibur (*juugun ianfu*) bagi para tentara Militer Jepang.

Sekitar tahun 1884, kompleks pelacuran di kota-kota besar di jaman itu muncul bersamaan dengan kegiatan pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa, seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta dan Surabaya. Perkembangan jalur transportasi baru, pembangunan hotel, munculnya pemukiman baru, dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan seksual para pekerja, lambat-laun menyebabkan di sepanjang lintasan jalan kereta api –terutama disekitar stasiun- mulai munculnya sejumlah perempuan penghibur yang kemudian diikuti oleh tumbuhnya kompleks lokalisasi.

Sebenarnya istilah lokalisasi adalah pembatasan terhadap suatu tempat tertentu dan khusus (daerah atau ruang lingkup), pembatasan penyebaran (penyakit), dan penentuan suatu lokasi. Dewasa ini lokalisasi sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat tinggal/rumah para Pekerja Seks Komersial (PSK), dimana masyarakat pada umumnya memiliki stigma negatif terhadap keberadaan para PSK. Lokalisasi berkembang bersamaan dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat terutama dari urbanisasi serta perpindahan penduduk dari daerah-daerah dan kota-kota lain.

Lokalisasi PSK di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang kini tinggal sejarah, memiliki kisah historis tersendiri. Perlu di ungkap kembali bahwa awal dari relokasi lokalisasi Kedung Banteng pada mulanya dari Watoe Dhakon (Ngebong) pada tahun 1982. Tokoh masyarakat bersama Pemkab Ponorogo yang pada saat itu Bupati adalah R. Sumani menyepakati penutupan lokalisasi tersebut pada mulanya. Namun, karena melihat dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi tersebut

misalnya tidak bisa mengontrol penyebaran penyakit dan melakukan pembinaan mental terhadap PSK, maka lokasi tersebut direlokasi ke Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo.

Keberadaan Lokalisasi Kedung Banteng membawa dampak sosial bagi lingkungan masyarakat sekitar lokalisasi khususnya dan secara lebih luas juga berdampak bagi masyarakat Ponorogo. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk segera melakukan penanganan hingga paripurna namun dilakukan dengan seksama, bertahap dan dengan memperhatikan aspirasi seluruh pihak yang berkepentingan. Sebagai salah satu langkah awal, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu mengetahui aspirasi dari pekerja seks komersial serta pelaku bisnis di lokalisasi, masyarakat sekitar lokalisasi yang terdampak, pemerintahan setempat dan OPD teknis yang akan menangani rencana penutupan lokalisasi Kedung Banteng. Setelah dilakukan kajian yang mendalam berbagai kemungkinan terhadap dampak penutupan lokalisasi, dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pendekatan dan penanganan yang humanis sehingga dapat meminimalisir gesekan yang terjadi dalam pelaksanaan penutupan lokalisasi, maka pada tahun 2015 kompleks lokalisasi di Kabupaten Ponorogo akhirnya secara resmi ditutup.

A. Data Exs Pekerja Seks Komersial Kabupaten Ponorogo

Praktik seksualitas di Indonesia pada umumnya dilarang keras, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan terkadang tanpa mengindahkan batasan usia. Anak-anak di bawah umur pun bisa menyewa film-film seksual dengan sangat mudah. Praktik pornografi dan pornoaksi dilarang di ruang publik, namun di ruang tersembunyi menurut syam tetap berlangsung terus menerus.

Menurut Kadir (2007), maraknya pekerja seks di Indonesia bukanlah sebuah fenomena yang muncul dengan sendirinya. Secara garis besar ada enam alasan mengenai latar belakang timbulnya pekerjaan ini antara lain karena kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup, ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang tengah dilakukan dan penghasilan yang dianggap masih belum mencukupi, karena tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk memasuki sektor formal ataupun untuk menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, latar belakang kerusakan atau ketidakutuhan dalam kehidupan berkeluarga, seperti anak yang tidak diperhatikan dan kurang kasih sayang orang tua, sakit hati ditinggal suami yang selingkuh atau menikah lagi, karena tidak puas dengan kehidupan seksual yang dimiliki sebelumnya, memiliki cacat secara badaniah.

Sementara menurut Kartono (2011), dampak akibat kegiatan pekerja seks komersial ini yaitu menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terjadi ialah syphilis dan gonorrhoe

(kencing nanah), yang mana jika tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunannya. Akibat lainnya yaitu rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergodanya oleh PSK biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan. Keberadaan PSK ini juga mengakibatkan rusaknya sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama goyahnya norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum dan agama.

Pengetahuan yang rendah dari seorang wanita bisa berdampak pada kesehatannya. PSK merupakan profesi yang rentan terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit kelamin maupun penyakit infeksi menular seksual. Seharusnya para PSK mengetahui mengenai dampak ataupun risiko dari pekerjaannya dan melakukan tindakan pencegahan dengan ketat. Tetapi walaupun mereka mengetahui risiko dan dampaknya, masih ada hal lain yang menyebabkan mereka menjadi seorang PSK yaitu dari sisi ekonomi maupun latar belakang kehidupan rumah tangga.

Mengenai pekerja seks komersial ini dibutuhkan kehati-hatian dalam membahasnya. Memang secara kriteria mereka dapat dikatakan sebagai pekerja karena dengan jasanya mereka mendapatkan imbalan. Tetapi perihal seperti ini juga akan menjadi dilematis. Sebab jika merujuk kepada asal-usul perempuan memilih menjadi pekerja seks komersial, jelas adalah karena kemiskinan yang melanda. Pilihan kepada pekerjaan ini karena memang kecenderungan orang mencari pekerjaan yang paling mudah, dan secara manusia, tubuh perempuan tidak bisa dipungkiri adalah aset komoditas. Keadaan ini disadari betul oleh masyarakat miskin sehingga ketika mereka tidak memiliki cara lain lagi maka mereka lebih memilih pekerjaan ini, mereka terpaksa menjual dirinya atau bisa jadi pada awalnya mereka benar-benar dijual. Tapi bila melihat melalui kaca mata kekerasan, pekerjaan ini sangat sarat dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Karena pekerjaan dengan segala keterpaksaan tidak pernah memberikan perlindungan kepada si perempuan sendiri, bahkan perlindungan dari banyak pihak yang diuntungkan dan seharusnya bertanggung jawab termasuk pemerintah.

PSK selalu dikaitkan dengan praktek prostitusi dan ia bukanlah masalah baru akan tetapi merupakan masalah lama yang baru diangkat. Di lihat dari perkembangan peradaban manusia, hampir semua negara memiliki permasalahan di bidang prostitusi. Belum ada sebuah negara yang meniadakan praktek prostitusi selain hanya menertibkannya. Tidak jarang praktek prostitusi ini ditentang oleh ulama/kyai termasuk masyarakat sendiri. Harus dilihat bahwa praktek prostitusi yang ada di Ponorogo merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Karena merupakan realitas sosial sehingga terkesan adanya sikap permisif dari masyarakat padahal praktek prostitusi tersebut

bertentangan dengan moral, susila dan agama yang setiap saat dapat merusak keutuhan keluarga.

Sekalipun praktek prostitusi ini merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental yang dapat menghancurkan pula keutuhan keluarga, namun dalam hukum positif sendiri tidak melarang pelaku praktik prostitusi tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktek prostitusi. Hal ini diatur dalam pasal 296 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut : “ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Di Kabupaten Ponorogo, lokalisasi PSK yang berada di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo sudah ditutup, yaitu sejak tahun 2015 oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa. Sebelum dilakukan penutupan lokalisasi, banyak upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka membekali skill/ketrampilan bagi eks pekerja seks komersial. Tujuannya adalah agar mereka bisa hidup ditengah-tengah masyarakat secara normal. Pelatihan menjahit, memasak, ataupun usaha di bidang tata rias/salon dan lain-lain diberikan kepada eks pekerja seks komersial. Jumlah eks pekerja seks di Kabupaten Ponorogo adalah 21 orang dari jumlah keseluruhan sebanyak 200 orang. Mereka yang berasal dari luar Ponorogo dikembalikan ke daerah asal masing-masing. Adapun yang berasal dari Ponorogo dikembalikan kepada keluarganya dan tetap dilakukan pemantauan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Usia eks PSK di Kabupaten Ponorogo yang mendominasi berkisar antar 25 – 29 tahun yaitu sebanyak 17 orang. Usia 25-29 tahun adalah usia produktif dari sisi reproduksi dan yang lainnya. Sementara eks PSK yang berusia 35 – 80 tahun ada 4 orang. Ini menunjukkan bahwa mereka tergolong pada usia yang sudah mendekati menopause atau bahkan sudah menopause dari sisi kemampuan reproduksi, bahkan termasuk lansia. Tabel 8.1 berikut menunjukkan data jumlah eks PSK di Kabuapten Ponorogo.

Tabel 8.1
Jumlah Data Exs Pekerja Seks Komersial Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Usia	Jumlah
1	2	3
1	15 – 24	-
2	25 – 29	17
3	30 – 34	-
4	35 – 80	4
<i>Jumlah / Total</i>		21

Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo

B. Jumlah Anak Jalanan/Terlantar dilihat dari Tingkat Umur, Pendidikan, Asal/Tempat Tinggal.

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Indonesia, sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada era Otonomi Daerah, dalam rangka untuk menanggulangi dan melindungi pekerja anak, telah dikeluarkan Kepmendagri dan Otda Nomor 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (PPA). Salah satu isi pokok adalah melakukan penanggulangan pekerja anak, dengan cara melakukan penghapusan, pengurangan dan perlindungan pekerja anak yang berusia di bawah 15 tahun agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pekerja anak. Menurut Pasal 5 program penanggulangan pekerja anak meliputi: (1) Melakukan pelarangan dan penghapusan segala bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; (2) Melakukan pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan; (3) Melakukan perbaikan pendapat keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar; (4) Melakukan sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Program yang bersifat khusus dalam penanggulangan pekerja anak meliputi: (1) mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa; (2) memberikan pendidikan nonformal; dan (3) mengadakan pelatihan keterampilan bagi anak. Pembiayaan kegiatan penanggulangan pekerja anak bisa dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak, APBN, APBD, bantuan luar negeri dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Beberapa anak jalanan, khususnya di negara berkembang, merupakan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Selain itu, beberapa anak jalanan juga berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal. Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.
2. Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kenek.
3. Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
4. Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.

Orang tua sangat mempengaruhi keputusan anak dalam rangka mencari nafkah. Dukungan ini dapat berupa dukungan langsung maupun tidak langsung. Dukungan ini ditunjukkan dengan perilaku orang tua yang meminta uang setoran pada anak jalanan. Keadaan sosial ekonomi keluarga yang serba kekurangan mendorong anak jalanan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat dilihat salah satunya melalui pekerjaan orang tua.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Data menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan/terlantar terdapat dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Babadan. Kecamatan Ponorogo mempunyai jumlah yang paling banyak yaitu 18 orang (5 perempuan dan 13 laki-laki). Jumlah anak jalanan di kecamatan ini besar, dikarenakan merupakan pusat atau Ibukota Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ekonomi berkembang secara pesat, sehingga anak jalanan memilih kota ini sebagai alternatif mencari kehidupan, baik dengan cara mengamen maupun meminta-minta. Sedangkan Babadan adalah kecamatan yang mempunyai 10 anak jalanan yang semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 jumlah anak jalanan tidak terlalu banyak, yaitu 12 anak terdiri dari 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan orang. Sementara anak terlantar tahun 2021 jumlahnya nihil. Dari tabel 8.2 di

bawah ini, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berhasil menangani permasalahan anak jalanan dan anak terlantar. Dibuktikan dengan menurunnya secara kuantitas jumlah mereka. Lebih lanjut keterangan tentang jumlah anak jalanan dan anak terlantar di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dalam tabel 8.2 berikut:

Tabel 8.2
Jumlah Anak Jalanan/Terlantar dilihat dari Tingkat Umur, Pendidikan, dan Asal/Tempat Tahun 2021

No	Jenis PMKS	Jumlah		Total
		L	P	
1	2			
1	Anak Jalanan	6	6	12
2	Anak Terlantar	-	-	-
	Jumlah	6	6	12

Sumber: *Dinsos dan P3A Kab. Ponorogo*

Penanganan kasus anak jalanan dilakukan pertama-tama dengan mendiagnosa masalah yang ada pada si pelaku. Setelah itu, meneliti model penyelesaian masalah. Model seperti ini penting karena seringkali menjadi anak jalanan disebabkan bukan karena faktor ekonomi, frustrasi atau lain sebagainya, tetapi bisa disebabkan karena hal yang lain. Bila dalam undang-undang disebutkan bahwa anak terlantar ditanggung negara (termasuk anak jalanan), maka sudah sepantasnya, negara ikut bertanggungjawab atas mereka. Tentu, usaha yang dilakukan adalah mendiagnosa masalah sesuai *core* (inti) masalah yang menimpa mereka. Salah mendiagnosa masalah, salah pula dalam proses penyelesaiannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Banyak cara bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti menanggung beban belajar sekolah mereka, mencarikan orang tua asuh dan juga memberi keterampilan kepada mereka dan keluarganya.

Dengan adanya UU Perlindungan Anak, diharapkan akan terdapat instrumen hukum yang berfungsi sebagai perekayasa perlindungan anak di Indonesia. Format ke depan yang menyangkut fungsi undang-undang sebagai instrumen *social engenering* akan segera bisa dilakukan. Harapan kita tidak hanya terbatas berhenti pada pembentukan sebuah produk undang-undang, tetapi yang lebih penting bagaimana undang-undang bisa dijalankan dengan langkah-langkah kongkrit oleh seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, LSM, Ormas dan lembaga lain yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan hak-hak anak. Selama ini pemerintah dianggap belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, maka peran masyarakat

menjadi amat penting untuk turut berpartisipasi, yakni para pihak yang mempunyai kepedualian masa depan anak, baik organisasi keagamaan, yayasan atau LSM. Namun upaya yang dilakukan selama ini belum maksimal, rata-rata baru terbatas program yang sifatnya sektoral dan belum menyentuh hal yang mendasar yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Kinerja bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Binas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo, dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kabupaten Ponorogo sangat penting dalam mendukung keberhasilan terwujudnya kesejahteraan sosial di masyarakat, khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Secara umum, masyarakat sebenarnya mempunyai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yaitu suatu potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM adalah warga yang dengan kesadaran, tanggung jawab sosial dan didorong rasa kebersamaan kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Ada 6 jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, yaitu:

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
2. Organisasi Sosial, adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
3. Karang Taruna, adalah organisasi sosial kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda wilayah daerah, kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan organisasi berdiri sendiri.
4. Wahana Kesejahteraan, adalah sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja daripada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
5. Dunia Usaha yang melakukan UKS, adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD

serta kewirasusahaan berserta jaringannya yang dapat melakukan tanggung jawab sosialnya.

6. Keperintisan dan Kepahlawanan. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disyahkan sebagai Perintis Kemerdekaan. Janda/Duda perintis kemerdekaan adalah isteri/suami yang ditinggal (meninggal dunia) oleh perintis kemerdekaan dan telah disahkan sebagai janda, duda perintis kemerdekaan. Keluarga Pahlawan adalah suami/isteri (warakawuri) pahlawan, anak kandung, anak angkat yang diangkat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pahlawan yang bersangkutan belum/tidak berkeluarga maka yang menjadi keluarga adalah orang tuanya.

Peningkatan kompetensi PSM dilakukan dengan menyinergikan dan mengintegrasikan gerak langkah PSM bersama PSKS lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSM dapat lebih diberdayakan dengan penguatan kompetensi keilmuan dan keterampilan. Selain itu, dapat berkolaborasi, berkoordinasi dan memperkuat jaringan kerja dengan gugus tugas lainnya di tingkat desa. Antara lain Karang Taruna (KT), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dan Lembaga Peduli Keluarga atau FCU (Family Care Unit).

Adapun di tingkat kecamatan, PSM dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan bersinergi dengan wadah-wadah pemberi pelayanan sosial seperti Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) maupun PKST di tingkat kabupaten/kota maupun potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya.

PSM sebagai kekuatan menggerakkan kepedulian sosial di masyarakat memiliki peran strategis dalam meminimalisasi meluasnya permasalahan sosial. Ini karena PSM tumbuh dari dan oleh masyarakat setempat. PSM lah yang paling memahami kondisi di desa/kelurahan dan tokoh masyarakat sekitar. Dengan pertimbangan itu, maka PSM perlu diberdayakan. Pemberdayaan itu dalam rangka meningkatkan kemampuan PSM menjalankan peran, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan lainnya demi meningkatkan peran kelembagaan PSM. Khususnya sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman. Juga pengembangan kemampuan administrasi maupun teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di samping itu, meningkatnya jejaring PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Secara umum prinsip pemberdayaan PSM harus memenuhi unsur integritas dan profesionalisme guna meningkatkan kemampuan serta kepercayaan diri.

Adapun aspek-aspek pemberdayaan PSM meliputi pemetaan/pendataan informasi kesejahteraan sosial sebagai kegiatan untuk mengetahui keberadaan, persebaran, potensi serta masalah demi memudahkan menentukan pelayanan

kesejahteraan sosial. Perekrutan atau kaderisasi untuk memilih anggota masyarakat yang mempunyai motivasi dan memenuhi persyaratan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa/kelurahan.

C. Jumlah Pengguna TIK/Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis TIK dan Kelompok Umur

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam bepergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk di antaranya mesin cetak, telepon, dan Internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi, tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah dari pentungan sampai senjata nuklir.

Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi (termasuk ekonomi global masa kini) dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan, dan merusak Bumi dan lingkungannya.

Berbagai macam penerapan teknologi telah memengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru sering kali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh: meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia, suatu istilah yang pada awalnya hanya menyangkut permesinan. Contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional.

Bahwa keadaan ini membahayakan lingkungan dan mengucilkan manusia. Penyokong paham-paham seperti transhumanisme dan tekno-progresivisme memandang proses teknologi yang berkelanjutan sebagai hal yang menguntungkan bagi masyarakat dan kondisi manusia. Tentu saja, paling sedikit hingga saat ini diyakini bahwa pengembangan teknologi hanya terbatas bagi umat manusia, tetapi kajian-kajian ilmiah terbaru mengisyaratkan bahwa primata lainnya dan komunitas lumba-lumba tertentu telah mengembangkan alat-alat sederhana dan belajar untuk mewariskan pengetahuan mereka kepada keturunan mereka.

Sedangkan informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam

atau ditransmisikan. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi, bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain tetapi itu tidak bertahan secara lama karena Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu jangkauan suara juga terbatas.

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Informasi adalah data yang telah di rangkum atau di manipulasi dalam bentuk lain untuk tujuan pengambilan keputusan.

Setelah itu teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang sehingga manusia sekarang dapat (mencoba) memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya.

Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).

Ditemukannya alfabet dan angka arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet, atau dengan penulisan angka, seperti MCMXLIII diganti dengan 1943. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan informasi itu.

Kemudian, teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. TI adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem

informasi, perangkat keras komputer, bahasa pemrograman, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari TI. TI menyediakan bisnis dengan empat set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis: proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas. TI melakukan berbagai fungsi (TI Disiplin/Kompetensi) dari meng-instal Aplikasi untuk merancang jaringan komputer dan basis data informasi. Beberapa tugas yang TI lakukan mungkin termasuk manajemen data, jaringan, rekayasa perangkat keras komputer, basis data dan desain perangkat lunak, serta manajemen dan administrasi sistem secara keseluruhan.

Teknologi informasi mulai menyebar lebih jauh dari konvensional komputer pribadi dan teknologi jaringan, dan lebih ke dalam integrasi teknologi lain seperti penggunaan ponsel, televisi, mobil, dan banyak lagi, yang meningkatkan permintaan untuk pekerjaan. Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelegen, ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik. Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.

Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.

Data dari Dinas Kominfo menunjukkan bahwa jenis TIK yang digunakan pada tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo adalah internet, tetapi tidak menyebutkan usia berapa pengguna internet tersebut. Ini berarti bahwa internet digunakan oleh semua umur sesuai kebutuhan masing-masing. Digunakan untuk belajar, berdagang, bersilaturahmi, dan masih banyak lagi kegiatan yang menggunakan internet. Masyarakat banyak yang tergantung kepada internet, bahkan tidak bisa meninggalkan internet. Tentu ini memicu para produsen smartphone untuk berkreasi lebih canggih lagi dalam memproduksi alat komunikasi, khususnya Handphone. Ia telah banyak menggantikan fungsi banyak hal, seperti radio, televisi, kantor pos, jam, kalender dan masih banyak lagi.

BAB IX

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Hukum dan lembaga peradilan perlu dijunjung tinggi, karena dengan adanya hukum, maka bisa menjadi landasan dasar dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk dapat menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk menciptakan tatanan suatu kelompok bangsa dan berlaku pada suatu wilayah tertentu.

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu mengetahui jumlah aparat penegak hukum dalam bentuk terpilah antara aparat penegak hukum laki-laki dan perempuan yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo penting dilakukan. Karena keterwakilan perempuan dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang penegakan hukum akan sangat di nanti dan diharapkan mampu memberikan akses keadilan bagi perempuan.

Secara umum, belum ada perubahan yang signifikan terkait komposisi perempuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Apabila dicermati, dalam setiap tahun komposisi perempuan tersebut selalu mengalami peningkatan di beberapa instansi penegak hukum tetapi peningkatan tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan laki-laki. Aparat penegak hukum khususnya hakim perempuan di Pengadilan Agama belum ada yang menduduki jabatan strategis, sedangkan pada Pengadilan Negeri ketuanya dari hakim perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan di ranah kepemimpinan sudah mendapat perhatian, karena sudah mampu menduduki jabatan yang strategis sesuai dengan kemampuannya.

A. Aparat Penegak Hukum

1. Jumlah Pegawai di Pengadilan Agama

Sejarah Perjalanan Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Tetapi, pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, waqaf, shadaqah, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Di Kabupaten Ponorogo, jumlah aparat penegak hukum pada lingkungan Pengadilan Agama ada 26 orang, yang terdiri atas 9 orang pegawai perempuan dan 17 orang pegawai laki-laki. Dari 9 pegawai perempuan, 1 diantaranya hakim, 1 sekretaris, 1 panitera muda, 5 panitera pengganti, dan 1 kepala sub bagian. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 masih didominasi oleh laki-laki. Data terkait bisa dilihat dalam tabel 9.1. dan grafik 9.1.

Tabel 9.1
Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Menurut
Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	Jabatan Pegawai Pengadilan	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki	Total
1	2	3	4	5
1	Ketua	-	1	1
2	Wakil Ketua	-	1	1
3	Hakim	1	2	3
4	Panitera	-	1	1
5	Sekretaris	1	-	1
6	Panitera Muda	1	2	3
9	Panitera Pengganti	5	4	9
10	Kepala Sub Bagian	1	2	3
10	Jurusita dan Juru Sita Pengganti	-	1	1
16	Staff	-	1	1
17	Pranata Komputer	-	2	2
Jumlah Total		9	17	26

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Grafik 9.1.
Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



2. Jumlah Pegawai di Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (PN) merupakan lembaga yang menangani masalah pidana dan perdata. Dalam menyelesaikan masalah pidana/kriminal, masyarakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri. Jumlah aparat penegak hukum perempuan di Pengadilan Negeri juga minoritas dibanding dengan jumlah aparat penegak hukum laki-laki. Jumlah aparat penegak hukum yang ada di PN ada 39 orang yang terdiri atas 10 pegawai perempuan dan 29 pegawai laki-laki. Jumlah ini menunjukkan kenaikan jumlah pegawai perempuan jika dibandingkan dengan jumlah pegawai di Tahun 2021 yang hanya 5 pegawai perempuan. Rasio jumlah pegawai laki-laki dan perempuan juga cukup rendah, yaitu sebesar 26% dibandingkan laki-laki yang berjumlah 74%. Jumlah selengkapnya bisa dilihat dalam tabel 9.2. dan grafik 9.2 di bawah ini:

Tabel 9.2
Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri
Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun
2021

NO	Jabatan Pegawai Pengadilan	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki	Total
1	2	3	4	5
1	Ketua	-	1	1
2	Hakim	1	7	8
3	Panitera	-	1	1
4	Sekretaris	-	1	1
5	Panitera Pengganti	4	5	9
6	Juru Sita / Juru Sita Pengganti	-	3	3
7	Panitera Muda Perdata	-	1	1
8	Panitera Muda Pidana	-	1	1
9	PAnitera Muda Hukum	-	1	1
10	Analisis Perkara Peradilan	-	2	2
11	Analisis Hukum	-	1	1
12	Pengadministrasian Registrasi Perkara	1	2	3
13	Kepala Sub Bagian PTIP	-	1	1
14	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	-	1	1
15	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	-	1	1
16	Verifikator Keuangan	1	-	1
17	Pengelola BMN	-	-	-
18	Pengelola Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian	1	-	1
19	Penyusunan Laporan Keuangan	1	-	1
20	Bendahara	1	-	1
21	Pengelola Perkara	-	-	-
Jumlah Total 2021		10	29	39

Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo

Grafik 9.2.
Rasio Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021



3. Jumlah Pegawai Kepolisian

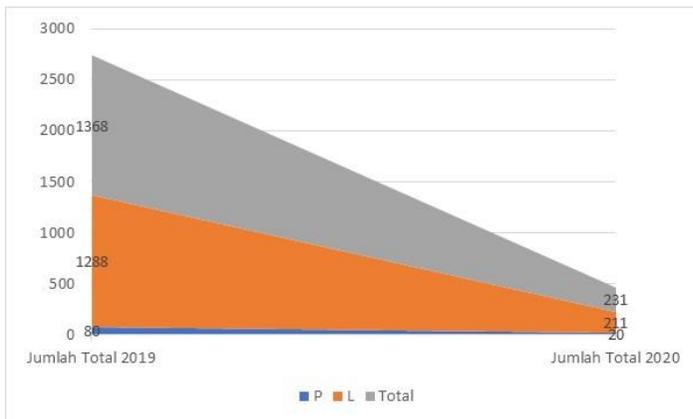
Pegawai kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pegawai kepolisian Kabupaten Ponorogo menurut jenis jabatan dan jenis kelamin, sebagaimana pegawai pengadilan agama dan pengadilan negeri, pejabat kepolisian juga didominasi oleh pegawai laki-laki. Rasio jumlah pejabat perempuan dan laki-laki sebesar 9,5%. Dari 231 pegawai kepolisian, jumlah perempuan hanya 20 orang, dan sisanya 211 adalah pegawai kepolisian laki-laki. Data terkait bisa dilihat dalam tabel 9.3 berikut:

Tabel 9.3
Jumlah Pegawai Kepolisian
Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	Jabatan Pegawai Kepolisian	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki	Total
1	2	3	4	5
1	Kapolres		1	1
2	Waka polres		1	1
3	Kabag		3	3
4	Kasubbag		7	7
5	Kasi	1	3	4
6	Kaur	2	2	4
7	Kasat		7	7
8	Kanit		56	56
9	PS	4	53	57
10	PA	2	11	13
11	Bamin	4	21	25
12	Banum	6	5	11
13	Kapolsek	1	20	21
14	Waka polsek		21	12
Jumlah Total 2020		20	211	231
Jumlah Total 2019		80	1288	1368

Sumber: Polres Ponorogo

Grafik 9.3
Jumlah Pegawai Kepolisian
Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021



4. Jumlah Pegawai Kejaksaan Menurut Jenis Jabatan dan jenis Kelamin

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Di Kabupaten Ponorogo, jumlah penegak hukum di lingkungan kejaksaan berjumlah 14 orang. Dari 14 pegawai kejaksaan tersebut, 9 di antaranya adalah pegawai laki-laki, dan sisanya 5 orang pegawai perempuan. Jabatan strategis Ketua Kejaksaan Negeri juga diduduki laki-laki, begitu jabatan strategis lainnya. Satu orang pegawai kejaksaan perempuan menduduki jabatan strategis yaitu Kasubag bin. Berikut jumlah pegawai kejaksaan di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 9.4
Jumlah Pegawai Kejaksaan
Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	Jabatan Pegawai Kejaksaan	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki	Total
1	2	3	4	5
1	Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo	-	1	1
2	Kasubagbin	1	-	1
3	Kepala Seksi Intelijen	-	1	1
4	Kepala seksi Pidana Umum	-	1	1
5	Kepala seksi Pidana Khusus	-	1	1
6	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	1	-	1
7	Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian	1	-	1
8	Urusan Keuangan dan PNBP	1	-	1
9	Urusan Perlengkapan	-	1	1
10	Urusan Data Statistik, Teknologi dan Perpus	-	1	1
11	Jaksa Fungsional	1	3	4
Jumlah Total		5	9	14

Sumber: Kejaksaan Negeri Ponorogo

Grafik 9.4
Jumlah Pegawai Kejaksaan
Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021



5. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Rumah tahanan Negara sebagai tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Indonesia. Rumah tahanan ini berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Rumah tahanan ini berbeda dengan lembaga pemasyarakatan jika di lihat dari sisi pengertiannya, karena lembaga pemasyarakatan ini adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Pegawai rumah tahanan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 berjumlah 51. Adapun distribusi pegawainya diantaranya 9 pegawai perempuan dan 42 pegawai laki-laki. Sekilas dari jumlah telah menunjukkan ketimpangan yang cukup berarti, hingga diperoleh rasio sebesar 18%, angka tersebut sangat jauh dari angka 100% untuk mencapai kesetaraan antara pegawai perempuan dan laki-laki. Jabatan-jabatan strategis pada rumah tahanan ini di dominasi oleh laki-laki, yang mana seluruh jabatan KASI dan jabatan Kepala diduduki oleh pegawai laki-laki. Pegawai perempuan hanya menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU). Data lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 9.5
Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara
Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	Jabatan Pegawai Lapas	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki	Total
1	2	3	4	5
1	Kepala Rumah Tahanan	-	1	1
2	KPLP	-	1	1
3	Kepala Bagian Tata Usaha	-	1	1
	Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan	-	1	1
4	Petugas Keamanan	4	32	36
5	Lainnya	5	6	11
Jumlah Tahun 2021		9	42	51

Sumber: Lapas Ponorogo

Grafik 9.5
Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara
Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021



B. Klasifikasi Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Tindak Kekerasan dan Jumlah Kasus yang Diadvokasi

1. Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan tingkat Perkawinan Serta Jumlah Kasus yang Diadvokasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kasus korban kekerasan jika dilihat dari tingkat perkawinan serta jumlah kasus yang diadvokasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 belum tersedia data yang dapat disampaikan. Adapun pada tahun 2020, terjadi sejumlah 6 kasus. Dari 6 kasus tersebut, di antaranya terjadi pada tingkat perkawinan usia 17 s.d. 25 sebanyak 1 korban, usia 26 s.d. 30 sebanyak 1 korban, dan usia di atas 30 sebanyak 10 korban. Adapun data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 9.6

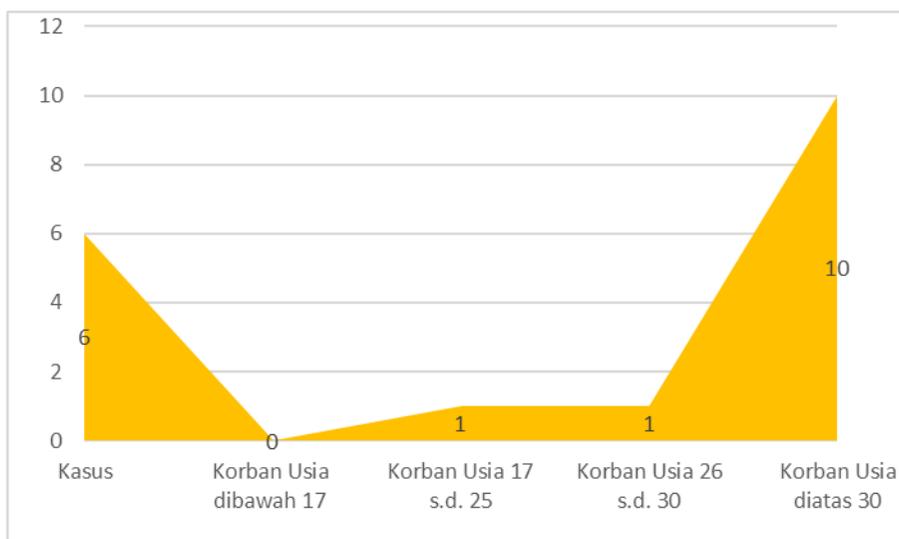
Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Perkawinan serta Jumlah Kasus yang diadvokasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Kasus	Tingkat Perkawinan				Ket.
		Usia di bawah 17 th.	Usia 17 s.d. 25	Usia 26s.d. 30	Usia di atas 30 th.	
1	2	3	4	5	6	11
1. Ngrayun	1				2	
2. Slahung						
3. Bungkal						
4. Sambit						
5. Sawoo						
6. Sooko						
7. Pudak						
8. Pulung						
9. Mlarak						
10. Siman						
11. Jetis	1		1	1		
12. Balong						
13. Kauman	1				2	
14. Jambon						
15. Badegan						
16. Sampung	1				2	
17. Sukorejo	2				4	
18. Ponorogo						
19. Babadan						

20. Jenangan						
21. Ngebel						
Jumlah/Total 2020	6		1	1	10	

Sumber: *Pengadilan Negeri Ponorogo*

Grafik 9.6
Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Perkawinan serta Jumlah Kasus yang diadvokasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: *Pengadilan Negeri Ponorogo*

2. Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Pekerjaan dan Jumlah Kasus yang di advokasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Pekerjaan dan Jumlah Kasus yang diadvokasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 belum tersedia data yang dapat disampaikan. Adapun pada Tahun 2020, terjadi sebanyak 6 kasus, 6 kasus tersebut kemudian menimbulkan korban di antaranya terjadi pada pegawai swasta sebanyak 5 orang dan pegawai lainnya 1 orang. Sedangkan pelaku kekerasan terdiri dari pegawai swasta sebanyak 4 orang, dan pegawai lainnya 2 orang. Jika dilihat dari kriteria pegawai, kasus kekerasan banyak terjadi pada perusahaan swasta, hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan dan pencegahan terhadap tindak kekerasan belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan swasta, akhirnya tindak kekerasan

sangat rentan terjadi di lingkungan kerja tersebut. Adapun data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan graifk di bawah ini:

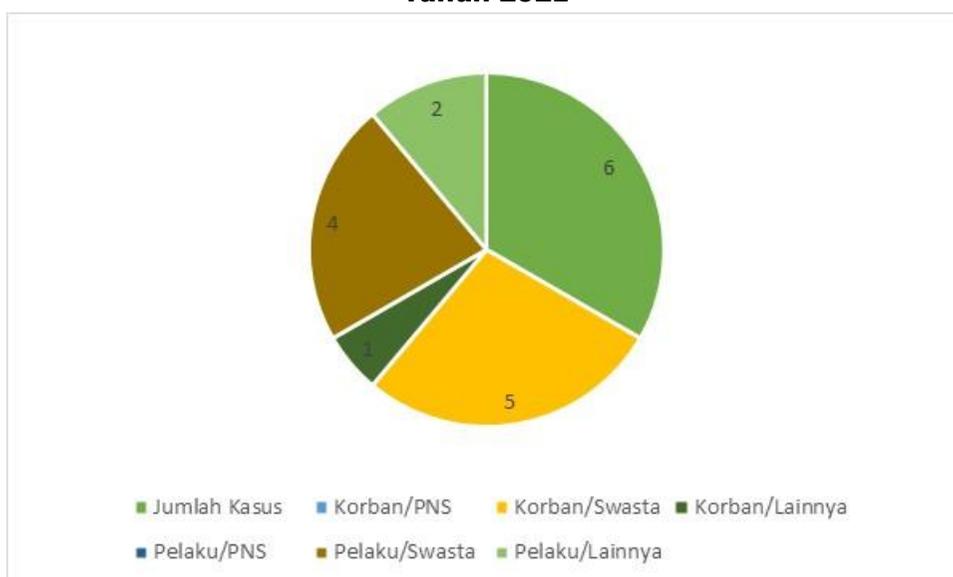
Tabel 9.7
Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Pekerjaan dan Jumlah Kasus yang diadvokasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			Jumlah Pelaku			Ket.
		PNS	Swasta	Lainnya	PNS	Swasta	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ngrayun	1			1			1	
2. Slahung								
3. Bungkal								
4. Sambit								
5. Sawoo								
6. Sooko								
7. Puduk								
8. Pulung								
9. Mlarak								
10. Siman								
11. Jetis	1		1			1		
12. Balong								
13. Kauman	1		1			1		
14. Jambon								
15. Badegan								
16. Sampung	1		1				1	
17. Sukorejo	2		2			2		
18. Ponorogo								
19. Babadan								
20.								

Jenangan								
21. Ngebel								
Jumlah/Total 2020	6		5	1		4	2	

Sumber: *Pengadilan Negeri Ponorogo*

Grafik 9.7
Jumlah Kasus Korban Tindak Pelaku Kekerasan berdasarkan Tingkat Pekerjaan dan Jumlah Kasus yang diadvokasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: *Pengadilan Negeri Ponorogo*

3. Jumlah Kasus Berdasarkan Tingkat Kekerasan, Tingkat Kejadian dan Tingkat Pelayanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kasus berdasarkan Tingkat Kekerasan, Tingkat Kejadian dan Tingkat Pelayanan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 belum tersedia data yang dapat disampaikan. Adapun pada tahun 2020, terdapat sebanyak 6 kasus. Dari 6 kasus tersebut kemudian terdiri dari tingkat kekerasan parah sebanyak 4 kasus, dan 2 lainnya berada pada tingkat sedang. Dari 6 kasus tersebut seluruhnya telah mendapatkan penanganan dan pelayanan. Adapun data lebih detailnya dapat dilihat melalui tabel dan graifk di bawah ini:

Tabel 9.8
Jumlah Kasus Berdasarkan Tingkat Kekerasan, Tingkat Kejadian dan
Tingkat Pelayanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Kasus	Tingkat Kekerasan			Tingkat Kejadian		Tingkat Pelayanan	
		Parah	Sedang	Ringan	Sering	Jarang	Dilayani	Tidak Dilayani
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ngrayun	1	1					1	
Slahung								
Bungkal								
Sambit								
Sawoo								
Sooko								
Pudak								
Pulung								
Mlarak								
Siman								
Jetis	1	1					1	
Balong								
Kauman	1	1					1	
Jambon								
Badegan								
Sampung	1		1				1	
Sukorejo	2	1	1				2	
Ponorogo								
Babadan								
Jenangan								
Ngebel								
Jumlah/Total 2020	6	4	2				6	

Sumber: Pengadilan Negeri Ponorogo

Grafik 9.8
Jumlah Kasus Berdasarkan Tingkat Kekerasan, Tingkat Kejadian dan Tingkat Pelayanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021



Sumber: *Pengadilan Negeri Ponorogo*

BAB X

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender adalah terjemahan dari *Gender Mainstreaming*, yaitu suatu strategi yang menempatkan laki-laki dan perempuan menjadi pertimbangan utama dalam setiap perumusan kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan. Dengan strategi tersebut secara teknis melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan kecepatan pelaksanaan PUB sesuai RPJMD, sekaligus menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pembangunan berkelanjutan serta pencapaian target-target MDGs (Millenium Development Goals) di Kabupaten Ponorogo dapat tercapai.

Perempuan dan laki-laki tidak perlu harus bersaing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau berkeluarga. Laki-laki dan perempuan harus dapat membangun dan membina kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat atau negara. Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menguasai dan mengeksploitasi satu sama lain. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan, karena itu harus dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dalam membangun kerjasama itu diperlukan komunikasi yang baik dan ungkapan yang dapat mendorong ke arah kebaikan umat manusia.

Untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, membutuhkan ketrampilan dan sumber daya manusia. Upaya bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas PUG harus dilakukan terus menerus agar pencapaian PUG di Kabupaten Ponorogo bisa terealisasi. Di samping itu, komitmen pemerintah dalam mengawal PUG menjadi salah satu kunci keberhasilan tersebut.

Saat ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di lembaga-lembaga masyarakat, perguruan tinggi, organisasi perempuan, sudah semakin baik dalam memahami pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga semakin banyak dalam mendukung proses pembangunan yang berperspektif gender di Kabupaten Ponorogo.

Agar pemahaman dan paradigma *stakeholder* terhadap Gender Budgeting Statement (GBS), dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

(PPRG) di masing-masing OPD meningkat, maka beberapa program di Kabupaten Ponorogo banyak yang mensyaratkan adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang responsive gender. Kegiatan tersebut diantaranya adalah Pendampingan Keluarga Harapan (PKH), PNPM, GSI, P2WKSS, dan lain-lain.

Di samping itu, untuk terus meningkatkan komitmen pemerintah terhadap Pengarusutamaan Gender, beberapa OPD juga melakukan analisis terhadap berbagai perkembangan pembangunan yang sudah dilakukan. Kegiatan analisis ini bisa dijadikan sebagai evaluasi perkembangan pembangunan yang sudah dilakukan diberbagai OPD yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dengan analisis ini pemerintah bisa melihat apakah masing-masing OPD sudah melaksanakan pembangunan yang responsive gender atau belum. Hasil dari analisis yang sudah dilakukan tersebut di antaranya adalah buku profil gender Kabupaten Ponorogo yang dilakukan mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Selain itu, beberapa penelitian dilakukan oleh para akademisi yang mendukung program PUG di Kabupaten Ponorogo. misalnya penelitian terkait alasan pemilihan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh Badan KB yang juga bekerja sama dengan PSGA IAIN Ponorogo, dan penelitian analisis MDGs terhadap pembangunan di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Bapeda tahun 2012, penelitian tentang analisis pelayanan publik tahun 2013, analisis faktor resiko penutupan lokalisasi Kedung Banteng tahun 2014 yang juga bekerja sama dengan PSGA IAIN Ponorogo dan penelitian tentang Profil Anak Kabupaten Ponorogo juga dilakukan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 ini.

A. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Potret kesetaraan gender memaparkan data terkait kesetaraan gender berdasar pada pekerjaan dan usaha-usaha ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta peran perempuan sebagai kepala keluarga. Dan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga serta keberadaan pemberdayaan masyarakat terutama perempuan di Kabupaten Ponorogo akan terlihat dalam data dibawah ini:

Tabel 10.1
Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Di
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga
1	2	3
1	Ngrayun	1.643
2	Slahung	3.228
3	Bungkal	2.613
4	Sambit	2.100

5	Sawoo	2.543
6	Sooko	1.111
7	Pudak	216
8	Pulung	2.789
9	Mlarak	2.075
10	Siman	2.862
11	Jetis	2.191
12	Balong	3.032
13	Kauman	3.263
14	Jambon	2.600
15	Badegan	1.975
16	Sampung	2.637
17	Sukorejo	3.460
18	Ponorogo	5.666
19	Babadan	4.643
20	Jenangan	3.675
21	Ngebel	993
Jumlah		55.315

Sumber : *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

Tabel 10.2
Home Industri Yang Dikelola Perempuan Di
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan	Jenis Usaha	Nama Usaha	Jumlah Usaha
1	2	3	4
Ponorogo	Usaha Rempeyek	-	2
	Usaha Rengginang	-	1
	Emping Mlinjo	-	3
Kauman	Jamu	-	2
	Rengginang	-	1
	Tempe	-	1
Sukorejo	Gorengan	-	1
	Keripik	-	2
Babadan	Roti Basah	-	2
Sampung	Tempe	-	8

	Marning Jagung	-	7
	Keripik	-	1
Jambon	Kerupuk	-	12
	Jajanan	-	3
	Tempe	-	3
Bungkal	Keripik	-	2
	Tempe	-	2
	Jamu	Jamu Mbok Mini	1
	Makanan Ringan	-	2
	Genteng	-	1
Badegan	Pembuatan Kue	Kelompok Bandar	10
	Peyek Kedelai	Susi	2
	Tahu	Sumiyem	3
	Keripik	-	2
	Roti	-	3
	Tempe	-	1
Balong	Sale Pisang	Fadilah	2
	Toge, Cambah	-	1
	Tempe	-	4
	Keripik	-	2
	Tahu	-	1
	Mebel	-	1
	Anyaman Bambu	-	18
	Jajanan Pasar	-	1
	Kerupuk	-	1
	Makanan Ringan	-	1
	Kasur	-	1
Jetis	Anyaman tas plastik	-	1
	Gethuk	-	2
	Kue	-	1
	Anyaman Bambu	-	1
Mlarak	Anyaman Bambu	-	5
Ngebel	Tape	Bibit	1
	Anyaman Bambu	Waining	2
	Tempe	-	2
Ngrayun	Tempe	-	15
	Keripik	-	2
	Sermier	-	3

Pulung	Tempe	-	4
Sambit	Tas Plastik	-	6
Sawoo	Biting	-	1
	Tempe	-	1
	Rengginang	Mekar Jaya	1
	Lidi	-	1
Slahung	Gerabah	-	1
	Tempe	-	2
Sooko	Sale Pisang, Roti Gapit, Roti Jahe	Menara	4
Jumlah			167

Sumber: *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

B. Kondisi Pembangunan Manusia dan Gender

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021:

Tabel 10.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun		
	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup	72.65	72.77	72.85
Harapan Lama Sekolah	13.72	13.73	13.74
Rata-rata Lama Sekolah	7.21	7.54	7.55
Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan (Ribu Rp.)	9883.00	9670.00	9851.00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.56	70.81	71.06

Sumber:

<https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/26/59/1/indeks-pembangunan-manusia-.html>

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 10.4
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Ponorogo	93.34	93.56	93.65

Sumber:

<https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/40/66/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Tabel 10.5
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2021

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	2020	2021
Kabupaten Ponorogo	67.48	67.63

Sumber:

<https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/40/75/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

Adapun upaya yang terus dilakukan untuk memberikan edukasi PUG di masyarakat diantara adalah:

A. Kecamatan Sayang Ibu, Rumah Sakit Sayang Ibu, Satgas GSI Kecamatan, Satgas GSI Desa/Kelurahan dan Suami Siaga.

Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah suatu gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk peningkatan perbaikan kualitas hidup perempuan. Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan gerakan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus terus meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Upaya untuk meminimalisir angka kematian ibu dan bayi diantaranya adalah dengan membeberkan masalah-masalah yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kematian, diantaranya adalah kekurangan gizi, adanya keterlambatan mendiagnosa, terlambat bertemu perangkat kesehatan, lambat dirujuk dan seringnya terjadi sakit.

Kabupaten Ponorogo pernah menjadi salah satu nominator lomba gerakan sayang ibu tingkat Provinsi Jawa Timur.aten Ponorogo. Gerakan Sayang Ibu ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan sumber daya manusia melalui derajat perempuan di puskesmas, posyandu.
2. Menunda usia kehamilan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan, misalnya posyandu desa dan ambulance desa.
4. Pelayanan peningkatan KB aktif
5. Meningkatkan tanggap darurat misalnya donor darah, pelatihan kader.
6. Peran serta masyarakat dalam sosialisasi gerakan sayang ibu.

Gerakan GSI ini merupakan upaya penurunan angka kematian ibu hamil sampai melahirkan dimana hal tersebut dapat bermanfaat untuk menciptakan bibit unggul, menciptakan kader bangsa serta pencegahan kematian. Selain GSI, P2WKSS dan KB Award Kabupaten Ponorogo, juga pernah masuk menjadi nomitar di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Untuk menindak lanjuti gerakan GSI tersebut, setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai kecamatan sayang ibu, sehingga jumlah totalnya ada 21 kecamatan. Sedangkan Jumlah Rumah Sakit Sayang Ibu ada 5, yaitu RSUD Dr. Harjono, RSUD Aisyiyah, RSUD Muslimat, RSUD Darmayu dan RSUD Muhammadiyah. Untuk Puskesmas Sayang Ibu jumlahnya ada 31 buah. Selain itu terdapat 307 desa/kelurahan yang juga ditetapkan sebagai desa/kelurahan sayang ibu. Data tersebut diatas berdasarkan data pada tahun 2020, untuk data tahun 2021 data belum tersedia. Lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel 10.1 dibawah ini:

Tabel 10.6
Jumlah Kecamatan Sayang Ibu, Rumah Sakit Sayang Ibu, Satgas GSI Kecamatan, Satgas GSI Desa/Kelurahan, dan Kelompok Suami Siaga Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kecamatan Sayang Ibu	Rumah Sakit Sayang Ibu	Satgas GSI Kecamatan	Satgas GSI Desa/Kelurahan	Kelompok Suami Siaga
1	2	3	4	5
21	5	31	307	307

Sumber: *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

B. Pokja PUG, Forum peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Forum Perlindungan Perempuan dan Fokal Point Gender.

PUG merupakan Salah satu strategi pembangunan yang di lakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender. Melalui pengintegrasian pengalaman, apresiasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan progam, proyek dan kegiatan di berbagai bidang.

Dasar hukum pelaksanaan Peangarusutamaan Gender di antaranya adalah:

1. Inpres No. 9/2000 tentang PUG dalam pembangunan.
2. Kepmendagri 67/2011 tentang perubahan atas Kepmendagri no. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional
3. SE No. 270/M.PPN/II/2013 tentang strategi Nasional percepatan PUG melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender (PPRG).

Tujuan dari Pengarusutamaan Gender adalah memastikan apakah laki-laki dan perempuan

1. Mempunyai akses yang sama dalam pembangunan
2. Berpartisipasi yang sama dalam pembangunan
3. Mempunyai kontrol yang sama dalam pembangunan
4. Mempunyai manfaat yang sama dalam pembangunan

Adapun tugas utama Pengarusutamaan Gender adalah, pertama; mengintergrasikan perspektif ke dalam siklus, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Kedua, mempengaruhi kebijakan Penanggungjawab Pelaksanaan PUG. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah semua pihak

bertanggungjawab terhadap strategi pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka jajaran penyelenggara negara dan pemerintahan yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo adalah pihak yang paling bertanggungjawab. Dalam kehidupan keluarga dan sosial, maka suami-istri dan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PUG.

Pengarusutamaan Gender sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui 5 bidang program yaitu:

1. Bidang Kesehatan, terutama kesehatan ibu, bayi dan anak serta lansia
2. Bidang Pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal.
3. Bidang Ketenagakerjaan, sehingga partisipasi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan tidak dibeda-bedakan.
4. Bidang Keterwakilan dalam mengambil keputusan baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif serta organisasi sosial politik atau pendidikan tinggi.
5. Bidang Penegak Hukum agar tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan dalam lingkup kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Maksud dari keadilan gender adalah kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya dan kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan secara berkeadilan dan merata, sehingga antara laki-laki dan perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang Hankamnas, politik, social budaya, ekonomi dan pendidikan. Sedangkan kesetaraan gender merupakan kondisi dan diperlakukan adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan.

Indikator kesetaraan dan keadilan gender, adalah indikator kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirumuskan dalam HDI dan GEm yang secara berkala dipublikasikan oleh UNDP dan BPS meliputi antara lain:

1. Kesehatan, terutama angka kematian ibu akibat hamil dan melahirkan, kematian bayi dan anak laki-laki dan perempuan, angka harapan hidup laki-laki dan perempuan.
2. Pendidikan, terutama lama anak laki-laki dan perempuan, proporsi laki-laki dan perempuan pendayagunaan/pemnafaatan latar belakang pendidikan dalam bidang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan
3. Ketenagakerjaan, terutama partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan, proporsi laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin, dan tunjangan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan

4. Keterwakilan, laki-laki dan perempuan dalam kedudukan dan proses pengambilan keputusan, terutama di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, profesional dan pendidikan
5. Penerapan Penegakan Hukum, baik sebagai pelaku maupun korban antara laki-laki dan perempuan, terutama dilihat dari formulasi produk hukum dan penafsiran dalam penegakkan hukum.

Banyak manfaat dari Kesetaraan dan Keadilan Gender, antara lain:

1. Kesejahteraan pembangunan akan lebih mudah tercapai setiap individu sebagai warga negara telah memberikan kontribusi yang baik dan seimbang.
2. Pembangunan dapat berjalan lebih cepat karena setiap warga negara telah berperan aktif dalam kegiatan peningkatan hidup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pelaksanaan hukum dan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan dengan adil dan harmonis.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan baik sehingga setiap warga negara mampu bersaing dengan tenaga luar di era globalisasi.
5. Produktivitas kinerja penduduk menjadi lebih baik karena laki-laki dan perempuan dapat bekerja saling membantu (bersinergi) satu sama lain.

Upaya percepatan pelaksanaan PUG dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dibutuhkan empat aspek yakni, akses, partisipasi, control, dan manfaat. Untuk mempercepat realisasi tersebut, berbagai forum telah dibentuk, agar semakin banyak yang menyuarakan aspirasi perempuan. Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, maka di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Ponorogo, dibentuk pokja Pengarusutamaan Gender dan Fokal Point Gender di Kabupaten Ponorogo. Adapun pelaksana dari kegiatan tersebut adalah semua OPD di Pemkab Ponorogo. Dengan semakin banyaknya forum tersebut, diharapkan akan semakin banyak yang menyuarakan PUG pada masing-masing elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Ponorogo segera dapat terwujud. Lebih lanjut lihat tabel 10.7 dibawah ini:

Tabel 10.7
Jumlah Pokja PUG dan Fokal Point Gender Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021

Tahun	Pokja PUG	Fokal Point Gender	Kegiatan
-------	-----------	--------------------	----------

1	2	3	4
2019	1 Pokja, dengan jumlah anggota 29	52	Penguatan kelembagaan PUG dan anak dalam pembangunan di pokja PUG dan fokal point tahun 2019
2020	1 Pokja, dengan jumlah anggota 30	51	Penguatan kelembagaan PUG dan anak dalam pembangunan di pokja PUG dan fokal point tahun 2020
2021	1 Pokja, dengan jumlah anggota 30	51	Penguatan kelembagaan PUG dan anak dalam pembangunan di pokja PUG dan fokal point tahun 2021

Sumber: *Dinsosdan P3A Kab. Ponorogo*

C. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Perempuan dan Anak sering menjadi korban terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Sosial P3A mendirikan pusat pelayanan terpadu untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap mereka. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Layanan ini dilaksanakan oleh Dinsos P3A yang dalam hal ini membentuk KPPA (Komite Perlindungan Perempuan dan Anak) atau Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beralamat di Jalan Menur Ponorogo.

Komite Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas melakukan perlindungan dan advokasi kepada korban-korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual, terutama kepada perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak bekerja sendiri. Tetapi bekerjasama dengan banyak instansi, diantaranya dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, advokad/LBH, rumah sakit, dan lain sebagainya. Lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10.8
Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 - 2021

Th	Nama Lembaga	Lokasi P2TP2A	CP / Email	Jml Kasus yg	Jenis Kasus yg ditangani
----	--------------	---------------	------------	--------------	--------------------------

	ga			ditangan i	
1	2	3	4	5	6
2019	P2TP2A	Jl. Kyai Kasan Besari No.35 Ponorogo	Ririn Indarwati, S.Sos / kp3aponorogo@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Laki – laki : 10 • Perempuan : 23 	<ul style="list-style-type: none"> • KDRT • Persetubuhan dibawah umur • Penganiayaan oleh anak • Bullying • Hak asuh anak • Pencemaran nama baik • Penculikan anak • Pembunuhan bayi karena kelalaian ibunya • Melarikan anak dibawah umur • Pencabulan anak dibawah umur • Pencurian anak • Penganiayaan di sekolah
2020	P2TP2A	Jl. Kyai Kasan Besari No.35 Ponorogo	Ririn Indarwati, S.Sos / kp3aponorogo@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Anak Laki – laki : 10 • Anak Perempuan : 7 • Perempuan Dewasa : 28 	<ul style="list-style-type: none"> • KDRT • Pembuangan mayat bayi • Persetubuhan dibawah umur • Hak asuh anak • Pencemaran nama baik • Persetubuhan mengakibatkan hamil • Pencabulan dan sodomi
2021	P2TP2A	Jl. Kyai Kasan Besari No.35 Ponorogo	Ririn Indarwati, S.Sos / kp3aponorogo@gmail.com	<ul style="list-style-type: none"> • Anak Laki – laki : 8 • Anak Perempuan : 31 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelecehan seksual pada anak • Penelantaran dan kekerasan thd anak • Perebutan hak asuh

				<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan Dewasa : 14 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikeluarkan dari sekolah • Pelecehan seksual • Penganiayaan dan pengancaman • Anak trauma pasca pelecehan seksual • Anak mencuri HP • Penemuan bayi • Pemerksaan terhadap anak • Dugaan kekerasan fisik, verbal dan psikis pada anak • Nafkah dari ayah kandung • Kehamilan tidak diinginkan • Begal payudara • KDRT • Konflik RT antara suami istri • Kekerasan, ekonomi dan perselingkuhan • Penelantaran anak • Pernikahan siri, tuntutan pemasukan KK atas anak (ART) • Konseling pola asuh orang tua pada anak • Perceraian • Kekerasan terhadap perempuan • Anak mogok sekolah • Bullying oleh anak
--	--	--	--	---	---

Sumber: *Dinsosdan P3A Kab. Ponorogo*

D. Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait Pemberantasan Perdagangan Orang

Trafikking atau yang biasa disebut perdagangan orang adalah salah satu kejahatan yang harus dihentikan, karena bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia. Di Kabupaten Ponorogo perlindungan terhadap perdagangan

orang telah mendapatkan payung hukum dari Bupati dengan diterbitkannya SK Bupati nomor 188.45/569/405.11/2018 tertanggal 08 Januari 2018 tentang Susunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Ponorogo yang pelaksanaannya adalah PPKAD, Kementerian Agama, Hukum dan HAM, Perhubungan, Dinsos P3A, Dinkes, Dindik, Disparpora, Bappeda, Dukcapil, Hukum, Kesra, RSUD, PKK, DWP, AJATKI, BPS, PSGA IAIN Ponorogo, PSW Unmuh Ponorogo, LSM Al Gheins, Aisyiyah, LBH IAIN Ponorogo, Muslimat NU, APSI, HMI.

Tujuan diterbitkannya SK tersebut adalah untuk Mencegah/mengantisipasi dan penanganan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Ponorogo. Data tabel dibawah ini adalah data yang diambil tahun 2020, dikarenakan data 2021 belum tersedia. Lebih lanjut lihat tabel dibawah ini.

Tabel 10.9
Gugus Tugas dan Kebijakan Terkait Pemberantasan Perdagangan
Orang Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Kebijakan	Pembuat Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Tujuan Kebijakan
1	2	3	4

Keputusan Bupati Nomor. 188.45/569/405.1/2 018 tertanggal 08 Januari 2018	Bupati	PPKAD, Kementerian Agama, Hukum dan HAM, Perhubungan, Dinsos P3A, Dinkes, Dindik, Disarpora, Bappeda, Dukcapil, Hukum, Kesra, RSUD, PKK, DWP, AJATKI, BPS, PSGA IAIN Ponorogo, PSW Unmuh Ponorogo, LSM Al Gheins, Aisyiyah, LBH IAIN Ponorogo, Muslimat NU, APSI, HMI	Mencegah/mengantisipasi dan penanganan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Ponorogo
---	--------	---	---

Sumber: *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

E. Lembaga Pusat Studi Wanita/Gender

Di Kabupaten Ponorogo, belum banyak terdapat lembaga/pusat studi wanita/gender yang konsen di bidang perempuan dan anak. Salah satu pusat studi gender dan anak yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang ada dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo.

PSGA IAIN Ponorogo, dahulu bernama PSW STAIN Ponorogo, telah banyak melakukan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Disamping itu PSGA IAIN Ponorogo sejak Tahun 2005 telah bekerjasama dengan Pemkab Ponorogo dalam bidang analisis gender di Kabupaten Ponorogo.

Selain membantu Pemkab dalam bidang analisis gender, PSGA IAIN Ponorogo juga mengadakan penelitian tentang gender baik secara mandiri maupun melalui pembiayaan dari lembaga. Disamping melakukan penelitian, PSGA IAIN Ponorogo juga melakukan pengabdian masyarakat dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Ponorogo dalam mensosialisasikan hak-hak anak. Lebih lanjut lihat tabel dibawah ini.

Tabel 10.10
Daftar Kelembagaan Pusat Studi Gender dan Anak
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Nama Perguruan Tinggi	Nama Organisasi	Nama Kepala/Ketua	Alamat
1	2	3	4	5

1	IAIN Ponorogo	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)	Isnatin Ulfah, M.H.I	Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo
2	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak	Dr. Sri Susanti, M.A	Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo
3	Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI)	Pusat Kajian Perempuan dan Anak (Studi Gender)	Wiwin Rifatul Fauziyati, M.SI	Jl. Batoro katong No. 32 Ponorogo

Sumber: *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

Selain PSGA di IAIN Ponorogo, terdapat pula Pusat Studi Gender dan Anak di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI). Pusat Studi Wanita yang ada di Perguruan Tinggi tersebut banyak mengkaji isu-isu gender dan anak sebagai sebuah isu nasional dan juga melakukan penelitian-penelitian terkait tentang gender dan anak.

F. Lembaga/Organisasi Masyarakat/LBH yang Peduli Terhadap Perempuan dan Anak.

Kabupaten Ponorogo ada beberapa lembaga/organisasi masyarakat/LBH yang peduli terhadap permasalahan perempuan dan anak. Diantaranya adalah Unit Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) yang berlokasi di Jl. Menur dengan kegiatan pencegahan kasus, pendampingan, konseling dan pelaporan.

Selain KPPA, ada JKPS cahaya yang beralamat di Desa Krebet Jambon dengan kegiatan Pencegahan kasus, pendampingan, konseling. Hal yang sama juga dilakukan oleh LSM Al Gheins yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda, PKK di Jl. Alo-Alon Utara, dan beberapa organisasi masyarakat seperti Muslimat NU, Aisyiyah dan Nasiyatul Aisyiyah. Data tabel dibawah ini adalah data yang diambil tahun 2020, karena data tahun 2021 belum tersedia. Lebih lanjut lihat tabel di bawah ini:

Tabel 10.11

Daftar Lembaga Masyarakat/ Organisasi Masyarakat/ LBH yang Peduli terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Nama Lembaga	Lokasi	Kegiatan
1	2	3	4
1	Unit Pelayanan	Jl. Menur	Pencegahan kasus,

	Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA)	Ponorogo	pendampingan, konseling dan pelaporan
2	JKPS Cahaya	Desa Krebet Jambon	Pencegahan kasus, pendampingan, konseling
3	Al Gheins	Jl. Ir H. Juanda	Pencegahan kasus, pendampingan, konseling dan pelaporan
4	PKK	Jl. Alon-Alon Utara	Pencegahan kasus, pendampingan, konseling dan pelaporan
5	Aisyiyah	Jl. Ukel	Pencegahan kasus, pendampingan, konseling dan pelaporan
6	Nasiatul Aisyiyah	Jl. Ukel	Pencegahan kasus, pendampingan, konseling dan pelaporan
7	Muslimat NU	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Pencegahan kasus, pendampingan, konseling dan pelaporan
8	Fatayat NU	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Pencegahan kasus, pendampingan, konseling dan pelaporan

Sumber : *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

G. Pemerintah dan Sekolah Layak Anak

Anak-anak merupakan modal pembangunan dan awal kunci kemajuan bangsa dimasa depan. Sepertiga dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo adalah anak-anak. Anak-anak terbukti mampu membuat perubahan di wilayah kabupaten secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Sebagai upaya pemenuhan hak anak, pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah mewujudkan pemenuhan hak anak melalui Kecamatan Layak Anak (KELANA), Desa Layak Anak (DELANA), dan Sekolah Ramah Anak. Lebih lanjut bisa dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 10.12
Data Kecamatan layak Anak (KELANA)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Sudah Layak Anak	Belum layak Anak
1	2	3	4
1	Ngrayun	√	-
2	Slahung	√	-
3	Bungkal	√	-
4	Sambit	√	-
5	Sawoo	√	-
6	Sooko	√	-
7	Pudak	√	-
8	Pulung	√	-
9	Mlarak	√	-
10	Siman	√	-
11	Jetis	√	-
12	Balong	√	-
13	Kauman	√	-
14	Jambon	√	-
15	Badegan	√	-
16	Sampung	√	-
17	Sukorejo	√	-
18	Ponorogo	√	-
19	Babadan	√	-
20	Jenangan	√	-
21	Ngebel	√	-
Jumlah		21	

Sumber : *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

Tabel 10.13
Data Desa layak Anak (DELANA)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Layak Anak
1	2	3	4
1	Ngrayun	11	11
2	Slahung	22	22
3	Bungkal	19	19
4	Sambit	16	16
5	Sawoo	14	14

6	Sooko	6	6
7	Pudak	6	6
8	Pulung	18	18
9	Mlarak	15	15
10	Siman	18	18
11	Jetis	14	14
12	Balong	20	20
13	Kauman	16	16
14	Jambon	13	13
15	Badegan	10	10
16	Sampung	12	12
17	Sukorejo	18	18
18	Ponorogo	19	19
19	Babadan	15	15
20	Jenangan	17	17
21	Ngebel	8	8
Jumlah		307	307

Sumber : *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

Tabel 10.14
Data Sekolah Ramah Anak
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Nama Sekolah	Kategori Sekolah	Induk Sekolah
1	2	3	4
1	TK Dharma Wanita Balong	TK	Diknas Ponorogo
2	DI TK Aisyiyah Banyudono	TK	Diknas Ponorogo
3	TK Dharma Wanita 01 Siman	TK	Diknas Ponorogo
4	TK Aisyiyah Bancar	TK	Diknas Ponorogo
5	TK Muslimat NU 01 Nologaten	TK	Diknas Ponorogo
6	TK PGRI Prayungan	TK	Diknas Ponorogo
7	TK Negeri Pembina Ponorogo	TK	Diknas Ponorogo
8	TK Negeri Pembina Jenangan	TK	Diknas Ponorogo
9	TK Dharma Wanita Babadan	TK	Diknas Ponorogo
10	TK Bhayangkara 62 Slahung	TK	Diknas Ponorogo
11	TK PGRI Ngebel	TK	Diknas Ponorogo
12	TK Dharma Wanita 01 Tugu	TK	Diknas Ponorogo
13	TK Dharma Wanita 1 Gelanglor	TK	Diknas Ponorogo
14	TK Pembina PGRI Kec. Kauman	TK	Diknas Ponorogo
15	TK Dharma Wanita 02 Duri	TK	Diknas Ponorogo

16	SDN 2 Kreet	TK	Diknas Ponorogo
17	SDI Arrisalah	TK	Diknas Ponorogo
18	SDN 1 Wonokerto	TK	Diknas Ponorogo
19	SDN 1 Coper	TK	Diknas Ponorogo
20	SDN 1 Bancar	TK	Diknas Ponorogo
21	SDN Besuki	TK	Diknas Ponorogo
22	SDS Muhammadiyah Ponorogo	TK	Diknas Ponorogo
23	SDN 3 Sawoo	TK	Diknas Ponorogo
24	SDN 1 Sambit	TK	Diknas Ponorogo
25	SDN 1 Badegan	TK	Diknas Ponorogo
26	SDN Bungkal	TK	Diknas Ponorogo
27	SDN 1 Somoroto	TK	Diknas Ponorogo
28	SDN 1 Sampung	TK	Diknas Ponorogo
29	SDN Golan	TK	Diknas Ponorogo
30	SDN 1 Karanglo Lor	TK	Diknas Ponorogo
31	SDN 1 Ngrayun	TK	Diknas Ponorogo
32	SDN 1 Siman	TK	Diknas Ponorogo
33	SDN 1 Babadan	TK	Diknas Ponorogo
34	SDN 1 Wagir Lor	TK	Diknas Ponorogo
35	SDN 1 Siwalan	TK	Diknas Ponorogo
36	SDN 1 Karang Balong	TK	Diknas Ponorogo
37	SDN 3 Bangunsari	TK	Diknas Ponorogo
38	SDN 1 Baosan Lor	TK	Diknas Ponorogo
39	SDN Banaran	TK	Diknas Ponorogo
40	SDN 1 Pulung	TK	Diknas Ponorogo
41	SDN 1 Jenangan	TK	Diknas Ponorogo
42	SDN 1 Mangkujayan	TK	Diknas Ponorogo
43	SDN 1 Menggare	TK	Diknas Ponorogo
44	SDN 1 Brotonegaran	TK	Diknas Ponorogo
45	SDS Mutiara Hati Ponorogo	TK	Diknas Ponorogo
46	MIN 2 Ponorogo	MIN	Kemenag
47	MTs Al Kautsar	MTs	Kemenag
48	MTsN 6 Ponorogo	MTs	Kemenag
49	MTsN 1 Ponorogo	MTs	Kemenag
50	MTsN Muhammadiyah 2 Jenangan	MTs	Kemenag
51	MTs Daar Al Hikmah	MTs	Kemenag
52	SMPN 1 Sawoo	SMP	Diknas Ponorogo
53	SMPN 1 Ponorogo	SMP	Diknas Ponorogo
54	SMPN 2 Ponorogo	SMP	Diknas Ponorogo

55	SMPN 3 Ponorogo	SMP	Diknas Ponorogo
56	SMPN 4 Ponorogo	SMP	Diknas Ponorogo
57	SMPN 5 Ponorogo	SMP	Diknas Ponorogo
58	SMPN 6 Ponorogo	SMP	Diknas Ponorogo
59	SMPN 1 Sooko	SMP	Diknas Ponorogo
60	SMPN 1 Puduk	SMP	Diknas Ponorogo
61	SMPN 1 Sukorejo	SMP	Diknas Ponorogo
62	SMPN 1 Siman	SMP	Diknas Ponorogo
63	SMPN 1 Sampung	SMP	Diknas Ponorogo
64	SMPN 1 Babadan	SMP	Diknas Ponorogo
65	SMPN 1 Bungkal	SMP	Diknas Ponorogo
66	SMPN 1 Ngebel	SMP	Diknas Ponorogo
67	SMPN 1 Jenangan	SMP	Diknas Ponorogo
68	SMPN 1 Ngrayun	SMP	Diknas Ponorogo
69	SMPN 1 Jetis	SMP	Diknas Ponorogo
70	SMPN 1 Slahung	SMP	Diknas Ponorogo
71	SMPN 1 Kauman	SMP	Diknas Ponorogo
72	SMPN 1 Pulung	SMP	Diknas Ponorogo
73	SMPN 1 Sambit	SMP	Diknas Ponorogo
74	SMAN 1 Badegan	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
75	SMAN 1 Ponorogo	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
76	SMAN 2 Ponorogo	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
77	SMAN 3 Ponorogo	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
78	SMAN 1 Pulung	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
79	SMAN 1 Ngrayun	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
80	SMAN 1 Babadan	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
81	SMAN 1 Jetis	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
82	SMAN 1 Sambit	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
83	SMAN 1 Slahung	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
84	SMAN 1 Bungkal	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
85	SMAN 1 Balong	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
86	SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
87	SMAIT Darut Taqwa	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
88	SMA Bakti Ponorogo	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
89	SMA Merdeka Ponorogo	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
90	SMA Hudaya Ponorogo	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
91	SMA Immersion Ponorogo	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
92	SMA Muhammadiyah 4 Balong	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
93	SMA Al-Muqoddasah	SMA	Dinas Pendidikan Prov.
94	SMA Muhammdiyah 3 Jetis	SMA	Dinas Pendidikan Prov.

95	SMK Darul Istiqomah	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
96	SMKS Al Islam Joresan	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
97	SMKN 1 Ngrayun	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
98	SMK Muhammadiyah 1 Jenangan	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
99	SMK Muhammadiyah 1 Somoroto	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
100	SMK Muhammadiyah 2 Ponorogo	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
101	SMK Ki Hajar Dewantara	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
102	SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Ponorogo	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
103	SMK N 2 Ponorogo	SMK	Dinas Pendidikan Prov.
104	SMKN 1 Badegan	SMK	Dinas Pendidikan Prov.

Sumber : *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

H. Forum Anak

Forum anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak – anak diseluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Di Kabupaten Ponorogo juga sudah terbentuk forum anak tersebut. Berikut data jumlah forum anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 - 2021:

Tabel 10.15
Jumlah Forum Anak
Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Layak Anak
1	2	3	4
1	Ngrayun	11	11
2	Slahung	22	22
3	Bungkal	19	19
4	Sambit	16	16
5	Sawoo	14	-
6	Sooko	6	6
7	Pudak	6	-
8	Pulung	18	18
9	Mlarak	15	15
10	Siman	18	18
11	Jetis	14	14
12	Balong	20	20

13	Kauman	16	16
14	Jambon	13	13
15	Badegan	10	10
16	Sampung	12	12
17	Sukorejo	18	18
18	Ponorogo	19	19
19	Babadan	15	15
20	Jenangan	17	17
21	Ngebel	8	8
Jumlah		307	287

Sumber : *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

I. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Ponorogo

Lingkungan adalah hal sangat urgen bagi kelangsungan hidup manusia, ia harus dijaga kelestariannya agar tidak merugikan manusia. Banyak kegiatan telah dilakukan oleh masyarakat Ponorogo dalam menjaga lingkungan tersebut. Diantaranya *pertama*; kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Bersama sekolah-sekolah yang ada di Ponorogo (SMKN 1, SMKN 2, SMA 3, SMPN 1, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 6, dan SDN Mangkujayan 1 Kabupaten Ponorogo). beserta komponen-komponen masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Ponorogo, menyelenggarakan Gerakan Aksi Peduli Pungut Sampah. Selain itu mereka juga mencabut paku yang menancap di pohon wilayah kota Ponorogo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak drh. H. Sapto Djatmiko mengatakan, bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Diharapkan seluruh sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo dapat menjaga kebersihan di lingkungan sekolah masing-masing karena kebersihan itu sebagian dari Iman dan mengingat banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari sampah salah satunya adalah dampak untuk kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik dan benar (pemisahan sampah organik dan non organik), maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius serta bencana banjir.

Kedua, Semakin dalamnya sumber air tanah di permukaan bumi reyog dan semakin luas lahan kering yang bertambah disebabkan oleh perubahan iklim yang cukup ekstrim yang bisa mengancam masa depan kita dan anak cucu, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo beserta komunitas pencinta kelestarian alam membikin suatu Gerakan Reboisasi, Alam, Kehutanan & Wilayah Air, Rakyat Obah Gumregah (Gerak Warog). Gerakan ini diluncurkan langsung oleh Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni di Desa Tugurejo. Menurut

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Supto Djatmiko bahwa di Ponorogo sudah ada reboisasi dari berbagai komunitas di Ponorogo dan perorangan yang masif, oleh karena itu Pemerintah hadir untuk mengintegrasikan dan berkesinambungan sebagai mitra atas dasar partisipasi masyarakat. Gerak Warog ini akan terus berlangsung dari tahun ketahun untuk mengadakan reboisasi di sejumlah titik mata air di Ponorogo. Gerak Warog ini akan menasar minimal 75 titik mata air yang ada di bumi reyog. Gerak Warog ini dalam konsep kerja reboisasi melakukan kemandirian partisipatif dalam hal pengadaan bibit, penanaman, sampai dengan pemeliharaan.

Ketiga, penanaman pohon produktif buah-buahan yang dilakukan oleh Polsek Pulung yang mengambil lokasi di "Desa Wisata Sekar Wilis" Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Tujuan penanaman pohon ini adalah dalam rangka mendukung program Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. sebagai gerakan menjaga serta merawat lingkungan alam sekitar, guna mencegah terjadinya bencana alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman lestari. ratusan bibit pohon yang di tanam di tempat ini merupakan pohon produktif yakni pohon buah-buahan diantaranya durian, mangga, alpukat, rambutan, jambu, kekengkeng, matoa dan beberapa jenis yang lainnya. Dipilihnya tanaman pohon produktif buah-buahan karena cocok dengan karakteristik lokasi Desa wisata, mengandung beberapa manfaat bagi lingkungan disekitar, selain dapat untuk menahan erosi tanah dan penghijauan, tanaman pohon buah yang tumbuh bisa juga dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan bagi masyarakat. Melalui kegiatan Polri Peduli Penghijauan, Polsek Pulung memberi motivasi dan contoh kepada segenap elemen masyarakat, dengan menanam pohon buah diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat disaat sekarang dan merupakan warisan untuk anak cucu kita dimasa yang akan datang.

Keempat, Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Kabupaten Ponorogo dalam rangka menyemarakkan Hari Santri dengan memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Rangkaian acara yang diselenggarakan LPBI NU Ponorogo diantaranya Genduri Sungai, Tanam Pohon, Tabur 10 ribu ikan dan gotong-royong membersihkan sungai dalam bulan bakti pengurangan resiko bencana di Dam Sungai Cokromenggalan Ponorogo.

Kelima, kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Ponorogo Resik-Resik dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ponorogo resik-resik adalah sebuah komunitas independen yang ada di Kabupaten Ponorogo. Komunitas ini didirikan uamanya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan lebih nyaman dengan cara memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Ponorogo mengenai isu-isu terkait sampah, utamanya plastic sampah sekali pakai. Komunitas ini mendorong dan mengedukasi masyaakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak

membuang sampah sembarangan, serta mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai.

BAB XI EKONOMI

Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat melekat dengan kehidupan manusia sehari-hari dan berkaitan dengan kesejahteraan hidup, karena manusia sebagai pelaku ekonomi memiliki kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan manusia sangat terbatas. Sektor pertanian masih menjadi andalan ekonomi Kabupaten Ponorogo, hampir seluruh wilayahnya merupakan penghasil produk pertanian. Produk unggulan pertanian yang dihasilkan berupa komoditas tanaman pangan seperti padi dan palawija. Selain pertanian, di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa kegiatan perekonomian mulai dari usaha produksi baik makanan, minuman, pakaian, ataupun yang lainnya hingga kegiatan perkoperasian yang tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Rekapitulasi Laporan Data Base Koperasi melalui Sistem Informasi Koperasi

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional, ia merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992.

Tujuan koperasi dititik beratkan pada kepentingan para anggota dan bukan menimbun kekayaan sendiri. Tujuan koperasi, bukan hanya untuk anggota melainkan juga untuk para konsumennya atau pelanggan. Tujuan koperasi bagi produsen adalah ada keinginan untuk menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi. Sedangkan bagi konsumen, ada keinginan untuk memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah. Bagi usaha kecil, ada keinginan untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Ponorogo terdapat banyak jenis koperasi yang berkembang, mulai Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Kopinkra (Koperasi Industri Kerajinan Rakyat), Kopti (Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia), KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia), Kopkar (Koperasi Karyawan), Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Kepolisian, Koperasi Serba Usaha (KSU), Koppas (Koperasi Pasar), Koperasi Wanita

(Kopwan), Koperasi Syariah (Kopsyah), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan lain-lain.

Jumlah koperasi yang berkembang di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 sebanyak 1.031 buah, 107.617 anggota, 61 manajer dan 929 karyawan. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang terdiri dari 919 buah, 93.742 anggota, 48 manajer dan 655 karyawan. Kenaikan ini merupakan dampak dari semakin menurunnya isu tentang covid-19, sehingga beberapa koperasi mulai melakukan aktivitas seperti sebelum terjadi pandemic covid-19.

Dari beberapa jenis koperasi tersebut jumlah yang paling banyak, didominasi oleh koperasi serba usaha yaitu sejumlah 334 buah dengan jumlah anggota koperasi serba usaha adalah 10.098 orang, 20 manajer, dan 241 karyawan. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah koperasi wanita menempati peringkat 2 yaitu sebanyak 307 buah, jumlah tersebut tetap jika dibandingkan dengan tahun 2020. Karena banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan lewat koperasi wanita ini, sehingga diharapkan perempuan di Ponorogo akan semakin mandiri untuk mencapai kesejahteraannya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menempati urutan ke 3 dengan jumlah 85 buah, akan tetapi dengan jumlah anggota yang hanya 5.901. Jumlah anggota ini justru lebih sedikit jika dibandingkan dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang menempati peringkat ke 4 dengan jumlah 69 buah, tetapi dengan anggota 13.430 orang, 2 orang manajer dan 42 orang karyawan. Yang menempati urutan ke 5 yakni Koperasi Lainnya dengan jumlah 58 buah, 70 orang anggota, 1 orang manajer dan 24 orang karyawan.

Koperasi Simpan Pinjam menempati peringkat ke 6 dengan jumlah 49 buah, anggota 5.425 orang, 17 manajer dan 2438 orang karyawan. Terdapat peningkatan jumlah anggota pada tahun ini dibandingkan tahun 2020, peningkatan ini terjadi karena masyarakat membutuhkan koperasi ini untuk membantu mengatasi berbagai masalah ekonomi saat Pandemi Covid-19.

Peringkat ke 7 diduduki oleh Koperasi Karyawan (Kopkar) dengan total 28 koperasi dan 358 anggota. Sementara itu Koperasi Unit Desa (KUD) menempati peringkat ke 8 dengan jumlah 26 buah dengan total anggota 53.471, 13 manajer dan 230 karyawan. Meskipun menempati urutan ke-7 namun Koperasi Unit Desa memiliki jumlah anggota yang paling banyak diantara jenis koperasi yang lain.

Koperasi Pondok Pesantren menempati peringkat ke 8 dengan jumlah koperasi sebanyak 22 buah, 62 anggota dan 4 karyawan. Jumlah ini sama jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 22 buah. Dengan 22 buah koperasi namun hanya memiliki dua karyawan mungkin akan terasa aneh. Hal ini terjadi, mungkin dikarenakan koperasi pondok pesantren kebanyakan tidak memiliki karyawan, karena dikelola para santri, sehingga tidak membutuhkan

karyawan dan tidak perlu menggaji karyawan. Sehingga keuntungan dari Kopontren ini semua untuk kesejahteraan masing-masing pondok pesantren yang memiliki koperasi.

Ada beberapa instansi/lembaga koperasi yang hanya memiliki sedikit koperasi, diantaranya koperasi Angkatan Darat yang memiliki 2 koperasi, koperasi Kepolisian, koppas, koperasi Telkom, koperasi veteran, dan koperasi Pabrik bahkan hanya memiliki 1 koperasi. Tabel 11.1 menjelaskan rekapitulasi laporan data base koperasi melalui sistem koperasi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Lebih lanjut lihat lampiran tabel 11.1

Adapun Jumlah total anggota koperasi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 sebanyak 107.617 orang dengan perincian anggota laki-laki sebanyak 65.249 orang dan perempuan sebanyak 42.368 orang.

Data ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi pada keanggotaan koperasi dibanding dengan perempuan dalam setiap tahunnya. Meskipun sudah ada koperasi wanita (Kopwan), tetapi ternyata belum mampu menambah jumlah perempuan dari sisi kuantitatif jumlah anggota.

Ini tentu menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk melakukan upaya-upaya yang serius terkait perkoperasian di Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Indakop. Sehingga perlu ditegaskan lagi agar Ponorogo bisa menjadi "Kabupaten Koperasi" di masa mendatang. Lebih detail tentang jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi tersebut, disajikan dalam lampiran tabel 11.1 berikut ini:

Tabel 11.1
Rekapitulasi Laporan Data Base Koperasi Melalui Sistem Informasi
Koperasi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Identitas Koperasi	Jumlah Koperasi	Anggota	Manajer	Karyawan
1	2	3	4	5	6
1	KUD	26	53.471	13	230
2	Kopontren	22	62	-	4
3	Kopinkra	5	312	-	4
4	Kopti	2	122	-	-
5	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	69	15.087	3	54
6	Kopkar	28	358	1	2
7	Kop. Angkatan Darat	2	634	1	7
8	Kop. Kepolisian	1	966	-	7
9	Kop. Serba Usaha	334	10.098	20	241
10	Kop. Pasar (KOPPAS)	1	-	-	-

11	Kop. Simpan Pinjam (KSP)	49	5.425	17	243
12	Kop. Listrik Pedesaan	-	-	-	-
13	KAI	-	-	-	-
14	Kop. Wanita	307	13.486	1	2
15	Kop. Veteran	1	-	-	-
16	Kop. Wredatama	2	176	-	-
17	Kop. Pebabri	1	108	-	1
18	Kop. Mahasiswa	2	503	-	-
19	Kop. Pemuda	2	296	-	-
20	Kop. Pertambangan	-	-	-	-
21	Kop. Pedagang Kaki Lima	2	-	-	-
22	Kop. Jamu Gendong	-	-	-	-
23	Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	85	5.901	3	30
24	Kop. Pertanian	4	56	-	-
25	Kop. Peternakan	7	-	-	-
26	Kop. Angkutan Darat	5	-	-	-
27	Kop. Telkom	1	25	-	27
28	K.B.P.R	3	13	1	49
29	Kop. Lainnya	68	236	1	28
30	Kop. Sekunder	2	282	-	-
	Jumlah	1.031	107.671	61	925

Sumber: *Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo*

B. Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin

Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya koperasi berasal dari anggota untuk anggota koperasi dapat berkembang baik bilamana anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi.

Dalam operasionalnya, koperasi tidak hanya bergantung pada struktur dan rencana kerja yang telah dibuat oleh masing-masing koperasi. Mekanisme keanggotaan juga menjadi salah satu faktor penting di dalam operasional koperasi yang profesional. Pada prinsipnya, keanggotaan ini bersifat terbuka dan seoptimal mungkin dari kalangan manapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi.

Status keanggotaan seseorang pada koperasi diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang

bersangkutan didaftarkan dan telah menandatangani buku daftar anggota. Standar status keanggotaan seseorang pada koperasi digolongkan pada:

1. Anggota, yaitu Seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota.
2. Calon Anggota, yaitu Seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, namun belum dapat melunasi simpanan pokok yang ditetapkan dan belum tercatat dalam buku anggota koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Jika permohonannya untuk menjadi calon anggota dikabulkan meskipun tidak dicantumkan dalam buku daftar anggota, pihak yang bersangkutan dapat memanfaatkan jasa pelayanan koperasi. Dalam kurun waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.
3. Anggota Kehormatan, yaitu Seseorang yang karena kedudukannya diminta oleh pengurus untuk menjadi anggota kehormatan koperasi. Anggota kehormatan wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta berperan aktif untuk kemajuan koperasi.
4. Anggota Luar Biasa, yaitu Mereka yang berstatus warga negara Indonesia atau warga negara asing bermaksud menjadi anggota yang memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan, namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota.

Dari jenis-jenis keanggotaan di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya koperasi berusaha seoptimal mungkin mengajak dari berbagai kalangan untuk dapat masuk menjadi anggota. Hal ini ditujukan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi anggota, semakin banyak pula potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari berbagai macam anggota. Semakin banyaknya anggota dari berbagai kalangan, juga memungkinkan jenis usaha dari koperasi semakin bervariasi dan semakin berkembang.

Adapun Jumlah total anggota koperasi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 sebanyak 107.617 orang dengan perincian anggota laki-laki sebanyak 65.249 orang dan perempuan sebanyak 42.368 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 93.742 anggota yang terdiri dari 60.941 anggota laki-laki dan 37.206 anggota perempuan. Kenaikan ini bisa saja terjadi karena dampak Pandemi Covid 19 yang memang mencapai puncaknya di tahun 2020, sehingga banyak masyarakat yang bergabung menjadi anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup pasca pandemic covid-19.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi pada keanggotaan koperasi dibanding dengan perempuan dalam setiap

tahunnya. Meskipun sudah ada koperasi wanita (Kopwan), tetapi ternyata belum mampu menambah jumlah perempuan dari sisi kuantitatif jumlah anggota. Lebih lanjut disajikan dalam tabel 11.2 berikut:

Tabel 11.2
Keanggotaan Koperasi di Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No	Kabupaten	Keanggotaan Koperasi		Jumlah L + P
		L	P	
1	Ponorogo	65.249	42.368	107.617
	Jumlah	65.249	42.368	107.617

Sumber: *Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ponorogo*

Dari data dalam tabel 11.2 diatas menunjukkan bahwa kenggotan perempuan dalam koperasi juga masih rendah. Hal ini tentu menjadi harus menjadi prioritas pemerintah untuk mendorong perempuan agar lebih banyak menjadi anggota koperasi, apalagi jumlah koperasi wanita cukup banyak, yaitu sebanyak 307 buah.

C. Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo

Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ponorogo, pemerintah daerah mendorong kepada masyarakat untuk mendirikan UMKM di berbagai macam sektor usaha. Banyak pelatihan dan bantuan dari pemerintah diberikan untuk mendukung berdirinya UMKM tersebut.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kabupaten Ponorogo termasuk kabupaten yang masyarakatnya banyak memiliki usaha rumahan (Home Industri). Home industri tersebut merupakan usaha mikro, yaitu suatu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Persyaratan dalam usaha mikro ini maksimal memiliki aset 50 Juta s.d 500 juta dengan omset 300 juta s.d 2.5 milyar rupiah.

Jadi yang dimaksud usaha kecil (mikro) yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri dengan sendiri, yang dikerjakan oleh orang perseorangan atau tubuh usaha yang bukanlah adalah anak perusahaan atau bukanlah cabang perusahaan yang dipunyai, dikuasai, atau jadi sisi baik segera ataupun tidak segera dari usaha menengah atau usaha besar yang penuh persyaratan Usaha Kecil seperti disebut dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. UU 20/2008 tentang UMKM diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta.

Usaha mikro di Kabupaten Ponorogo terdiri dari beberapa jenis usaha, yaitu pedagang obrok, pengrajin bordir, pengrajin emas, pracangan, pembuat tempe, peternak, pertanian, pertukangan, pertokoan, warung, jasa sablon, jasa wartel, bengkel las, mebel, bahan bangunan, jasa angkutan, industri tahu, konveksi, jasa cuci mobil, pengrajin emping mlinjo, pengrajin genteng, pengrajin kompor, jasa catering, jasa penjahit, pengrajin batu bata, industri roti, pengrajin anyaman bambu, industri krupuk dan lain. Tabel 11.3 berikut menjelaskan tentang jenis usaha mikro di Kabupaten Ponorogo, tetapi belum ditemukan data berapa jumlah usaha tersebut sekaligus kepemilikannya.

Termasuk data tentang berapa jumlah pengrajin sate dan dawet Jabung yang menjadi ikon Kabupaten Ponorogo juga belum tersedia datanya.

Tabel 11.3
Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No.	Jenis Usaha Mikro	Lokasi
1	2	3
1	Perdagangan Obrok	Kab. Ponorogo
2	Pengrajin Bordir	Kab. Ponorogo
3	Pengrajin Mas	Kab. Ponorogo
4	Prancangan	Kab. Ponorogo
5	Pembuatan Tempe	Kab. Ponorogo
6	Peternak	Kab. Ponorogo
7	Pertanian	Kab. Ponorogo
8	Pertokoan	Kab. Ponorogo
9	Warung	Kab. Ponorogo
10	Pedagang	Kab. Ponorogo
11	Konveksi	Kab. Ponorogo
12	Jasa Sablon	Kab. Ponorogo
13	Jasa Wartel	Kab. Ponorogo
14	Bengkel las	Kab. Ponorogo
15	Mebel	Kab. Ponorogo
16	Bahan Bangunan	Kab. Ponorogo
17	Jasa Angkutan	Kab. Ponorogo
18	Pra Koperasi	Kab. Ponorogo
19	Industri Tahu	Kab. Ponorogo
20	Jasa Cuci Mobil	Kab. Ponorogo
21	Pengrajin Emping Mlinjo	Kab. Ponorogo
22	Pengrajin Kompor	Kab. Ponorogo
23	Pengrajin Genteng	Kab. Ponorogo
24	Catering	Kab. Ponorogo
25	Jasa Penjahit	Kab. Ponorogo
26	Pengrajin Batu Bata	Kab. Ponorogo
27	Industri Roti	Kab. Ponorogo
28	Pengrajin Anyaman Bambu	Kab. Ponorogo
29	Indutri Krupuk	Kab. Ponorogo
30	Lain-Lain	Kab. Ponorogo

Sumber: *Dinsos P3A Kab. Ponorogo*

UMKM di Kabupaten Ponorogo berkembang dalam berbagai macam bidang di hamper seluruh kecamatan di Ponorogo. Selain hal yang perlu dibanggakan adalah sebanyak 1.039 UMKM di Kabupaten Ponorogo tersebut dikelola oleh perempuan. Jumlah ini merupakan jumlah yang baik untuk jumlah UMKM terutama yang dikelola oleh perempuan. Hal ini membuktikan bahkan perempuan sudah memberikan kontribusi penting di bidang ekonomi. UMKM tersebut terdiri dari mulai bidang makanan dan minuman, kerajinan, batik, gerabah hingga batu -batu. Adapun jumlah UMKM yang dikelola oleh perempuan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo ditunjukkan oleh tabel 11.4 berikut:

Tabel 11.4
Home Industry Yang Dikelola Perempuan
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pada SKPD, Ormas, LSM, dan PT
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS USAHA	JUMLAH
1	2	3	4
1	KECAMATAN PONOROGO	MAMIN	68
		KERAJINAN	7
		BATU-BATA	0
		BATIK	3
		GERABAH	6
2	KECAAMATAN BABADAN	MAMIN	34
		KERAJINAN	8
		BATU-BATA	9
		BATIK	8
		GERABAH	3
3	KECAMATAN JENANGAN	MAMIN	25
		KERAJINAN	3
		BATU-BATA	0
		BATIK	4
		GERABAH	1
4	KECAMATAN SIMAN	MAMIN	28
		KERAJINAN	23
		BATU-BATA	2
		BATIK	0
		GERABAH	2
5	KECAMATAN JETIS	MAMIN	32
		KERAJINAN	71

		BATU-BATA	1
		BATIK	0
		GERABAH	0
6	KECAMATAN BALONG	MAMIN	15
		KERAJINAN	6
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	1
7	KECAMATAN BUNGKAL	MAMIN	19
		KERAJINAN	16
		BATU-BATA	8
		BATIK	0
		GERABAH	0
8	KECAMATAN SLAHUNG	MAMIN	49
		KERAJINAN	8
		BATU-BATA	1
		BATIK	0
		GERABAH	1
9	KECAMATAN NGRAYUN	MAMIN	13
		KERAJINAN	1
		BATU-BATA	1
		BATIK	1
		GERABAH	0
10	KECAMATAN KAUMAN	MAMIN	13
		KERAJINAN	0
		BATU-BATA	2
		BATIK	0
		GERABAH	1
11	KECAMATAN SAMPUNG	MAMIN	12
		KERAJINAN	1
		BATU-BATA	17
		BATIK	0
		GERABAH	1
12	KECAMATAN SUKOREJO	MAMIN	28
		KERAJINAN	10
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
13	KECAMATAN JAMBON	MAMIN	28
		KERAJINAN	4

		BATU-BATA	1
		BATIK	0
		GERABAH	6
14	KECAMATAN BADEGAN	MAMIN	17
		KERAJINAN	2
		BATU-BATA	7
		BATIK	0
		GERABAH	0
15	KECAMATAN SAWOO	MAMIN	24
		KERAJINAN	48
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
16	KECAMATAN SAMBIT	MAMIN	17
		KERAJINAN	105
		BATU-BATA	58
		BATIK	1
		GERABAH	0
17	KECAMATAN PULUNG	MAMIN	30
		KERAJINAN	22
		BATU-BATA	1
		BATIK	0
		GERABAH	1
18	KECAMATAN SOOKO	MAMIN	30
		KERAJINAN	0
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
19	KECAMATAN PUDAK	MAMIN	0
		KERAJINAN	0
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
20	KECAMATAN NGEBEL	MAMIN	8
		KERAJINAN	0
		BATU-BATA	0
		BATIK	0
		GERABAH	0
21	KECAMATAN MLARAK	MAMIN	23
		KERAJINAN	37

		BATU-BATA	3
		BATIK	3
		GERABAH	0

Selain usaha mikro di atas, yang menggembirakan adalah banyak masyarakat ponorogo yang menggunakan perkembangan tehnologi informasi untuk memasarkan produknya. Melalui IG (Instagram), Facebook atau media sosial lainnya, sehingga hasil produksinya bisa di kenal oleh masyarakat luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Banyak pelaku usaha yang mendapatkan pesanan dengan menggunakan teknik pemasaran ini. Di samping itu mereka menggandeng reseller untuk memasarkan produknya. Sehingga menjamurlah olshop-olshop tanpa membutuhkan tempat usaha/toko dan modal yang besar. Cukup dengan memasarkan produk lewat story HPnya, dagangan akan dibeli oleh masyarakat yang menyukainya. Efeknya adalah menjamurnya jasa pengiriman barang, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan barang. Hal ini tentu juga merupakan peluang bisnis tersendiri yang tentunya banyak menghasilkan keuntungan.

BAB XII BUDAYA

Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di bagian barat Jawa Timur. Ponorogo juga merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Banyak potensi budaya yang merupakan kearifan lokal tersimpan di Ponorogo. Di Kabupaten Ponorogo juga banyak terdapat pondok pesantren, sehingga tidak mengherankan jika Kabupaten Ponorogo mendapat julukan sebagai "kota budaya dan kota santri". Di antara kebudayaan yang paling menonjol dan sangat melegenda yang berasal dari Kabupaten Ponorogo adalah kesenian Reyog. Saat mendengar kata "Reyog", maka secara otomatis masyarakat akan tahu bahwa kesenian tersebut berasal dari Kabupaten Ponorogo. Termasuk ketika disebut kata "Gontor", maka masyarakat mengetahui bahwa Gontor adalah Pondok Pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, meskipun Pondok Pesantren Darussalam Gontor ini telah memiliki beberapa cabang di Indonesia.

Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati sesuai dengan tanggal lahirnya kabupaten tersebut, yaitu tanggal 11 Agustus. Pada tanggal 11 Agustus 1496, Bathara Katong dinobatkan sebagai adipati pertama di Kadipaten Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Bathara Katong dan juga mengacu pada buku *Hand book of Oriental History*. Pada batu gilang tersebut tertulis candrasengkala memet berupa gambar manusia yang bersemedi, pohon, busung garuda dan gajah. Candrasekala memet ini menunjukkan angka tahun 1496 M. Sehingga dapat ditemukan hari wisudo Batharoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo yaitu Minggu Pon tanggal 1 besar 1418 Saka bertepatan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dhulhijjah 901 H. Selanjutnya melalui seminar hari jadi Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996, maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo, dan ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Tahun 2021 merupakan peringatan hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke 525 tahun.

A. Kearifan Lokal di Kabupaten Ponorogo

Kearifan lokal merupakan falsafah hidup masyarakat mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini sudah sangat mendarah daging sehingga menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun hingga saat ini. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua akan mewariskannya kepada anak-anak mereka dan begitu seterusnya. Kearifan lokal adalah

pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun. Kearifan lokal begitu melekat dan sulit dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut.

Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan, dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Hal tersebut dapat terwujud dalam beberapa bentuk seperti (1) pola pikir masyarakat yang berbudi pekerti baik; (2) perasaan mendalam terhadap tanah kelahiran; (3) bentuk perangai/tabi'at masyarakat kebanyakan pada daerah tertentu yang tetap melekat dan dibawa saat berbaur dengan kelompok masyarakat/lingkungan yang berbeda; (4) filosofi hidup masyarakat tertentu yang mendarah daging dan tetap lekat meski telah lama hidup di perantauan; dan (5) keinginan besar untuk tetap menjalankan adat/tradisi yang telah lama diikuti secara turun temurun.

Kearifan lokal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kearifan lokal tradisional atau kearifan lokal lama dan kearifan lokal kontemporer atau kearifan lokal baru. Kearifan lokal ini muncul karena adanya pengaruh beberapa hal, seperti perkembangan teknologi dan masuknya budaya luar pada suatu daerah. Pengertian kearifan lokal menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jadi kearifan lokal adalah suatu hal yang telah melekat pada masyarakat dan telah menjadi ciri khas di daerah tertentu secara turun temurun dan telah diakui oleh masyarakat luas.

Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal tumbuh dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, dimana beberapa hal akan berperan penting dalam perkembangannya, diantaranya bahasa, agama, kesenian, taraf pendidikan masyarakat, perkembangan teknologi dan lain sebagainya.

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak kearifan lokal yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, ada 10 kecamatan yang memiliki kearifan lokal dengan berbagai macam bentuknya. Berikut ini tabel daftar kearifan lokal yang tersebar di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Ponorog.

Tabel 12.1
Daftar Kearifan Lokal Masing-Masing Kecamatan
Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

KECAMATAN	Kearifan Lokal	Pesan yang Terkandung
(1)	(2)	(3)
1. Ngrayun	-	-
2. Slahung	Kirab Joyonegoro	Nilai Patriotik
3. Bungkal	-	-
4. Sambit	Bersih Desa Waringin Anom	Rasa Syukur
5. Sawoo	Kirab Budaya Sawoo	Rasa Syukur
6. Sooko	-	-
7. Pudak	-	-
8. Pulung	-	-
9. Mlarak	-	-
10. Siman	-	-
11. Jetis	Upacara Sapu Jagad	Gotong Royong
12. Balong	-	-
13. Kauman	Grebeg Tutup Suro	Pelestarian Sejarah
14. Jambon	-	-
15. Badegan	-	-
16. Sampung	Sedekah Bumi	Rasa Syukur
17. Sukorejo	Festival Sukosewu	Rasa Syukur
18. Ponorogo	-	-
19. Babadan	Bersih Desa Purwosari	Rasa Syukur
20. Jenangan	Kirab Pusaka	Pelestarian Sejarah
21. Ngebel	Larangan	Rasa Syukur

Sumber: *Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Ponorogo*

Berdasarkan tabel 12.1, sebanyak 10 kearifan lokal yang tersebar diseluruh kecamatan di Ponorogo, berikut ini dijelaskan kearifan lokal tersebut.

a. Kirab Joyonegoro di Kecamatan Slahung.

Kegiatan kirab Joyonegoro merupakan napak tilas mengenang Bupati Joyonegoro Kabupaten Gadingrejo (Ponorogo selatan) yang juga merupakan sejarah tokoh pendiri Slahung. Kegiatan budaya tersebut dilaksanakan setiap tahun dan akan terus dilestarikan karena merupakan salah satu sumber PAD dan sekaligus mampu menghidupi ekonomi masyarakat.

b. Bersih Desa

Tradisi bersih desa, di suatu daerah merupakan budaya yang terus dilestarikan warganya. Tradisi ini dipercaya bisa menjadi pembuang sial atau marabahaya di suatu daerah. Tradisi bersih desa hampir dilaksanakan diseluruh desa di Kabupaten Ponorogo sebagai bentuk rasa syukur dan merupakan budaya yang terus dilestarikan warga masyarakat Ponorogo. Cara pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing desa. Ada yang menggelar acara wayangan, pengajian, tahlilan, dan lain-lain sesuai kearifan lokal masing-masing desa. Kegiatan bersih desa tersebut biasanya dilakukan pada setiap bulan Dzulq'adah, tetapi ada juga yang menyelenggarakan di luar bulan tersebut.

c. Kirab Budaya Sawoo di Kecamatan Sawoo

Kirab tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas berdirinya daerah yang sekarang bernama Kecamatan Sawoo. Kirab tersebut diadakan setiap bulan Agustus dimulai petilasan Sunan Kumbul menuju pendopo Kecamatan Sawoo.

d. Upacara Sapu Jagad di Kecamatan Jetis

Upacara sapu jagad di Desa Winong kecamatan Jetis merupakan bentuk bersih desa yang dimaksudkan agar desa nyaman dan aman untuk di tinggali. Sapu Jagad yang dilakukan yakni dengan berkeliling desa sembari menyapu dengan sapu lidi secara simbolis. Sapu jagad dimaksudkan untuk membersihkan desa dari hal-hal yang terlihat maupun kasat mata. Ritual ini dilakukan pada bulan *Se/lo* (pada kalender Jawa). Sapu yang digunakanpun tidak sembarang sapu lidi, sapu tersebut dido'akan, kemudian dibawa berkeliling desa oleh tokoh masyarakat, perangkat desa dan masyarakat Desa Winong. Upacara sapu jagad di Desa Winong Kecamatan Jetis ini merupakan bentuk gotong royong masyarakat setempat untuk membersihkan desanya agar aman dan nyaman untuk di tinggali, dan terbebas dari segala marabahaya baik yang kasat mata maupun tidak.

e. Grebeg Tutup Bulan Syuro di Kecamatan Kauman

Sumoroto merupakan daerah bagian barat Ponorogo, yang pada setiap akhir bulan muharram (suro) diselenggarakan grebek tutup bulan suro, berupa kirab budaya dari daerah Bantarangin menuju pendopo Kecamatan Kauman. Kegiatan ini merupakan upaya pelestarian sejarah kekuasaan pada masa lalu, yang disebut sebagai kerajaan Bantarangin yang dipercaya masyarakat sebagai cikal bakal Kabupaten Ponorogo.

f. Sedekah Bumi di Kecamatan Sampung

Sedekah bumi merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa hasil bumi dan hasil panen. Berbagai macam bentuk kesyukuran dilakukan oleh masyarakat Ponorogo untuk mengungkapkannya. Diantaranya adalah dengan menggelar acara sedekah bumi dengan membuat tumpeng yang berisi hasil pertanian

mulai jagung, padi, kedelei, sayur mayor, polo pendem (umbi-umbian) hingga buah-buahan dan palawija seperti yang dilakukan oleh masrakat Desa Tugurejo Slahung, Desa Carangrejo dan Pager Ukir Sampung, dan Desa-Desa lain di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedekahbumi tersebut dimaksudkan agar masyarakat khususnya warga Ponorogo selalu berada dalam lindungan Tuhan, di beri berkah, jauh dari musibah dan bencana.

g. Festival Sukosewu di Kecamatan Sukorejo

Salah satu acara yang digelar masyarakat yang menambah semaraknya kearifan lokal di Kabupaten Ponorogo adalah Festival Sukosewu yang di gelar oleh masyarakat Desa Sukorejo. Sukosewu adalah sebuah tempat yang konon kabarnya salah satu tempat singgah Pangeran Diponegoro saat berperang melawan penjajah pada tahun 1825-1830-an. Dinamakan Sukosewu karena ditempat ini dulu setidaknya ditumbuhi ribuan pohon Asoka. Ditempat ini pula nampak ada tumpukan batu bata yang dipercaya sebagai tempat singgahnya Pangeran Diponegoro. Festival ini menampilkan pawai dengan membawa umbul-umbul, tumpeng, alat musik tektur, dan bendera berukuran besar 5x2 dibentangkan dan diarak keliling desa dan berakhir di Sukosewu. Diharapkan acara festival ini menjadi ajang persatuan masyarakat Desa Sukorejo khususnya.

h. Bersih Desa Purwosari di Kecamatan Babadan

Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menolak bala' dengan ritual bersih desa. Seperti yang dilakukan warga Desa Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang menggelar ritual sapu jagad sebagai bentuk penolak bala. Ritual bersih desa sapu jagad ini, diadakan di balai desa setempat pada malam hari. Sebelumnya, masyarakat bersama tokoh desa melakukan upacara penyerahan sapu kepada kepala desa. Sapu ini nantinya akan dipergunakan untuk menyapu jalan disepanjang jalan desa. Mengenakan pakaian adat khas Ponorogo, kepala desa bersama tokoh desa dan seluruh masyarakat Desa Purwosari mengarak sapu pusaka tersebut. Arak-arakan ini dikawal pasukan ala keraton Jawa, berjalan mengelilingi desa dengan berjalan kaki. Kepala desa bersama tokoh desa Purwosari mengenakan pakaian adat khas Ponorogo mengarak sapu pusaka tersebut dengan dikawal pasukan ala keraton jawa berjalan mengelilingi desa dengan berjalan kaki. Saat berkeliling desa ini, suasana terasa sangat sakral, para peserta ritual tidak diperkenankan berbicara satu sama lain, mereka harus menjalankan tapa bisu, dan tidak diperkenankan mengenakan alas kaki. Menurut Kepala Desa Purwosari, Sukatman, ritual bersih desa ini bisa untuk mencapai apa yang diinginkan. Sapu sebagai perlambang untuk membersihkan segala kotoran, seperti halangan atau bala. Sapu ini menjadi perlambang untuk membersihkan segala halangan, seperti marabahaya dan bala. Selain itu sapu jagad itu juga dipercaya bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

i. Kirab Pusaka di Kecamatan Jenangan

Kirab Pusaka diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan masyarakat Ponorogo. Kegiatan tersebut sebagai ajang bersatunya antara penguasa dengan rakyat. Kirab pusaka dan buceung purak atau berebut tumpeng menjadi tradisi yang dilaksanakan di Ponorogo untuk menyambut datangnya bulan Suro atau Muharram. Kirab pusaka merupakan kegiatan kilas balik sejarah Ponorogo. Yaitu saat wilayah yang semula bernama kerajaan Wengker ini memindah pusat pemerintahannya. Boyongan itu terjadi pada abad ke 15, yaitu dari pusat pemerintahan kota lama di kota timur atau kutho wetan yang kini merupakan Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan, menuju kota tengah atau kutho tengah yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo saat ini. Perpindahan ini dilaksanakan pada 1 suro 1951 saka atau 1 muharram 1440 H, tepatnya setelah matahari berangsur tergenlincir ke arah barat, masuk tanggal 1 suro.

Perpindahan pusat pemerintahan Kadipaten Ponorogo ini ditandai dengan sebuah prosesi penuh nuansa mistis dan religi. Dalam kirab pusaka tersebut diboyong tiga pusaka kebanggaan Ponorogo yaitu Angkin Cinde Puspito, Songsong Tunggul Wulung dan Tumbak Tunggul Nogo. Dalam prosesi kirab, ketiga pusaka dibawa oleh sejumlah senopati yang diperagakan oleh para lurah, camat serta kelapa dinas. Mereka mengenakan busana tradisional Jawa lengkap dengan keris di punggung yang berarti mereka berjalan damai. Pasukan yang memiliki sebutan bergada pusaka ini berbaris penuh khidmat sambil membawa ketika senjata andalan mereka.

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal kesenian Reog. Kesenian ini lahir dari budaya setempat yang masih kental dengan unsur mistik dan kebatinan. Tidak ada yang tahu pasti kapan kesenian ini muncul dan berkembang. Tetapi terdapat foto dokumentasi yang memperlihatkan kesenian reyog yang berasal dari Jawa Timur tepatnya dari Ponorogo sudah ada sejak tahun 1920-an. Kehadiran kesenian reog Ponorogo sebagai salah satu warisan budaya nusantara memiliki sejarah yang panjang. Ada sumber yang mengatakan bahwa kesenian reyog bermula dari seorang abdi dalem Kerajaan Majapahit yang bernama Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu merasa suasana Kerajaan Majapahit saat itu telah dikacaukan oleh kehadiran para penjiat dan koruptor. Melihat suasana ini, Ki Ageng Kutu ke luar dari kerajaan lalu mengajarkan beladiri dan kesenian pada anak-anak muda. Dalam suasana tersebut Ki Ageng Kutu menciptakan kesenian reyog sebagai media untuk mengkritik Kerajaan Majapahit.

Reog merupakan kesenian ketangkasan membawa topeng macan berwarna merah dengan bulu-bulu burung merak yang beratnya bisa

mencapai 560 kg. Reog Ponorogo biasa dimainkan oleh 6-8 orang pemuda. Seluruh pemain diharuskan memakai pakaian serba hitam. Tarian Reog diiringi music yang bersumber dari kendang, gong dan angklung paglag. Dalam setiap pertunjukan, reog biasanya diselingi seni tradisi lain seperti jathilan (jaran kepang), dan bujang ganong (ganongan).

Walau dalam setiap pertunjukan reog terdiri dari berbagai rangkaian, tidak ada pakem yang mengatur rangkaian atau tahapan pertunjukan. Menariknya dalam pementasan reog Ponorogo, ada penari yang nampak kesurupan dan mampu mengangkat orang dewasa untuk duduk diatas topeng, berapapun berat yang harus disangga dengan hanya menggunakan kekuatan gigi yang digunakan untuk mengangkat topeng. Maka, sudah seharusnya kesenian reog dijaga dan dilestarikan sebagai hasil karya perenungan seseorang terhadap ketidakadilan yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

Pada setiap bulan muharram (suro) di Kabupaten Ponorogo diadakan pesta rakyat sebagai bentuk perwujudan budaya masyarakat Ponorogo yaitu "Grebek Suro". Pada pesta rakyat ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, diantaranya adalah Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRG), pawai lintas sejarah dan kirab pusaka, serta larungan risalah do'a di Telaga Ngebel. Kegiatan FNRG diikuti oleh group reog di seluruh Indonesia. Selain kesenian reog, di Ponorogo banyak kesenian yang berkembang.

Kesenian reog Ponorogo hampir menyebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Setiap kecamatan, memiliki group reog yang tersebar di masing-masing desa, meskipun saat ini jumlah group reog tidak sebanyak tahun 1980an, karena alasan biaya dan lain-lain sehingga jumlahnya mengalami penurunan.

j. Larungan Risalah Do'a di Kecamatan Ngebel

Kearifan lokal selanjutnya yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo adalah Larungan risalah do'a di Telaga Ngebel. Acara tersebut memiliki makna spiritualitas tinggi bagi masyarakat Ponorogo, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan Telaga Ngebel. Tradisi larungan ini merupakan wujud rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan selama satu tahun terakhir. Sebelum acara tersebut digelar, malam sehari sebelumnya juga digelar acara do'a bersama dan berziarah di makam kuno yang ada di Desa Ngebel. Larungan risalah do'a ini digelar secara rutin setiap tanggal 1 muharram (suro) oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

B. Cerita Rakyat Ponorogo

Salah satu bentuk budaya yang ada di Ponorogo adalah cerita rakyat. Seperti kabupaten lain, Kabupaten Ponorogo juga memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri Kabupaten Ponorogo. Cerita rakyat adalah cerita pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya yang

beraneka ragam mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang suatu kejadian di suatu tempat atau asal muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, maupun dewa.

Ciri-ciri cerita rakyat di antaranya adalah (1) cerita rakyat disampaikan secara lisan; (2) disampaikan secara turun-temurun; (3) tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya; (4) kaya akan nilai-nilai luhur; (5) bersifat tradisional; (6) memiliki banyak versi dan variasi; dan (7) mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya.

Berikut ini beberapa Cerita Rakyat di Kabupaten Ponorogo

Tabel 12.2
Daftar Cerita Rakyat Masing-Masing Kecamatan
Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

KECAMATAN	Cerita Rakyat	Pesan yang Terkandung
1	2	3
1. Ngrayun	-	-
2. Slahung	Joyonegoro	Kepahlawanan
3. Bungkal	-	-
4. Sambit	-	-
5. Sawoo	-	-
6. Sooko	-	-
7. Pudak	-	-
8. Pulung	Kerajaan Ngerum	Perlawanan
9. Mlarak	-	-
10. Siman	Babad Jeruksing	Berdirinyasebuahdaerahdarisebuah proses
11. Jetis	Ki Demang Kutu	Kepahlawanan
12. Balong	-	-
13. Kauman	Kraton Bantarangin	-
14. Jambon	-	-
15. Badegan	-	-
16. Sampung	Sejarah BatuTulis	Pengembangan Raja-Raja Jawa
17. Sukorejo	Legenda Golan dan Mirah	Terjadinya konflik sosial budaya masyarakat
18. Ponorogo	Babad Ponorogo	Asal-usul Reog dan Pemerintah Ponorogo
19. Babadan	-	-
20. Jenangan	Babad Ponorogo	Sejarah Ponorogo
21. Ngebel	Baro Klinting	-

Sumber: *Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Ponorogo*

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak cerita rakyat yang tersebar di beberapa kecamatan yang masing-masing cerita memiliki pesan yang bermacam-macam mulai sejarah, pahlawan, hingga konflik sosial budaya. Cerita rakyat tersebut diantaranya adalah:

1. Joyonegoro

Cerita Joyonegoro mengandung makna kepahlawanan yang patut di jadikan teladan bagi generasi sekarang. Joyonegoro adalah bupati Kabupaten Gadingrejo (Ponorogo selatan) yang juga merupakan sejarah tokoh pendiri Slahung.

Sepeninggal sinuwun panembahan Senapati/Danang Sutawijaya putra-putranya mendapat bagian masing-masing. Mas jolang/Sri Susuhunan Adi PrabhuHanyakrawati Senapati ing Alaga Mataram dinobatkan menjadi raja Mataram, sedangkan pangeran Puger kakak beliau menjadi Bupati Demak. Sedangkan Jayaraga/Pangeran Barthothot sebagai Bupati Ponorogo bagian Timur, berbagi kekuasaan dengan Tumenggung Ranggawicitra II Bupati Kota Lama Ponorogoyang pengaruhnya masih dibawah Mataram yang konon juga terhitung cucu dari Sultan pajang dari garis Ibu.

Ibu Tumenggung Ranggawicitra II sultan pajang siapa. Arya Pangiri atau Pangeran Benawa. Namun, melihat hubungan dengan Mataram kalau boleh berpendapat kemungkinan kakek beliau adalah Pangeran Benawa. Dimana Pangeran Benawa berhasil naik tahta berkat bantuan Danang Sutawijaya.

Cerita antara Tumenggung Ranggawicitra II dan Jayanegara berawal ketika terjadi perebutan kekuasaan dalam tubuh Mataram. Dimana Pangeran Puger sebagai Adipati Demak memberontak pada tahun 1602, karena tidak puas akan kedudukannya. Pemberontakan Pangeran Puger II ini dapat ditanggulangi 3 tahun kemudian. Setelah reda, Pangeran Puger di skorsing oleh Mataram dan di mutasi ke Pati.

Terinspirasi dari pemberontakan kakaknya, pemberontakan ke 2 di dalangi oleh Pangeran Jayaraga/Mas Brothothot yang menjadi Bupati Srigading Ponorogo. Sebelum memberontak, Mas Brothothot untuk memantapkan hatinya sebagai "calon" raja berganti nama menjadi Joyonegoro. Namun, sebelum pemberontakan meletus, tahun 1607 atas laporan masyarakat, maka pemberontakan ini dapat dicegah, sehingga membuat Joyonegoro diasingkan.

Ada dua versi yang berbeda mengenai dimana lokasi "pengasingan" Joyonegoro. Cerita lokal yang di dukung buku "Babat Ponorogo" mengatakan beliau diasingkan, hingga akhir hayat dan di makamkan di masjid batu gunung Loreng Ponorogo. Sedangkang dari sumber lain mengatakan bahwa Joyonegoro diasingkan di masjid Batu di Nusa Kambangan. Sedangkan kepada Tumenggung Ranggawicitra II sebagai imbalan atas kesetiannya, beliau mendapatkan hadiah dari Prabu Hanyakrawati. Adapun kapan beliau lengser dan wafat tidak jelas

beritanya, karena pada umumnya di pesarean keluarga di Sentono tidak memuat angka tahun.

2. Kerajaan Ngerum di Pulung.

Kerajaan Ngerum merupakan cerita dalam asal usul kesenian tari keling yang berasal dari Dusun Mojo Desa Singgahan Pulung Ponorogo. Kesenian Tari dalam setiap gerakannya mempunyai arti sebagai suatu cerita, begitu juga dengan Tari Keling. Pesan yang terkandung dalam cerita kerajaan Ngerum adalah tentang perlawanan antara Kerajaan Lambas Keling yang menjadi jajahan Kerajaan Ngerum.

Tari Keling menceritakan yakni ada dua kerajaan yang bernama Lambas Keling yang dipimpin seorang raja yang bernama Bagas Pati dan kerajaan Ngerum dengan rajanya Prabu Indra Jaya. Kerajaan Lambas Keling atau disebut Keling merupakan wilayah jajahan kerajaan Ngerum. Raja Bagaspati yang mempunyai perwujudan seperti raksasa berniat memperistri kedua putri kembar dari kerajaan Ngerum, yaitu putri Sekar Arum dan Sekar Wangi. Bagaspati akhirnya memberanikan diri datang ke kerajaan Ngerum untuk melamar dengan membawa iring-iringan prajurit yang semuanya raksasa. Sampai di Ngerum lamaran Bagaspati ditolak. Bagaspati akhirnya marah dan menculik kedua putri Ngerum. Beberapa saat kedua emban pengasuh putri tersebut panik, karena kedua putri yang diasuhnya dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya dua orang pujangga kerajaan yang mengetahui hal tersebut melaporkannya pada ratu mereka. Akibatnya kerajaan Ngerum geger dan ratu tersebut mengeluarkan sayembara atas usulan pujangga kerajaan Jokarmo dan Jokarso.

Sayembara tersebut berisi tentang barang siapa bisa menemukan kedua putri tersebut, kalau dia perempuan akan dijadikan saudara dan kalau laki-laki akan dijadikan suami keduanya. Seluruh rakyat ikut mencari kedua putri tersebut dengan pergi ke hutan sambil memainkan bunyi-bunyian, kentongan dan kendang. Sampai ditengah hutan mereka bertemu dengan perempuan tua yang diketahui berasal dari padepokan Waringin Putih, wargapun menanyakan dan bercerita pada perempuan tua tersebut. Setelah itu perempuan tua tersebut pulang dan menceritakannya kepada anaknya yang bernama Joko Tawang. Joko Tawang berniat untuk mengikuti sayembara tersebut. Akhirnya Joko Tawang berhasil menemukan kedua putri tersebut namun untuk dapat membawanya pulang harus mengalahkan Bagaspati. Pertarunganpun terjadi hingga berakhir dengan kekalahan Bagaspati serta para prajuritnya. Iring-iringan kepulauan kedua putri tersebut sangat meriah, para prajurit Bagaspati digiring dijadikan tawanan, sementara yang lainnya memikul kerun, lambang kebesaran kerajaan Keling dan yang lain tak henti-hentinya memainkan alat musik dari gendang dan kentongan serta tambur untuk mengiringi empat orang emban yang menari sambil berjalan menghibur kedua putri Ngerum. Kerun yang dibuat dari

beberapa daun kelapa lengkap dengan pelepahnya yang dirangkai sehingga berbentuk mirip dadak merak dalam reyog.

3. Babad Jeruksing.

Cerita babad Jeruksing memiliki pesan tentang berdirinya sebuah daerah terjadi dari sebuah proses. Pada tahun 1740 terjadi geger pacinan di Kartasura atau pemberontakan Sunan Kuning. Raja Pakubuwana II kalah dan melarikan diri hingga sampai ke Kabupaten Ponorogo. Dibantu oleh punggawa yang bernama Jayengrana hingga sampai di Kadipaten Pedanten selatan kadipaten kota lama (saat itu belum pindah) . Di tengah jalan ada orang memberi buah jeruk, dan setelah dibuka ternyata berbau pesing akhirnya tempat diberi nama Jeruksing (jeruk pesing).

Selanjutnya Raja melanjutkan perjalanan ke daerah Pulung, terus melanjutkan lagi ke Sawoo melewati lereng gunung Bayangkaki, di Sawoo meninggalkan situs Sunan Kumbul. Setelah itu mondok di Tegalsari pada zaman Kyai Muhammad Besari (kakek Kyai Kasan Besari). Sekitar tahun 1748 bisa merebut tahta kembali. Akhirnya jayengrana diangkat menjadi Adipati Pedanten yang pertama. Dan makamnya sekarang berada di Kecamatan Pulung. Tempat situs Kadipaten Pedanten berada persis di belakang masjid kurang lebih 750 meter arah ke timur dari pasar Kecamatan Siman.

4. Ki Demang Kutu

Cerita rakyat tentang Ki Demang Kutu merupakan sebuah cerita tentang kepahlawanan seorang tokoh. Legenda kesenian reyog ini merupakan sindiran atau satire sekaligus mempunyai makna simbolis yang timbul pada masa Raja Bre Kertabumi yaitu raja terakhir kerajaan Majapahit. Hal ini berawal dari menyingkirnya penasehat kerajaan yang bernama Ki Ageng Ketut Suryo Alam dari Istana Kerajaan Majapahit. Ki Ageng Ketut Suryo Alam menganggap Prabu Bre Kertabumi telah menyimpang dari tatanan moral kerajaan. Penyimpangan moral inilah yang dinilai awal dari kehancuran Majapahit, dimana kebijakan politik Majapahit waktu itu banyak dipengaruhi oleh permaisuri sehingga banyak kebijakan, peraturan Raja yang tidak benar. Ki Ageng Ketut Suryo Alam menyingkir ke suatu daerah di selatan, yang bernama Kutu. Suatu desa kecil yang masuk wilayah Wengker.

Kemudian Ki Ageng Ketut Suryo Alam mendirikan sebuah padepokan yang mengajarkan sikap seorang prajurit dan kesatria yang gagah dan perkasa. Seorang prajurit harus taat kepada kerajaan dan sakti. Untuk menempuh tujuan tersebut Ki Ageng Ketut Suryo Alam atau lebih dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Ki Demang Kutu melarang muridnya berhubungan dengan wanita (wadat). Menurut kepercayaannya, barang siapa melanggar ajaran tersebut, kekuatan atau kesaktinnya akan berkurang, bahkan hilang sama sekali.

Untuk itulah muridnya harus tinggal di padepokannya. Kepemimpinan dan padepokan Ki Ageng Kutu cepat menyebar dan populer ke beberapa daerah lainnya. Di dalam padepokan tersebut, Ki Ageng Kutu merenung dan berfikir, bagaimana strategi untuk melawan Majapahit yang dianggapnya meyimpang. Dalam perenungannya muncul pendapat bahwa peperangan bukanlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, sehingga diciptakanlah sebuah perlawanan secara psikologis dengan membuat kritikan lewat media kesenian. Sebuah drama tari yang menggambarkan keadaan kerajaan Majapahit, dan oleh Ki Ageng Kutu disebut Reyog.

Ki Ageng Kutu sebagai tokoh warok yang dikelilingi oleh para murid-muridnya menggambarkan fungsi dan peranan seseorang masih tetap diperlukan dan harus diperhatikan. Pelaku dalam Drama tari tersebut adalah Singo Barong yang mengenakan bulu merak di atas kepalanya menunjukkan kecongkakan atau kesombongan sang Raja, yang selalu diganggu kecantikan permaisurinya dalam menentukan kebijakan kerajaan. Penari kuda atau Jathilan yang diperankan oleh seorang laki – laki yang lemah gemulai dan berdandan seperti wanita menggambarkan hilangnya sifat keprajuritan kerajaan Majapahit.

Tarian penunggang kuda yang aneh menggambarkan ketidakjelasan peranan prajurit kerajaan, ketidak disiplin prajurit terhadap rajanya, namun raja berusaha mengembalikan kewibawaannya kepada rakyat yang digambarkan dengan penari kuda (Jathilan) berputar-putarnya mengelilingi Sang Raja.

Seorang pujangga kerajaan digambarkan oleh Bujang Ganong yang memiliki wajah berwarna merah, mata melotot dan berhidung panjang menggambarkan orang bijaksana, bernalar panjang tetapi tidak digubris oleh Raja sehingga harus menyingkir dari kerajaan. Setelah Ki Ageng Kutu meninggal, kesenian ini diteruskan oleh Ki Ageng Mirah pada masa Bathoro Katong (Bupati pertama Ponorogo) hingga sekarang. Oleh Ki Ageng Mirah cerita yang berlata belakang sindiran tersebut digantikan dengan cerita Panji. Kemudian dimasukkan tokoh – tokoh panji seperti Prabu Kelana Sewandana, Dewi Songgolangit yang menggambarkan peperangan antara kerajaan Kediri dan Bantarangin.

5. Keraton Bantarangin

Diceritakan bahwa Raja Bantar Angin yang bergelar Prabu Kelana Sewandana jatuh cinta kepada putrid dari kerajaan Kediri yang bernama Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Oleh sebab api cinta yang tidak bias dipadamkan, maka Prabu Kelana Sewandana kemudian mengutus Patihnya yaitu Pujonggo Anom atau yang lebih dikenal dengan Bujang Ganong untuk melamar Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Dalam perjalanan menuju ke kerajaan Kediri, Bujang Ganong dihadang oleh Singo Barong (seorang raja dari segala harimau yang menjaga tapal batas kerajaan Kediri). Singo Barong mempunyai bentuk tubuh yang tidak

lazim yaitu orang yang berbadan manusia tetapi berkepala Harimau. Prabu Singo Barong mendapat perintah dari Raja Kediri untuk memeriksa atau melarang siapapun tanpa seijin sang Raja masuk ke wilayah kerajaan Kediri.

Perjalanan Bujang Ganong terpaksa berhenti di perbatasan kerajaan Kediri karena dihadang oleh Singo Barong. Perang mulut antara keduanya sulit dihindari sehingga memuncak menjadi perang fisik. Karena kesaktian dan keperkasaan Singo Barong, Patih Bujang Ganong dapat dikalahkan dan bertekuk lutut dikaki Singo Barong. Kemudian Singo Barong menyuruh Bujang Ganong pulang ke kerajaan Bantar Angin dan melaporkan kealahannya. Sesampainya di kerajaan Bantar Angin, Bujang Ganong langsung menghadap Prabu Kelana Sewandana. Mendengar kekalahan dan ketidak berhasilan utusannya, beliau langsung marah dan memerintahkan Bujang Ganong untuk mengerahkan segala kekuatan bala tentaranya untuk menyerang Singo Barong dan kerajaan Kediri. Prabu Kelana Sewandana akan menghancurkan Kediri apabila Dyah Ayu Dewi Songgolangit menolak lamarannya.

Dalam perjalanannya, Prabu Kelana Sewandana diiringi suara bended an Gong yang riuh sekali dengan maksud untuk member semangat kepada prajuritnya. Seperti perjalanan sebelumnya, setelah sampai di tapal batas kerajaan Kediri, pasukan Bantar Angin dihadang oleh Singo Barong dan bala tentaranya. Akhirnya perannpun terjadi dengan dahsyatnya. Ternyata kekuatan dan kesaktian bala tentara Singo Barong sangat sulit dikalahkan oleh prajurit Bantar Angin, sehingga Prabu Kelana Sewandana harus turun tangan sendiri.

Adu kesaktian antara Prabu Kelana Sewandana dan Singo Barong berlangsung seru dan mengagumkan. Keduanya sangat sakti mandraguna dan saling serang.

Prabu Kelana Sewandana sangat terpaksa mengeluarkan pusaka andalannya yaitu Cemethi Samandiman. Dengan sekali cambuk Singo barong langsung lumpuh kehilangan kekuatannya. Singo Barong menyatakan dan mengakui kealahannya dan takhluk kepada Prabu Kelana Sewandana. Prabu Kelana Sewandana tidak keberatan menerima takhlukan Singo Barong asalkan mau menunjukkan jalan menuju ke Kerajaan Kediri dan membantu mewujudkan cita – cita Prabu Kelana Sewandana. Dua pasukan itu bergabung di bawah pimpinan Singo barong dan Bujang Ganong menuju kerajaan Kediri. Tanpa perlawanan yang berarti, pasukan kerajaan Kediri dapat dikalahkan oleh Pasukan Prabu Kelana Sewandana. Akhirnya Prabu Kelana Sewandana berhasil mempersunting Putri Kediri Dyah Ayu Dewi Songgolangit.

Untuk memperingati perjalanan dan kemenangan Prabu Kelana Sewandana ini diciptakanlah suatu kesenian yang dikenal dengan REOG

6. Sejarah Batu Tulis

Cerita tentang sejarah batu tulis merupakan cerita tentang pengembangan raja-raja Jawa. Ponorogo pada zaman dahulu disebut dengan

nama Wengker. Dalam berbagai prasasti nama Wengker kerap disebut telah ditaklukan dan biasanya disertai dengan penyebutan nama rajanya. Seperti prasasti Kamaglyan yang menceritakan kisah kemenangan Raja Airlangga atas Wijayawarna Raja Wengker bekas sekutunya bertahun 1006M.

Salah satu daerah yang kaya dengan peninggalan purbakala adalah kecamatan Sampung, di lereng selatan pegunungan Lawu. Daerah diyakini beberapa sejarawan sebagai Ibukota ketiga kerajaan Medang. Yang pertama berada di wilayah lereng Merapi, lalu pindah ke Wwatan Madiun. Kemudian pindah lagi ke Medang-Sampung ketika Wwatan-Madiun diserang Sriwijaya saat pesta pernikahan Airlangga dan Rajanya Dharmawangsa mati terbunuh. Sebagai Ibukota pelarian, wilayah dataran tinggi Sampung ini sangat cocok. Karena tanahnya subur dan kaya sumber mata air alami serta dikelilingi pegunungan yang menjadi benteng utama. Persis seperti Maccu Picchu di Peru.

Situs ini terdiri dari: balok altar (meja) dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berudak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang itu, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf pallawa. Beberapa dugaan menyebutkan bahwa situs ini adalah peninggalan era Dharmawangsa Raja Medang sekaligus mertua Airlangga. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa ini adalah tempat Airlangga mengasingkan diri setelah kerajaan mertuanya hancur diserbu Sriwijaya.

Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos melarikan diri ke hutan pegunungan (*wanagiri*) ditemani pembantunya yang bernama Mpu Narotama, Pagerukir inilah yang diyakini. Saat itu ia berusia 16 tahun, dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Setelah tiga tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya supaya membangun kembali Kerajaan Medang. Airlangga kemudian sukses membangun kerajaan baru bernama Kahuripan.

Situs ini berada di sebuah kaki bukit, sepertinya asal muasal benda-benda tersebut adalah di atas bukit lalu diturunkan. Bukin yang berada di belakang situs juga cukup aneh struktur bebatuannya persis seperti pundek berundak di gunung padang. Di seberang jalan situs ini ada sebuah sumber mata air dua warna dua kolam.

Adapun berdasarkan cerita rakyat, semasa pengembaraan Airlangga bersama Mpu Narotama. Keduanya berguru ke seorang empu yang sangat tersohor yaitu Empu Bharada. Di Situs Pager Ukir inilah Airlangga digembleng ilmu jaya wijaya dan ilmu kanuragan. Hingga akhirnya Airlangga lulus dan diberi gelar oleh gurunya sebagai Prabu Kelono Sewandono sedangkan Narotama berganti nama menjadi Pujanggo Anom. Kedua tokoh nama Kelono Sewandono dan Pujonggo Anom merupakan tokoh yang digambarkan dalam kesenian reog Ponorogo, yaitu gambaran seorang Satriya yang sakti mandara guna dan berperilaku baik.

Sebelumnya dengan runtuhnya kerajaan Medang di Jawa Tengah banyak rakyatnya yang pindah ke Jawa Timur. Pada tahun 1928 Empu Sendhok yang merupakan patih dari kerajaan Medhang dia beserta keluarganya pindah ke Jawa Timur. Tidak sedikit rakyat yang mengikuti jejak Empu Sendhok untuk pindah ke Jawa Timur.

Di Jawa Timur kemudian mendirikan sebuah kerajaan, kerajaan itu diberi nama kerajaan Watonmas. Kerajaan Watonmas itu berada di sekitar sungai Brantas antara Malang dan Surabaya. Kemudian Empu Sendhok itu dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Sri Isana Wikrama Darmotungga Dewa, yang mana menjadi moyang bagi raja-raja di Jawa selama 300 tahun berturut-turut sampai dengan tiga keturunan. Akan tetapi kerajaan Watonmas itu tidak bertahan lama karena diserang oleh musuh sehingga kerajaan Watonmas itu runtuh. Kemudian muncul suatu kerajaan baru yaitu kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Airlangga. Masa pemerintahan Raja Erlangga antara tahun 1000-1042. Setelah Empu Sendhok, ternyata juga ada rombongan lain dari Jawa Tengah yang pindah ke Jawa Timur di bawah pimpinan putra Raja Medhang yang bernama Kettu Wijaya.

Kemudian Kettu Wijaya beserta rombongannya berjalan melewati jalur sebelah selatan hingga di sebelah timur Gunung Lawu kemudian mereka beristirahat dan menetap disana. Dengan kejadian itu mereka mendirikan sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Wengker. Berdirinya kerajaan Wengker itu dibuktikan dengan adanya sebuah prasasti yang ditemukan di Sendang Kanal Madiun. Didalam prasasti tertulis berdirinya kerajaan Wengker pada tahun 986 – 1037 M dengan rajanya yang bergelar Kettu Wijaya.

Nama Wengker merupakan akronim dari "*Wewengkon angker*" atau tempat yang angker. Wilayah kerajaan Wengker meliputi sebelah Utara yaitu Gunung Kendeng sampai Gunung Pandan. Kemudian sebelah timur merupakan Gunung Wilis ke selatan sampai ke laut selatan. Kemudian sebelah selatan merupakan wilayah laut selatan dan sebelah barat dari pegunungan mulai laut kidul ke utara sampai ke Gunung Lawu.

Kemudian didalam buku *Hindhu Yavansche Tiyt* halaman 134 yang di tulis oleh Proffesor Doktor N.J. Krom menjelaskan bahwa kerajaan Wengker terletak di desa Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Kemudian didalam buku *Sejarah Indonesia* yang ditulis oleh Dra. Setyawati Sulaiman juga menjelaskan bahwa kerajaan Wengker itu terletak di dekat desa Setono.

Kemudian berdasar penelitian menyebutkan bahwa kerajaan Wengker itu, kerajaannya terletak di desa Kadipaten perbatasan berbatasan dengan desa Setono. Kerajaan Wengker dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Wijaya atau Kettu Wijaya. Kerajaan Wengker itu kerajaan yang kuat, amat sentosa, rajanya sakti mandraguna dan rakyatnya banyak yang berilmu tinggi dan senang dalam melakukan dalam tapa brata.

Kerajaan Wengker dikelilingi oleh sungai yang menjadi batas kota dan sebagai benteng pertahanan. Selain itu juga terdapat tiga benteng dalam tanah istilahnya *Benteng Pendem*. Pada tahun 947 M, Empu Sendhok digantikan anaknya yang bernama Sri Isyanatungga Wijaya yang menikah dengan Sri Lokapala. Selanjutnya ia digantikan putranya, Sri Makuyhawangsa Wardana. Sri Makuthawangsa Wardana mempunyai dua orang putri. Salah satu putrinya menikah dengan Dharmawangsa. Selanjutnya sang menantu itulah yang kemudian memegang kekuasaan di Medhang. Salah satu putri Makuthawangsa yang bernama Mahendradatta menikah dengan Udayana dan mempunyai anak bernama Airlangga. Dalam memimpin Medhang, Dharmawangsa mempunyai ambisi besar memperluas wilayah. Kerajaan Medhang saat itu diperkirakan di sekitar daerah Maospati Magetan.

Pada tahun 1016, kerajaan Medhang diserang Sriwijaya bersama sekutunya yaitu Wurawari dan Wengker, sehingga raja Dharmawangsa dan seluruh pembesar kerajaan tewas. Kemudian peristiwa itu dikenal dengan sebutan "*Pralaya*" atau kehancuran. Selain itu beserta sekutunya ingin menghancurkan Medhang. Sementara keterlibatan Wengker adalah pengaruh ekspansif Medhang yang berusaha memperluas wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan juga persaingan dalam bidang ekonomi.

Satu-satunya yang berhasil lolos dari serangan tersebut adalah Airlangga yang pada saat itu sedang melangsungkan pernikahan dengan putri Dharmawangsa. Pada waktu itu usia airlangga 16 tahun, beserta Narotama ia bersembunyi di hutan sekitar daerah Wonogiri. Pada tahun 1019 M, Airlangga dinobatkan menjadi raja Kahuripan yang terletak di bekas reruntuhan kerajaan Medhang. Saat itu bekas kerajaan Medhang sepeninggal Dharmawangsa merupakan wilayah yang kecil karena setelah terjadinya Pralaya, wilayah Medhang menjadi terpecah-pecah. Airlangga merupakan raja yang tersohor dan berpengaruh besar.

Tahun 1028 M, Airlangga memulai usahanya menyatukan kembali wilayah Medhang termasuk terhadap kerajaan Wengker. Tahun 1031 Wengker bisa ditaklukkan. Pada tahun 1035 kerajaan Wengker ternyata bangkit dan kuat lagi. Airlangga kembali menyerang Wengker dengan kekuatan pasukan yang besar. Pada tahun 1037 M, Kettu Wijaya mengalami kekalahan, terpaksa meninggalkan harta benda dan permaisurinya. Kettu Wijaya lari ke desa Topo kemudian pindah ke Kapang diikuti bebrapa prajuritnya. Karena terus diserang pasukan Airlangga lari ke Sarosa. Disinlah akhirnya Kettu Wijaya dapat dikalahkan dan ia dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Kettu Wijaya hilang beserta jiwa raganya (muksa). Dengan semikian berakhir riwayat kerajaan Wengker dibawah pimpinan Kettu Wijaya. Selanjutnya wilayah Wengker menjadi daerah kekuasaan Airlangga.

Berselang sekitar 200 tahun muncul kerajaan baru yaitu kerajaan Bantarangin. Terletak di desa Sumoroto kurang lebih 12km arah barat kota

Ponorogo yang masih bagian wilayah kerajaan Wengker. Pada tahun 1078 kerajaan Wengker dipimpin oleh Kelono Sewandono. Rajanya yang bernama Kelono Sewandono dan patihnya bernama Kelono Wijaya yang masih saudara kandung. Raja Kelono Sewandono kakaknya memiliki paras yang tampan sampai dijuluki Tubagus Kelono Sewandono. Sedangkan adiknya berwajah jelek, keningnya nong nong, mata pendul, bermulut lebar, gigi besar-besar, pundak benjol dan rambunta gimbal. Meskipun berwajah jelek namun Kelono Sewandono memiliki kesaktian yang luar, ahli bertapa dan kaya akan mantra-mantra.

Pada suatu malam Kelono Sewandono bermimpi bertemu dengan putri Kediri yang bernama Dewi Songgolangit. Keesokan harinya beliau mengutus adiknya yaitu Kelono Wijaya untuk melamar Dewi Songgolangit ke Kediri. Sang Prabu Kertojoyo raja Kediri mengetahui jika putrinya ketakutan melihat tamunya yang baru datang, namun akan menolak takut karena raja Bantarangin itu orangnya sakti mandraguna. Kemudian dia minta persyaratan untuk proses pernikahan nanti yaitu :

1. Minta seperangkat gamelan (gong) yang belum ada di bumi ini dan digunakan untuk mengiringi jalannya temanten dari Wengker sampai Kediri.
2. Minta berbagai macam hewan isi hutan yang dihalau ke Kediri untuk mengisi kebun binatang
3. Minta manusia berkepala harimau.

Sesampainya di Bantarangin segera menyatakan apa saja yang menjadi permintaan Putri Kediri. Kelono Sewandono murka mendengar apa yang dikatakan adiknya. Permintaan itu tidak wajar, tidak akan terlaksana, maka kerajaan Kediri akan diserang dengan peperangan. Dengan kesaktian ilmunya seluruh hewan hutan dapat dikumpulkan di alun-alun lalu merakit alat musik model baru yang terbuat dari bambu dan kayu seperti seruling (terompet), angklung, ketipung dan gendang. Ketuk, kenong dan kempul juga dari bambu. Seperangkat alat musik (gamelan) yang terbuat dari bambu semuanya sudah disiapkan termasuk penabuhnya (pemainnya). Tinggal manusia berkepala harimau (macan) yang akan diketemukan nanti.

Sesudah semua persyaratan selesai calon temanten laki-laki yaitu Raja Bantarangin diiring menuju kerajaan Kediri. Gamelan (musik) dipukul dengan sorak sorai, gembira, gemuruh laksana batu bata runtuh. Waktu itu Kelono Wijaya tidak boleh ikut karena nanti akan menakuti Putri Kediri dan dikatakan kakaknya bila ikut memalukan karena jelek rupanya. Akhirnya mengalah dan menerima untuk menjaga kerajaan.

Ternyata Patih Kediri yang bernama Singolodro yang juga disebut Barongseta juga menghendaki ingin menyunting Dewi Songgolangit. Patih Singolodro itu juga sakti mandraguna, dan kondang dapat berubah menjadi harimau putih karena itu disebut Barongseto. Mendengar ramai-ramai gemuruh

sorak-sorai masuk kota secepat kilat dengan penuh keberanian menerjang barisan pengiring pengantin. Para pengiring temanten bubar lari kesana kemari. Hewan yang digiringpun lari tak karuan hanya tinggal Barongseta berhadapan dengan Kelono Sewandono.

Keduanya lalu perang tanding Kelono Sewandono naik kuda sambil membawa tombak Singolodro membawa tameng dengan sebilah pedang. Singolodro terkena tombak Kelono Sewandono seketika berubah menjadi harimau gembong yang berwarna putih menubrak musuh mengenai leher bagian belakang terlepas dari kudanya. Bergulung-gulung antara harimau dengan manusia. Akhirnya Kelono Sewandono jatuh terbanting dicengkram oleh harimau. Kemudian dicakar, dicengkeram, dikunyah-kunyah, dibanting-banting seperti kucing makan tikus dibuat permainan oleh Singolodro.

Kelono Wijaya yang menunggu kerajaan, merasa malu karena kakaknya menghinanya, malu mengakui saudaranya karena jelek rupa lalu dia pergi dari kerajaan bertapa di gunung Wilis menggugat para dewa menuntut keadilan minta wajah yang bagus seperti kakaknya. Kemudian permintaan itu diterima, turunlah Dewa dari kayangan memberi topeng mas yaitu topeng manusia yang bagus seperti halnya Kelono Sewandono, satunya berupa pecut atau cambuk yang diberi nama pecut *Samandiman*. Setelah Kelono Wijaya sampai di alun-alun Kediri tahu kakaknya dimakan harimau gembong, lalu didekatinya. Pecut Samandiman diacungkan di atasnya. Tidak tahu asal usulnya darimana, seketika Singolodro kehabisan tenaga, lemah lunglai tanpa daya sambil mengaduh.

Kelono Wijaya menolong kakaknya, dengan mengucap mantra-mantra sambil memegang seluruh tubuhnya, seketika kekuatan Kelono Sewandono kembali seperti sediakala, luka-luka sudah hilang, hanya luka bekas cakaran kuku harimau di mukanya yang tidak bisa pulih. Setelah selesai menolong kakaknya lalu menolong Singolodro. Diraba seluruh tubuhnya seketika itu berubah menjadi manusia tetapi kepalanya masih kepala harimau. Ini untuk mencukupi permintaan Dewi Songgolangit yang ketiga. Dengan kesaktian Kelono Wijaya, hewan-hewan yang tadinya lepas kesana kemari dengan petikan jari tangan saja sudah datang sendiri, setelah berkumpul terus menghadap Raja Kediri. Singolodro yang berubah berkepala harimau berada di belakang jadi genaplah persembahan 3 macam yang menjadi persyaratan Dewi Songgolangit telah dapat dipenuhi.

Kemudian diketahui jika putri Songgolangit hilang tidak diketahui kemana arahnya lalu bersama-sama mencarinya. Sampai disalah satu gunung di sana terdapat gua yang tertutup batu. Penutup gua itu diketuk dengan jari oleh Singolodro. Batu hancur lebur, kelihatan Dewi Songgolangit merebahkan tubuhnya dibatu. Kelono Sewandono senang hatinya, lalu dibujuk di ajak pulang, disanjung akan kecantikannya diajak ke kerajaan Bantarangin. Karena sepatah katapun Dewi Songgolangit tidak menjawab Kelono Sewandono marah,

karena merasa dihina. Diapun berkata: "Orang idiajak bicara sepatah katapun kok tidak menjawab hampa diam seperti batu" terbukti sumpah yang dikatakan Kelono Wijaya, seketika Dewi Songgolangit berubah menjadi batu, berwujud arca seorang wanita.

Kelono Sewandono lalu menyerah, bila seperti itu memang bukan jodohnya, lalu diputuskan untuk pulang. Karena pinangannya gagal, akan lewat jalan semula merasa malu maka mencari jalan lain. Kelono Wijaya ingin Pecut Samandiman pemberian dewa akan dicoba kesaktiannya. Bermula akan lewat jalan bawah tanah mulai dari gua yang kemudian disebut gua Selomangleng di gunung Klotok, tanah dicambuk pecut bisa gusur, bisa berlubang seperti terowongan yang mudah dilewati. Sampai di kerajaan Bantarangin dapat melihat keluar dengan cara membelah sungai. Tempat pemunculannya merupakan gua yang dinamakan gua Bedali dari kata *mbedhah kali* (Jawa). Karena didalam gua itu terdapat sungai yang airnya mengalir. Selanjutnya Raja Bantarangin karena merasa kecewa akan menikah yang gagal, dia tidak akan menikah. Sebagai hiburan yang menjadi gantinya lalu ia memelihara anak laki-laki yang ganteng atau yang biasa disebut dengan *gemblakan*. Raja Bantarangin juga dikenal sebagai raja warok pertama. Warok berasal dari WARA yang memiliki arti pria agung, pria yang diagungkan.

Sesudah peristiwa raja Bantarangin, mempunyai peninggalan berupa sepetrangkat gamelan (musik) terbuat dari bambu. Itu diwariskan kepada rakyat lalu diperagakannya. Mencontoh perjalanan rajanya seperti itu lalu menjadi sebuah kesenian yang dinamakan REYOG. Dimasa pemerintahan Airlangga, wilayah kerajaan wengker tidak pernah terjadi peperangan maupun persengketaan, sebaliknya menjadi daerah yang aman tentram. Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua yaitu Kediri atau Daha dan Jenggala atau Panjalu. Sepeninggal airlangga terjadi perang saudara antara kedua kerajaan tersebut. Situasi yang tidak stabil digunakan Wengker menyusun kekuatan baru sehingga sampai berdirinya Majapahit nama Wengker masih terdengar jelas bahkan hubungan kedua kerajaan terjalin dengan baik.

Dimasa pemerintahan Majapahit, Wengker dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kudamerta atau Wijayarajasa. Dalam kitab Nagarakartagama disebutkan "*Priya haji sang umunggu Wengker bangun hyang Upandra Nurun Narpari Wijayarajasanopamana parama-ajnottama*". Bahwa yang membangun kerajaan Wengker adalah Wijayarajasa sebagai raja pertama. Kemudian dalam kitab ini juga disebutkan Raden Kudamerta menikah dengan Bhre Dhaha. Raden Kudamerta berkedudukan di Wengker dengan nama Bhre Parameswara dari Pamotan yang dikenal dengan nama Sri Wijayarajasa. Yang dimaksud Bhre Dhaha adalah Dewi Maharajasa adik dari Tribhuwana. Berarti Wijayarajasa adalah menantu Raden Wijaya.

Selain menjadi raja Wengker, Wijayarajasa merupakan tokoh yang mempunyai peran besar di Majapahit antara lain salah satu dari 8 tokoh yang

diundang pada waktu pengangkatan mahapatih Gajahmada tahun 1364 M, diangkat menjadi anggota dewan Sapta Prabu, menjadi anggota dewan pertimbangan agung tahun 1351 M, mengambil tindakan tegas terhadap kesalahan yang dilakukan Gajahmada atas peristiwa Bubat dan mendapat penghargaan dari Tribhuwana Tunggaladewi.

Putra Wijayarajasa yang bernama Susumma Dewi atau Paduka Sori menikah dengan Hayam Wuruk pada tahun 1357 M, setelah prabu Hayam Wuruk gagal menikah dengan putri Pajajaran yang meninggal pada peristiwa Bubad. Pernikahan itu merupakan pernikahan keluarga karena ibu Susumma Dewi adalah adik Tribhuwana Tunggaladewi yang merupakan ibu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dan Susumma Dewi merupakan sama-sama cucu Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana.

Dari pernikahan-pernikahan yang melibatkan dua kerajaan yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Wengker. Menurut Dr. N.J. Krom, bahwa untuk pergi ke Bubad disamakan dengan ke Wengker. Seperti kita ketahui bahwa Perang Bubad terjadi sebagai akibat pernikahan politik yaitu salah satu cara Majapahit menaklukkan kerajaan disekitarnya. Walaupun wengker adalah daerah kekuasaan Majapahit tetapi kekuatan Wengker sangat diperhitungkan Majapahit. Kerajaan Wengker jarang diungkap keadaannya karena peran Wijayarajasa lebih banyak di Majapahit dibanding memimpin kerajaannya sendiri. Pusat pemerintahan Wengker ketika dipimpin Wijayarajasa berada di sekitar Kecamatan Sambit Ponorogo. Wijayarajasa meninggal pada tahun 1310 Saka dan dimakamkan di Manar dengan nama Wisnubhawano.

Zaman kepemimpinan Wengker dimasa Majapahit berikutnya adalah Dyah Suryawikrama Girishawardana, ia adalah anak Dyah Kertawijaya. Ia memimpin Wengker sejak ayahnya masih memimpin pemerintahan Majapahit tahun 1447-1451 M. Setelah kekosongan kekuasaan selama tiga tahun ia memimpin Majapahit selama 10 tahun (1456-1466 M). Dalam kitab Pararaton ia bergelar Bhre Hyang Purwawisesa. Ia meninggal tahun 1466 M dan dimakamkan di Puri. Sampai masa ini nama Wengker masih disebut dalam sejarah Majapahit.

Zaman Majapahit terakhir yaitu Brawijaya V sampai runtuhnya kerajaan Majapahit, Wengker masih ada. Tetapi yang berkuasa di kerajaan Wengker sudah tidak ada. Pemerintahannya hanya tinggal daerah Kademangan. Berada di sebelah selatan juga disebut Kademangan Wengker, Demangnya bernama Kethut Suryangalam. Melihat kata Ketut kiranya perubahan dari kata Kettu, nama raja Wengker pertama yaitu Kettu Wijaya. Dapat disimpulkan Ketut Suryangalam masih keturunan Kettu Wijaya.

Demang Suryangalam kondang akan kedigdayaannya, sakti mandraguna, tidak mempan segala senjata. Sampai zaman Wengker berakhirnya, rakyatnya beragama Hindu. Memuja kepada Syiwa, Brahma dan Budha yang arca-arcanya semua ada di Ponorogo.

Diakhir kejayaan Majapahit yang mana wilayah Majapahit terpecah-pecah. Wilayahnya seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Surabaya memerdekakan diri. Kerajaan Majapahit itu terakhirnya kerajaan Hindu di Tanah Jawa. Raja yang terakhir Prabu Brawijaya V juga masih ada Brawijaya VI dan VII tetapi sudah tidak ada kekuasaan sama sekali. Runtuhnya Majapahit pada tahun 1478 oleh Raja Kediri atau Daha yang bernama Ronowijaya Girinda Wardana, lalu dikalahkan oleh Adipati Bintoro Raden Patah. Pusaka kerajaan dan Pendopo kerajaan dipindah ke Demak. Raden Katong putra Brawijaya V ikut diboyong ke Demak. Demak menguasai kota-kota pesisir lain seperti Lasem, Tuban, Gresik dan Sedayu. Raden Patah diakui sebagai pemimpin kota-kota dagang pesisir dengan gelar Sultan.

Raden Patah merupakan putra Prabu Majapahit dengan putri Cina yang pada waktu itu hamil muda kemudian diberikan kepada Arya Damar, setelah lahir diberi nama Raden Patah. Prabu Majapahit yang mempunyai istri putri Cina adalah Brawijaya terakhir. Arya Damar menyatakan kepada permaisurinya bahwa putranya tersebut akan menjadi raja Islam yang pertama di Jawa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa adalah Demak.

Pada saat Raden Patah menginjak kerajaan Hindu Majapahit telah mulai runtuh yang disebabkan perlawanan kaum bangsawan yang telah mendirikan kota di pantai utara dan mendapat dukungan Islam. Kesempatan ini dipergunakan Raden Patah untuk menemui Sunan Ampel atau Raden Rahmad. Raden Patah mengutarakan beberapa hal mengenai Majapahit yang telah lemah. Raden Patah tinggal di rumah Raden Rahmad untuk belajar beberapa hal setelah cukup diberi kedudukan di Bintoro. Bintoro dikembangkan atas dasar Islam. Mendengar hal tersebut raja Majapahit Prabu Brawijaya mengangkat Raden Patah menjadi mangkubumi di Bintoro. Berkat dukungan para wali, Bintoro berkembang menjadi kerajaan Islam pertama dengan nama Demak pada tahun 1403 Saka atau tahun 1481 M, dibawah pimpinan Raden Patah dengan gelar Panembahan Djimbun.

Seiring munculnya Demak Majapahit semakin parah dilanda krisis, Brawijaya telah direbut oleh Girishawardana yang sebenarnya tidak berhak atas tahta Majapahit. Pada waktu raja Brawijaya terakhir, telah memberi kekuasaan kepada Raden Patah yang kelak kemudian berkembang menjadi kerajaan Demak. Hal yang berbeda dialami putra Brawijaya V lain yang bernama Raden Katong yang belum mempunyai wilayah kekuasaan. Hingga terdengar berita bahwa sebelah timur Gunung Lawu ada seorang demang dari Kutu yang tidak mau menghadap ke Majapahit. Maka Raden Katong disuruh menghadapkan demang tersebut ke Majapahit. Kemudian Raden Katong di Demak lalu masuk Islam.

Demang Kutu tersebut adalah Ki Ageng Suryangalam atau terkenal dengan sebutan Kutu. Ia merupakan Punggawa Majapahit yang masih termasuk

kerabat keraton maka oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, ia diberi jabatan Demang. Kademangan Kutu atau Surukubeng wilayahnya adalah bekas kerajaan Wengker yang mana seiring semakin melemahnya Majapahit. Kyai Ageng Kutu meneruskan tata cara dan adat kerajaan Wengker dahulu. Para pembantu dan punggawanya diajarkan beladiri dan berperang serta tapa brata.

Raden Katong datang di Demak. Disertai dengan Seloaji diutus memeriksa bekas kerajaan Wengker yang ada di sebelah timur Gunung Lawu dan disebelah barat Gunung Wilis ke selatan sampai laut selatan. Mereka berangkat berdua, sampai sebelah barat Gunung Wilis bertemu dengan Kyai Ageng Mirah. Kyai Ageng Mirah itu merupakan putra dari Kyai Ageng Gribig seorang ulama dari Malang. Kyai Gribig putra dari Wasi Begono. Wasi Begono putra dari Brawijaya V. Kyai Ageng Mirah niatnya akan menyiarkan agama Islam di Wengker. Tetapi tidak bisa berlangsung karena penduduk Wengker semua beragama Budha. Mereka kemudian sepakat berjuang bersama, Raden Katong atas dasar pemerintahan sedangkan Kyai Ageng Mirah atas dasar penyebaran agama Islam. Mereka selalu koordinasi terhadap apa yang mereka hadapi dalam perjuangan ini. Kyai Ageng Mirah senang mendapat mitra Raden Katong karena masih keturunan Majapahit. Masalah Raden Katong adalah Kyai Ageng Kutu tidak mau menghadap ke Majapahit sedangkan Kyai Ageng Mirah kesulitan dalam menyebarkan agama Islam. Setelah saling berkenalan dan saling mengutarakan apa yang menjadi kepentingannya karena sama-sama tujuannya, mereka bertiga lalu meneruskan perjalanan melakukan pengamatan sampai laut selatan.

Pihak Raden Katong berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak Ki Ageng Kutu, antara lain dilakukan Kyai Ageng Mirah terhadap Kyai Ageng Kutu secara dialogis agar Kyai Ageng Kutu bersedia menghadap ke Majapahit. Tetapi Kyai Ageng Kutu menolak dengan alasan antara lain kerajaan Majapahit yang memberi pintu bagi penyebaran agama Islam padahal wilayah Wengker kebanyakan menganut agama sendiri yaitu Hindu dan Budha. Kyai Ageng Kutu menganggap penyebaran Islam yang dipimpin Raden Patah justru Majapahit mengangkatnya menjadi penguasa Demak Bintoro. Kyai Ageng Mirah menjelaskan bahwa pengangkatan Raden Patah tidak salah karena masih putra Brawijaya V. Tetapi Kyai Ageng Kutu tetap menganggap hal yang dilakukan Majapahit merupakan hal yang menyalahi aturan kerajaan sendiri. Akhirnya upaya dialogis yang dilakukan Kyai Ageng Mirah gagal.

Upaya persuasif dari pihak Raden Katong yang gagal dilaporkan kepada Prabu Brawijaya V, dan langkah yang dilakukan Brawijaya adalah mengirim pasukan Majapahit untuk menumpas Kyai Ageng Kutu. Rombongan pasukan tersebut di pimpin oleh Raden Katong. Pada dasarnya Raden Katong tidak mau bermusuhan dengan pihak Wengker mengingat jasa Kyai Ageng Kutu terhadap Majapahit begitu banyak. Tetapi Seloaji memberi nasihat bahwa apa yang dianggap Kyai Ageng Kutu benar adalah menurut Kyai Ageng Kutu sendiri,

sedangkan pihak kerajaan menganggap hal yang menyalahi peraturan dan Raja pun langsung memerintahkan untuk menumpas, maka ia menasehati Raden Katong untuk tidak ragu-ragu dalam bertindak.

Kemudian terjadilah peperangan antara tentara Majapahit yang dipimpin Raden Katong beserta Kyai Ageng Mirah dan Seloaji serta beberapa tokoh lain. Jalannya peperangan termasuk didalamnya strategi perang yang dilakukan. Maka pada tahun 1468 M, Kutu sebagai ibukota Wengker jatuh ke tangan Raden Katong dan bala tentaranya. Kyai Ageng Kutu bisa dikalahkan tetapi tidak ditemukan jasadnya atau musnah di bukit yang kemudian disebut dengan Gunung Bacin. Kyai Honggolono sebagai tangan kanan Kyai Ageng Kutu Tewas dalam pertempuran ini. Raden Katong sangat terharu melihat kematian Ki Honggolono dan musnahnya Kyai Ageng Kutu mengingat mereka berdua adalah para perwira yang berjasa besar kepada Majapahit terutama ketika merebut kembali Wengker yang sempat dikuasai Kediri. Konsolidasi dalam keluarga Kyai Ageng Kutu juga dilakukan antara lain menikahi dua putri Kyai Ageng Kutu yaitu Niken Sulastri dan Niken Gandini, putra pertama Kyai Ageng Kutu yang bernama Surohandoko menggantikan kedudukan ayahnya di Kademangan Kutu, Suryongalim dijadikan Kepala Desa di Ngampel, Warok Gunoseco menjadi kepala desa di Siman, Waro Tromejo di Gunung Loreng Slahung.

Setelah selesai kemudian kembali ke Demak, Kyai Ageng Mirah ikut sampai Demak. Setelah beberapa bulan di Demak, Raden Katong, Seloaji dan Kyai Ageng Mirah diutus kembali ke Wengker dengan diberi pangkat. Raden Katong diangkat menjadi Adipati bergelar Kanjeng Panembahan Batara Katong. Maka diberi nama Batara, karena Wengker rakyatnya semua beragama Budha.

Dari peristiwa itu dapat kita ketahui mengenai sejarah perjalanannya kerajaan Wengker hingga berdirinya Ponorogo. Kerajaan Wengker yang terkenal selama kurang lebih 500 tahun. Walaupun kerajaan Wengker kerajaan yang kecil tetapi sangat diperhitungkan kekuatannya oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Kahuripan dan Majapahit serta peletak dasar-dasar pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari daerah Ponorogo ini.

Nama Ponorogo bermula dari Pramanaraga kemudian lama kelamaan kata Pramanaraga berubah menjadi Ponorogo. Pono bermakna pandai, mengerti sedangkan Rogo bermakna badan. Ponorogo berdiri pada tahun 1486 M. Dengan Adipati bernama Raden Katong, Patihnya Seloaji dan Penghulu (pemuka) agamanya Kyai Ageng Mirah. Berdirinya Ponorogo ini tidak terlepas dari perjuangan tiga orang yang sangat berjasa yaitu Raden Katong, Seloaji dan Kyai Ageng Mirah. Dari usaha mereka agama Islam tersebar luas di daerah Ponorogo meskipun sebelumnya ada pertentangan-pertentangan dengan adanya Islam. Karena dulunya semua warga di Wengker ini menganut agama Hindu dan Budha. Kemudian Ponorogo menjadi kota yang aman tentram, terbebas dari pencuri dan para brandalan.

7. Legenda Golan Mirah (terjadinya Konflik Sosial Masyarakat)

Cerita rakyat tentang Golan dan Mirah masih terasa kental di masyarakat sampai sekarang, terutama dalam masyarakat sekitar kedua daerah tersebut. Legenda ini terletak di Desa Golan dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo yang keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Sukorejo. Berkisah tentang dua desa yang tidak bisa bersatu karena terbentur adanya kisah leluhur yang entah mitos atau fakta dari zaman dahulu hingga sekarang.

Kisah dimulai antara Ki Ageng Honggolono dan Kyai Ageng Mirah yang hendak mencarikan anaknya pasangan, yakni putra dari Ki Ageng Honggolono bernama Joko Lancur dan putri dari Kyai Ageng Mirah yang bernama Kencono Wungu. Kedua anak saling jatuh cinta sama lain dan berniat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Joko Lancur, putra dari Ki Ageng Honggolono yang terkenal dengan watak yang suka berjudi dan berwatak buruk dan Kencono Wungu, putri dari Kyai Ageng Mirah, sosok yang santun dan taat beragama.

Kyai Ageng Mirah yang tidak suka dengan watak dan sifat Ki Ageng Honggolono tidak rela jika putrinya menikah dengan Joko Lancur, sehingga membuat persyaratan yang sangat sulit supaya pernikahan tersebut tidak terwujud. Kyai Ageng Mirah meminta dua persyaratan. Pertama, Ki Ageng Honggolono harus membuat bendungan yang mengalir di Desa Mirah. Kedua, Ki Ageng Honggolono harus membuat seserahan berupa lumbung berisi padi yang harus berjalan dengan sendirinya menuju tempat pernikahan. Syarat-syarat tersebut sulit dipenuhi Ki Ageng Honggolono karena Kyai Ageng Mirah meminta pertolongan Kluntung Waluh untuk menghambatnya, namun akhirnya diketahui oleh Bajul Kowor, anak buah Ki Ageng Honggolono. Keduanya bertempur dan dimenangkan oleh Bajul Kowor.

Mendekati hari pernikahan, Ki Ageng Honggolono belum sanggup memenuhi persyaratan yang diajukan, akhirnya tidak ada jalan lain selain berbuat curang dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Saat hari pernikahan, Kyai Ageng Mirah mengetahui bahwa Ki Ageng Honggolono berbuat curang. Akhirnya Ki Ageng Honggolono marah karena pernikahan gagal terjadi dan terjadilah pertempuran sengit antar keduanya. Melihat hal tersebut, kedua mempelai, Joko Lancur dan Kencono Wungu bunuh diri. Melihat putranya mati, Ki Ageng Honggolono bersumpah serapah 5 hal yaitu 1). Warga Desa Golan dan Mirah tidak boleh menikah. 2). Segala jenis barang dari Desa Golan tidak boleh dibawa ke Desa Mirah dan sebaliknya. 3). Segala jenis barang dari kedua Desa Golan dan Mirah tidak bisa dijadikan satu. 4). Warga Desa Golan tidak boleh membuat atap rumah berbahan jerami, dan 5). Warga Desa Mirah tidak boleh menanam, membuat hal apapun yang berkaitan dengan bahan kedelai.

Percaya atau tidak, kelima hal tersebut sampai sekarang masih berlaku di sana dan menjadi tata krama yang tidak ada berani melanggarnya. Sudah beberapa contoh yang melanggar hal tersebut secara sengaja ataupun tidak sengaja berujung pada tertimpa masalah. Salah satunya saat ada seorang

warga desa lain yang mengadakan upacara pernikahan dimana peralatan yang dipinjamnya berasal dari Desa Golan dan Mirah hingga akhirnya nasi yang ditanak tidak bisa matang. Contoh lain adalah, seseorang yang mencampur hasil panen padi di sebuah mobil dari kedua desa hingga akhirnya tidak bisa menemukan jalan pulang.

8. Babad Ponorogo (Asal Usul Reyog dan Pemerintah Ponorogo)

Cerita tentang babad Ponorogo mengisahkan tentang asal usul Reyog dan pemerintahan Ponorogo. Menurut buku "Babad Ponorogo" yang disusun oleh Purwowidjoyo pada tahun 1997, setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker, lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan sekarang). Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan, yang datang silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman. Sekitar 1482 konsolidasi wilayah mulai dilakukan.

Tahun 1482 – 1486 M, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi, pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis mendirikan kadipaten didukung semua pihak, Bathoro Katong (Raden Katong) dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad XV, dan ia menjadi adipati yang pertama.

Mengutip dari buku Babad Ponorogo karya Poerwowidjojo tersebut, diceritakan bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah, Selo Aji dan Joyodipo pada hari Jum'at saat bulan purnama, bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk (wilayah katongan sekarang). Didalam musyawarah tersebut di sepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan "Pramana Raga" yang akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo.

Pramana Raga terdiri dari dua kata: Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, permono, wadi sedangkan Raga berarti badan, jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa dibalik badan, wadak manusia tersimpan suatu rahasia hidup(wadi) berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwamah, shufiah dan muthmainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada.

Pada suatu hari, yang kebetulan pada saat malam jumat bulan purnama, Raden Katong, Seloaji, Kyai Ageng Mirah dan Jayadipo duduk bersama di oro-oro (tanah gersang dan luas) untuk mengadakan musyawarah. Kemudian Raden Katong memulai pembicaraan, "Bapa Mirah, saya minta Bapa memikirkan pusat kota yang akan kita bangun ini, dimana dan bagaimanakah

sebaiknya sebaiknya tempat untuk pendirian pusat kota itu diletakkan?”. Kemudian Kyai Mirah menjawab, “Begini Raden, kalau untuk pusat kota sebaiknya kita pilih yang berbentuk Bathok Mengkureb (tempurung tengkurap). Itulah tanah dan tempat yang sebaik-baiknya untuk dihuni”. Kemudian Jayadipo yang lebih mengenal daerah itu menyambung, “Raden, kalau berkenan dan sudi mendengar pendapat saya, untuk pusat kota Raden saya silahkan memilih ditengah-tengah tanah yang luas itu. Marilah sekarang saja kita semua kesana! Saya persilahkan Raden dan semua untuk melihat.

Empat orang tersebut terheran-heran, semua melihat dengan sungguh-sungguh arah yang ditunjuk Jayadipo. Seloaji dan Kyai Ageng Mirah tidak melihat sesuatu apapun yang ada disana, akan tetapi Raden Katong melihat ada sesuatu di tengah-tengah padang rumput yang luas. Raden Katong melihat benda berbeda berjumlah tiga buah. Raden Katong bertanya kepada Jayadipo, “Kakang Jayadipo, saya melihat ada tombak, payung yang sedang terbuka dan satunya lagi saya kurang begitu jelas. Benda apakah itu kakang? Apakah maksud kakang menunjukkan benda ini kepada kami?”. Raden diminta untuk menyembah tiga kali. Setelah menyembah tiga kali barulah Seloaji dan Kyai Ageng Mirah dapat menyaksikan keberadaan tiga benda tersebut. Jayadipo mengatakan bahwa dia dan kakaknya bernama Jayadrono adalah abdi ari ayahanda yaitu Prabu Brawijaya V. Adapun pusaka itu ada disini karena kamilah yang membawanya. Dahulu ayahanda bersabda, jika kelak ada orang yang dapat melihat pusaka ini, itulah tanda kesetiaan Sang Prabu kepada orang itu maka berikanlah pusaka itu, selain itu Sang Prabu juga bersabda bahwa dahulu Katong memang diharapkan untuk menjadi raja menggantikan Sang Prabu. Itulah titah dari Ayahanda dan sekarang radenlah yang mewarisinya. Payung ini bernama Payung Tunggul Wulung, adapun tombak ini bernama Tombak Tunggul Naga dan satunya berupa sabuk yang bernama Sabuk Cinde Puspito.

Raden Katong menyembah tiga kali lalu mengambil payung Tunggul Wulung, Seloaji mengambil tombak Tunggul Naga, sedangkan Kyai Ageng Mirah mengambil sabuk (ikat pinggang) Cinde Puspita. Setelah ketiga barang itu diambil, terdengar suara gemuruh tiga kali. Bersamaan dengan itu, tanah berhamburan ke atas dan jatuh ke kanan kiri. Tanah yang berjatuhan tadi akhirnya menjadi gundukan tanah sebanyak lima puluh buah. Adapun tempat suara gemuruh terjadi, muncullah gua dengan lobang menganga. Kelak setelah empat puluh hari gua tersebut tertutup kembali seperti semula. Oleh Jayadipo gua tadi diberi nama Gua Sigala-gala. Adapun gundukan tanah tadi diberi nama Gunung Lima dan Gunung Sepikul dari situlah asal muasal Ponorogo.

Tiga orang disertai empat puluh santri yang sudah bisa membaca Qur'an dan mengerti maknanya. Diperintah babat di hutan Wengker membangun desa sampai menjadi kota. Semua kebutuhan dicukupi, berupa alat pembabat hutan, peralatan pertanian dan perkakas rumah tangga. Hanya waktu itu keluarga, anak dan istri tidak boleh ikut. Sampai di sebelah barat Gunung

Wilis, sebelah timur Gunung Lawu disana mereka istirahat. Ketepatan ditempat yang banyak *glagahnya* dan tanahnya berbau wangi, disitulah mulai dibabat. *Babatan* baru itu tadi dinamakan "*Glagahwangi*". Orang yang berjumlah 40 dibagi menjadi empat kelompok yaitu utara 10, timur 10, selatan 10 dan barat 10 orang kemudian Raden Katong, Seloaji dan Kyai Ageng Mirah ditengah sebagai pengawas dan komando.

Musyawarah berlanjut untuk memberikan nama kota yang akan didirikan tersebut. setelah mufakat dan kemauan terikat mereka memutuskan kota bernama Pramanaraga. Pramana artinya perana yaitu menyatunya sumber cahaya dari matahari, bulan dan bumi yang berpengaruh menyinari kehidupan manusia yang digelar di alam raya. Ketiga unsur tersebut dinamakan Trimurti, bertempat dan menyatu dengan badan manusia menjadi mani. Mani laki-laki yang bercampur perempuan mendapat sabda dari kehendak Yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia. Jadi Pramana dan raga diumpamakan seperti madu dan manisnya, atau bunga dan sarinya, umpama api dan nyalanya. Sedangkan pana berarti mengerti akan segala situasi, mengerti dengan pemahaman yang sesungguhnya.

Setelah dapat tertata, lalu membuat kota dan berdasar putusan musyawarah nama Kadipaten Barunya "Ponorogo". Dari kata Sankrit (sansekerta) Pramana Raga, disingkat menjadi Ponorogo. Pono artinya sudah mengerti semuanya, lahir dan batin sedangkan Rogo itu badan maknanya sudah mengerti pada raganya, bisa menempatkan diri artinya tepo seliro. Jadi Ponorogo berarti manusia yang telah mengetahui, mengerti kepada dirinya sendiri yaitu manusia yang sudah mengetahui unggah-ungguh (sopan santun) atau manusia yang sudah mengerti tentang tata krama.

Kemudian esok harinya, sewaktu fajar menyingsing, terdengar suara riuh rendah bunyi-bunyian, kentongan, bende, lesung, dan alat bunyi yang lain dipukul bersamaan sebagai pertanda lahirnya kota baru Pramanaraga. Pada hari Minggu Pon, bulan Besar tahun 1486 M diresmikan sebagai berdirinya kota Ponorogo, menjadi daerah Kabupaten. Adipatinya disebut Kanjeng Panembahan Batara Katong, Patihnya Seloaji, dan Penghulu agamanya Kyai Ageng Mirah. Kemudian berkeliling kota hingga pelosok desa. Disetiap tempat dipasang pengumuman tentang pendirian kota baru itu. Mulailah Pramanaraga dikenal masyarakat sebagai kota kadipaten yang baru. Sekarang kota Pramanaraga terkenal dengan sebutan Ponorogo.

Berdirinya kota ini diperingati atau ditulis pada batu menggunakan *Candra Sengkolo Memet*. *Candra Sengkolo Memet* itu berupa gambar atau bangunan berupa gambar 4 jumlahnya, yaitu urut dari arah ke kanan, 1. Gambar orang semedi (bertapa), 2. Gambar pohon beringin, 3. Gambar garuda terbang, 4. Gambar Gajah. Pencipta memberi arti orang 1, beringin (kayu) 4, burung terbang 0, gajah 8 jadi dapat dibaca 1408 dalam hitungan Saka.

Kemudian jangka sepuluh tahun, membuat prasasti lagi di batu. Tertulis aksara Jawa, angka aksara Jawa 1418 tahun Saka atau 1496 M itu merupakan peringatan mulai patihnya Demang Suryongalam. Ponorogo sudah tidak ada keributan lagi. Para Warokan dan Warok yang semula suka mengganggu kepada para santri sudah tidak mengganggu lagi. Para pemimpin desa, tetua para warok bersama-sama pergi ke Kadipaten untuk menyerahkan diri dan minta tuntunan hidup bermasyarakat.

Para pamong praja, mulai demang, palang mantri, para bupati, prajurit dipenuhi. Pejabat lainnya dicukupi lebih-lebih permasalahan pertanian. Raden Katong sendiri selalu memberi contoh, mempunyai kebun merica di desa Mrican dan desa Sahang Ngebel (sahang=merica). Juga beternak hewan seperti sapi, kerbau dan kuda. Selama 10 tahun kota Ponorogo menjadi aman tentram, tidak ada curi-mencuri, perampokan atau brandal.

Sebelum itu situasi kota tidak aman tenteram, lebih-lebih usaha perkembangannya agama Islam selalu mendapat rintangan. Nama santri itu dimana saja terlihat berbeda, sebab busananya serba putih, sarung putih, baju takwa model cina juga putih. Padahal pakaian penduduk aslinya serba hitam. Jadi kelihatan mencolok bedanya. Jika ada santri lewat jalan melewati rumah penduduk asli, untung-untungnya hanya dijuluki, ujanya : *Santri Buki (santri Busuk*". Celakanya lagi kadang-kadang diejek agar marah. Jika marah lalu diajak gulat, bila sial ada juga yang meludahi. Berdasar kenyataan seperti itu Raden Katong dan Kyai Mirah lalu mengatur atau menyiasati santri, bila keluar dari rumah akan mengajar mengaji, tidak boleh sendirian, harus ada temannya paling tidak 3 – 5 orang.

Sedangkan cerita tentang asal usul kesenian Reyog Ponorogo, sebagaimana seni pertunjukan yang lain juga mengalami dinamika seiring dengan konteks ruang dan waktu yang melingkupinya. Sebagai seni adiluhung kota Ponorogo, kesenian ini memiliki basis yang kuat dengan sejarah eksistensi masyarakat ponorogo itu sendiri. Menurut berbagai sumber, seni Reyog Ponorogo pada awalnya, bukanlah berbentuk seni pertunjukan sebagaimana yang kita lihat saat ini, melainkan hanyalah sebuah tradisi yang tercipta berkat pembacaan kreatif mereka terhadap alam semesta. Salah satu tradisi kreatif itu, sebagaimana ditulis Ridho Kurnianto, sebagai simbol tolak bala (menolak bahaya).

Berawal dari aksi ini, kemudian berkembang menjadi kreasi seni budaya berikut pernik-perniknya yang begitu dinamis hingga saat ini. Seni Reyog Ponorogo merupakan seni rakyat (seni populer). Karena disinyalir lahir dan berkembang di tengah masyarakat Ponorogo. Kurnianto menulis, bahwa sejarah lahirnya seni Reyog Ponorogo belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Ia menuliskan beberapa aksi yang menjadi latar sejarah lahirnya seni ini; yakni respon alami dari masyarakat Ponorogo yang animistis dan dinamistis dalam menghadapi kehidupan (sebagai sejarah awal), tradisi upacara adat, sindiran

politik, tanda masuknya Islam di Ponorogo, lukisan ide seniman yang melahirkan dua legenda, yakni; legenda Suryongalam dan Bantarangin.

Berdasarkan beberapa versi sejarah Reyog Ponorogo sebagaimana dipaparkan di atas, sekalipun terkesan beda perspektif, tetapi apabila dicermati lebih jauh, ditemukan titik temu yang sama. Reyog Ponorogo dengan instrumen utama kepala Harimau dan burung Merak menggambarkan kondisi jaman saat awal seni Reyog ini lahir, yakni pemilihan binatang harimau dan burung merak yang dianggap sebagai binatang "mistik", sebagai tanda bahwa ia lahir dari masyarakat yang masih memeluk keyakinan animisme-dinamisme.

Pengemasan seni Reyog dengan perpaduan kepala harimau dan burung merak juga sangat dimungkinkan hasil dari kreasi seorang seniman budaya di jamannya, dimana ide itu muncul berakar dari konteks masyarakat yang mengitarinya saat itu, sekaligus untuk memberikan tanda dan meneguhkan jati diri sebagai bangsa. Dalam konteks ini, seni Reyog Ponorogo sangat dimungkinkan lahir dari imaginasi masyarakatnya untuk meneguhkan jati diri sebagai seorang atau kelompok masyarakat pelaku peradaban yang dilukiskan dalam budaya fisik, seperti yang ditulis Davidson, bahwa produk atau hasil budaya fisik dan tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa akan menghasilkan warisan budaya yang merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu.

Seni Reyog juga sangat dimungkinkan berlatar kepentingan politis. Ini ditunjukkan dengan adanya fakta sejarah tentang sindiran Ki Ageng Kutu (Suryongalam) terhadap kebijakan Prabu Brawijaya V yang kemudian diilustrasikan seperti seekor macan yang ditunggangi burung merak (bernyali kecil, takut kepada isteri, atau bahkan menyerupai "banci"). Kehadiran tiga versi legenda (Bantarangin, Suryongalam, dan Batharakatong) sekaligus menandai hadirnya relasi kuasa (*power relation*) yang disebut Foucault sebagai praktik wacana atau *discursive formation*. Hal ini ditandai dengan cerita-cerita yang pada awalnya berkembang dalam ranah tradisi tutur/lisan yang sangat sulit diidentifikasi secara tepat perkembangan kronologis wacana tersebut.

Secara alami, kesenian Reyog Ponorogo sebagaimana kesenian yang lain, tidak bisa mengelak dari konteks jaman yang mengiringi. Konteks ruang dan waktu ini, tidak jarang "memaksa" kesenian adiluhung ini untuk mengikutinya. Bahkan dalam konteks tertentu "harus" berbaur di dalam perubahan atau penyesuaian jaman tersebut, agar tetap eksis dan tetap hidup dalam mengemban fungsi dan perannya di tengah masyarakat. Dalam konteks ruang dan waktu yang terus berubah, Reyog Ponorogo sudah barang tentu dituntut tetap "ada" dengan jati diri esensial yang dimilikinya. Hal ini berarti, satu sisi harus mempertahankan watak karakternya sebagai seni rakyat dengan bangunan jiwanya yang berakar pada adat tradisi masyarakatnya (tradisional,

mengalir alami (apa adanya) dan tanpa beban). Sementara pada sisi yang lain harus keluar dari "zona" tradisionalnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang melingkupi. Karena itu, nilai karakter dasar haruslah terus dipedomani dalam penyesuaian ruang dan waktu itu, sehingga perubahan atau penyesuaian apapun terkait dengan pernik-pernik seni Reyog Ponorogo tidak akan pernah menggeser karakter dasar dengan segudang nilai luhur tersebut.

9. Baro Klinting di Kecamatan Ngebel

Cerita Baro Klinting adalah sebuah cerita rakyat tentang terjadinya telaga di Kecamatan Ngebel yang di sebabkan karena rendahnya empaty dan perhatian masyarakat kepada orang lain, sehingga merasa terdzolimi dan menyebabkan kemarahan hingga menyebabkan bencana tenggelamnya beberapa kampung, hingga akhirnya menjadi telaga hingga sekarang.

10. Sendang Bulus di Kecamatan Bungkal

Sendang bulus merupakan salah satu obyek wisata yang terletak di Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dahulu kerap dibanjiri para pelancong, terutama saat pagi hari. Namun, kini, tempat wisata ini seolah sudah tidak dilirik oleh wisatawan. Sendang berarti kolam, sedangkan bulus merupakan nama lain dari kura-kura. Di area ini tersebut, dahulu banyak ditemui bulus, tapi sekarang tidak lagi. Kurang tersedianya pakan, banyaknya pencurian bulus, dan kura-kura yang kabur dari dalam kolam, membuat Sendang Bulus kini seakan tak memiliki lagi hewan amfibi tersebut. Di kolam seluas 200 meter persegi ini, tidak ada bulus yang menampakkan diri.

Ingin berwisata alam murah meriah di Ponorogo, Sendang Bulus jawabannya. Sendang yang berarti kolam dan bulus berarti kura-kura, memang hanya ada satu-satunya di bumi reog. Dulunya kawasan ini tempat wisata yang menarik. Tapi saat ini hanya ada pemancing yang setiap saat duduk di pinggir sendang. Menurut Sugito sekretaris Desa Pager, saat ini di dalam sendang hanya ada beberapa bulus, namun sayang tidak mau menampakkan diri meski sudah diberi pakan oleh warga. "Mungkin karena takut diambil orang, akhirnya bersembunyi di dalam air," tuturnya. Pernah ada warga yang memberikan pakan berupa ayam satu ekor yang telah dipotong-potong hanya beberapa bulus terlihat menghampiri dan makan, kemudian langsung berenang ke dasar kolam.

Punahnya populasi bulus, lanjutnya, selain karena kurang tersedianya pakan, juga karena perburuan liar. Bulus di sini juga sering kabur ke aliran sungai. Beberapa warga yang menemukan bulus di sungai sudah berusaha mengembalikan bulus ke sendang. Tapi karena jarang mendapatkan makanan lagi, bulusnya kabur lagi.

11. Beji Sirah Keteng di Kecamatan Sambit

Cerita tentang Beji Sirah Keteng merupakan situs peninggalan Ki Ageng Kutu yang berada di Desa Bedingin Sambit Ponorogo sebagai salah satu bukti perjuangannya. Bedingin merupakan sebuah desa yang ada di wilayah selatan kota. Bedingin masuk pada wilayah Kecamatan Sambit. Desa Bedingin yang memiliki 2 Dukuh, yakni, Dukuh Krajan dan Dukuh Karang Rejo yang terbagi lagi menjadi 17 Rukun Tetangga dengan luas wilayah 200, 092 HA. Desa yang berbatasan dengan Kec. Bungkal ini ternyata menyimpan situs yang memiliki nilai sejarah. Situs tersebut adalah sebuah Patung yang berupa gambar kepala, yang sekitarnya ada batu batu persegi panjang. Menurut Marjuki, Kepala Desa Bedingin, patung tersebut telah ada di situ sejak ia masih kecil. Patung yang terletak di samping pemancingan Beji Sirah Keteng tersebut, menurutnya merupakan sebuah peninggalan jaman Hindu. "Kalau menurut masyarakat ini, Patung tersebut adalah petilasan Mataram Hindu. Yakni penghambaran kepala Prabu Boko", tuturnya. Bahkan, nama sirah keteng itu juga di ambil dari keberadaan Patung tersebut. Sirah Keteng, Legenda dan Mitos. Masyarakat Desa Bedingin, dengan mata pencaharian bertani, memiliki legenda yang beredar terkait Beji dan Situs sirah keteng tersebut. Kalau menurut masyarakat, ada 3 versi legenda yang beredar terkait situs tersebut. Dan masing masing versi hampir mirip," ungkap Marjuki. Marjuki mencontohkan, Versi Ki Hajar Wilis yang melawan Prabu Boko dari Mataram hampir mirip dengan cerita Raden Katong dan Surya Alam, tandasnya menjelaskan.

Sedang legenda yang beredar pada masyarakat, menurut masyarakat tersebut, hanyalah legenda yang dituturkan secara lisan. Hingga saat ini belum ada buku yang di cetak secara resmi dari pihak desa khusus untuk pengunjung Beji Sirah Keteng. Melihat bentuk patung dan batu yang ada pada Sirah Keteng, masyarakat Desa Bedingin beranggapan, patung tersebut ada sebelum Islam berkembang di Ponorogo. Dalam Legenda tersebut dituturkan, Prabu Boko adalah seorang Prabu yang berkuasa di Mataram kuno. Dia adalah pemuja bangsa lembut, yang berkuasa di hutan Ketangga, namanya Mamang Sari. Mamang Sari ini adalah penguasa alam jin dan meminta wadal atau tumbal para gadis. Dia merupakan istri Prabu Boko. Karena ia menjadi suami Mamang Sari, maka Prabu Boko, menjadi lebih sakti dan merasuk pada dunia halus.

Guna mencari tumbal untuk Mamang Sari, Prabu Boko mencari gadis gadis dari Kerajaan Jenggala. Melihat kelakuan Prabu Boko, maka Raja Jenggala, mengutus Ki Hajar Bambang Prono dari Gunung Wilis yang kemudian di kenal dengan Hajar Wilis. Hajar Wilis kemudian turun tangan untuk membatalkan niat jahat Prabu Boko. Kemudian terjadi perkelahian, hingga beberapa hari. Dalam perkelahian tersebut, Prabu Boko kecondhang dan melarikan diri yang kemudian di kejar oleh Hajar Wilis. Dalam kisah kejar-kejaran inilah menurut Marjuki versi Bathara Katong dan Surya Ngalam mirip dengan cerita ini.

Terjadinya Desa Pager misalnya, tidak lepas dari cerita Sirah Keteng ini . Di desa tersebut Prabu Boko meloncat pagar, begitu juga cerita tentang Desa Wringin Anom, saat itu Prabu Boko berada di Ringin Surup sampai senja, maka disebut dengan Wringin Anom yang artinya beringin muda. Gadis-gadis yang di bawa oleh Prabu Baka untuk dijadikan tumbal ini, kemudian melawan Prabu Boko dan lari melepaskan diri. Perlawanan tersebut terjadi di daerah Nglewan. Prabu Boko kalah dan dipenggal kepalanya oleh Hajar Wilis. Kemudian Hajar Wilis memisahkan antara kepala dan badan. Badan atau gembung Prabu Boko ditanam di sawah mbak endul yang tidak jauh dari Beji, sedangkan kepalanya ditanam di Gunung Sampung. Menurut ceritan sebenarnya Hajar Wilis menyuruh Nggotho abdinya, untuk menanam kepala Prabu Boko di Gunung Lawu, tetapi karena ia tertidur hingga pagi maka kepala Prabu Boko ditanam di Gunung Sampung. Marjuki menjelaskan, sampai sekarang banyak pengunjung dari luar daerah, sampai luar Kabupaten banyak yang datang berdo'a di lokasi patung tersebut. Kebanyakan yang datang adalah mereka yang ingin naik derajatnya. Ada yang minta agar pangkatnya naik atau terpilih menjadi Dewan atau Bupati. Marjuki juga menandakan, bahwa cara berdo'a sesuai dengan keyakinan yang ia anut. Sampai saat ini tidak ada ketentuan cara berdo'a di lokasi situs Sirah Keteng.

12. Petilasan Sunan Kumbul di Kecamatan Sawoo

Cerita tentang petilasan Sunan Kumbul Tempat merupakan tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat dan merupakan asal usul terjadinya Desa Sawoo. Petilasan Sunan Kumbul adalah sebuah tempat di mana Sunan Paku Buwono II disuruh kakaknya Pangeran Kalipo Kusumo berhenti dan bertapa di bawah pohon Sawoo untuk menyelesaikan masalah keadaan yang menimpa Kraton Kartosuro. Untuk lebih jelasnya

Sehingga sampai sekarang dikeramatkan oleh masyarakat desa Sawoo dan sekitarnya. Tiap-tiap hari tertentu, terutama malam Jum'at banyak orang yang berjariah di tempat itu. Para pejariah itu bukan hanya orang dari desa Sawoo saja, tetapi juga dari daerah lain. Para pendatang itu pada umumnya mempunyai maksud tertentu, misalnya ingin agar usahanya maju, ingin agar naik kelas, agar sembuh dari penyakitnya, agar mendapat kedudukan di dalam tempat kerjanya dan lain sebagainya.

13. Goa Maria di Kecamatan Sooko

Goa Maria merupakan tempat yang dianggap keramat oleh umat kristiani sebagai tempat pembaptisan yang terletak di Desa Klepu Kecamatan Sooko. Goa Maria Fatima Sendang Waluya Jatiningasih adalah tempat peribadatan umat Katolik yang berada di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh peziarah dari Ponorogo dan luar Ponorogo bahkan dari luar Jawa Timur. Letaknya yang berada dilereng

pegunungan dan dibawah hutan pinus membuat tempat ini sangat nyaman untuk dikunjungi. Sehingga peziarah yang datang ketempat ini merasa betah karena kesejukannya. Di tempat ini juga terdapat sendang (sumber mata air) yang bernama Sendang Waluya Jatiningasih. Berikut ini sejarah singkat Gua Goa Maria Fatima Sendang Waluya Jatiningasih. Kisah Gua Maria Fatima di Klepu berawal dari adanya sebuah sumber mata air (belik – bahasa Jawa) yang dibuat oleh keluarga Bapak Tamiran yang tinggal di lingkungan Pondok, Stasi Klepu. Umat di desa Klepu yang mayoritas beragama Katolik dan saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Bapak Albertus Agung. Mereka memiliki kebiasaan untuk berdoa bersama dari rumah ke rumah secara bergantian. Ketika doa bersama sampai di rumah Bapak Tamiran, orang yang hendak ke rumah Pak Tamiran dan melewati belik tadi pasti berhenti sejenak dan menoleh ke belik tadi. Apa sebabnya? Karena oleh penduduk setempat, konon tempat ini dianggap sebagai tempat yang angker, yang sakral. Ketika hal ini diketahui oleh Mbah Selan, seorang tokoh di lingkungan Pondok, maka dia mengambil prakarsa mengajak teman-teman yang sudah tua atau uzur usianya untuk berdoa atau tirakatan setiap malam Jumat pukul 24.00 di belik tadi. Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga lainnya.

Pada waktu itu ada kebiasaan di kalangan umat Katolik Stasi Klepu bahwa setiap bulan Mei mereka mengirimkan wakil untuk berziarah ke Sendangsono. Hal ini kemudian menimbulkan gagasan pada tokoh umat serta umat yang berdiam di sekitar belik tadi untuk mengubah tempat tadi menjadi tempat ziarah dan tempat berdoa seperti Sendangsono di Jawa tengah. Akhirnya disepakati untuk mengusulkan kepada Romo Paroki untuk mengubah belik tadi menjadi sendang dan menempatkan patung Bunda Maria di tempat itu.

Rm. A. Haryopranoto, Pr, pastor paroki St. Maria, Ponorogo saat itu menyetujui gagasan tersebut. Kebetulan pada tahun 1986 Keuskupan Surabaya sedang mencari lokasi tempat ziarah sebagaimana di Sendangsono. Maka kemudian tanah di mana terletak belik tadi dibeli oleh Paroki dan dijadikan tempat ziarah untuk menghormati Bunda Maria dan diresmikan oleh Mgr. A.J. Dibyakaryana, Uskup Surabaya saat itu, dengan nama "Sandang Waluyajatiningsih", pada tanggal 27 Mei 1988.

Selain plaza atau lapangan tempat berdoa bagi umat kemudian juga dibangun jalan salib melingkari jalan yang menuju ke tempat ziarah tersebut, tempat-tempat di mana terletak jalan salib masih di atas tanah milik umat yang dengan sukarela mengijinkan tanah mereka untuk dikurangi sebagai jalan untuk para peziarah dan ditempati jalan salib masih ditempati jalan salib.

Pada awal tahun 2000, tepatnya tanggal 25 Desember 1999, tempat ziarah Sendang Waluya jatiningasih termasuk Gereja Sakramen Mahakudus, Klepu, merupakan salah satu tempat bagi umat di Keuskupan Surabaya untuk mendapatkan anugerah indulgensi selama Yubileum tahun 2000. Tanggal 31

Desember 1999 diadakan misa pembukaan Yubileum tahun 2000 oleh Uskup Surabaya, Mgr. J. Hadiwikarta, bersama Romo-Romo dari Kevikepan Regio III. Dengan dinyatakannya sebagai tempat untuk mendapatkan indulgensi, maka jumlah peziarah dari berbagai tempat meningkat, baik di Keuskupan Surabaya maupun dari Keuskupan Malang dan Semarang bahkan juga dari Jakarta.

Akses untuk menuju ke tempat ini sudah lumayan bagus namun ada jalan dekat lokasi yang belum diaspal sehingga menyebabkan sedikit kendala. Dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo dapat ditempuh dengan menempuh rute Ponorogo-Pulung-Sooko. Sesampainya di Sooko ada petunjuk (rambu) yang menunjukkan tempat tersebut. Di sepanjang perjalanan menuju tempat ini tersaji pemandangan hijau yang membentang luas berupa hutan dan sawah. Dibandingkan dengan tempat ziarah Gua Maria Lourdes Puh Sarang, alam di Klepu, sangat mendukung, sangat indah, di latar belakang oleh hutan pinus, air sendang yang asli. Kendaraan besar seperti bis tidak bisa menjangkau tempat ini. Tempatnya masih sepi belum banyak pedagang dan kios-kios seperti di Puh Sarang. Parasana yang ada tidak selengkap di Puh Sarang, namun tempat itu punya daya tarik tersendiri dan cocok untuk mereka yang ingin bersusah payah dan mengalami kesulitan kalau berziarah. Kalau dilihat dalam peta, sebagaimana Gua Lourdes Puh Sarang di Prancis dan Gua Maria Fatima di Portugal letaknya tidak terlalu jauh. Dan sebenarnya tempat ziarah Puh Sarang dan Klepu juga tidak terlalu jauh, keduanya masih berada di seputar Gunung Wilis.

14. Tanah Goyang di Kecamatan Pudak

Di Kecamatan Pudak terdapat tanah yang jika di injak akan ambles ke dalam, sehingga masyarakat setempat menyebut sebagai tanah goyang. Kejadian alamiah ini menarik untuk dijadikan destinasi wisata yang menantang dan murah sekaligus menyenangkan dan dapat menghibur masyarakat. Jika wisata alam ini dikelola dengan baik buka tidak mungkin akan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang tidak sedikit.

15. Situs Makam Tumenggung Jayengrono di Kecamatan Pulung

Cerita tentang situs Tumenggung Jayengrono ini merupakan cerita rakyat tentang putra laki-laki dari RM Sasangka atau Adipati Haryo Matahun Suryonegoro Jipang Bojonegoro dari keturunan Ibu Bathara Katong, beliau merupakan salah satu murid Ki Ageng Ronggojoyo yang sakti dan dimintai bantuan oleh Raja Kartosuro yang kuwalahan melawan Cina.

16. Goa Kusumo di Kecamatan Mlarak

Gua Kusuma adalah gua peninggalan sejarah yang sangat eksotik yang terletak di Desa Suren Kecamatan Mlarak Ponorogo. Gua ini berada di lereng tebing setinggi \pm 10 meter dari permukaan tanah, ini menjadikan gua tersebut

sering dikunjungi oleh warga setempat karena memiliki wisata alam yang sangat indah. Gua Kusumo adalah salah satu asset desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata yang menyenangkan.

17. Makam Kyai Ageng Hasan Besari dan Masjid Tegalsari

Makam tersebut terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Ponorogo. Kyai Ageng Hasan Besari salah satu tokoh dalam babad Islam di Ponorogo dan sekarang menjadi salah satu tempat wisata religi. Memasuki makam Kyai Ageng Hasan Besari yang terdapat di dalam kawasan Masjid Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Di dalam kawasan masjid tersebut terdapat dua makam. Pada batu nisannya menempel dua buah papan bertuliskan Jawa Kuno. Kata juru kunci, makam yang satu adalah Nyai Hasan Besari, satunya isterinya. Pada dinding-dinding makam terbentang kain kafan yang mengelilinginya.

Setiap malam-malam tertentu makam tersebut sering didatangi keturunan Kyai Hasan Besari guna melakukan doa bersama. Tidak jauh dari makam terdapat sebuah masjid, yang konon masjid tersebut pernah digunakan Kyai Ageng menyebarkan ilmunya. Peninggalan Kyai Ageng yang masih terlihat adalah Pondok Tegalsari. Dalam sejarahnya, Pesantren Tegalsari pernah mengalami zaman keemasan berkat kealiman, kharisma, dan kepiawaian para kyai yang mengasuhnya. Ribuan santri datang menuntut ilmu di pondok ini. Mereka berasal dari hampir seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Karena besarnya jumlah santri, seluruh desa menjadi pondok, bahkan pondokan para santri juga didirikan di desa-desa sekitar, misalnya Desa Jabung (Nglawu), Desa Bantengan, dan lain-lain. Jumlah santri yang begitu besar dan berasal dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang itu menunjukkan kebesaran lembaga pendidikan ini.

Dari tangan Kyai Ageng Hasan Besari telah lahir orang-orang besar, seperti Pakubuwono II atau Sunan Kumbul, Raden Ngabehi Ronggowarsito dan tokoh pergerakan nasional H.O.S Cokroaminoto. Setelah Kyai Ageng Hasan Besari wafat, beliau digantikan oleh putra ketujuh yaitu Kyai Hasan Yahya. Namun pada pertengahan abad ke-19 atau pada generasi keempat keluarga Kyai Besari, Pesantren Tegalsari mulai surut. Jumlah santrinya kian menyusut. Walaupun demikian, banyak para santri dan anak cucunya yang mengembangkan agama Islam dengan mendirikan Pondok Pesantren di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Salah satu yang terbesar adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di wilayah kecamatan Mlarak. Pondok ini didirikan oleh tiga orang cucu Kyai Ageng Hasan Besari.

18. Petilasan Mbok Rondo Dadapan di Kecamatan Balong

Cerita rakyat tentang petilasan Mbok Rondo Dadapan (Sumur Blumbun), diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Daha Kediri, cerita ini terkait dengan

cerita tentang Dewi Sekartaji dan Ande-Ande Lumut yang sudah terkenal di masyarakat.

19. Makam Astana Srandil di Kecamatan Jambon

Makam Asta Srandil tercatat dalam sejarah sebagai makam Pejuang Islam dan makam pemimpin wilayah Ponorogo pada masa penjajahan melawan Belanda, yaitu Raden Merto Kusumo yang berjuang bersama Pangeran Diponegoro dengan arsitektur makam bergaya Hindu Jawa. Selain itu, di dalam astana tersebut juga terdapat dua makam Bupati Sumoroto yang bernama R. Mas Broto Dirjo dan Raden mas Adipati Brotodiningrat. Astana ini berupa Punden Berundak yang di bangun pada Tahun 1830. Selain sebagai tempat wisata religi di Ponorogo, tempat ini juga dikenal menjadi tujuan spiritual tokoh-tokoh kebangsaan di Ponorogo.

20. Goa Lowo dan Watu Dukun di Kecamatan Sampung

Goa Lowo merupakan bukti rumah manusia purba di Kabupaten Ponorogo yang terletak di Desa Sampung. Selain itu di Kecamatan Sampung juga terdapat Watu Dukun yang terletak di kaki gunung suci Desa Pager Ukir Sampung Ponorogo. Batu besar tersebut telah berusia lebih dari 1000 tahun, dan diyakini sebagai situs yang bernilai sejarah sebagai tempat penggemblengan Airlangga oleh empu Brada.

21. Sukosewu dan Klampis Ireng di Kecamatan Sukorejo

Sukosewu merupakan tempat peristirahatan perjuangan pasukan Diponegoro melawan Belanda, ketika di kejar oleh pasukan Belanda, pasukan berkuda Diponegoro beristirahat di daerah yang sekarang di kenal dengan nama Sukorejo. Kudanya di ikat memakai kayu suko. Lambat laun kayu bekas mengikat kuda tersebut tumbuh menjadi pohon suko yang jumlahnya ada seribu. Selain Sukosewu ada tempat yang di sebut dengan Klampis Ireng, yang masyarakat meyakini sebagai kerajaan demit (setan). Di Kenal sebagai Kerajaan Ki Lurah semar Bodronoyo, dan diyakini sebagai tempat yang dipercaya oleh masyarakat untuk merenung atau menyepi untuk menenangkan diri dari masalah yang dihadapi.

C. Lagu Daerah dan Musik Ponorogo

Selain memiliki kearifan lokal dan cerita rakyat, Kapupaten Ponorogo juga memiliki lagu daerah atau musik daerah. Lagu daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya pencipta lagu daerah ini tidak diketahui lagi alias noname.

Lagu kedaerahan mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja. Lagu kedaerahan biasanya memiliki lirik sesuai

dengan bahasa daerahnya masing-masing seperti tondok kadadingku dari Jawa Barat dan Rasa Sayange dari Maluku.

Lagu daerah atau musik daerah ini biasanya muncul dan dinyanyikan atau dimainkan pada tradisi-tradisi tertentu pada masing-masing daerah, misal pada saat menina-bobok-kan anak, permainan anak-anak, hiburan rakyat, pesta rakyat, perjuangan rakyat, dan lain sebagainya.

Lagu kedaerahan biasanya merujuk kepada sebuah lagu yang mempunyai irama khusus bagi sebuah daerah. Terdapat lagu-lagu kedaerahan yang telah menjadi populer diseluruh negara hasil penyiaran oleh radio dan televisi.

Beberapa ciri khas lagu daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat.
2. Bersifat serdehana sehingga untuk mempelajari lagu daerah tidak dibutuhkan pengetahuan musik yang cukup mendalam seperti membaca dan menulis not balok.
3. Jarang diketahui pengarangnya.
4. Mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar.
5. Sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain karena kurangnya penguasaan dialek/bahasa setempat sehingga penghayatannya kurang maksimal.
6. Mengandung nilai-nilai kehidupan yang unik dan khas.

Di Kabupaten Ponorogo, lagu daerah yang terdaftar pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga hanya ada satu, yaitu lagu berjudul Niken Gandini yang mengandung pesan keteguhan jiwa dan mengandung nilai moral, kesetiaan dan ketulusan. Selain Niken Gandini sebagai lagu daerah, terdapat beberapa lagu tentang daerah Ponorogo yang menggambarkan tentang ke khasan yang berasal dari Kabupaten ini, baik kuliner maupun yang lainnya. Lagu tersebut diantaranya adalah:

- a. Bumi Ponorogo
- b. Dawet Jabung
- c. Sate Ayam Ponorogo
- d. Kuto Ponorogo
- e. Jembatan Gantung
- f. Taman Singo
- g. Dalan Anyar
- h. Bermain Reyog
- i. Warok Ponorogo

Selain lagu daerah diatas, Kabupaten Ponorogo juga memiliki musik/kesenian asli dari Ponorogo yang menambah khazanah kesenian asli daerah. Tentunya ini merupakan kekayaan daerah yang tak ternilai harganya, yang jika dikembangkan juga dapat menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Musik/kesenian asli dari Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah:

a. Gong Gumbang

Gong Gumbang merupakan salah satu kesenian yang diciptakan pada tahun 1838, sebagai kesenian untuk menolak bala (mara bahaya) dengan memainkan alat musik yang terbuat dari bambu. Pada zaman dahulu, ada bangsawan Mataram yang bernama Ki Iro Iri yang melarikan diri ke Ponorogo untuk menghindari peperangan. Gong Gumbang ini diyakini dapat menolak bala karena di Desa Wringinanom pernah terjadi bencana yang mengakibatkan gagal panen dan kesulitan air. Setelah diciptakan gong gumbang bencana itu menjadi sirna. Kesenian tersebut dipertunjukkan untuk menolak bala dengan harapan masyarakat hidup makmur dan masyarakatnya sejahtera.

Kesenian tersebut berasal dari Desa Wringinanom yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Bagi penduduk desa Wringinanom, Gong Gumbang ini sudah tidak asing serta dianggap bernuansa magis pada masa silam. Kesenian ini telah ada di daerah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya tahun 1837 M. Kesenian ini merupakan jenis kesenian yang tergolong langka, bahkan menjadi suatu kebanggaan karena ada yang pernah mengatakan, kesenian ini satu-satunya di dunia.

Kesenian Gong Gumbang ini biasa dimainkan minimal satu tahun sekali dalam acara puncak bersih desa yang dilaksanakan pada hari Jum'at terakhir bulan Selo atau Dzulq'adah dalam kalender hijriyah. Tradisi ini sudah turun temurun sejak kepemimpinan Demang Anggoduwo. Upacara puncak bersih desa ini diadakan di Telaga Matilirejo dusun Banyuripan. Sebelum acara puncak, biasanya diadakan ritual penyembelihan kambing dan kenduri di dua tempat yang dianggap keramat yaitu di sumber tambang dan di Jatoroso. Konon, kesenian Gong Gumbang ini berasal dari Keraton Mataram. Pembuat alat musik Gong Gumbang adalah seniman keraton yang mengungsi di Dusun Banyuripan.

Dalam sejarah Babad diceritakan, ide penyelenggaraan bersih desa itu muncul dari seorang tetua yang bernama Irobiri Banyuripan yang aslinya dari Mataram. Suatu ketika, ia mendapat wangsit dalam mimpinya seakan-akan ditemui seorang kakek yang tua renta. Kakek itu mengatakan kalau warga desa Wringinanom ingin selamat dan air telaga Mantilirejo melimpah dan tidak kehabisan air, maka harus dilaksanakan bersih desa setiap tahun pada bulan Selo di Telaga. Pelaksanaannya harus hari Jum'at dan disertai Gong Gumbang serta tledaknya di waktu siang hari dan malam harinya pindah ke rumah perangkat desa. Semua mimpi itu diceritakan kepada Lurah Anggoduwo, Wringinanom dan kemudian disetujui dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat

desa. Alat-alat musik Gong Gumbeng ini sekarang disimpan di rumah Gunarto, Kamituwo (Kepala Dusun) Desa Wringinanom. Alat-alat kesenian ini masih original dari pertama kali dibuat, meskipun memang ada beberapa yang lapuk. Dari pemerintah desa sendiri belum ada rencana untuk memperbarui alat kesenian tersebut, karena bahan yang digunakan untuk membuat Gumbeng, sulit ditemukan. "Harus dari bambu yang mati ngarang (kering di musim kemarau).

b. Seni Kongkil.

Kongkil adalah seni budaya musik yang terbuat dari bamboo. Seni yang mirip angklung ini sekarang hanya terdapat di Kecamatan Bungkal Ponorogo. Kongkil merupakan seni budaya musik yang memakai instrument bamboo yang digantung sebanyak lima buah. Diamainkan oleh 8-10 orang. Satu orang memainkan kongkil, satu orang kendang, satu orang gong, satu orang kenong, satu orang saron, satu orang demung, dan sisanya adalah penyanyi. Kongkil pertama ditemukan di Desa Padas Bungkal dibuat oleh seniman Jawa sekitar tahun 1928. Seniman Jawa tersebut bernama Toinangun. Beliau yang kongkil dengan 5 nada yaitu *ro, lu, mo, nem, ji*. Sekarang musik kongkil hanya terdapat di Desa Bungkal tepatnya di Dukuh Kudo yang bernama Kyai Martopuro. Grup ini berdiri sejak tahun 1938 yang didirikan oleh mbah Marto (kakek Marto).

c. Musik Odrod

Musik Odrod merupakan seni musik tradisional yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, yang sudah ada sejak akhir penjajahan Belanda di Indonesia, namun perkembangannya dimulai sejak tahun 1958. Semenjak itu, berdirilah beberapa kelompok musik odrod, namun yang bertahan hingga kini adalah kelompok Musik Odrod Kelana Ria.

Musik Odrod adalah sebuah ansambel musik yang terdiri dari instrumen terompet, euphonium 1, euphonium 2, flugel, sousaphone (yang oleh pemain Musik Odrot disebut dengan piston, tenor 1, tenor 2, kaltu, bass), tambur, kendang ciblon, ketipung dangdut, jidor dan cer (kecer), keyboard, dan bass elektrik.

Pemberian nama musik Odrod tersebut diambil dari sumber suara (anamatopea) salah satu instrumen alat musik tersebut yaitu bass (shausophone). Bass mempunyai aksan yang kuat dan peranannya cukup dominan dalam permainan musik ini. Alat musik bass ini bila ditiup akan berbunyi *drod...drod...drod..*, sehingga akhirnya musik tersebut dinamakan musik Odrot oleh Sri Sarno selaku Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo pada tahun 1979. Pemberian nama ini diberikan kepada H. Abdullah dari Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo, pendiri dan pelestari kesenian musik tiup pada acara lomba seni musik tiup di

Kabupaten Ponorogo yang saat itu grup musiknya yang bernama Tirta Kencana berhasil meraih juara pertama tingkat kabupaten.

Alat musik Odrot bila dilihat dari bentuk instrumennya merupakan peninggalan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia alat musik tiup ini digunakan sebagai penghormatan pemberangkatan angkatan perang Belanda dan sebagai penghibur para pemimpin Belanda. Alat musik Odrot terbuat dari bahan baku yang dapat digolongkan dalam tiga bahan dasar yaitu terbuat dari kuningan/tembaga adalah piston, tenor I dan II, kaldu dan bass. Instrumen yang terbuat dari kulit dililit dengan kuningan yaitu tambur dan jidor, dan instrumen yang terbuat dari kayu dan kulit adalah kendang.

Kesenian musik Odrot di Ponorogo hanya berkembang di tiga wilayah yaitu di Sampung, Jetis dan Lengkon. Di Desa Lengkon, musik Odrot muncul pada tahun 1958, instrumen tersebut dibeli dari Desa Gampeng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Pembelian alat musik tersebut diprakarsai oleh H. Abdullah mengingat kebiasaan masyarakat Desa Lengkon selalu mengundang musik Odrot dalam acara hajatan seperti khitanan atau pernikahan.

Kemudian kesenian ini diajarkan kepada warga setempat yang mempunyai minat untuk belajar musik Odrot. Lambat laun kesenian ini berkembang menjadi pertunjukan yang diminati oleh masyarakat dan sering ditanggap dalam acara resepsi pernikahan, nadar, khitanan, dan sebagainya. Pada tahun 1980 nama Tirta Kencana diubah menjadi Kelana Ria oleh Abdul Jalil (ketua perkumpulan musik Odrot saat ini). Alasan perubahan nama ini dikaitkan dengan visi sanggar musik Odrot sekarang yang lebih berorientasi pada profesi.

Dalam pementasannya, tata rias untuk penyanyinya menggunakan tata rias cantik, untuk penyanyi /vokal menggunakan busana sehari-hari wanita sedangkan pesinden berbusana nasional (berkebaya). Tata busana pemain musik Odrot disesuaikan dengan acara pementasan yang dibagi dalam dua yaitu pementasan untuk acara hiburan dan acara resmi. Untuk pementasan acara hiburan biasanya hanya memakai kaos yang bertuliskan sanggar kelompok Kelana Ria, dan untuk pementasan resmi menggunakan seragam seperti masinis kereta yang terdiri dari jas hitam dililit warna kuning pada lengan dan bagian depan menggunakan pangkat disisi kiri dan kanan bahu, celana hitam, topi seperti masinis kereta api dan bersepatu.

d. Tari Keling

Seni tari keling berasal dari dukuh Mojo Desa Singgahan Pulung Ponorogo dan masih dilestarikan oleh masyarakat setempat yang menggambarkan sosok Butho (raksasa) hitam pekat menggambarkan suku tanah Jawa sebelum dihuni oleh Syeh Subakir yang hilang hingga sekarang tidak diketahui dari Kerajaan Tambas Keling sehingga dinamakan Tari Keling yang artinya hitam pekat. Sekitaran tahun 1942 pada saat hari raya idul fitri atau

masyarakat Dusun Mojo menyebutnya Bodo Riyaya. Desa Singgahan khususnya Dusun Mojo kegembiraan lebaran selalu dirayakan dengan berbagai pentas seni seperti reyog, ludruk, ketoprak dan berbagai kesenian lainnya. Namun pada saat itu merupakan masa-masa sulit dimana situasi politik yang belum stabil ditambah dengan kemarau panjang yang mengakibatkan paceklik/gagal panen.

Kedatangan Jepang ke Indonesia ikut menambah keadaan masyarakat Dusun Mojo semakin memprihatinkan. Orang hanya makan batang pisang atau masyarakat Mojo menyebutnya ares gedang dan pakaiannya hanya menggunakan karung. Biasanya ketika masyarakat Mojo merayakan tahun baru Jawa atau Suro dan hari raya idul fitri selalu dihibur dengan kesenian reyog atau pementasan ketoprak. Tetapi pada saat itu tidak ada uang untuk membiayai pementasan. Sebenarnya di Mojo juga pada saat itu banyak seniman yang bisa bermain reyog dan ketoprak.

Kelompok reyog dan ketoprak pada saat itu tidak bisa mereka pertunjukan, dikarenakan banyaknya biaya untuk membeli peralatan reyog dan peralatan ketoprak. Mahalnya harga dadak merak, seperangkat gong dan seragamnya sementara untuk makan saja sulit. Akhirnya Khasan Ngali seorang tokoh yang juga merupakan perangkat Desa Singgahan mengumpulkan para pemuda untuk dilatih menari atau njoget dengan pakaian ala kadarnya orang cukup dilumuri angus dan pakainnya cukup dengan janur dan kepalanya dihias menggunakan serabut aren. Merintis sebuah tarian dengan mengambil cerita tentang Bagaspati dan Joko Tawang.

Sejak kemunculannya pada tahun 1942, beberapa saat keberadaannya sempat tenggelam setelah tahun tujuh puluhan dikarenakan beberapa faktor dan situasi politik yang tidak menentu, akhirnya diteruskan oleh menantu Khasan Ngali yang bernama Warni. Warni sendiri juga merupakan warga asli Desa Singgahan dan merupakan sutradara ludruk. Pada masa tujuh puluhan kesenian-kesenian di Dusun Mojo masih sangat eksis banyak dijumpai kesenian ketoprak, reyog, ludruk dan keling. Sampai tahun 2006 kemudian kepemimpinan diketuai oleh Marsudi sampai sekarang. Pada awalnya hanya bernama kelompok keling baru pada tahun 2007 akhirnya kelompok keling tersebut diberi nama Guno Joyo.

Asal mula tari keling menurut cerita yang berkembang pada masyarakat Dusun Mojo adalah bahwa tanah Jawa pada zaman dahulu diceritakan merupakan tanah yang angker tidak dapat dihuni oleh suku apapun. Suku Keling merupakan satu-satunya suku yang bisa bertahan. Suku keling berperawakan hitam seperti orang Papua. Suku Keling bisa bertahan hidup namun untuk bercocok tanam tidak bisa berhasil, pagi menanam sorenya sudah mati. Akhirnya suku Keling bertemu dengan seorang syeh yang bernama Syeh Subakir. Suku keling kemudian bercerita kepada Syeh Subakir tentang keluh kesah yang dialaminya karena selalu gagal dalam bercocok tanam. Oleh Syeh

Subakhir akhirnya diberi tolak balak, dan pulau Jawa bisa berkembang sampai saat ini.

Selain dari cerita nenek moyang mengenai kekuatan suku Keling nama Keling juga dikaitkan dengan sebuah cerita yang diangkat dalam pementasan tentang dua kerajaan yang kebenaran keberadaannya belum bisa dipastikan, yaitu kerajaan Lambas Keling dan kerajaan Ngerum. Tari Keling merupakan suatu tarian kolosal yang merupakan gambaran dari prajurit Bagaspati dari kerajaan Lambas Keling dengan prajuritnya yang digambarkan seperti orang Keling hitam-hitam dan seperti raksasa atau disebut buto.

Menurut sumber tertulis yang dimiliki paguyuban Guno Joyo Tari Keling adalah sebuah sendra tari yang dimainkan dijalanan dengan memainkan sebuah lakon meskipun, bukan merupakan sebuah drama yang dialogis. Pada awal pementasan, hanya beberapa pemain yang menari sampai lakon yang diperankan selesai, hingga pada akhirnya semua orang yang ada disana ikut terlibat dalam tarian. Sutrisno, kepala Dusun Mojo sekitaran tahun 2006, pengambilan nama Keling didasarkan pada ciri khas dari seni tersebut adalah orang-orang Keling atau hitam.

e. Gajah-gajahan.

Kesenian tradisional Gajah-gajahan pada dasarnya adalah seni jalanan (*street arts*) yang berbentuk arak-arakan terdiri atas sekelompok penari, pemusik dan penyanyi. Tokoh utamanya adalah patung gajah yang digotong oleh dua orang yang berada di dalam "tubuh" gajah tersebut. Di atas patung gajah tersebut, duduk anak laki-laki usia pra akil baliq yang didampingi oleh seorang pembawa payung. Sementara itu, agar si Gajah bisa berjalan sesuai arah, dia didampingi oleh orang yang bertugas untuk menuntun Gajah tersebut. Di belakang gajah, berbaris para penari dan penyanyi yang diiringi oleh alunan musik hadroh yang instrumennya terdiri atas jedor, kendang, kenong, kentrung, dan kecer.

Sebagaimana seni pertunjukan rakyat lainnya (beberapa versi cerita tentang Seni Gajah-gajahan. Pertama, ini mengisahkan tentang perjalanan Raja Abrahah (cerita yang dimuat dalam Al Qur'an) yang hendak menyerang Ka'bah. Karenanya, dalam pertunjukan tersebut digambarkan seorang yang berpakaian raja/Kafilah sedang mengendarai seekor gajah yang diiringi oleh para prajuritnya. Versi lain, seni ini menggambarkan tentang perjalanan seorang tokoh pendiri Kabupaten Ponorogo yang hendak menyebarkan agama Islam di Kabupaten Ponorogo.

Terlepas dan kontroversi di atas, nuansa Islam memang terlihat kental dalam seni gajah-gajahan Itu terlihat dan alat musik yang dimainkan maupun jenis musiknya yang umumnya berisi puji-pujian dan sholawat nabi. Memang, kesenian ini awal mulanya tumbuh di lingkungan pesantren, biasanya dipertunjukkan pada perayaan hari besar Islam.

Konon, seni rakyat ini muncul dan mendapat sambutan ketika pamor seni Reog mulai luntur. Pada masa pemerintahan Orde Lama pertunjukan kesenian Reog sering digunakan untuk alat propaganda politik terutama di kalangan Partai Komunis Indonesia. Seiring dengan kejatuhan PKI, kesenian Reog Ponorogo pun sempat mengalami titik nadir dan kehilangan pamornya. Dan pada saat yang bersamaan, muncullah kesenian baru yang lebih bernafaskan Islam.

Walaupun kesenian tradisional gajah-gajahan pemunculannya relatif masih muda dibanding dengan kesenian Reog, kesenian ini mendapat tempat di kalangan masyarakat Ponorogo. Bahkan, dalam perkembangannya kesenian ini tidak hanya diminati oleh kalangan pesantren, namun juga masyarakat luas. Kesenian gajah-gajahan dewasa ini dipentaskan tidak hanya pada hari-hari besar Islam tapi juga pada saat merayakan pesta pribadi seperti khitanan ataupun pernikahan. Demikian juga, pada saat pesta masyarakat lainnya yang banyak mengundang konsentrasi masa seperti upacara bersih desa, ulang tahun kemerdekaan, dan sebagainya. Seiring dengan hal itu, pengaruh "Budaya Populer" pun terlihat pada kesenian Gajah-gajahan. Misalnya dengan dimasukkannya tokoh banci (laki-laki yang berpakaian perempuan) dan lagu dangdut/campursari dalam kesenian tradisional ini.

Masuknya unsur-unsur tersebut bisa menjadikan suasana lebih hidup dan lebih mengundang penonton ketika kesenian tersebut dipentaskan. Demikian juga, remaja laki-laki yang duduk di atas gajah yang semula berpakaian ala padang pasir yang menggambarkan tokoh kalifah, bisa dimodifikasi menjadi tokoh lain seperti penari Jathil - tokoh penari yang terdapat pada reog. Iringan musiknya pun juga lebih bervariasi, bisa musik qosidah, dangdut, dan lain-lain, menyesuaikan dengan situasi dan tempat di mana kesenian tersebut dipentaskan. Karena memang sebagai bagian dari kebudayaan, kesenian bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula kesenian gajah-gajahan, dan kesenian yang lainnya. Apabila pada masa pemunculannya nuansa Islam dan padang pasir sangat lekat, pada saat sekarang identitas tersebut berbaur dengan budaya masa kini (*pop art*) sehingga mungkin saja kesenian ini tetap bisa eksis, pada masa-masa yang akan datang, karena lebih dinamis mengikuti perkembangan.

f. Hadrah/Terbangan

Seni Hadrah atau lebih populer dengan sebutan terbangan perkembangannya tak lepas dari sejarah dakwah Islam di Ponorogo. Meskipun bukan kesenian asli daerah, namun seni hadrah/terbangan banyak berkembang di masyarakat Ponorogo. Seni ini memiliki semangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang tahu secara persis, kapan datangnya musik hadrah di Indonesia. Namun hadrah atau yang lebih populer dengan musik terbangan

(rebana bahasa jawa) tersebut tak lepas dari sejarah perkembangan dakwah Islam para Wali Songo. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa pada setiap tahun di serambi Masjid Agung Demak, Jawa Tengah diadakan perayaan Maulid Nabi yang diramaikan dengan rebana. Para Wali Songo mengadopsi rebana dari Hadrolmout sebagai kebiasaan seni musik untuk dijadikan media berdakwah di Indonesia.

Menurut keterangan ulama besar Palembang Al Habib Umar Bin Thoah Bin Shahab, adalah Al Imam Ahmad Al Muhajir (kakek dari Wali Songo kecuali Sunan Kalijaga), ketika hijrah ke Yaman (Hadrolmout) bertemu dengan salah satu pengikut tariqah sufi (darwisy) yang sedang asyik memainkan hadrah (rebana) serta mengucapkan syair pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan pertemuan itu mereka bersahabat. Setiap Imam Muhajir mengadakan majelis maka disertakan darwisy tersebut, hingga keturunan dari Imam Muhajir tetap menggunakan hadrah disaat mengadakan suatu majelis.

Hadrah selalu menyemarakkan acara-acara Islam seperti peringatan Maulid Nabi, tabligh akbar, perayaan tahun baru hijriyah, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Sampai saat ini hadrah telah berkembang pesat di masyarakat Indonesia sebagai musik yang mengiringi pesta pernikahan, sunatan, kelahiran bayi, acara festival seni musik Islami dan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan, pesantren, remaja masjid dan majelis taklim.

Makna hadrah dari segi bahasa diambil dari kalimat bahasa Arab yakni hadhoro atau yuhdhiru atau hadhron atau hadhrotan yang berarti kehadiran. Namun kebanyakan hadrah diartikan sebagai irama yang dihasilkan oleh bunyi rebana. Dari segi istilah atau definisi, hadrah menurut tasawuf adalah suatu metode yang bermanfaat untuk membuka jalan masuk ke 'hati', karena orang yang melakukan hadrah dengan benar terangkat kesadarannya akan kehadiran Allah dan Rasul-Nya.

Syair-syair Islami yang dibawakan saat bermain hadrah mengandung ungkapan pujian dan keteladanan sifat Allah dan Rasulullah SAW yang agung. Dengan demikian akan membawa dampak kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para sufi yang biasanya melibatkan seruan atas sifat – sifat Allah yang Maha Hidup (Al-Hayyu), melakukannya sambil berdiri, berirama dan melantunkan bait-bait pujian atas baginda Nabi Muhammad SAW. Pujian terhadap Rasulullah baik dalam bentuk prosa maupun syair, telah ada sejak zaman Rasulullah SAW lewat bait-bait gubahan tiga penyair terkenal yaitu Hasan ibn Tsabit, Abdullah ibn Rawahah dan Ka'ab ibn Malik. Nabi justru sangat terkesan dengan keindahan syair (qasidah) yang disampaikan oleh Ka'ab ibn Zuhayr ibn Abi Salma. Karena rasa sukanya, Nabi Muhammad pernah menghadihkan selendang (burdah) untuk Ka'ab. Sanjungan yang sering disampaikan para shahabat ini bersifat metaforik dan gaya simbolik sehingga mengilhami syair dan prosa dalam kitab-kitab Maulid semisal al-Barzanji.

g. Jaran Thek

Jaranan Thek sering juga disebut Reyog Thek atau Thik. Jaranan thek adalah kesenian Kuda Lumping yang berasal dari Ponorogo, Kesenian ini Disebut Thek karena menghasilkan suara "thek" dari suara Topeng Barongan. Sebagian masyarakat Ponorogo juga menyebut Jaranan Thek dengan senthewe, karena mahkota pada barongan Jaran Thek berbentuk seperti daun Talas yang menjulang, dalam bahasa jawa adalah Sente, Rawe.

Sejarah Jaranan Thek bermula pada akhir abad ke 15 dan awal abad 17. Pada abad ke-15 Warok Guno Seco dan Warok Suro Handoko merupakan orang yang tersingkirkan di Kadipaten Ponorogo. Mereka diberi kewenangan untuk menjadi pejabat di daerah yang jauh dari Pusat Ponorogo, tetapi mereka menolak dengan menampilkan Topeng Barongan Tanpo Lulang (topeng reyog tanpa dilapisi kulit harimau) yang menyimbolkan pemimpin Ponorogo saat itu tidak memiliki wibawa. Peninggalan abad ini adalah (1) barongan Singo Barong berbentuk harimau, memiliki bentuk kotak atau lonjong dengan warna merah, terkadang hitam, dan (2) barongan Klonowandono yang disebut kucingan dengan warna merah, terkadang hitam.

Pada abad ke-17 sering terjadinya pertarungan antar komunitas Reog Ponorogo (dhahak merak) di era Kolonial. Bagi grup reog yang kalah akan kehilangan perangkat barongan dadak merak, ggemblak dan peralatan lainnya. Sehingga membuat malu bagi anggota komunitas Reog Ponorogo yang kalah, kemudian mengungsi ke wilayah pergunungan Ponorogo bagian timur dengan tetap melakukan pertunjukan seperti kesenian Reog Tanpo Lulang yang mudah dibuat, karena apabila ingin membuat barongan dhadhak merak harus berhadapan dengan harimau lagi. Sehingga para warok yang kalah tempuk membuat kesenian dengan cerita berdasarkan legenda telaga Ngebel yaitu Naga Baruk klinting. Meski topeng berbentuk menyerupai naga, tetap disebut macan atau singo barong. Walau pun tanpa dilapisi kulit harimau, Jaranan Thek diiringi musik seadanya Kemudian Kesenian Jaranan Thek diminati oleh masyarakat sekitar hingga menyebar ke arah timur seperti Tulungagung, Trenggalek dan sebagian Pacitan hingga mengisi acara pasar malam di Blitar dan Malang.

Alur cerita Jaranan Thek di Ponorogo tidak menceritakan tentang perebutan seorang puteri seperti halnya kesenian kuda lumping umumnya, tetapi menceritakan perburuan hewan-hewan di hutan Ponorogo yang akan digunakan sebagai santapan pada acara desa yang mengacu pada legenda terjadinya Telaga Ngebel, sebagai pengingat kepada penonton dan generasi selanjutnya bahwa manusia tidak boleh rakus, serakah, sombong dan acuh tak acuh. Peninggalan abad ini adalah (1) Barongan Singo Barong berbentuk Naga Baruk Klinting memanjang dengan warna merah dan (2) Barongan Kucingan berbentuk Naga baruk klinting pendek dengan warna merah, menggambarkan seorang Lurah Ngebel.

Pementasan Jaranan Thek, diawali dengan pembacaan mantra oleh para Bopo, setelah itu pasukan berkuda mengejar dan memburu pasukan babi, Pasukan berkuda menyerang barongan naga baruk klinting yang kemudian pasukan berkuda kalah. Barongan naga baruk klinting marah dan murka karena diganggu saat bertapa, sehingga lurah ngebel (kucingan) turun tangan dan mengalahkan Baruk Klinting.

BAB XIII

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan menyebutkan tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dengan mengakses dan mengontrol sumber sayat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, terdapat beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan dari IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender. IPG ini merupakan rasio antara IPM laki-laki dan perempuan, dimana semakin mendekati 100 maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013.

Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya. IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah serta standar hidup layak (*decent standard of living*) menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen dengan menggunakan batas minimum dan maksimum.

Sementara itu dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan perempuan digunakan rumus untuk masing-masing jenis kelamin sebagai berikut

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{RLS} + I_{HSL}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Sedangkan IPG dihitung dengan menggunakan rasio IPM perempuan dan IPM laki-laki.

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{Kesehatan_L} \cdot I_{Pendidikan_L} \cdot I_{Pengeluaran_L}}$$

$$IPM_P = \sqrt[3]{I_{Kesehatan_P} \cdot I_{Pendidikan_P} \cdot I_{Pengeluaran_P}}$$

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \cdot 100$$

Berdasarkan rumus yang ada selanjutnya dihitung IPG Kabupaten Ponorogo tahun 2021 berdasarkan nilai yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 13.1

Nilai Pembangun IPG Kabupaten Ponorogo 2021

No	VARIABEL	Laki-laki	Perempuan
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,11	74,69
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,88	7,12
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,61	13,74
4	Pengeluaran Per Kapita (pertahun)	12.999.000	9.318.000

1. Indeks kesehatan

$$I_{Kesehatan_L} = \frac{AHH_L - AHH_{L_{min}}}{AHH_{L_{max}} - AHH_{L_{min}}} = \frac{(70,11 - 53,71)}{(75,99 - 53,71)}$$

$$I_{Kesehatan_L} = 0,74$$

$$I_{Kesehatan_P} = \frac{AHH_P - AHH_{P_{min}}}{AHH_{P_{max}} - AHH_{P_{min}}} = \frac{(74,69 - 59,69)}{(79,43 - 59,69)}$$

$$I_{Kesehatan_P} = 0,76$$

2. Indeks pengetahuan

$$I_{RLS_L} = \frac{RLS_L - RLS_{L_{min}}}{RLS_{L_{max}} - RLS_{L_{min}}}$$

$$I_{RLS_L} = \frac{7,88 - 2,27}{11,77 - 1,16}$$

$$I_{RLS_L} = 0,59$$

$$I_{HLS_L} = \frac{HLS_L - HLS_{L_{min}}}{HLS_{L_{max}} - HLS_{L_{min}}}$$

$$I_{HLS_L} = \frac{13,61 - 4,8}{15,47 - 4,8}$$

$$I_{HLS_L} = 0,82$$

$$I_{\text{Pengetahuan}_L} = \frac{I_{\text{RLS}_L} + I_{\text{HSL}_L}}{2}$$

$$I_{\text{Pengetahuan}_L} = \frac{0,59 + 0,82}{2}$$

$$I_{\text{Pengetahuan}_L} = 0,705$$

$$I_{\text{RLS}_P} = \frac{\text{RLS}_P - \text{RLS}_{P \min}}{\text{RLS}_{P \max} - \text{RLS}_{P \min}}$$

$$I_{\text{RLS}_P} = \frac{7,12 - 1,16}{11,32 - 1,16}$$

$$I_{\text{RLS}_P} = 0,58$$

$$I_{\text{HLS}_P} = \frac{\text{HLS}_P - \text{HLS}_{P \min}}{\text{HLS}_{P \max} - \text{HLS}_{P \min}}$$

$$I_{\text{HLS}_P} = -0,92$$

$$I_{\text{Pengetahuan}_P} = \frac{I_{\text{RLS}_P} + I_{\text{HSL}_P}}{2}$$

$$I_{\text{Pengetahuan}_P} = \frac{0,58 + 0,92}{2}$$

$$I_{\text{Pengetahuan}_P} = 0,75$$

3. Indeks pengeluaran

$$I_{\text{Pengeluaran}_L} = \frac{\text{Ln}(\text{Pengeluaran}_L) - \text{Ln}(\text{Pengeluaran}_{L \min})}{\text{Ln}(\text{Pengeluaran}_{L \max}) - \text{Ln}(\text{Pengeluaran}_{L \min})}$$

$$I_{\text{pengeluaran}_L} = \frac{\text{Ln}(12999) - \text{Ln}(3935)}{\text{Ln}(27667) - \text{Ln}(3935)}$$

$$I_{\text{pengeluaran}_L} = 0,61$$

$$I_{Pengeluaran_p} = \frac{\ln(Pengeluaran_p) - \ln(Pengeluaran_{p_{\min}})}{\ln(Pengeluaran_{p_{\max}}) - \ln(Pengeluaran_{p_{\min}})}$$

$$I_{pengeluaran_p} = \frac{\ln(9318) - \ln(1543)}{\ln(23325) - \ln(1543)}$$

$$I_{pengeluaran_p} = 0,66$$

4. IPM dan IPG

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{Kesehatan_L} \times I_{Pengetahuan_L} \times I_{Pengeluaran_L}}$$

$$IPM_L = \sqrt[3]{0,74 \times 0,705 \times 0,61}$$

$$IPM_L = 0,68$$

$$IPM_P = \sqrt[3]{I_{Kesehatan_P} \times I_{Pengetahuan_P} \times I_{Pengeluaran_P}}$$

$$IPM_P = \sqrt[3]{0,76 \times 0,75 \times 0,66}$$

$$IPM_P = 0,72$$

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \cdot 100$$

$$IPG = 93,65$$

Pada metode baru, angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Ponorogo tahun 2021 adalah 93,65 mendekati 100 yang menunjukkan bahwa pembangunan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo semakin setara, seimbang dan merata.

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

Tabel 13.2

Nilai Pembangun IDG Kabupaten Ponorogo 2021

No.	VARIABEL	L	P	TOTAL
1	Proporsi Penduduk	477.428 (49,95%)	478.411 (50,05%)	955.839 (100%)
2	Keterwakilan di parlemen	39 (86,67%)	6 (13,33%)	45 (100%)
3	Proporsi Tenaga Profesional	45,85%	54,15%	100%
4	Proporsi Sumbangan pendapatan	64,01%	35,99%	100%

1. Indeks keterwakilan di parlemen

$$EDEP_{Par} = \left(\frac{P_P}{X_P} + \frac{P_L}{X_L} \right)$$

$$EDEP_{par} = \left(\frac{50,05}{13,33} + \frac{49,95}{86,67} \right)$$

$$EDEP_{par} = 4,34$$

$$I_{Par} = \frac{EDEP_{Par}}{50}$$

$$I_{par} = \frac{4,34}{50}$$

$$I_{par} = 0,09$$

Dengan:

P_p = proporsi penduduk perempuan

P_l = proporsi penduduk laki-laki

X_p = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

X_l = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

2. Indeks pengambilan keputusan

$$EDEP_{DM} = \left(\frac{P_p}{Y_p} + \frac{P_l}{Y_l} \right)$$

$$EDEP_{DM} = \left(\frac{50,05}{54,15} + \frac{49,95}{45,85} \right)$$

$$EDEP_{DM} = 2,01$$

$$I_{DM} = \frac{EDEP_{DMr}}{50}$$

$$I_{DM} = \frac{EDEP_{DMr}}{50}$$

$$I_{DM} = \frac{2,01}{50}$$

$$I_{DM} = \frac{2,00}{50}$$

$$I_{DM} = 0,04$$

Dengan:

Y_p = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_l = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

3. Indeks distribusi pendapatan

$$EDEP_{Inc-Dis} = \left(\frac{P_p}{Z_p} + \frac{P_L}{Z_L} \right)$$

$$EDEP_{Inc-Dis} = \left(\frac{50,05}{35,99} + \frac{49,95}{64,01} \right)$$

$$EDEP_{Inc-Dis} = 2,17$$

$$I_{Inc-Dis} = \frac{(EDEP_{Inc-Dis} \times 759,56) - 30}{732,72 - 300}$$

$$I_{Inc-Dis} = \frac{(2,17 \times 759,56) - 360}{732,72 - 300}$$

$$I_{Inc-Dis} = 2,977$$

Dengan:

Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

$$IDG = \left(\frac{(I_{Par} + I_{DM} + I_{Inc-Dis}) + 100 + 100}{3} \right)$$

$$IDG = \frac{(0,087 + 0,04 + 2,977) + 100 + 100}{3}$$

$$IDG = \left(\frac{(0,087 + 0,04 + 2,996) + 100 + 100}{3} \right)$$

$$IDG = 67,63$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai IDG adalah sebesar 67,63. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mulai dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.